



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19)
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 8);
 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);

36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
43. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
44. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);
45. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Agustus 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 31



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2022

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021 melalui Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022. Namun dalam pelaksanaan RKPD tahun berjalan 2022, ditemukan berbagai kondisi yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen tersebut. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2022. Penyusunan Perubahan dokumen RKPD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun dasar Perubahan RKPD dapat dilakukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.



Perubahan terhadap RKPD Tahun 2022 perlu dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Pada saat ini Indonesia termasuk Kota Tasikmalaya masih dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Meskipun kondisi pandemi Covid 19 sudah dapat terkendali dengan baik, namun masih menuntut pemerintah daerah untuk tetap melakukan penanganan dan mempertahankan stabilitas perekonomian daerah. Dampak dari pandemi covid-19 masih terasa dampaknya bagi kehidupan masyarakat, diantaranya:

- a. Terjadinya perlambatan pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran
- c. Masih terjadinya kasus konfirmasi positif covid-19 terutama diprediksi akan meningkat pada bulan Juli 2022
- d. Kurang optimalnya konsumsi pemerintah sebagai akibat belum optimalnya penerimaan negara.

Salah satu untuk mengatasi pandemi covid-19 yaitu dengan terus meningkatkan cakupan vaksinasi covid-19. Sampai dengan awal bulan Juli 2022 cakupan vaksinasi dosis 1 mencapai 102,58%, dosis 2 sebesar 81,63% dan dosis 3 baru mencapai 37,00% dan pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Oleh karena itu Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 masih mendukung upaya penanganan Covid-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemic covid-19, serta pemulihan ekonomi.

Selain hal tersebut, penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19)
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 8);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);



38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
43. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
44. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);
45. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 serta RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Nasional tahun 2022. Untuk selanjutnya RKPD Perubahan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja PD dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, selaras, konsisten antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah Kota Tasikmalaya serta harus dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan serta kondisi saat ini tentang masyarakat akan pembangunan dan pelayanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.



1.3.1. Hubungan RKPD dengan RKP Nasional

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 harus memperhatikan dan mengacu pada berbagai substansi perencanaan, kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKP nasional. Kebijakan dan program prioritas nasional harus didukung guna mendorong pencapaian target pembangunan nasional. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya.

1.3.2. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Barat

Sama halnya dengan RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 juga menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya. Perencanaan kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat harus menjadi acuan dan mendapat dukungan dari daerah kabupaten/kota guna mendorong pencapaian target pembangunan provinsi. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah provinsi Jawa Barat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya.

1.3.3. Hubungan RKPD dengan Renja PD

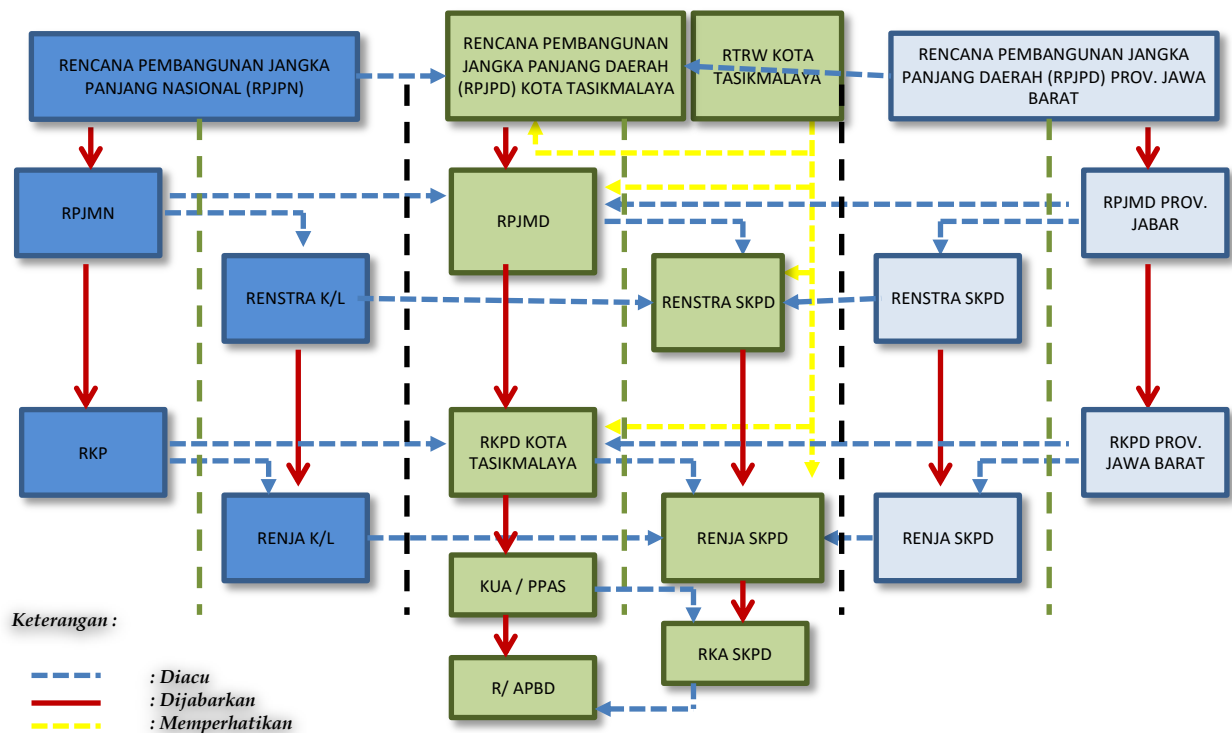
Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2020 menjadi acuan bagi penyusunan Renja PD tahun 2021. Sehingga perlu dilakukan sinergitas dan koordinasi dalam penyusunan Renja PD dengan penyusunan RKPD. Selain itu Renja PD disusun dengan berpedoman pada Renstra PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh PD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.4. Hubungan RKPD dengan RTRW Kota Tasikmalaya

Selain mengacu dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas, penyusunan perubahan RKPD pun harus memperhatikan dokumen perencanaan tentang penataan dan pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin perencanaan pembangunan sesuai dengan arah penataan dan pemanfaatan ruang di Kota Tasikmalaya.

Gambar 1.1

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tahapan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Memberikan gambaran mengenai proyeksi kerangka ekonomi daerah dan rencana APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan digunakan untuk membiayai belanja pembangunan daerah
5. Memberikan gambaran arah pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat, akademisi dan dunia usaha; serta
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



1.5. Sistematika

Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan RKPD Tahun 2022 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, pengintegrasian program, serta maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

1.5 Sistematika

Menjelaskan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab dan garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek fisik kondisi geografis dan demografis, serta aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022 Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2022 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, gambaran kondisi ekonomi daerah Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menyajikan data tentang arah kebijakan keuangan/kemampuan fiskal daerah yang mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan visi dan misi pembangunan yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022.
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Menjelaskan isu strategis dan fokus pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 pada tahun rencana, serta tema dan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah, indikator dan target kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, pagu indikatif dan rencana kebutuhan prakiraan maju, serta PD pelaksana, yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2022.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

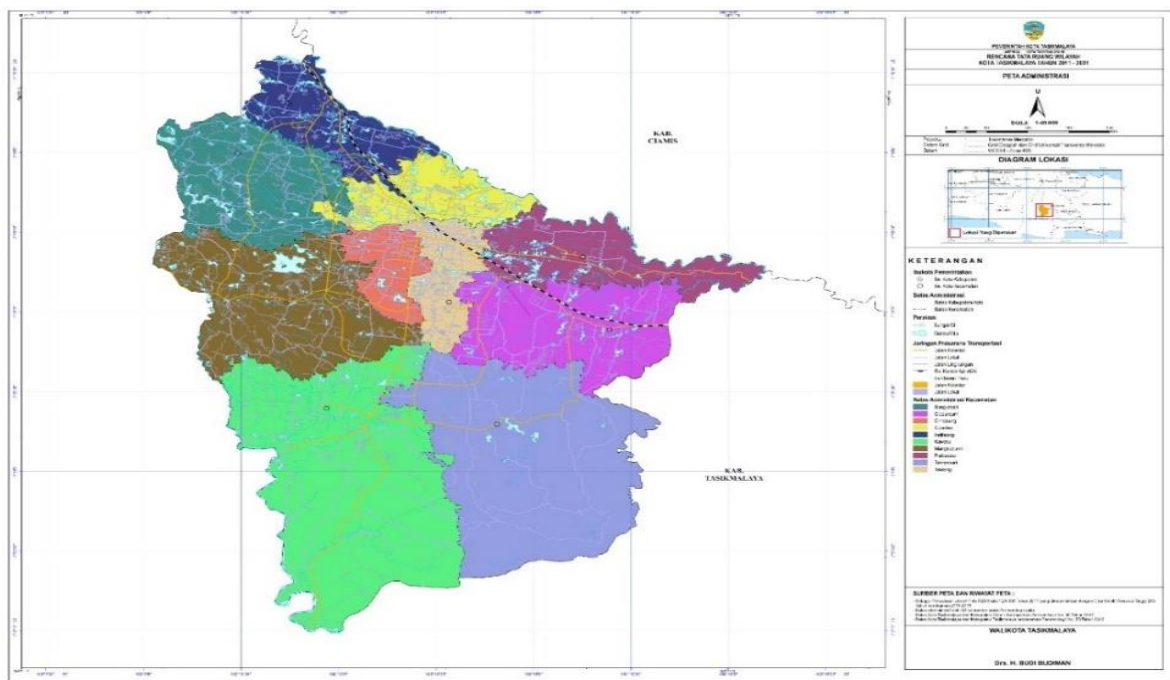
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" BT-108°24'02" BT dan antara 7°10' LS-7°26'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur ber Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmala

2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl (lihat gambar 2.2).

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat Gambar 2.3). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

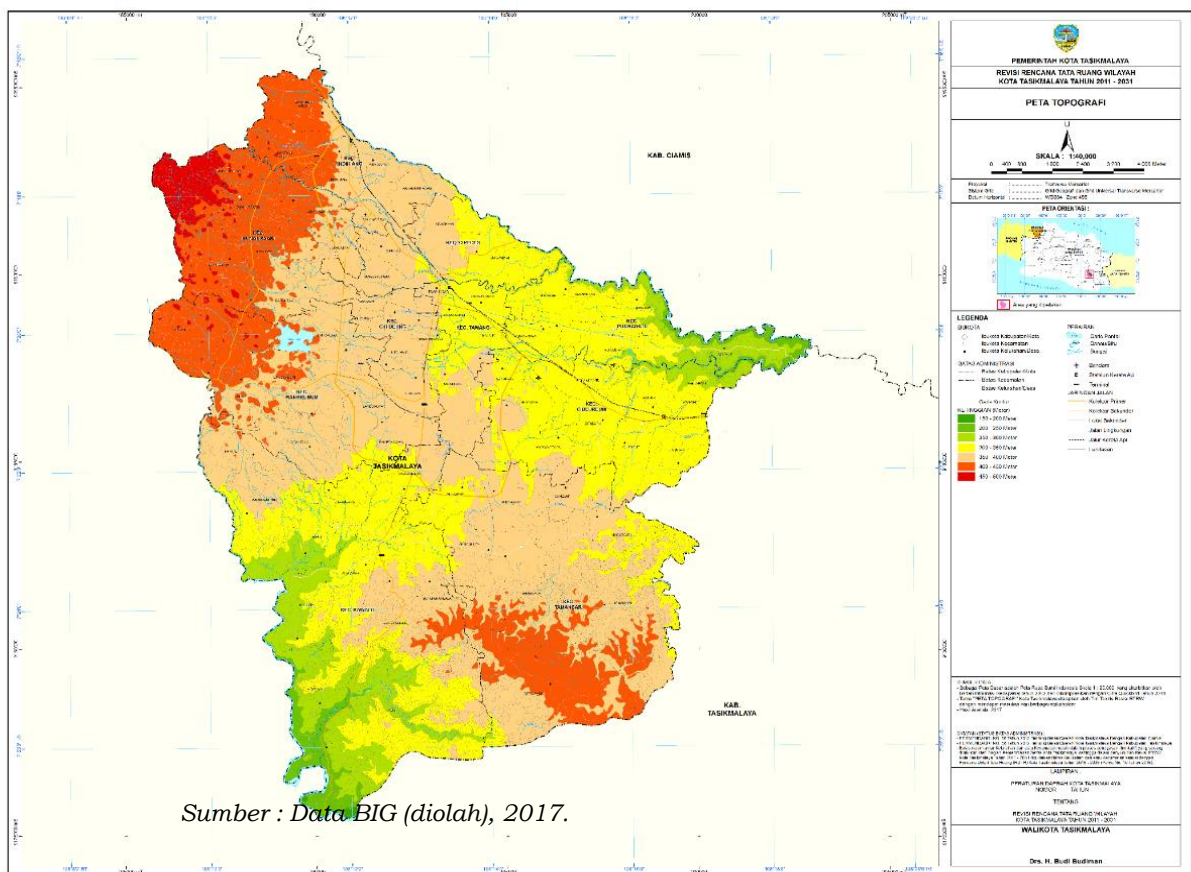


Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.1 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya.

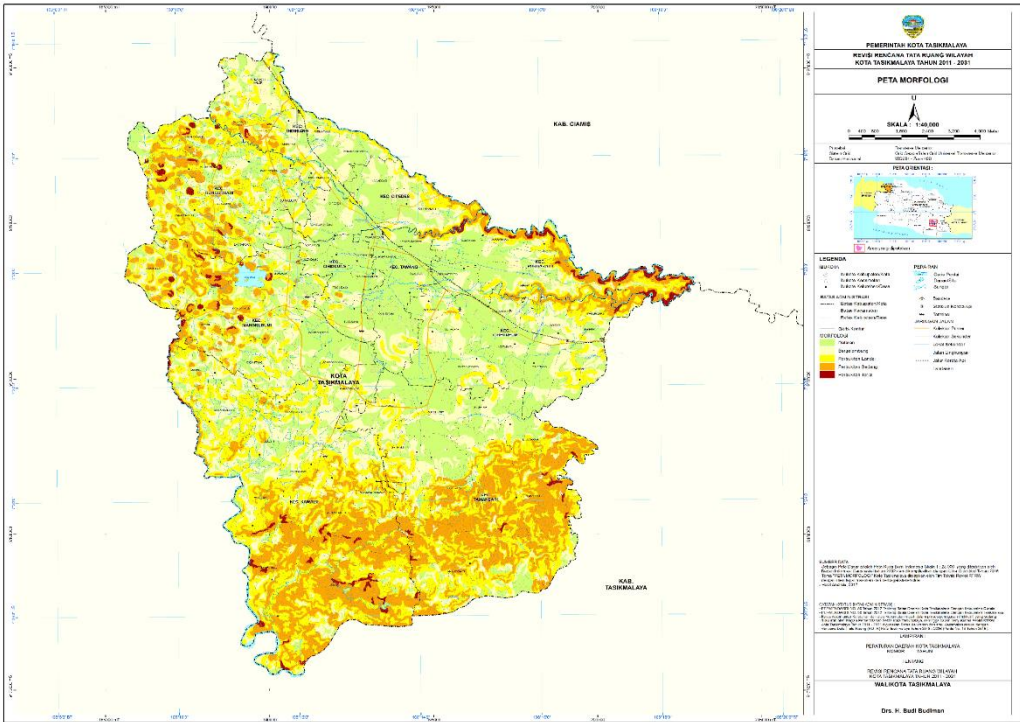
Tabel 2.1.
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Luas (Hektar)	% Luas
0 – 2 %	5.372,15	29,16
2 – 5 %	4.574,18	24,83
5 – 15 %	4.882,58	26,50
15 – 25 %	1.543,24	8,38
25 -40 %	1.799,53	9,77
>40 %	250,36	1,36
Total	18.422,04	100,00

Sumber : Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017.



Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Tasikmalaya



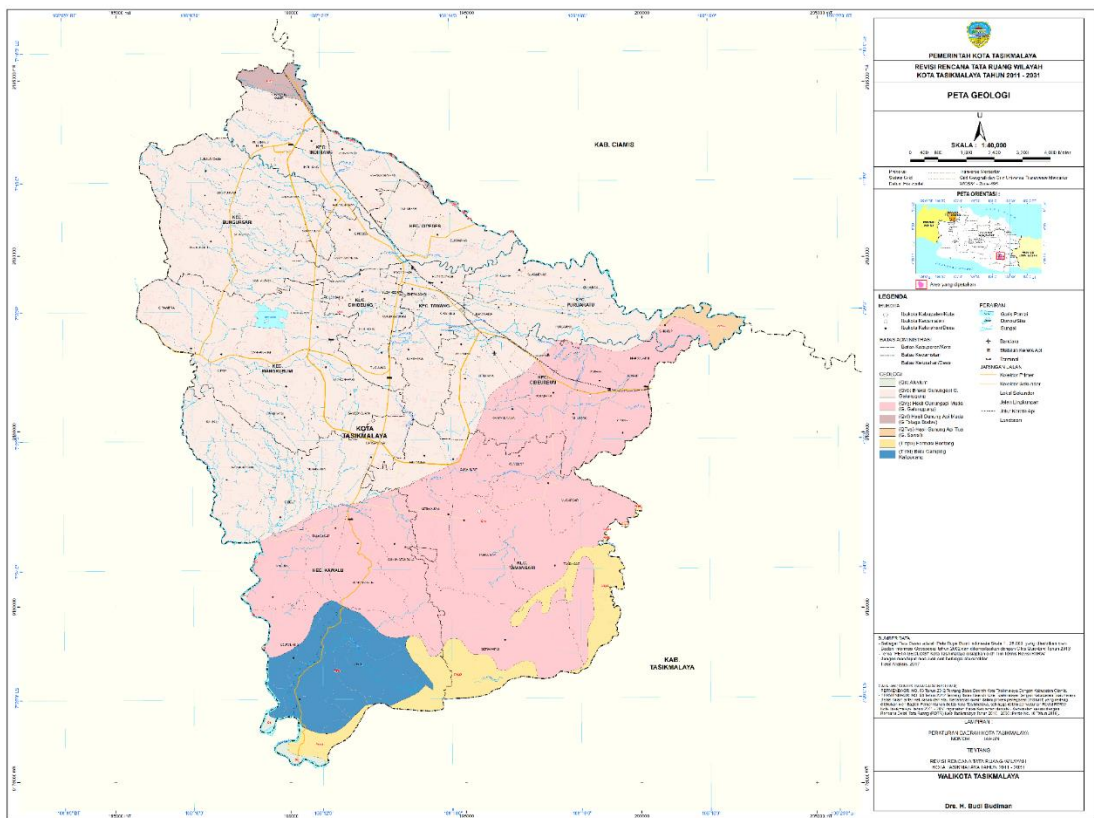
Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.3.
Peta Morfologi Kota Tasikmalaya

2.1.1.3. Geologi

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kota Tasikmalaya

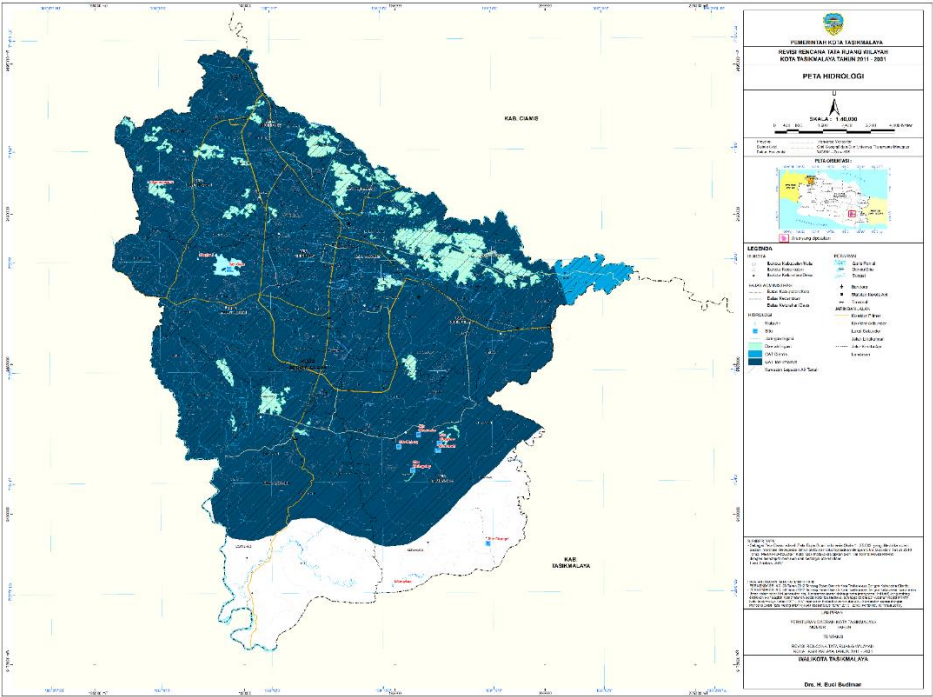
2.1.1.4. Hidrologi dan Hidrogeologi

Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m³/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m³/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m³/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m³/hari.

Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m³. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m³/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibanjuran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (6.000 m³/detik).

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari.

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping.



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.5.
Peta Hidrologi Kota Tasikmalaya

2.1.1.5. Klimatologi

Pada tahun 2021 suhu udara rata-rata di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 24,9°C. dengan suhu terendah sebesar 17,4°C yang terjadi pada bulan Januari dan tertinggi sebesar 33,0°C terjadi pada bulan Maret dan April sebesar 33,00 °C dengan kelembaban udara rata-rata 84,1% pada bulan April. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Rata-rata suhu dan kelembaban udara
Tahun 2021

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	17,4	24,9	32,0	62	79	86
Februari/February	20,4	24,3	32,8	63	77	87
Maret/March	20,4	25,3	33,0	61	78	85
April/April	20,4	25,5	33,0	60	82	95
Mei/May	19,0	25,4	32,2	64	83	91
Juni/June	20,4	25,2	32,6	65	85	94
Juli/July	19,0	25,1	32,0	65	83	94



Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
Agustus/ August	19,0	24,4	31,6	71	86	94
September/ September	19,0	24,4	31,4	70	87	95
Oktober/ October	20,0	24,9	31,6	72	88	95
November/ November	20,0	24,7	31,6	78	92	97
Desember/ December	20,0	25,1	32,0	73	90	97
Rata-rata/ Average	19,6	24,9	32,2	67,1	84,1	92,5

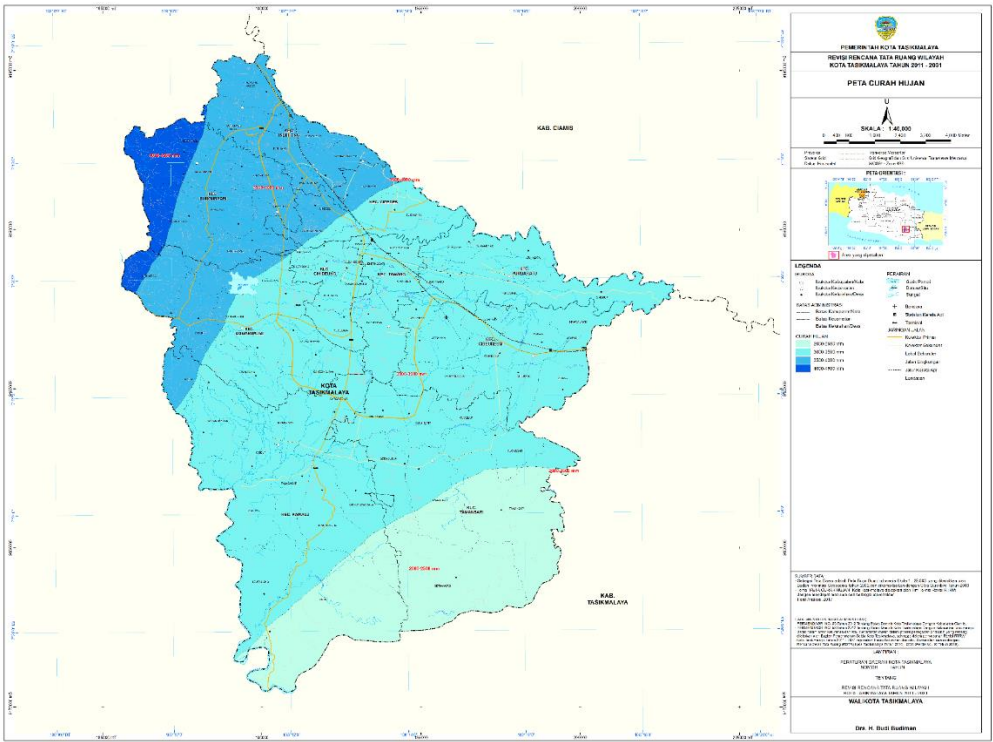
Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, 2022.

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2021 terjadi pada bulan Novemberyaitu 32 mm³ dan paling rendah terjadi pada bulan April, Mei Juli yaitu 1 mm³. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 24 hari. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)
(1)	()	(15)
Januari/ January	8	22
Februari/ February	2	17
Maret/ March	5	22
April/ April	1	12
Mei/ May	1	9
Juni/ June	3	12
Juli/ July	1	8
Agustus/ August	-	-
September/ September	2	20
Oktober/ October	2	10
November/ November	4	27
Desember/ December	4	19
Rata-rata/ Average	3	14,83

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, 2022



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.6.
Peta Klimatologi Kota Tasikmalaya

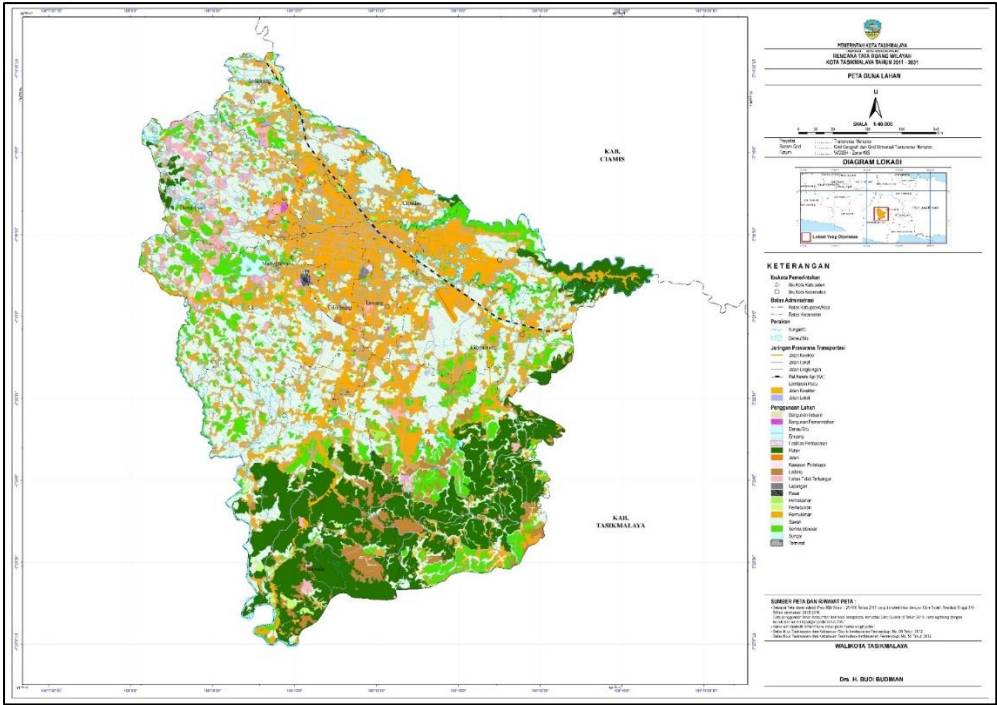
2.1.1.6. Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan

Penggunaan lahan Kota Tasikmalaya didominasi lahan sawah sebesar 35,246%, permukiman sebesar 28,646% dan hutan sebesar 19,382%. Berikut rincian penggunaan lahan kota Tasikmalaya.

Tabel 2.4.
Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan Industri	58,57	0,318
Bangunan Pemerintahan	10,70	0,058
Danau/Situ	50,56	0,27
Empang	263,30	1,42
Fasilitas Peribadatan	0,87	0,005
Hutan	3570,56	19,382
Kawasan Pariwisata	4,78	0,026
Ladang	217,18	1,179
Lahan Tidak Terbangun	697,38	3,786
Lapangan	17,21	0,093
Pasar	14,30	0,078
Pemukaman	24,88	0,135
Permukiman	5277,20	28,646
Sawah	6493,10	35,246
Semak Belukar	141,22	0,767
Sungai	82,05	0,445
Terminal	7,69	0,042
Jumlah	18.422,04	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2021.

Gambar 2.7.
Peta Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya



2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah.

Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Kajian tentang potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019, ada beberapa zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I**, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Bawah G. Galunggung dan Kipas Lahar Gunungapi Tua berupa lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa sawah, kolam, semak belukar, perkebunan campuran, bangunan, pekarangan, jalan, jalur hijau, ladang, dan sebagian landasan pacu. Potensi bencana gempa bumi dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,68 g. Tingkat risiko yang dapat terjadi setara intensitas VIII-IX MMI;
2. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45 % wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Tengah G. Galunggung dan Lereng Kipas Bawah G. Galunggung serta Perbukitan Bergelombang berupa kaki gunung berlereng 10°-15° hingga landai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, danau, hutan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan Galian C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman, tegalan dan sebagian landasan pacu (bagian selatan). Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif sedang dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,49 g;
3. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% wilayah

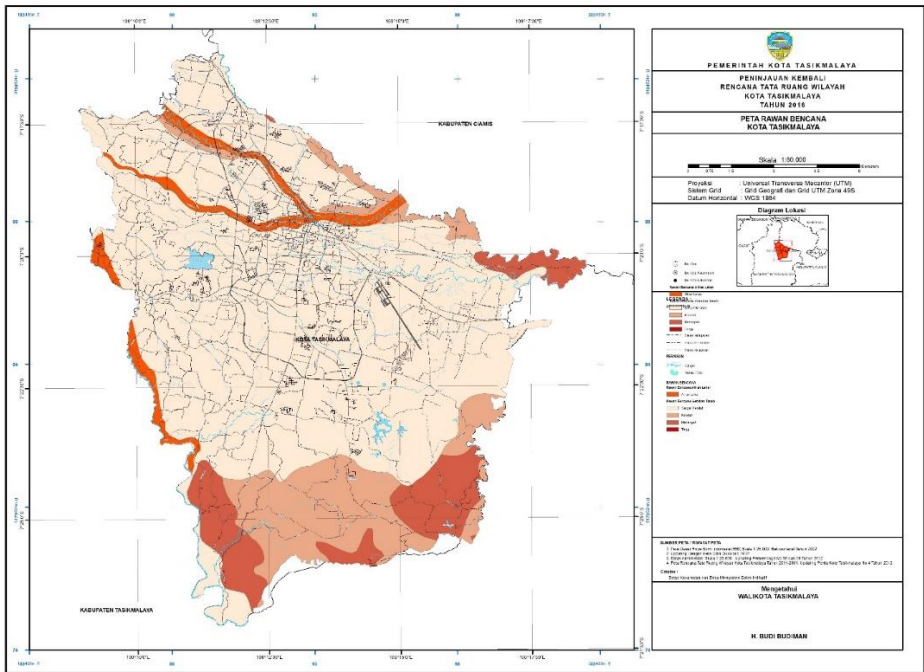


Kecamatan Cibeureum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lembah Gunung Cibeureum dan Kipas tengah G. Galunggung berupa lereng perbukitan dan lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, lahan terbuka, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan golongan C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman dan tegalan. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif rendah dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,35 g.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk ketiga zona tersebut adalah rekayasa lahan sebelum dilakukan pembangunan (pengerasan dan pengeringan lahan dll), menghindari lereng sungai dan tebing yang terjal berpotensi longsor (pembangunan diluar zona sepadan gawir sungai dan gawir tebing minimal 3-5 meter), pembuatan tanggul/terasering pada tebing dan tepi sungai yang terjal sebagai penahan longsor.

Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal $>45^\circ$. Sungai-Sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukkan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuh tanah penutup, jatuhnya bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuhnya atau runtuh bongkah breksi dan lava.

Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1 : 50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Potensi bencana gunungapi tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun (arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan serta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar).



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2021.

Gambar 2.8.
Peta Rawan Bencana Kota Tasikmalaya Kondisi Kependudukan
2.1.2. Jumlah Penduduk

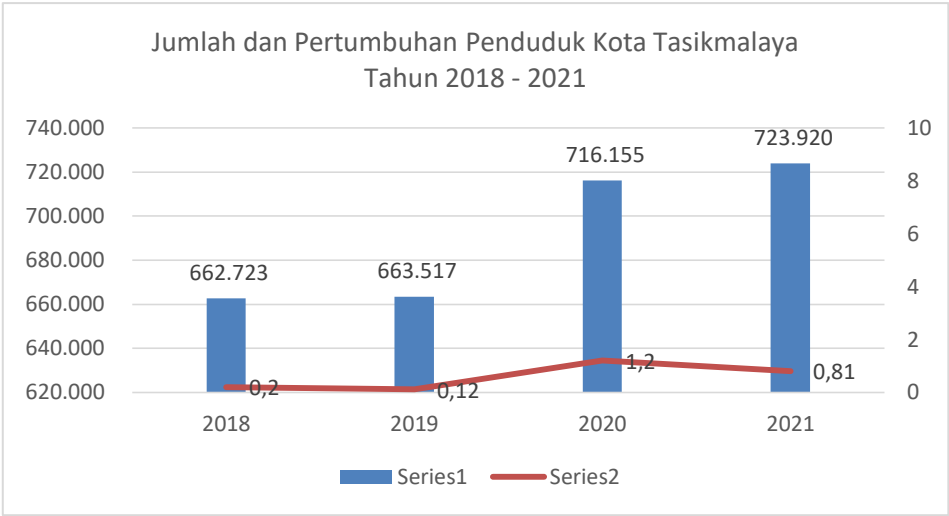
Jumlah Penduduk di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 0,2 % per tahun, bahkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan kenaikan sebesar 1,20 %. Berikut ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2018 - 2021.

Tabel 2.5.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2018	662.723	0,20
2019	663.517	0,12
2020	716.155	1,20
2021	723,920	0,81

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2018 - 2021 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini :



Sumber : BPS, data diolah, 2022.

Gambar 2.9.
Perkembangan Demografi Kota Tasikmalaya 2018-2021

Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebanyak 723.920 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 367.563 jiwa dan perempuan sebanyak 356.358 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mangkubumi, yaitu sebanyak 98.810 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Purbaratu sebanyak 44.850 jiwa.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawalu	97,59	13,48	2.305	105,57
Tamansari	78,25	10,81	2.115	104,74
Cibeureum	69,06	9,54	3.755	102,51
Purbaratu	44,85	6,20	3.551	104,36
Tawang	60,81	8,40	8.801	99,65
Cihideung	72,73	10,05	13.345	101,60
Mangkubumi	98,81	13,65	4.119	102,82
Indihiang	58,39	8,07	5.377	102,25
Bungursari	61,55	8,50	3.493	103,50
Cipedes	81,88	11,31	9.057	103,44
Kota Tasikmalaya	723,92	100,00	3.930	103,14

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah ,2022.

Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2021 berada di Kecamatan Mangkubumi kemudian Kecamatan Kawalu. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan

Kawalu juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya tahun 2021 mencapai 3.930 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Cihideung sebesar 13.345 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tamansari sebesar 2.115 jiwa/km². Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mangkubumi dengan penduduk sebanyak 98.810 jiwa pada tahun 2021 atau sekitar 13,48 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya, diikuti oleh Kecamatan Kawalu yang hampir setara yaitu sebanyak 97.590 jiwa 13,48 persen dan Kecamatan Cipedes 81.880 jiwa 11,31 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu yaitu sebanyak 44.850 jiwa, atau 11,31 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Tasikmalaya terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tawang 8.801 jiwa/km² pada tahun 2021, Kecamatan Cihideung 13.345 jiwa/km² dan Kecamatan Cipedes 9.057 jiwa/km². Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 2.115 jiwa/km² hingga 5.337 jiwa/km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 7 kecamatan lainnya.

1. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,27 sampai dengan 103,14 untuk kurun waktu tahun 2018-2021. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 103 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2021

Tahun	Jenis Kelamin				Laki-laki +Perempuan	Sex Ratio
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2018	333.102	50,26	329.621	49,74	662.723	101,05
2019	333.321	50,24	330.196	49,76	663.517	100,95
2020	363.740	50,79	352.415	49,21	716.155	103,21
2021	367.563	50,77	356.358	49,22	723.921	103,14

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Data Penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2021 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :



Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	31.122	29.643	60.765
5 – 9	28.591	27.493	56.084
10 – 14	31.819	29.646	61.465
15 – 19	31.604	30.012	61.616
20 – 24	30.414	29.696	60.110
25 – 29	29.910	28.634	58.544
30 – 34	29.274	27.652	56.926
35 – 39	27.662	26.352	54.014
40 – 44	26.324	24.577	50.901
45 – 49	23.455	22.803	46.258
50 – 54	20.341	20.322	40.663
55 – 59	17.764	17.805	35.569
60 – 64	13.605	13.779	27.384
65 – 69	10.425	10.685	21.110
70 – 74	6.089	6.817	12.906
75 +	5.341	6.499	11.840
JUMLAH	363.740	352.415	716.155

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Tasikmalaya paling tinggi berada pada usia produktif. Hal tersebut menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah motor penggerak utama pembangunan.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah, dapat teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu :

- a) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:



- peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- pelestarian kawasan cagar budaya; dan
- penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota.

b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

- pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut :

a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, meliputi:

- kawasan pusat kota;
- kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
- kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari;
- kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari;

b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan, meliputi :

- kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan
- kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu.

c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Capaian indikator makro Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022

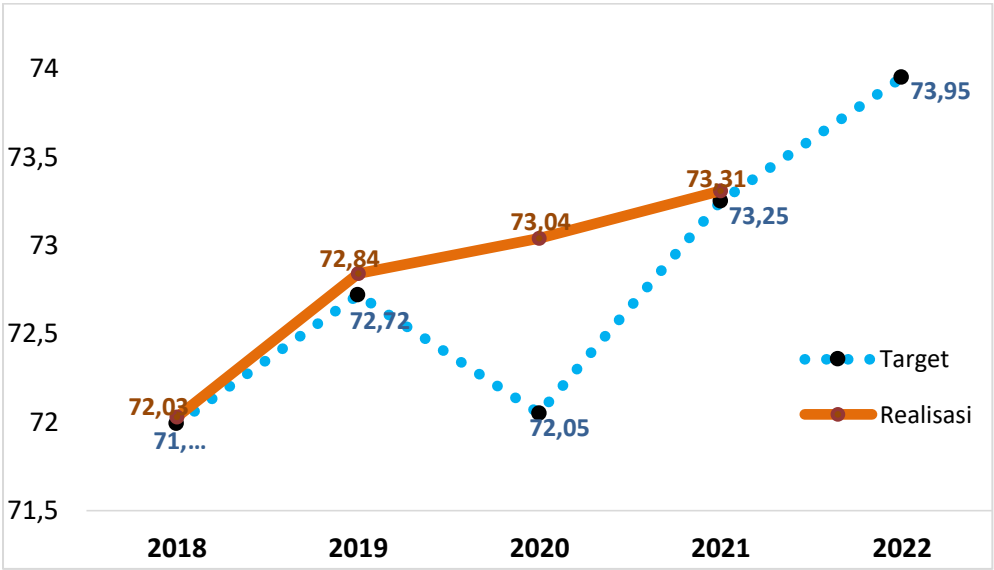
NO.	Indikator	2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,99	72,03	72,72	72,48	72,05	73,04	73,25	73,31
	Indeks Pendidikan	67,22	67,41	67,97	67,77	67,95	68,46	68,25	69,12
	Rata-rata Lama Sekolah	8,73	9,04	8,87	9,13	9,35	9,33	9,55	9,52
	Harapan Lama Sekolah	13,42	13,42	13,44	13,44	13,47	13,45	13,51	13,46
	Indeks Kesehatan	79,7	79,54	80,11	79,89	80,4	80,23	81,06	80,52
	Usia Harapan Hidup	71,18	71,7	72,07	71,93	72,35	72,15	72,75	72,34
	Indeks Daya Beli	69,64	69,69	70,64	71,37	55,79	70,93	57,58	70,78
	Pengeluaran per Kapita	9,84	9,86	10,16	10,41	7,63	10,26	8,57	10,213
2	PDRB Perkapita	30,6	30,14	33,7	32,78	30,23	32,51	30,77	31,56

NO.	Indikator	2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	PDRB ADH Berlaku	20,33	20,09	22,44	21,75	22,08	21,59	22,98	22,85
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,95	5,94	7,06	5,97	2,5	-2,01	4,5	3,57
5	Inflasi	3,76	2,3	3,53	1,72	2,5	1,61	2,25	1,17
6	Indeks gini	0,4	0,391	0,39	0,36	0,41	0,366	0,4	0,414
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,25	0,2	0,23	0,12	0,22	1,27	0,21	0,81
8	Tingkat Kemiskinan	13,8	12,71	12,8	11,6	13,5	12,97	12,5	13,13

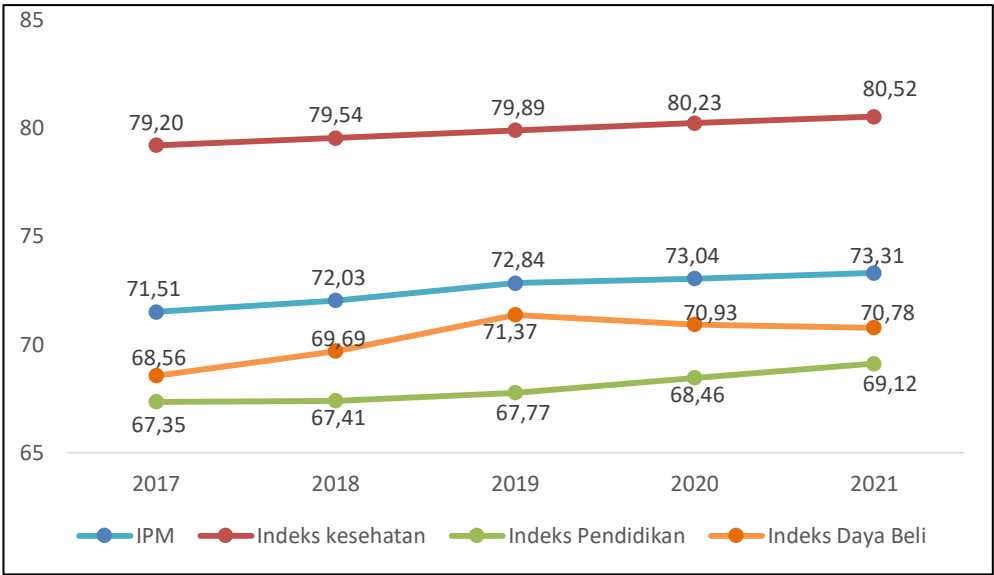
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

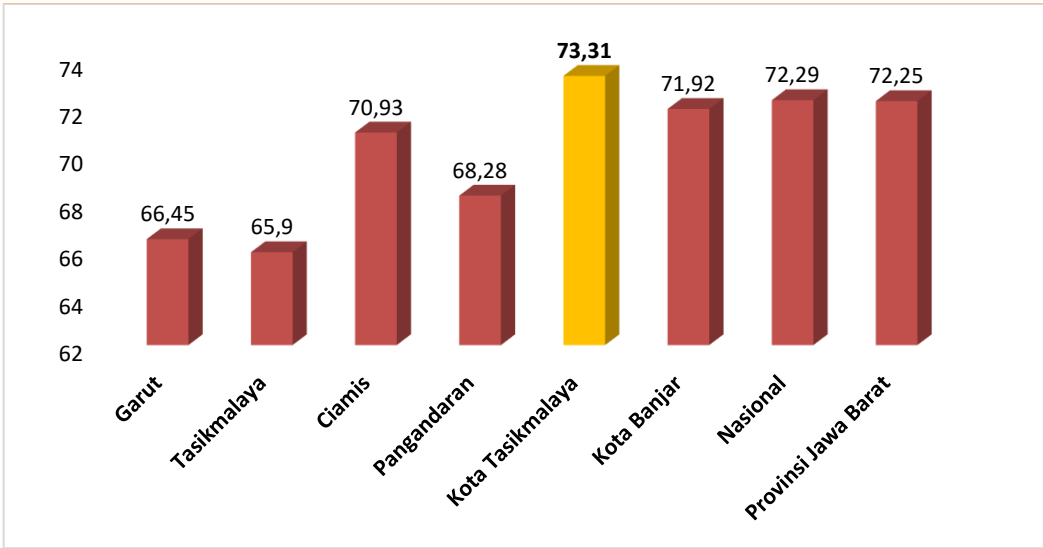


Gambar 2.10. Target & Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya, 2018-2022 (Point)



Gambar 2.5.
Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa IPM Kota Tasikmalaya terus mengalami kenaikan yaitu 71,51 poin pada tahun 2017 meningkat menjadi 73,31 poin pada tahun 2021. Adapun untuk masing-masing unsur IPM, Indeks Kesehatan dari 79,20 poin pada tahun 2017 menjadi 80,52 poin pada tahun 2021, Indeks Pendidikan 67,35 pada tahun 2017 menjadi 69,12 poin pada tahun 2020, serta Indeks Daya Beli dari 68,56 poin pada tahun 2017 menjadi 70,78 poin pada tahun 2021. Dari ketiga komponen penghitungan IPM yang mengalami penurunan hanya Indeks daya beli, hal ini diakibatkan oleh terjadinya pandemic Covid-19.



Gambar 2.11.
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia
Kab./Kota, Provinsi dan Nasional 2018-2022 (Point)

2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam

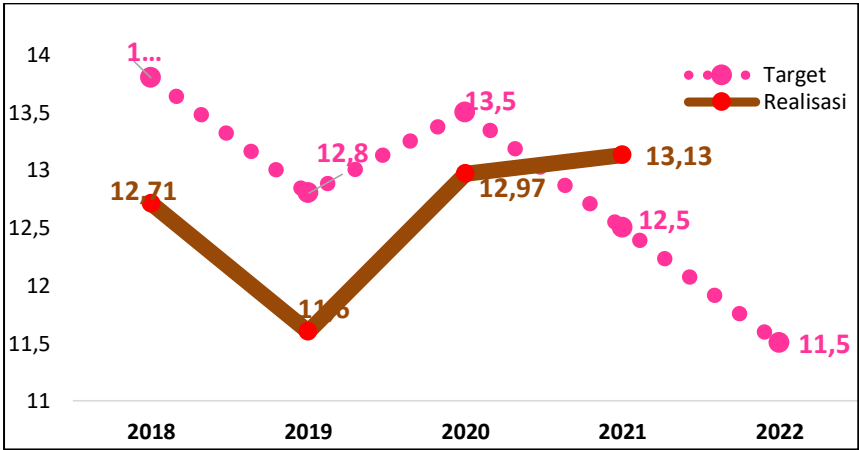
menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.10.
Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2018 - 2021

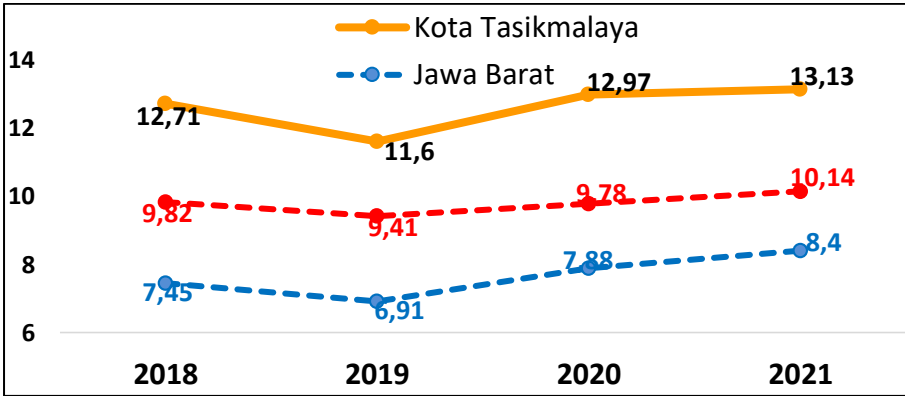
Indikator	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	12,71	11,60	12,97	13,13
Penduduk Miskin (ribu orang)	84,22	76,98	86,13	89,46
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	447,008	457.899	470.150	480.341
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,52	1,98	1,75	2,41
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,31	0,53	0,39	0,69

Sumber : BPS RI, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 13,13% pada tahun 2021. Capaian ini masih di atas kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

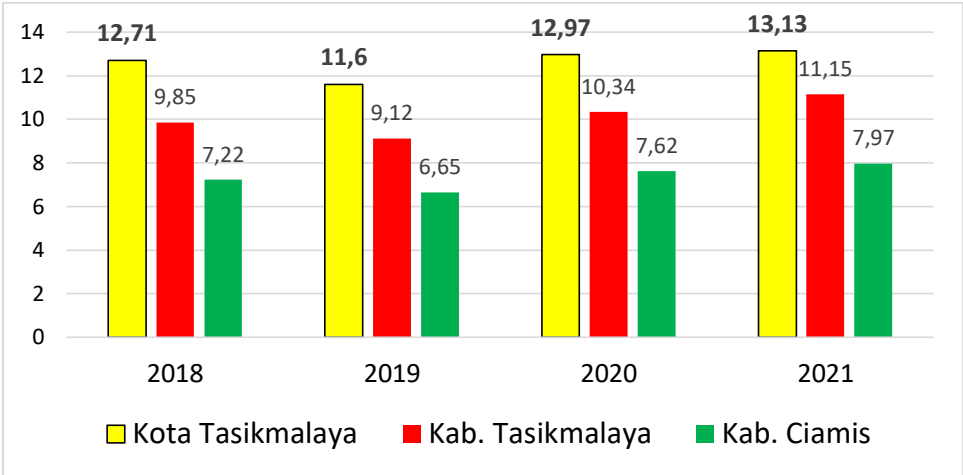


Gambar 2.12.
Target & Realisasi
Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya, 2018-2022 (Persen)



Gambar 2.13
Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional

Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah tetangga yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis maka dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.14
Perbandingan Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis

3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 19.977,6 Milyar pada tahun 2018 dan menjadi 22.845,56 pada tahun 2021. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.11. dan tabel 2.12.

Tabel 2.11.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 011,2	1 054,8	1 079,4	1 100,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,7	1,8	1,91
C	Industri Pengolahan	2 783,3	3 067,4	3 051,3	3 159,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,8	3,0	2,9	2,99
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	76,6	82,8	90,7	96,31
F	Konstruksi	3 175,1	3 474,5	3 341,1	3 700,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	4 493,5	4 944,1	4 719,3	4 954,11
H	Transportasi dan Pergudangan	1 942,1	2 084,4	2 028,6	2 072,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 008,5	1 150,6	1 148,6	1 209,65
J	Informasi dan Komunikasi	624,4	685,2	915,2	978,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2 166,2	2 245,5	2 201,9	2 396,31
L	Real Estat	317,7	351,7	360,6	397,89



Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
M,N	Jasa Perusahaan	203,8	250,7	222,2	240,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	864,9	897,8	895,5	921,48
P	Jasa Pendidikan	389,0	444,9	483,9	511,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	414,1	468,2	501,0	547,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	502,8	543,7	545,5	553,75
Produk Domestik Bruto		19 977,6	21 750,9	21 589,5	22 845,56

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2018 - 2021 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	644,6	644,5	658,9	660,75
B	Pertambangan dan Penggalian	1,3	1,3	1,3	1,36
C	Industri Pengolahan	2 038,7	2 196,0	2 153,5	2 194,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,6	1,7	1,6	1,68
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	52,1	54,7	59,6	63,01
F	Konstruksi	2 296,0	2 436,9	2 333,3	2 475,68
G	Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 567,9	3 812,4	3 575,0	3 681,31
H	Transportasi dan	1 459,4	1 543,2	1 435,1	1 439,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	724,8	781,5	753,5	771,50
J	Informasi dan Komunikasi	596,8	651,2	869,8	932,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 483,5	1 499,5	1 470,0	1 552,58
L	Real Estat	261,4	285,2	290,4	319,77
M,N	Jasa PerusahaanActivities	165,1	182,2	156,6	168,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	565,0	585,4	579,3	591,46
P	Jasa Pendidikan	280,0	294,0	306,5	314,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Activities	314,9	347,7	361,1	386,04
R,S,T,U	Jasa LainnyaActivities	405,8	428,8	424,4	425,66
Produk Domestik Bruto		14 859,1	15 746,1	15 430,0	15 981,25

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022



4. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.13.

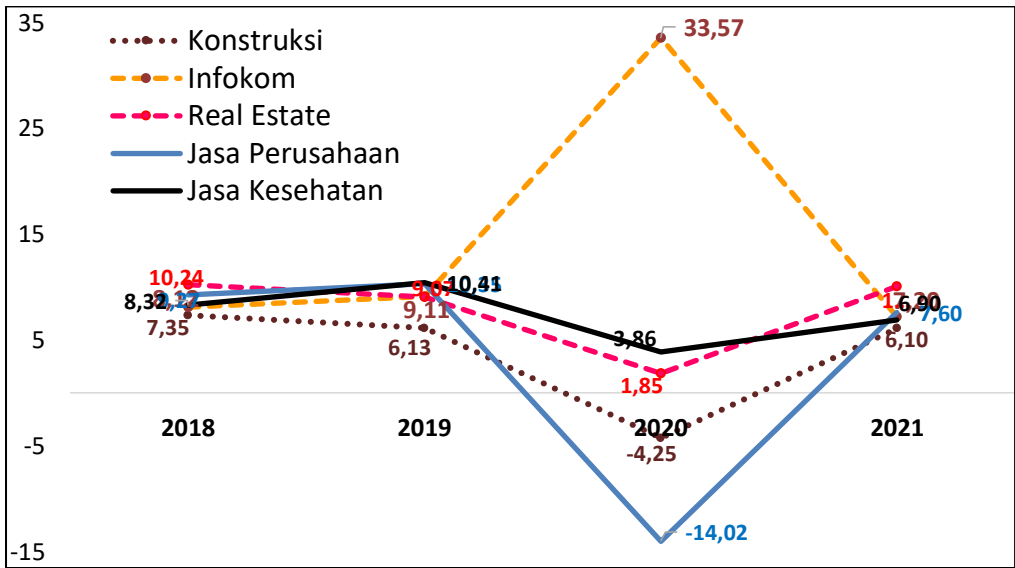
Tabel 2.13.
Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2021 (Persen)

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,06	4,85	5,00	4,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	13,93	14,10	14,13	13,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,38	0,38	0,42	0,42
F	Konstruksi	15,89	15,97	15,48	16,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/	22,49	22,73	21,86	21,69
H	Transportasi dan Pergudangan	9,72	9,58	9,40	9,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,05	5,29	5,32	5,29
J	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,15	4,24	4,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	10,84	10,32	10,20	10,49
L	Real Estat	1,59	1,62	1,67	1,74
M,N	Jasa Perusahaan	1,02	1,15	1,03	1,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan	4,33	4,13	4,15	4,03
P	Jasa Pendidikan	1,95	2,05	2,24	2,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	2,07	2,15	2,32	2,40
R,S,T	Jasa Lainnya	2,52	2,50	2,53	2,42
Produk Domestik Bruto/		100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Selama lima tahun terakhir (2018 - 2021) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada periode lima tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2018 s.d. 2021 menduduki peringkat pertama kontribusinya

terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2018 s.d 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



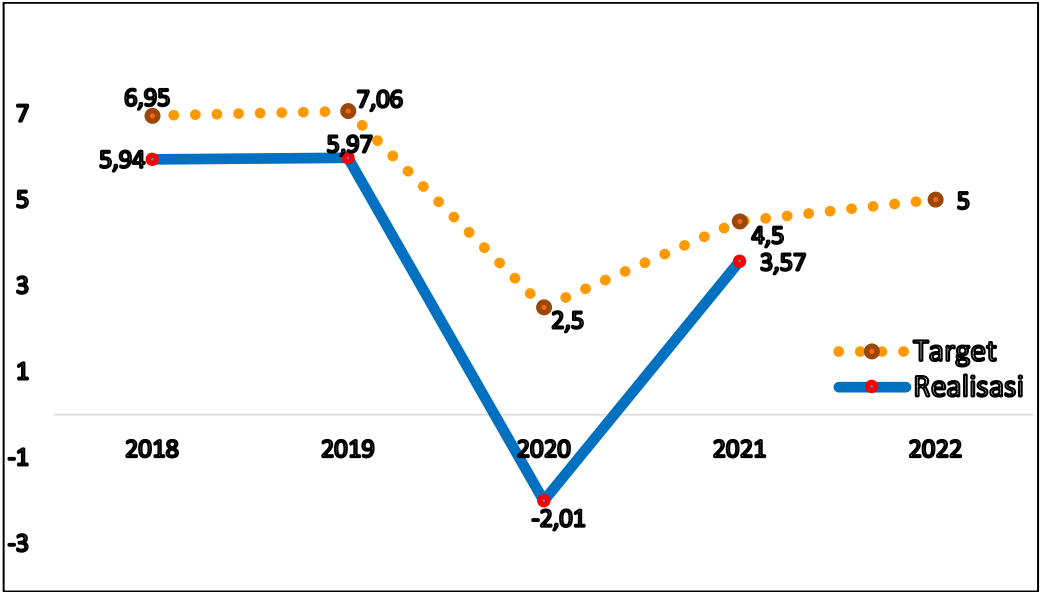
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.15.
Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2018-2020 (Persen)

Empat besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2021, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,69 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 16,20 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 13,83 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,49 persen.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

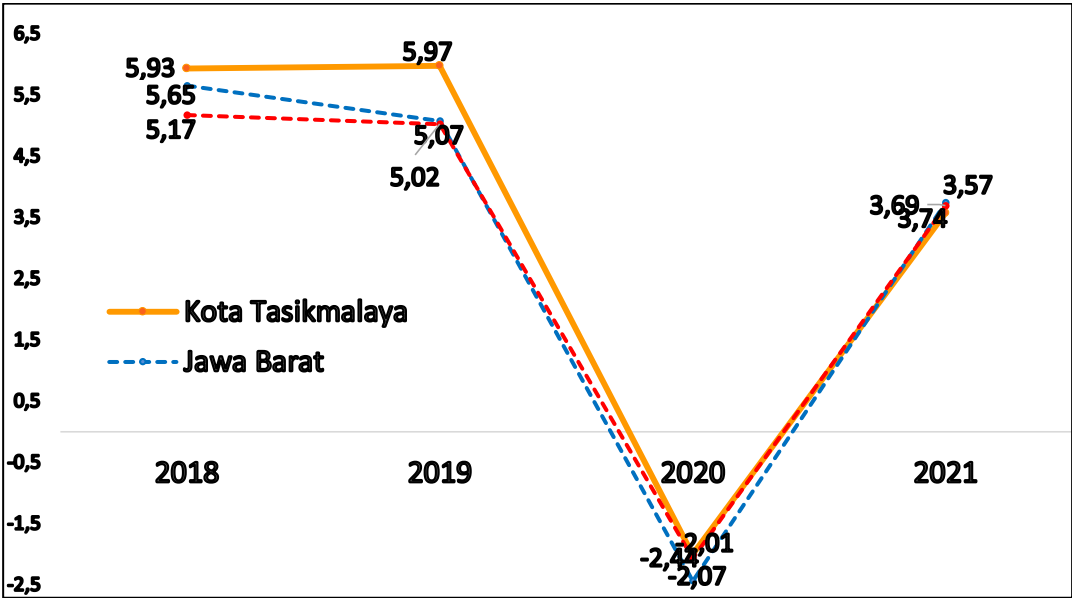
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya dalam 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2018 mengalami perlambatan dengan mencapai angka 5,94% namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 5,97%. Namun seiring dengan terjadinya pandemic covid-19, sektor ekonomi mengalami perlambatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.16.
Target & Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya, 2018-2022
(Persen)

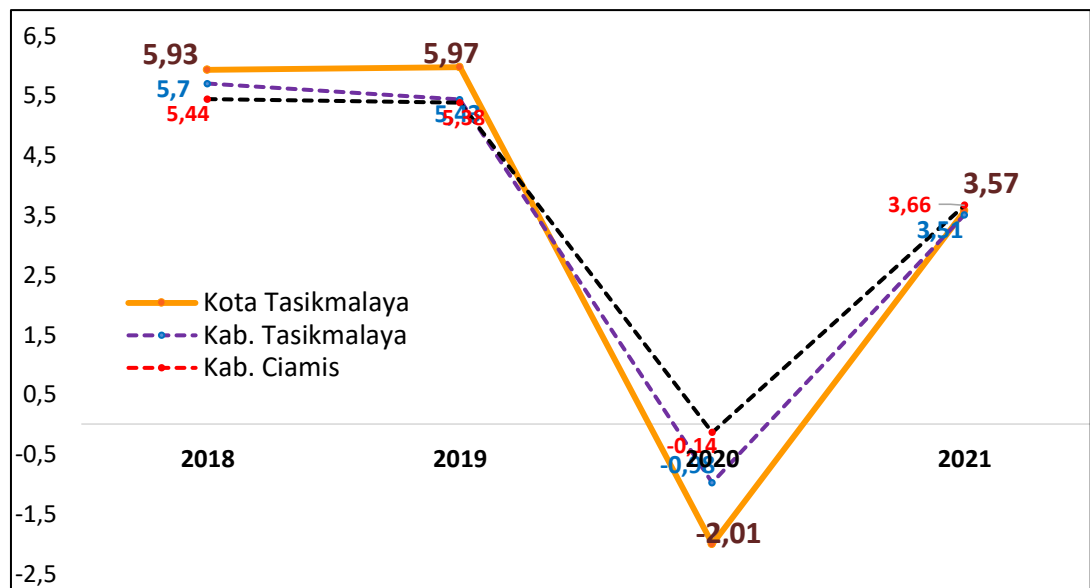
Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2020 lebih baik. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.17.
LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 - 2021

Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.18.

LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
Tahun 2018 - 2021

6. PDRB Menurut Penggunaan

a. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku), maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, setiap rumah tangga di Kota Tasikmalaya menghabiskan dana sekitar 14.502,89 milyar rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 15.710,37 miliar rupiah (2019), 15.559,84 miliar rupiah (2020) dan 15.915,40 miliar rupiah (2021). Selama periode 2018 - 2021, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB mengalami fluktuasi, yaitu 72,60 persen (2018); 72,22 persen (2019), 72,07 persen (2020)

dan 69,66 persen (2021). Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 72,60 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 69,66 persen.

Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010), konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 4,82 persen s.d. 4,88 persen, namun pada tahun 2020 dan 2021 turun -2,45 persen dan 0,69. Sedangkan konsumsi per kapita penduduk Kota Tasikmalaya tumbuh antara 4,54 persen s.d. 4,75 persen, namun untuk tahun 2020 dan tahun 2021 turun -2,52% dan -7,62.

Tabel 2.14.
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kota Tasikmalaya,
2018 - 2021

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)				
a. ADHB	14.502,89	15.710,37	15.559,84	15.915,40
b. ADHK	9.879,99	10.361,74	10.107,68	10.177,77
Proporsi terhadap PDRB (persen)	72,60	72,22	72,07	69,66
Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Juta Rp)				
a. ADHB	21,88	23,68	23,43	21,98
b. ADHK	14,91	15,62	15,22	14,06
Pertumbuhan (persen)				
a. Konsumsi RT	4,71	4,88	-2,45	0,69
b. Konsumsi Perkapita	4,50	4,75	-2,52	-7,62

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

b. Konsumsi Lembaga Non Profit

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 2.15.
Perkembangan Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT)
Kota Tasikmalaya, 2018 - 2021

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)				
a. ADHB	477,62	519,37	508,27	523,52



URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
b. ADHK	347,06	362,56	350,78	356,67
Proporsi terhadap PDRB (persen)	2,39	2,39	2,35	2,28
Pertumbuhan (persen)	13,38	4,47	-3,25	1,68

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Total konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018- 2021 mengalami fluktuasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT sebesar 447,62 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 519,37 miliar rupiah (2019), 508,27 miliar rupiah (2020) dan 523,52 miliar rupiah (2021).

Pertumbuhan konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berfluktuasi, berturut-turut sebesar 13,38 persen (2018), 4,47 persen (2019), -3,24 persen (2020) dan 1,68 persen (2021).

c. **Konsumsi Akhir Pemerintah**

Secara total, konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.270,74 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya 2.435,33 miliar rupiah (2019), 2.463,08 miliar rupiah (2020) dan 2,483,17 miliar rupiah (2021).

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 2.16.
Perkembangan Konsumsi Pemerintah Kota Tasikmalaya
2018 - 2021

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)				
a. ADHB	2.270,74	2.435,33	2.463,08	2.483,17
b. ADHK	1.429,28	1.515,98	1.510,16	1.497,68
Proporsi terhadap PDRB (persen)	11,37	11,19	11,41	10,86
Konsumsi Pemerintah Perkapita (Juta Rp)				
a. ADHB	3,43	3,67	3,71	3,43
b. ADHK	2,16	2,28	2,27	2,07



URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertumbuhan (persen)				
a. Konsumsi Pemerintah	-0,71	3,21	-0,38	1,91
b. Konsumsi Pemerintah Perkapita	-0,91	1,30	-5,83	0,56

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi capital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 2.17.
Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tasikmalaya, 2018 - 2021

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PMTB (Miliar Rp)				
a. ADHB	6.519,97	7.121,01	6.844,41	7.573,28
b. ADHK	4.749,10	5.029,51	4.800,18	5.095,88
Proporsi terhadap PDRB (persen)	32,64	32,73	31,70	33,14
Struktur PMTB (persen)				
a. Bangunan	96,59	96,76	97,12	97,21
b. Non Bangunan	3,41	3,24	2,88	2,79
Pertumbuhan (persen)	7,12	5,90	-4,58	6,16

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

e. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori

mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 2.18.
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Tasikmalaya, 2018 - 2021

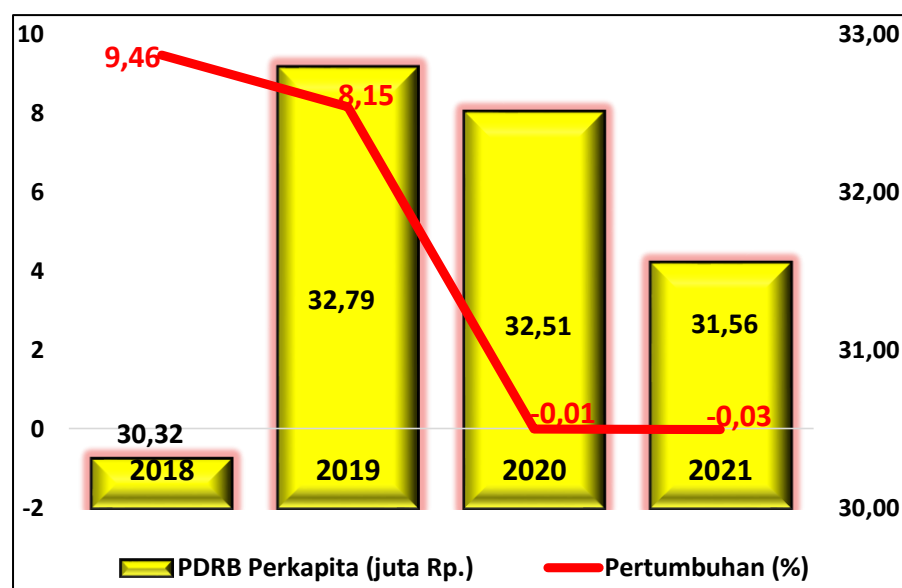
URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inventori (Miliar Rp)				
a. ADHB	733,24	752,84	293,91	-149,56
b. ADHK	442,04	447,57	167,52	-83,41
Proporsi terhadap PDRB (persen)	3,67	3,46	1,36	-0,006

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Pada tahun 2018, perubahan inventori Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku sebesar 733,24 miliar rupiah. Pada tahun-tahun selanjutnya menjadi sebesar 752,84 miliar rupiah (2019), 293,91 miliar rupiah (2020) dan -149,56 miliar rupiah (2021). Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 3,67 persen (2018), 3,46 persen (2019), 1,36 persen (2020) dan -0,006 persen (2021).

7. PDRB Perkapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya tahun 2020 sebesar Rp.32,51 juta mengalami penurunan sebesar -0,01%, bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar Rp.32,79 juta. Penurunan PDRB Perkapita ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi covid-19, berikut capaian dari tahun 2016-2020.

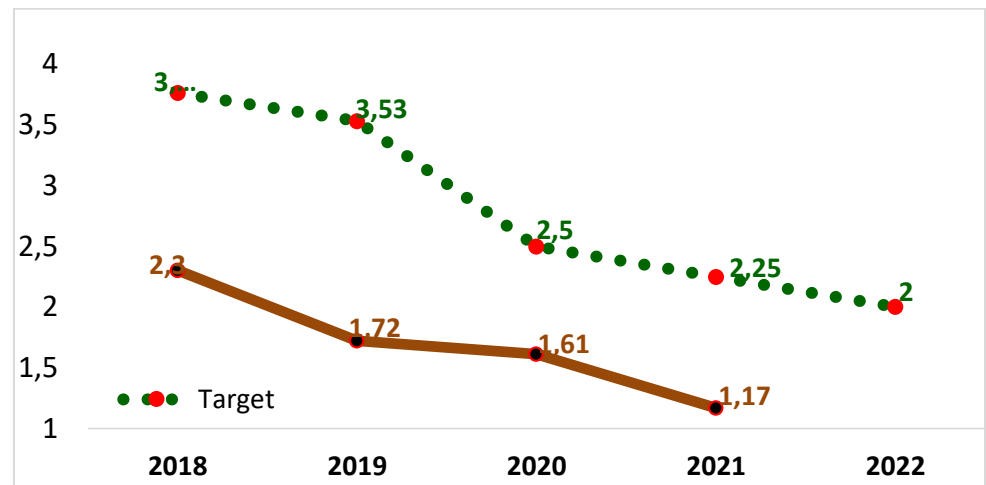


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

Gambar 2.19
Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2018-2021

8. Inflasi

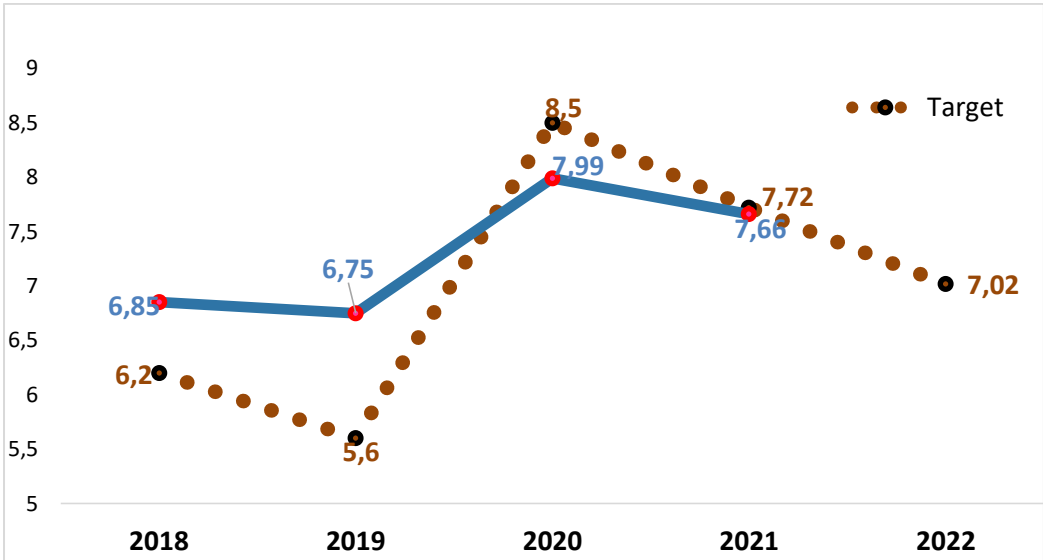
Angka inflasi Kota Tasikmalaya terus mengalami penurunan, pada tahun 2018 inflasi berada pada angka 2,23 selanjutnya terus menurun menjadi 1,17 pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.16.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.20.
Target & Realisasi Inflasi Kota Tasikmalaya, 2018-2022 (Persen)

9. Tingkat Pengangguran Terbuka



Gambar 2.21.
Target & Realisasi Tingkat Pengangguran Kota Tasikmalaya, 2018-2022 (Persen)

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 521.003 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 342.585 orang 65,75%, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 178.418 orang atau 33,46 %. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.19.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Kategori	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	301.619	322.887	343 285	342 585
1. Bekerja	280.959	301.081	315 844	316 349
2. Pengangguran Terbuka	20.660	21.806	27 441	26 236
Bukan Angkatan Kerja	179.049	170.976	172 612	178 418
Jumlah	480.668	493.863	515 897	521 003
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	93,15	93,25	92,01	92,34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	62,75	65,38	66,54	65,75
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,85	6,75	7,99	7,66

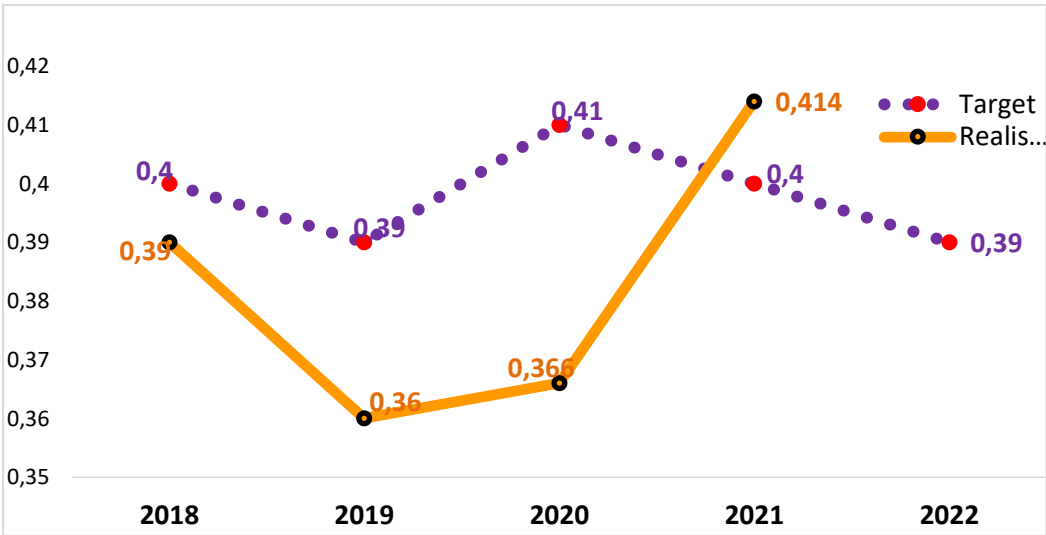
Sumber : Data Sakernas BPS

10. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih

besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.22.

Target & Realisasi Indeks Gini Kota Tasikmalaya, 2018-2022 (Point)

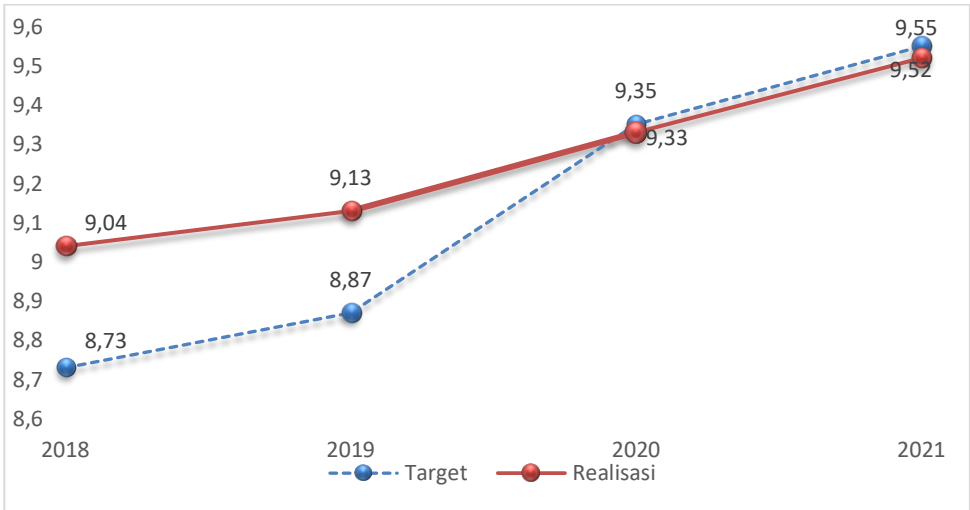
2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di Kota Tasikmalaya sebesar 9,04 tahun meningkat menjadi 9,52 tahun pada tahun 2021 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,52 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA. Capain RLS pun dapat dilihat melampaui target yang telah ditentukan, namun pada taun 2020 dan 2021 terdapat sedikit penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

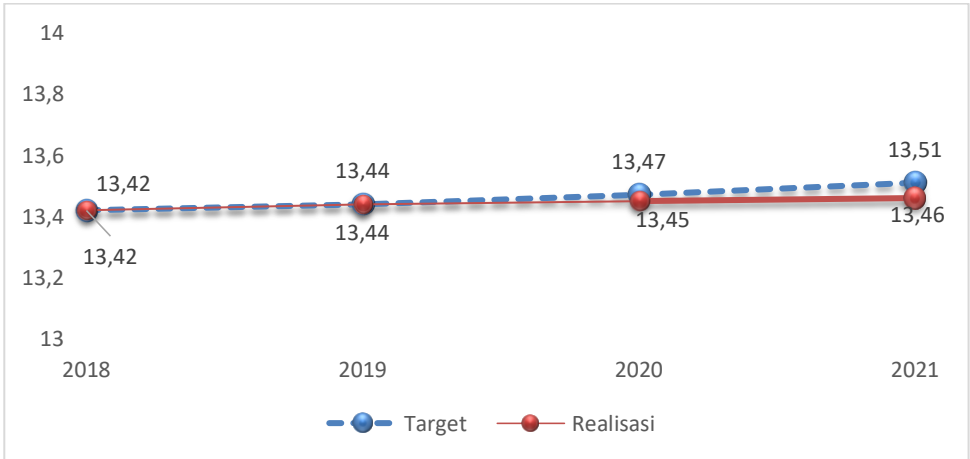


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.23.
Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2021

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya berkisar pada 13,4 tahun sampai 13,46 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat selisih dari target yang telah ditentukan meskipun tidak terlalu signifikan yakni sebesar 0,02 dan 0,05 tahun. Harapan Lama Sekolah di Kota Tasikmalaya secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

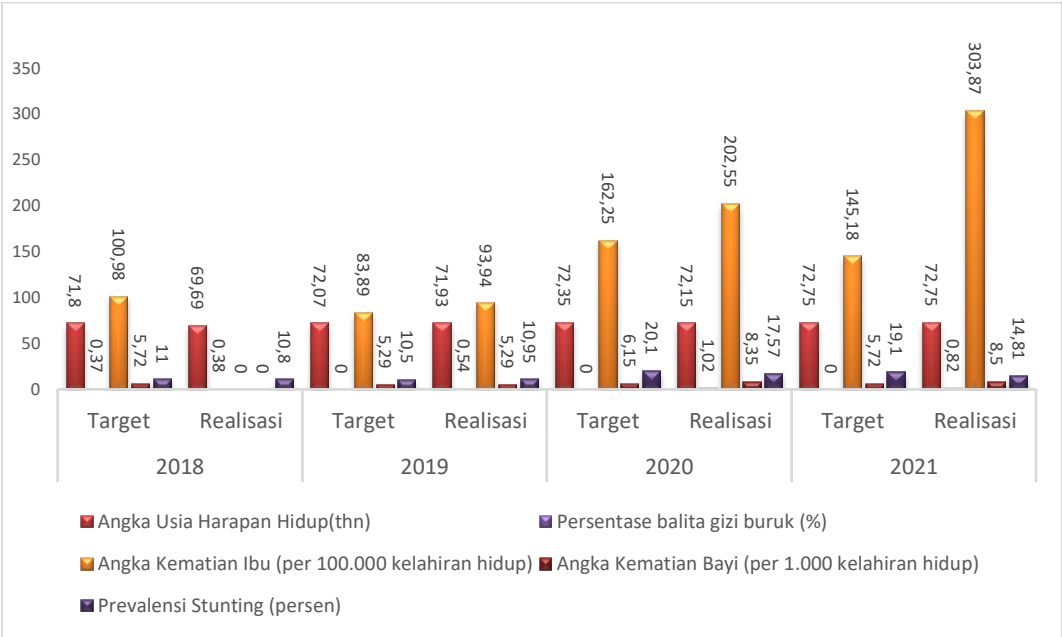


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.24.
Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2021

2.1.2.2.2. Kesehatan

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2018-2021 adalah sebagaimana tabel dan gambar berikut:



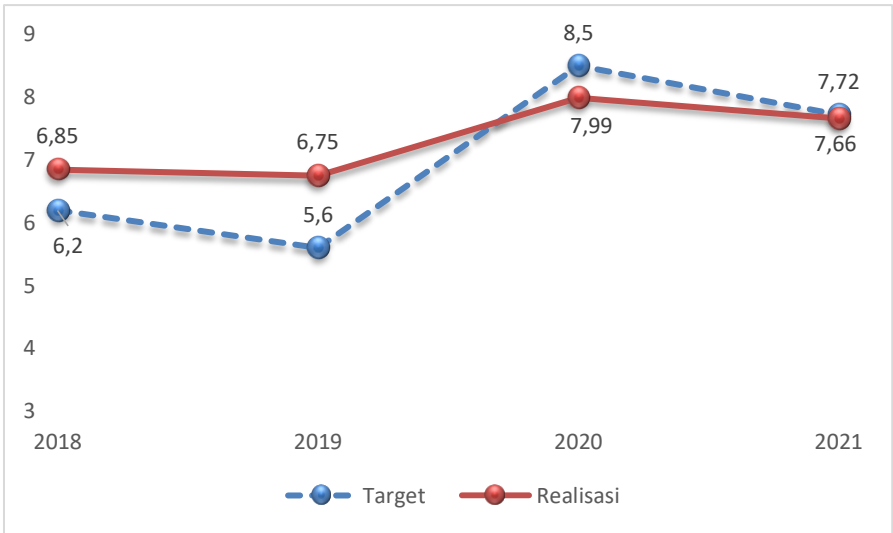
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.25.
Gambaran Umum Kesehatan

Indikator makro kesehatan yang tidak bisa memenuhi target adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan persentase balita gizi buruk. Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH pada Tahun 2021 dengan target 145,18, dan realisasi 303,87. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 101,32 dari tahun 2020. Angka kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH pada Tahun 2021 adalah 8,5 persen dengan target 5,72 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,15. Sedangkan untuk persentase balita gizi buruk yang ditargetkan sebesar 0 persen, masih saja terdapat 0,82 persen di tahun 2021 walaupun mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,2 persen. Permasalahan tersbut disebabkan oleh masih rendahnya derajat kesehatan ibu hamil, rendahnya kesadaran ibu hamil memeriksakan kehamilan, masih adanya pernikahan dini dan masih adanya proses kelahiran diluar fasilitas kesehatan.

2.1.2.2.3. Ketenagakerjaan

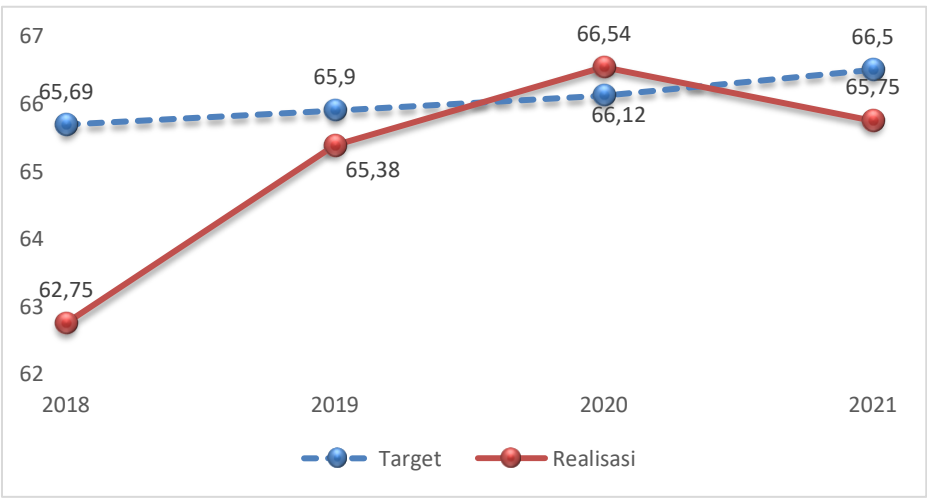
Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka dan Partisipasi Angkatan Kerja. Capaian hal tersebut di Kota Tasikmalaya tahun 2018 - 2021 dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut :



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.26.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yaitu dari 7,99 persen pada tahun 2020, menjadi 7,66 persen pada tahun 2021, demikian halnya dengan capaian target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembinaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil dilaksanakan.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.27.
Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Partisipasi Angkatan Kerja memiliki trend kenaikan selama tiga tahun terakhir terkecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,79 persen dari 66,54 persen menjadi 65,75 persen, demikian halnya dengan target yang harus dipenuhi tidak bisa tercapai pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah angkatan kerja mengalami penurunan, kemudian penduduk angkatan kerja



2.1.2.2.4. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.20.
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya
Tahun 2018 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah grup kesenian (buah)	173	173	173	173
Jumlah gedung (unit)	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2022.

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2018 sampai dengan 2021, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sekitar 2 sampai 3 klub. Sementara jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk hanya sekitar 0,6 gedung, artinya gedung olahraga masih kurang.

Tabel 2.21.
Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah klub olahraga (buah)	260	260	260	260
Jumlah gedung olahraga (unit)	71	71	71	71

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2022.

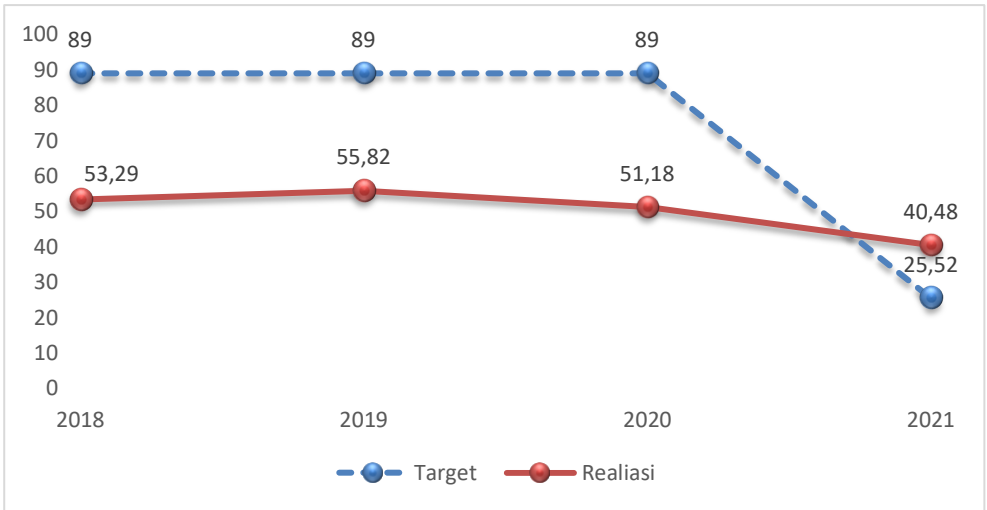
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar

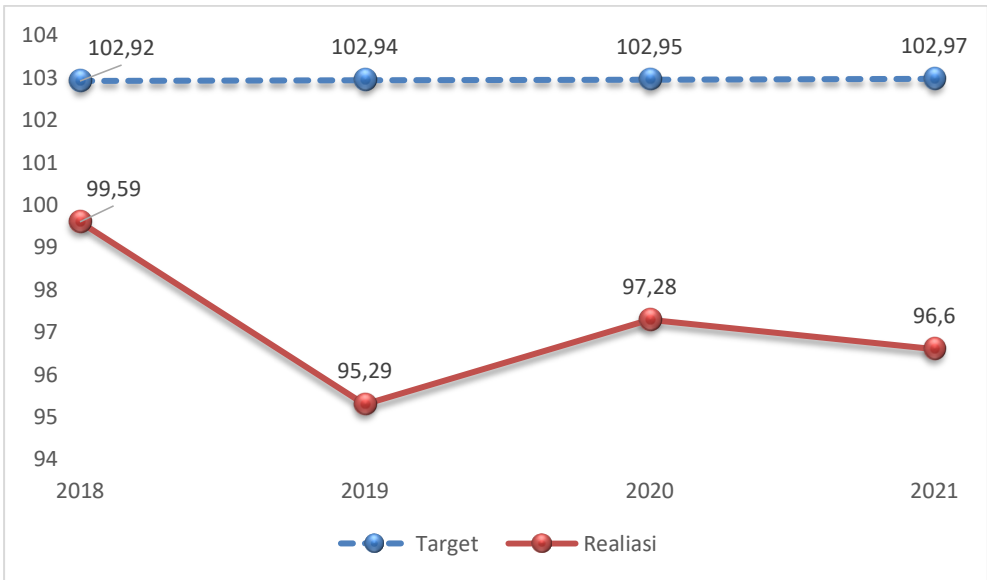
Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Capaian APK PAUD, SD, dan SMP di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.28.
Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2018-2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada APK PAUD menjadi sebesar 51,18 persen dari tahun 2019 sebesar 55,82 persen, hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,46 persen. Demikian halnya di tahun 2021 kembali terjadi penurunan kembali sebesar 4,46 persen, menjadi 40,48 persen. APK PAUD dari tahun ke tahun belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Salah satu penyebabnya adalah penurunan jumlah anak usia PAUD yang didaftarkan pada lembaga pendidikan PAUD di masa pandemi Covid 19, selain itu masih terdapat anak yang tidak disekolahkan pada semua jenjang PAUD.

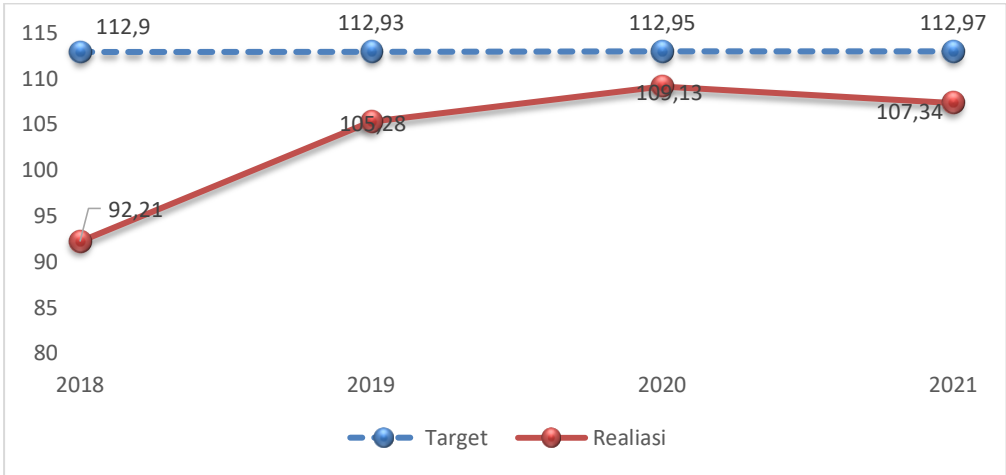


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.29.
Angka Partisipasi Kasar SD Tahun 2018-2021

Pada jenjang Sekolah Dasar APK mengalami fluktuasi, terjadi penurunan pada tahun 2019 dan 2021 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 APK SD sebesar 96,6 artinya turun sebesar 0,68 persen dari

tahun sebelumnya, selain itu APK SD pun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

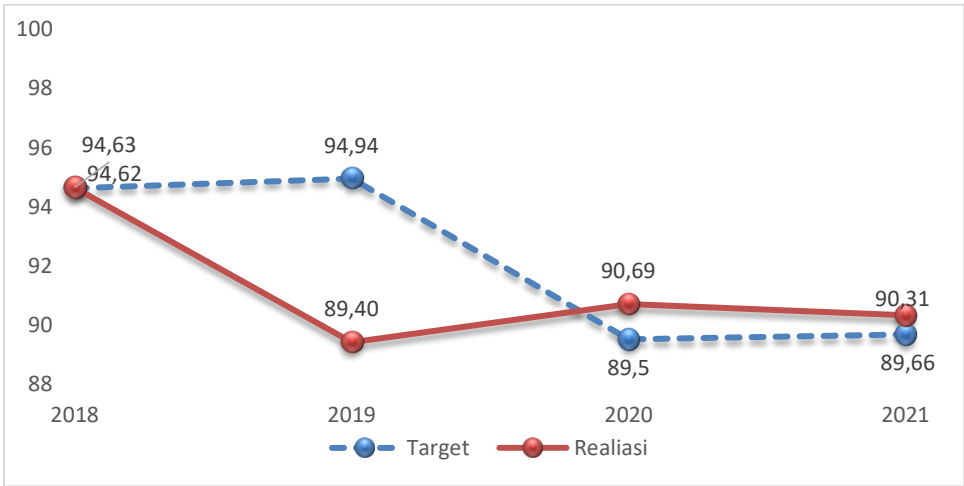


Gambar 2.30.
Angka Partisipasi Kasar SMP Tahun 2018-2021

APK SMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. APK SMP sebesar 107,34 persen atau turun sebesar 1,79 persen dari tahun sebelumnya. Seperti halnya APK PAUD dan SD, APK SMP pun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Angka Partisipasi Murni

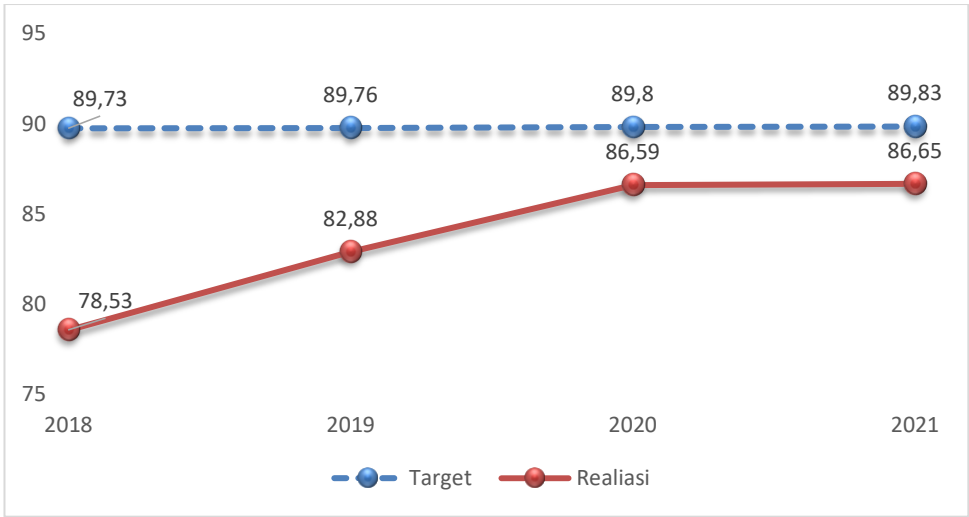
Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.



Sumber : : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.31.
Angka Partisipasi Murni SD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

APM SD/MI Sederajat pada tahun 2021 menunjukkan angka 90,31 persen sedangkan tahun sebelumnya 90,69 persen atau dengan kata lain turun sebesar 0,38 persen, yang berarti bahwa terdapat 90,31persen penduduk usia SD/MI sederajat yang mengenyam pendidikan SD/MI Sederajat. Namun jika dilihat dari target yang telah ditentukan tahun 2020 dan 2021 telah melampaui target yang ditetapkan.



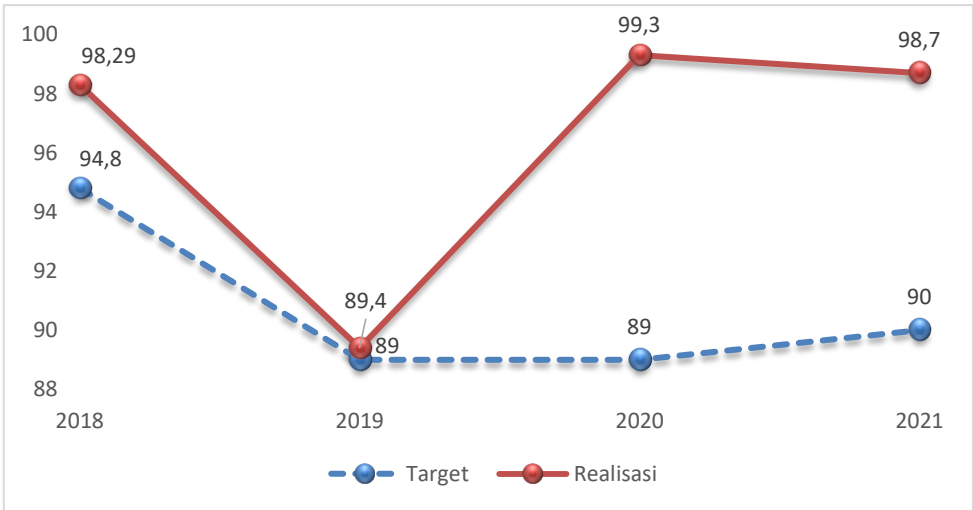
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.32.
Angka Partisipasi Murni SMP Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Pada jenjang SMP, APM sebesar 86,59 persen pada tahun lalu dan 86,65 persen pada tahun 2021 dengan kata lain mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 86,65 persen penduduk usia SMP Sederajat yang mengenyam pendidikan SMP Sederajat. Namun APM SMP tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses ke sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, dan lain sebagainya.

3. Angka Partisipasi Sekolah

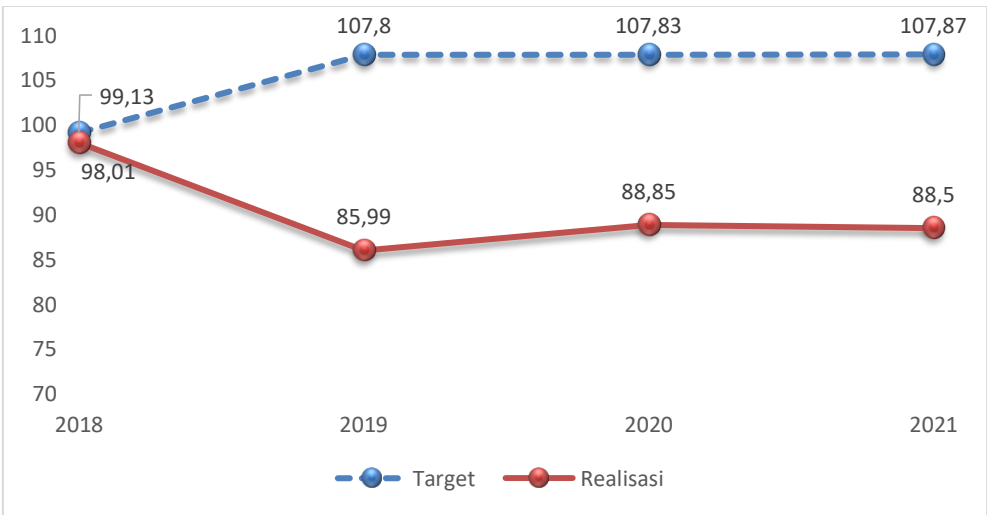
Angka Patisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 dan13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7-12) dan usia SMP (13-15). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.33.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2021

Perbandingan realisasi APS yang dicapai pada tahun 2021 dan 2021 untuk usia SD/MI mengalami penurunan 06 persen, yakni dari sebesar 99,30 persen menjadi 98,7 persen. Nilai APS sebesar 98,7 persen artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 98,7 persen, sisanya 1,3 persen ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah).



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.34.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2021

Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMP/MTs (13-15 tahun) sebesar 88,5 persen terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yakni 88,85 persen. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan 7-12 tahun dengan kata lain semakin tinggi tingkatan pendidikan semakin rendah turun tingkat partisipasi sekolahnya. Berbagai alasan yang

melatarbelakangi antara lain kekurangan biaya, keterbatasan akses ke sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, menikah dan lain-lain.

4. Ketersediaan Sekolah

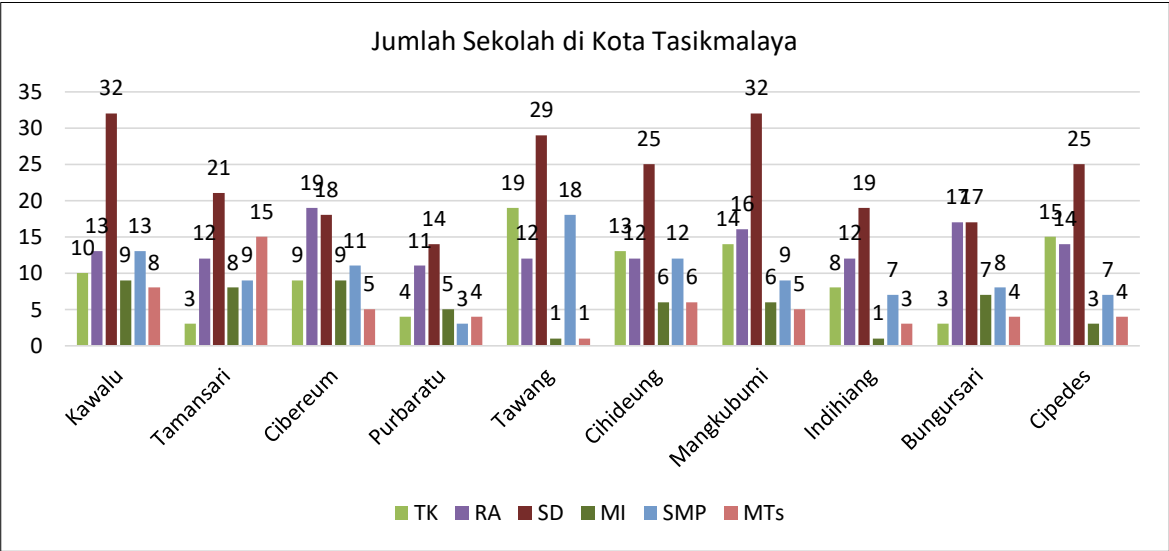
Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya tahun 2021 dapat dilihat Pada tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22.
Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

No	Tahun	SD/MI					SMP/MTs				
		SD		Jumlah SD	MI	Jumlah SD dan MI	SMP		Jumlah SMP	MTs	Jumlah SMP dan MTs
		Negeri	Swasta				Negeri	Swasta			
1	2018	199	30	229	53	282	21	53	74	55	129
2	2019	199	30	229	53	282	21	54	75	55	130
3	2020	199	32	231	55	286	21	76	97	55	152
4	2021	199	33	232	55	286	21	60	81	51	132

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

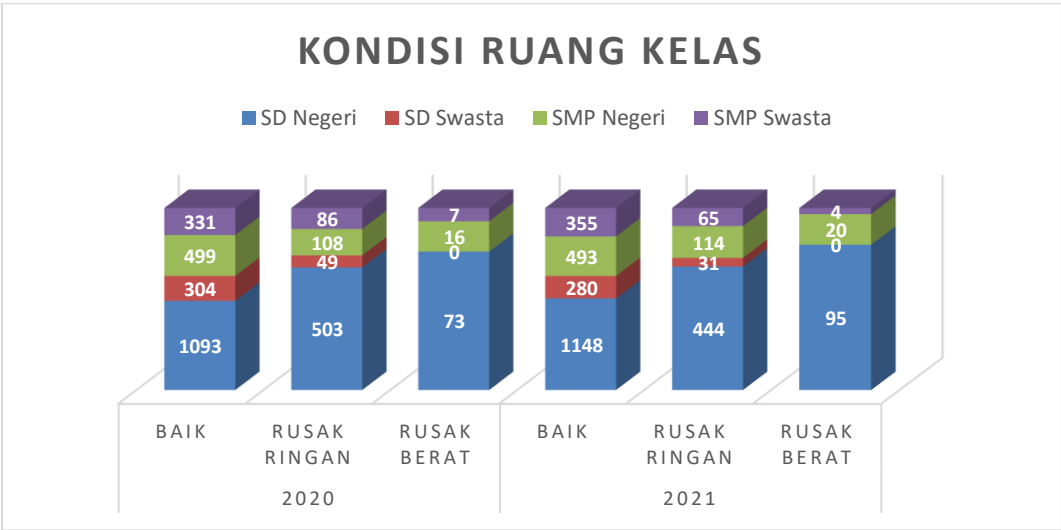
Sebaran sekolah per kecamatan dapat terlihat pada gambar 2.21, untuk tingkat SD, MI, SMP dan MTs sebarannya antar kecamatan cukup merata.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.35.
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Tahun 2021

Selain sebaran sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup penting adalah ruang kelas. Kondisi ruang kelas SD dan SMP di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan, data diolah, 2022.

Gambar 2.36.
Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2020 dan 2021

5. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Tabel 2.23.
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid
SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	2.991	64.276	2.367	1 : 21,50	1 : 27,10
2019	2.982	63.827	2.390	1 : 21,36	1 : 26,60
2020	3.234	63.475	2.398	1 : 19,60	1 : 26,50
2021	3.188	62.421	2.025	1 : 19,58	1 : 30,82

Sumber: : Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan 2022

Tabel 2.23. di atas menunjukkan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2021 di Kota Tasikmalaya rasio murid dengan guru selama periode tersebut berada pada posisi 1 : 19,58. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2021 sebesar 1: 30,82, kondisi ini belum sesuai dengan standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukkan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel walaupun kembali mengalami kenaikan bila dibandingkan

tahun sebelumnya. Rasio guru dengan murid menunjukkan penurunan yaitu 1:16,17 dari tahun sebelumnya 1 :17,2. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 16 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2021 sebesar 1:27,19 sedangkan tahu sebelumnya 1: 23,8 hal ini masih di atas standar yaitu 1 : 32 walaupun mengalami kenaikan sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 2.24.
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid
SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2018	1.685	28.116	974	1 : 16,7	1 : 28,9
2019	1.665	28.155	976	1 : 16,8	1 : 28,7
2020	1.764	28.571	1.970	1 : 17,2	1 : 23,8
2021	1.777	28.739	1.057	1 : 16,17	1: 27,19

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Selain pendidikan formal yang dilaksanakan juga dilaksanakan pendidikan non formal diantaranya pendidikan kesetaraan. Berikut data murid program kesetaraan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021.

Tabel 2.25.
Jumlah Murid Program Paket A, B dan C
di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021		
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Cihideung	17	35	204	7	57	262	6	33	128	10	84	271
2	Cipedes	10	43	224	-	20	131	-	112	254	-	81	217
3	Tawang		47	166	-	42	180	8	34	129	10	39	105
4	Indihiang		31	136	-	82	177	-	86	275	1	39	95
5	Kawalu	5	83	272	-	118	439	-	135	400	8	114	296
6	Cibeureum	12	147	310	7	159	377	2	175	363	-	98	281
7	Tamansari	18	91	304	19	157	431	20	201	486	1	241	464
8	Mangkubumi		3	87	-	41	151	-	69	209	2	90	248
9	Bungursari		83	132	6	53	116	-	49	110	3	45	137
10	Purbaratu		34	94	2	89	193	13	123	297	11	146	315
Kota Tasikmalaya		62	597	1.929	41	818	2.457	49	1.017	2.651	46	977	2.429

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

6. Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan

Salah satu indikator kualitas pendidikan adalah Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan. Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya dalam rentang waktu tahun 2018 s.d.2021 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.26.
Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 s.d. 2021

No	Tingkatan Sekolah	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Sekolah Dasar	133.838	192.197	195.569	205.221
2	Sekolah Menengah Pertama	52.437	113.427	121.863	109.851
3	Sekolah Menengah Atas	69.575	149.697	158.909	164.661
4	Perguruan Tinggi	52.493	38.592	39.556	41.270

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka (BPS), 2019 s.d. 2022

Tabel 2.26 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2021, didominasi oleh tamat Sekolah Dasar dengan persentase sebesar 39,39 persen, Sekolah Menengah Pertama sebesar 21,08 persen, Sekolah Menengah Atas sebesar 31,60 persen, dan Perguruan Tinggi sebesar 7,92 persen. Namun demikian terdapat kenaikan pada jumlah penduduk yang lulus pada tingkat Perguruan Tinggi setiap tahunnya. Iya

7. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Capaian indikator kinerja urusan pendidikan pada tahun 2021 dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.27.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2018- 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Wirausaha baru sektor Pendidikan	Orang	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	89	53,29	89,00	55,82	89,46	51,18	25,52	40,48
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,92	97,56	102,94	95,29	102,95	97,28	102,97	96,06
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	112,90	103,55	112,93	105,28	112,95	109,13	112,97	107,34
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,62	94,62	94,94	89,40	89,53	90,69	89,66	90,31
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	89,73	89,73	89,76	82,88	89,80	86,59	89,83	86,65



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	%	94,80	98,29	89	89,40	89	99,30	90	98,7
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,13	98,01	107,80	85,99	107,83	88,85	107,85	88,5
9	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD/MI (per 10.000)	%	39,60	36,63	39,81	36,05	39,81	37,66	39,84	37,77
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP/MTs (per 10.000)	%	34,79	33,22	36,26	33,87	36,26	35,06	36,74	35,76
11	Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000)	Poin	509,84	532,12	510,67	490,14	511,49	518,04	512,27	503,23
12	Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)	Poin	720,34	785,11	723,80	686,57	727,60	687,64	731,11	686,61
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Paket A (per 1.000)	Poin	0,22	0,22	0,22	0,20	0,22	0,20	0,22	0,19
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Paket B (per 1.000)	poin	0,57	0,53	0,57	0,48	0,58	0,58	0,58	0,43
15	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi	%	96,04	70,02	96,06	69,85	96,08	71,45	96,11	72,28
16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi	%	96,57	84,68	96,57	78,78	96,58	78,81	96,58	78,94
17	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,00	100,00	98,09	100,00	98,09	100,00	98,16	100
18	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,91	100,00	99,93	100,00	99,93	100,00	99,94	100
19	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus	%	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100
20	Persentase Wirausaha Baru sektor pendidikan yang dibina	%	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100
21	Persentase Lulusan Kesetaraan Paket A, B dan C	%	100	100,00	99,00	100,00	99,00	100,00	100	100
22	Persentase Capaian Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	89,00	95,35	90,44	88,94	85,00	92,90	90	96,71
23	Persentase pelayanan pendidikan yang dihitung	%	90	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90	90,91
24	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP	%	7,69	35,90	7,70	16,67	30,00	11,54	30	34,78
25	Persentase Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS	%	100	100,00	100,00	100,00	97,00	100,00	99	100



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
26	Persentase Kegiatan UPTD Pendidikan SKB ya	%	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100	100
27	Tingkat Partisipasi anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	6,5	7,02
28	Tingkat Kelulusan Warga Belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100
29	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	78,55
30	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	71,40
31	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	66,48
32	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	70,97
33	Presentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter / keagamaan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100,00
34	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100
35	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	51,35	53,23
36	Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	30	34,78

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

_ * Indikator baru pada RPJMD Perubahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di kota Tasikmalaya berdasarkan jumlah penduduk belum sesuai dengan yang telah ditargetkan. Realisasi dari tahun ke tahun memang mengalami kenaikan, tetapi tidak dengan target yang telah ditentukan. Capaian rasio guru murid SD/MI per

10.000 orang di kota Tasikmalaya sesuai dengan yang telah ditargetkan. Realisasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2021 terdapat penurunan. capaian rasio guru murid SD/MI per 1000 orang di kota Tasikmalaya sesuai dengan yang telah ditargetkan. Realisasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2021 terdapat penurunan. Capaian Sekolah SD/MI serta SMP/MTs kondisi bangunan baik di kota Tasikmalaya belum bisa memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh besarnya beban pendanaan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dan semakin berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sedangkan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus, serta Persentase Wirausaha Baru sektor Pendidikan telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian persentase siswa prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP pada tahun 2020 yakni dari target 30 persen terealisasi sebesar 11,54 persen, hal ini dipengaruhi oleh Pandemi Covid 19 dengan adanya pembatasan kegiatan yang mengumpulkan massa, sehingga kegiatan berjenis pelombaan banyak yang di tunda dan atau dibatalkan penyelenggaraanya.

2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2018-2021 secara umum mengalami fluktuasi. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.28.
Capaian Indikator Pelayanan
Urusan Kesehatan Tahun 2018-2021

	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	%	42	40	47	42,3	67,5	29,53	76,9	40.75
2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	6	6,72	5,29	5,29	6,15	8,35	5,72	8,5
3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	101	151,6	83,89	93,94	162,25	202,55	145,18	303.87
4	Prevalensi Stunting	%	11	10,8	10,50	10,95	20,10	17,57	19,1	14.81
5	Persentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	100	100	100	43,13	100	54.15
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	95,45	100	95,5
7	Persentase layanan jaminan kesehatan nasional masyarakat miskin	%	80	99,01	85	99,06	90	100,00	100	80,31
8	Persentase ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	60	79,3	70	85,20	80	48,57	90	66,6
9	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja	%	100	94,9	100	97,9	100	81,62	100	100

	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
10	Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	34	59,44	36	39,47	38	41,37	45,13	40,83
11	Persentase balita gizi buruk	%	0	0,37	0	0,545	0	1,02	0,5	0,82
12	Capaian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga yang memenuhi standar	%	43	65,6	48	67	53	15	54,25	38,21
13	Persentase Puskesmas sesuai standar permenkes 75	%	70	66	80	81	90	36,37	95	77
14	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	%	25	24,9	40	42,5	80	40,63	80	71
15	Persentase pelayanan kesehatan keluarga	%	50	70,75	65	72,5	75	100	85	75,17
16	Persentase Penyakit menular ditangani sesuai tatalaksana standar	%	100	100	100	100	100	100	100	61,5
17	Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar	%	100	100	100	100	100	100	100	50,5
19	Capaian fasilitas kesehatan tahapan pertama yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	95,45	100	95
20	Persentase Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	%	100	94,25	100	88,05	100	100	100	100
21	Capaian Penyelenggaraan Operasional Pelayanan terhadap jumlah lab dan gudang farmasi	%	100	96,31	100	100	100	100	100	100
22	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja sesuai standar	%	80	80	100	95	100	100	100	100
23	Persentase implementasi sistem informasi kesehatan	%	100	100	95	100	100	100	100	100
24	Persentase standar pelayanan minimal rumah sakit	%	80	82,09	82	82,13	83	82,25	100	100
25	Akreditasi Rumah Sakit dr. Soekardjo	kategori	5	5	5	5	5	5	5	5
26	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	100	80,79	100	80,77	100	100	100	100
27	Persentase capaian Mutu dan Keselamatan Pasien	%	0	63,85	81	66,15	82	82	83	83
28	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dr. Soekardjo	%	0	82,05	75	82,05	80	80	85	83,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022.

Pelayanan kesehatan sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut disampaikan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Tasikmalaya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
1	Kersanagara	1	RSUD dr. Soekardjo



No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
2	Kawalu	2	RS ISLAM Hj. Siti Munaroh
3	Karanganyar	3	RS Jasa Kartini
4	Tamansari	4	RSB dr. Hj. Karmini EH
5	Cibeureum	5	RS Tasik Medika Citratama (TMC)
6	Purbaratu	6	RSB UMMI
7	Kahuripan	7	Sayang Bunda
8	Tawang	8	RSIA Widaningsih
9	Cihideung	9	RS Syifa Medina
10	Cilembang	10	RSIA Bunda Aisyah
11	Mangkubumi	11	RS Prasetya Bunda
12	Sambongpari	12	RS Permata Bunda Tasikmalaya
13	Indihiang	13	Fasilitas Kesehatan lainnya 6 unit
14	Parakanyasag		
15	Bungursari		
16	Sukalaksana		
17	Bantar		
18	Cipedes		
19	Panglayungan		
20	Cigeureung		
21	Urug		
22	Sangkal		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022.

Selain fasilitas kesehatan, jumlah SDM kesehatan/tenaga medis di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.
Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah			Rasio terhadap Jmlh Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Dokter Spesialis	96	41	137	27,8	11
2	Dokter Umum	92	131	223	24,4	45
3	Dokter Gigi	15	52	67	7,9	13
4	Dokter Gigi Spesialis	1	3	4	3,3	-
5	Perawat	611	939	1.550	197,8	180
6	Bidan	-	742	742	89,5	120
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	55	75	7,2	16

No	Uraian	Jumlah			Rasio terhadap Jmlh Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	17	19	36	6,1	18
9	Tenaga Gizi	20	72	92	12,8	14
10	Tenaga Kefarmasian	11	69	80	37,9	
	a. Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	-	-	24
	b. Apoteker	-	-	-	-	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022.

Berdasarkan data di atas, masih terdapat beberapa ketersediaan SDM kesehatan yang berada di bawah standar yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

2.1.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi beberapa lingkup sub urusan, yaitu jalan kota, pengelolaan sumber daya air, tata ruang, tata bangunan dan pemukiman. Adapun pembahasan mengenai tiap sub urusan sebagaimana uraian dibawah ini.

A. Jalan Kota

Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUKR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, dinyatakan bahwa panjang jalan kota di Kota Tasikmalaya adalah 450,742 km. Adapun kinerja infrastruktur jalan kota selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.31.
Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Km	-*	403,910	-*	411,302	-*	379,525	-*	397.157
Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	93	89,61	91,58	91,25	97	84,2	98	88,11
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target	Km	-*	29,100	-*	37,470	-*	16,083	-*	19,601
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km)	%	6	14,55	25	18,74	30	8,04	0,4	9,80

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	Km	-*	65,73	-*	80,42	-*	45,90	-*	42,275
Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun)	%	20	21,91	20	26,81	20	15,3	20	14,09

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Lebih lanjut, panjang jalan kota belum seluruhnya dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan terutama drainase jalan. Sehingga, pada beberapa ruas jalan mengalami genangan ketika hujan. Tabel berikut ini merupakan kinerja bangunan pelengkap jalan terdiri dari pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan dari tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.32.
Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Km	20	21,51	20	26,81	20	37,03	20	26,69
Capaian pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	%	79,25	71,7	89,62	80,93	94,34	123,43	88,16	88,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Berikut ini merupakan capaian pembangunan jalan mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.33.
Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun	Km	-*	0,7	-*	0,9	-*	2,45	-*	3,425

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit)	%	3,3	10,93	14,83	14,05	33,55	38,25	88,16	53,48

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Di sisi lain, masih terdapat masalah keterbatasan kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Hal ini disiasati dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

B. Sumber Daya Air

Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34.
Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	53,47	58	60,2	68,49	66,6	79,94	72,68	84,23
Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik	KM	108,01	117,15	121,61	138,36	134,53	161,47	146,8	180,22
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya (target 40 Km selama 5 thn)	%	20	13,9	20	27,2	20	5,95	20	25,47
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya	Km	-*	5,56	-*	10,88	-*	2,38	-*	10,19

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

C. Tata Ruang

Kinerja Tata Ruang selama tahun 2018-2021 mengalami peningkatan baik pada pemberian ijin maupun pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Selain itu pada tahun 2019, terdapat 6 rencana detail tata ruang yang disusun.

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruangdengan RTR	%	85	86	87	88	90	91	92	87,18
Capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	94	95	95	96	96	97	97	97,15
Capaian dokumen rencana detail tata ruang yang disusun	Dokumen	-	-	2	6	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

D. Tata Bangunan

Capaian realisasi bangunan sesuai ijin bahwa pada tahun 2021 terealisasi 97,37%, hal inimenunjukkan bahwa terdapat rekomendasi teknis bangunan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat tertangani seluruhnya. Sedangkan untuk pengawasan rekomendasi teknis bangunan yang ditangani terhadap yang diajukan hanya terealisasi 94,87%. Lebih lengkapnya capaian tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Capaian Indikator Kinerja Tata Bangunan Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian realisasi bangunan sesuai ijin	%	99,2	100	99,3	100	99,4	99,4	99,5	97,37
Capaian pengawasan rekomendasi teknis bangunan	%	94	100	95	95,99	96	96	97	94,87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Untuk kondisi bangunan Pemerintahan khususnya Gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan tahun 2021 yang memiliki kondisi

baik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11 Gedung, sedangkan yang mengalami kerusakan berat sudah berkurang menjadi 1 gedung. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.37.
Kondisi Bangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
Tahun 2018 - 2021

No	Kondisi Bangunan	Gedung Kecamatan	Gedung Kelurahan
1	Baik	3	11
2	Rusak Ringan	4	45
3	Rusak Sedang	3	11
4	Rusak Berat	4	1
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0	1
	Total	10	69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

E. Permukiman

Sub urusan permukiman pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur lingkungan (jalan dan drainase), pemenuhan air minum dan akses terhadap sanitasi.

Jalan lingkungan di Kota Tasikmalaya sepanjang 1.941,759 Km, jalan lingkungan tersebut dilakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.38.
Kondisi Jalan Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik
Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jalan Lingkungan yang ditangani	Km	-*	50,324	-*	219,169	-*	219,007	-*	59,874
Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	18,75	25,162	21,62	109,58	21,6	25,18	27,01	28,26

Ket : * = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Panjang drainase yang ditangani pada tahun 2021 sepanjang 50.990 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.39.
Kondisi Drainase Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik
Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Drainase Lingkungan yang ditangani	m	-*	19.399	-*	143	-*	27,341	-*	50,990
Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	20	20,77	20	20,92	20	50,20	20	54,59

Ket : * = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Akses masyarakat terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Kota Tasikmalaya berdasarkan *baseline* yang tertuang dalam RPJMD yang mengacu kepada jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 180.442 KK adalah sebesar 99.892 KK (55,36 %). Capaian untuk tahun 2021 realisasi KK yang berakses SPAL sebanyak 281 KK / 61,20%. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.40.
Capaian Realisasi KK yang berakses SPAL Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi KK berakses SPAL	KK	-*	5.945	-*	3.184	-*	130	-*	281
Capaian KK berakses SPAL	%	41,17	58,65	41,3	60,42	60,49	60,54	61,04	61,20

Ket : * = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Sedangkan Kepala Keluarga yang berakses air minum di Kota Tasikmalaya yang mengacu kepada *baseline* RPJMD yang mengacu kepada jumlah KK sebanyak 180.442 KK. Capaian untuk tahun 2021 capaian akses air minum sebanyak 1.894 KK / 56,23 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41.
Capaian Realisasi KK yang berakses Air Minum Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi KK berakses Air Minum	KK	-*	310	-*	3.941	-*	114	-*	1.894
Capaian KK berakses Air Minum	%	53,27	53,33	53,77	55,51	54,27	55,58	55,82	56,23

Ket : * = Perubahan indicator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

2.1.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.42.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian penanganan rumah tidak layak huni	%	8,6	26,66	16,6	35,25	_*	47,61	_*	54,15
Persentase penanganan kawasan kumuh	%	52,7	61,65	59,81	97,78	98,88	98,88	99,23	99,23
Jumlah PSU yang diserahkan dan Jumlah PSU yang diverifikasi	Unit	10/20	5/31	10/20	19/20	_*	0/0	_*	12/16
Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Unit	1075	3333	1000	1075	1000	1043	1000	1320
Persentase PSU yang diverifikasi	%	7,43	15,61	14,87	22,68	22,3	22,68	30,11	28,62
Persentase PSU yang diserahkan	%	3,72	7,06	7,43	14,13	11,15	14,13	17,84	18,58
Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	52,7	61,65	59,81	97,78	98,88	98,88	99,23	99,23
Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	_*	26,66	_*	35,25	43,59	47,61	47,59	54,15
Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	_*	-	_*	-	100	100	100	100

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2022.

Target Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 – 2022 adalah sebanyak 5.000 unit rumah, realisasi tahun 2021 sebanyak 1320 unit sehingga secara total sebanyak 6.771 unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 – 2021

Kegiatan	Satuan	Jumlah				Total
		2018	2019	2020	2021	
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni	Unit	3.333	1.075	1.043	1320	6.771

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2022.

Berdasarkan pencapaian diatas, penanganan target RTLH yang merupakan janji politik sudah terpenuhi bahkan lebih besar dari yang diperkirakan. Namun mengacu kepada pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2017 yang merupakan baseline penyusunan RPJMD jumlah RTLH yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya sebanyak 12.504 unit. Sehingga jika melihat dari penanganan RTLH



sampai dengan tahun 2021 masih tersisa 5.733 unit rumah masih perlu rehabilitasi. Akan tetapi data tersebut, diperlukan pemutakhiran dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data RTLH pada aplikasi e-RTLH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kumuh di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 terdiri dari 18 (delapan belas) lokasi dengan luas total 276,17 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 206,24 hektar berdasarkan identifikasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kota Tasikmalaya yang dilakukan pada Tahun 2016. Dan pada tahun 2018 hasil Updating RP2KP-KP Program KOTAKU, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 105,92 hektar. Untuk tahun 2019 sisa luasan kumuh sebesar 6,14 hektar dan pada tahun 2020 sisa luasan kumuh seluas 3,1 hektar dan pada tahun 2021 sisa luasan kumuh sebesar 2,13 Ha yang direncanakan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2022.

Kemudian pada tahun 2021, dilakukan identifikasi kembali terhadap kawasan kumuh di wilayah Kota Tasikmalaya. Hasil identifikasi terdapat kawasan kumuh seluas 168,49 Hektar yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.44.
Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Walikota Tahun 2021

No.	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
1	ARGASARI	Argasari	Cihideung	3,78
2	CIPALAYUNG	Cipedes-Panglayungan	Cipedes	15,40
3	CIPANYIR	Cipedes-Panyingkiran	Cipedes-Indihiang	16,31
4	INDIHIANG	Indihiang	Indihiang	1,59
5	PARAKANYASAG	Parakanyasag	Indihiang	1,31
6	SUKAMAJU KALER	Sukamaju Kaler	Indihiang	2,14
7	TUGURAJA	Tuguraja	Cihideung	3,90
8	CIKALANG	Cikalang	Tawang	2,80
9	PURBARATU	Purbaratu	Purbaratu	9,30
10	SUKAJAYA	Sukajaya	Purbaratu	14,00
11	SUKAMENAK	Sukamenak	Purbaratu	9,23
12	MUGARSARI	Mugarsari	Tamansari	4,73
13	SETIAWARGI	Setiawargi	Tamansari	2,25
14	SUMERANG	Sumelap-Ciherang	Tamansari-	17,00



No.	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
15	CIAKAR	Ciakar	Cibeureum	11,60
16	KOTABARU	Kotabaru	Cibeureum	6,05
17	SETIAJAYA	Setiajaya	Cibeureum	9,77
18	MARGABAKTI	Margabakti	Cibeureum	4,36
19	BUNGURSARI	Bungursari	Bungursari	3,22
20	SUKAJAYA	Sukajaya	Bungursari	1,22
21	CIBEUTI	Cibeuti	Kawalu	5,00
22	URUG	Urug	Kawalu	11,50
23	LEUWILIANG	Leuwiliang	Kawalu	2,80
24	TANJUNG	Tanjung	Kawalu	3,47
25	CIGANTANG	Cigantang	Mangkubumi	0,45
26	KARIKIL	Karikil	Mangkubumi	5,31
JUMLAH				168,49

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022.

Prioritas selanjutnya dalam urusan perumahan dan permukiman adalah verifikasi dan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan formal. Dari *baseline* jumlah perumahan formal tahun 2017 sejumlah 269 unit perumahan sampai dengan tahun 2021 sudah 50 unit perumahan yang telah diserahkan (18,58 %) dan yang telah diverifikasi sebanyak 77 unit perumahan (28,62 %).

Tabel 2.45.
Jumlah Perumahan yang Telah Serah dan Verifikasi
Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Kegiatan	Satuan	Basis Data	Jumlah				Total
			2018	2019	2020	2021	
Verifikasi PSU	Unit	0	41	20	0	16	77
Serah Terima PSU	Unit	14	5	19	0	12	50

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022.

2.1.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Urusan keamanan, ketertiban umum dan Linmas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Data capaian indikator urusan keamanan, ketertiban umum dan linmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan
Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian kualitas pengembangan	%	100	100	100	100	100	100	—*	—*

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	kehidupan berbangsa dan bernegara									
2	Persentase capaian koordinasi trantibmas dan pencegahan tindak criminal	%	100	100	100	100	100	100	_*	_*
3	Persentase penyelesaian potensi konflik kerukunan umat beragama	%	100	100	100	100	100	100	_*	_*
4	Persentase capaian pembinaan kerukunan umat beragama	%	100	100	100	100	100	100	_*	_*
5	Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase capaian pendidikan politik bagi masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu	%	83	80	84	86	_**	_**	_**	_**
8	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000)	point	1,13	1,018	1,14	1,02	1,15	0,88	1,16	2,27
9	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000)	point	55,8	54,66	56,10	60,49	56,3	52,23	56,3	53,95
10	Persentase Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%)	%	27	49,26	28	22,95	29	22,95	30	26,30
11	Persentase penanganan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	70	86	75	84	80	91,83	90	100
12	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	%	65	75	70	100	75	100	80	100
13	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%)	%	88	100	90	100	94	100	96	100
14	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%)	%	0,00557	0,00557	0,00558	0,00557	0,00561	0,00529	0,00563	0,00539
15	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	%	80	96,1	85	95,87	90	95,87	95	96,1
16	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	84	84,8	84,5	84	85	84,61	85,5	85,71
17	Persentase penegakan perda dan perkada	%	80	86	85	84,84	85	98,54	85,5	86,13
18	Persentase pembinaan dalam penegakan peraturan daerah	%	70	100	75	100	80	100	90	100
19	Persentase rekomendasi penindakan yang ditangani	%	80	81,75	85	85	90	90	95	100
20	Angka Kriminalitas	Point	3,7	5,11	3,2	5,51	3,5	5,88	3	5,88
21	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	%	88	100	90	100	94	100	96	100
22	Persentase penanganan	%	80	94	85	100	90	100	95	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	perlindungan masyarakat									
23	Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani	%	80	100	85	100	90	100	95	100
24	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	65	9,52 -65	70	1,26 - 100	75	8,76	80 - 1,5	-8,76
25	Persentase ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Capaian pelatihan anggota linmas	%	18	18	28	65,22	38	71,20	48	71,20
27	Capaian pos siskamling aktif per RW	%	50	50	60	94,85	70	94,85	85	94,85
28	Capaian penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan	%	80	94	85	100	90	100	95	100
29	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi	%	23	24	25	75	30	78,26	30	76,2
30	Persentase aktifitas pencegahan rawan kebakaran yang dilakukan	%	20	20	20	100	40	100	50	100
31	Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang tangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,BPBD, KesbangPol , 2022.

Berkaitan dengan penanganan bencana, berikut jumlah kejadian bencana di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.47.
Kejadian Bencana Tahun 2018-2021

No.	Bencana	Kejadian			
		2018	2019	2020	2021
1.	Angin Putting Beliung	4	11	-	3
2.	Pohom tumbang	16	26	13	43
3.	Rumah Roboh	49	49	75	94
4.	Gempa bumi	1	3	2	0
5.	Longsor	20	34	28	37
6.	Banjir	11	12	2	6
7.	Tersambar petir	5	10	6	4
8.	Gerakan Tanah	3	4	12	3
9.	Kekeringan	116	-	-	-
10.	Pandemi Covid-19	-	-	1	1
	Jumlah	225	149	138	214

Sumber :BPBD Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.1.6. Urusan Sosial

Capaian layanan urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	67	66,88	70	79,89	74	79,9	77	79,9
2	Capaian Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	14	13,95	15	13,95	15	15	16	16
4	Capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Komunitas Binaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 521.003 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 342.585 orang 65,75%, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 178.418 orang atau 33,46 %. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.49.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Kategori	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	301.619	322.887	343 285	342 585
1. Bekerja	280.959	301.081	315 844	316 349
2. Pengangguran Terbuka	20.660	21.806	27 441	26 236
Bukan Angkatan Kerja	179.049	170.976	172 612	178 418
Jumlah	480.668	493.863	515 897	521 003
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	93,15	93,25	92,01	92,34

Kategori	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	62,75	65,38	66,54	65,75
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,85	6,75	7,99	7,66

Sumber : Data Sakernas BPS

Merujuk pada Data SAKERNAS Tahun 2021 di atas, total Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 342.585 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 316.844 orang atau 92,34 persen merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 26.236 orang merupakan pengangguran, yang artinya bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar 7,66 persen.

Tabel 2.50.
Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Kategori	2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bekerja	280.959	93,15	301.081	93,25	315.844	92,01	316. 349	92,34
Pengangguran	20.660	6,85	21.806	6,75	27.441	7,99	26.236	7,66
Angkatan Kerja	301.619	100,00	322.887	100	343.285	100	342 585	100

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain: Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufaktur; dan Jasa.

Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 58 LPK.

Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.51.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2021

No	Indikator	Satuan	TAHUN							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,20	6,85	5,6	6,75	8,5	7,99	7,72	7,66
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,69	62,75	65,90	65,38	66,12	66,54	66,50	66,54
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	40	45,83	45	57,55	60	23,68	100	23
4	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	100	87	100	100	100	0	150	163
5	Persentase kesempatan kerja yang	%	15	n/a	17,30	17,75	17	18,83	-	-

No	Indikator	Satuan	TAHUN							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	terpenuhi terhadap permintaan									
6	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	85,70	n/a	85,70	100	_*	_*	_*	_*
7	Persentase implementasi hubungan industrial dan jaminan sosial terhadap total perusahaan	%	21,40	n/a	10	10,71	_*	-	_*	_*
8	Persentase perusahaan yang memiliki lembaga ketenagakerjaan	%	_*	_*	_*	_*	15	15,5	20	15,58
9	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	_*	_*	_*	_*	-	-	100	100
10	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	_*	_*	_*	_*	-	-	43,32	24,96

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2018 - 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	SKOR	500	n/a	700	699.7	700	n/a	800	756

Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.2.3. Pangan

Tugas pemerintah daerah di bidang pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penanganan kerawanan pangan, menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis, dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi

seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH Kota Tasikmalaya tahun 2020 mencapai 91,6 telah mencapai nilai optimal yaitu nilai skor PPH ideal minimal 90. Kajian ini menyimpulkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kota Tasikmalaya sudah cukup berkualitas. Berikut capaian pelayanan urusan pangan Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.53.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pangan Tahun 2018 - 2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	75	104,35	80	110,5	85	121,6	_*	_*
2	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	92	98	95	100,6	98	100,6	_*	_*
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	%	86	86,11	87	75	88	66,67	_*	_*
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	78	33,07	81	82,09	_*	_*	_*	_*
5	Peningkatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	%	68	65,17	69	43,39	_*	_*	_*	_*
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	76	80	77	80	81	100	_*	_*
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	47	6,25	48	81,25	49	0	_*	_*
8	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	poin	_*	_*	_*	_*	_*	_*	91	91,3
9	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	poin	_*	_*	_*	_*	_*	_*	84	91,5
10	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	unit	_*	_*	_*	_*	_*	_*	3	0
11	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	88	110,6
12	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	71	124,9
13	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	50	66,67
14	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	79	100

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2022.

2.1.3.2.4. Pertanian

Capaian layanan urusan pertanian di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54.
Pelayanan Umum Urusan Pertanian Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	30	58,17	32	62,68	33	62,68	34	-
2	Capaian pengelolaan data pertanian (realisasi pendataan pertanian terhadap target)	%	-*	10	-*	20	-*	100	-*	-
3	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	1	100	1	100	1	100	1	-
4	Penyelesaian izin lokasi	%	1	93,33	1	93,33	1	62,68	1	-
5	Persentase pengelolaan penatagunaan tanah	%	10	10	20	20	20	20	60	50

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Perkembangan pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	Ha	7,94	8,56	9,44	10,3	-*	-*	-*	-*
2	Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani	%	61,8	59,35	64,8	71,04	-*	-*	-*	-*
3	Capaian Indeks Kualitas Air dan Udara	Point	100	(IKA=49,03, Sedikit Memenuhi), (IKU=71.385, Cukup))	100	(IKA = 51,83 Sedikit Memenuhi), (IKU = 81,32, Cukup) / Baik	-*	-*	-*	-*
4	Cakupan Pengendalian Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
5	Persentase Pengelolaan Sampah	%	70,46	62,34	73,46	71,04	-*	-*	-*	-*
6	Capaian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	%	27,78	22,22	50	27,78	-*	-*	-*	-*
7	Persentase Luas Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	13,56	23,99	38,98	46,24	-*	-*	-*	-*
8	Capaian Pemantauan Kualitas Lingkungan	%	26,04	34,38	100	35,18	-*	-*	-*	-*
9	Capaian UKM Berpotensi	%	17,39	21,74	39,13	0	-*	-*	-*	-*

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Pencemaran yang Ditangani									
10	Capaian Volume Sampah yang terangkut ke TPA	%	57,93	56,76	59,43	58,98	_*	_*	_*	_*
11	Capaian Pengurangan Sampah	%	12,53	2,59	14,03	12,05	_*	_*	_*	_*
12	Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Dokumen	_**	_**	_**	_**	_**	_**	50	50
13	Capaian Luas RTH yang dikelola	Ha	_**	_**	_**	_**	_**	_**	100	100
14	Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	100	100
15	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	100	150

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

_* Indikator Lama

_** Indikator Baru

Ruang lingkup urusan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan RTH

Dalam rangka menambah luas ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya, maka dinas lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pembebasan bukit, dengan rincian penambahan luas ditampilkan pada tabel.

Tabel 2.56.
Pembebasan Lahan untuk RTH

No.	Nama Gunung	Lokasi		Luas (m²)	Tahun Pembebasan	Ket.
		Kelurahan	Kecamatan			
1	Gunung Kokosan	Cibunigeulis	Bungursari	35.796	2008, 2009, 2011, 2015	Setda, KPLH
2	Gunung Kiara	Bungursari	Bungursari	10.162	2011	KPLH
3	Gunung Tengah	Bungursari	Bungursari	4.555	2013	KPLH
4	Gunung Pondok	Bungursari	Bungursari	5.410	2013, 2014	KPLH
5	Gunung Hanjuang	Cibunigeulis	Bungursari	6.707	2013	KPLH
6	Gunung Bondan	Sukajaya	Bungursari	1.027	2014	KLH
7	Gunung Jambore	Sukalaksana	Bungursari	3.965	2014	KLH
8	Gunung Bubut	Cipawitra	Mangkubumi	2.200	2017	DLH
9	Gunung Putri	Cibunigeulis	Bungursari	12.677	2018	DLH
10	Gunung Cilamajang	Cipawitra	Mangkubumi	20.453	2017, 2018, 2019	DLH
Jumlah				102.952		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Selian bukit, yang termasuk dalam ruang terbuka hijau adalah Taman Pemakaman Umum (TPU). Berdasarkan hasil survey Luas TPU di Kota Tasikmalaya yaitu 101,94 Ha. Yang terdiri dari TPU milik masyarakat 89,67 Ha dan TPU Milik Pemerintah 12,27 Ha.

Tabel 2.57.
Taman Kota Tasikmalaya Tahun 2022

No	Nama	Luas (Ha)
1	Taman Dadaha	4,2592
2	Taman Lapang Cigeureung	0,7661
3	Alun Alun Indihiang	0,6104
4	Taman STIA	0,3983
5	Taman Unsil	1,0653
6	Taman Kota	0,5524
7	Alun Alun	1,2789
8	Taman Mesjid Agung	0,2998
9	Taman Bale Wiwitan	0,3231
10	Pulau Jalan Padayungan	0,0143
11	Taman Batas Kota Indihiang	0,061
12	Taman Batas Karangresik	0,0552
13	Pulau Jalan Simpang	0,015276
14	Linggajaya	
15	Pulau Jalan Tugu HZ. Mustofa	0,048531
16	Taman Kelurahan	0,478663
17	Panglayungan	
18	Pulau Rancabango	0,103591
19	Taman Warga Cigeureung	0,12254
20	Taman Kantor Kecamatan Bungursari	0,070313
21	Bungursari	
22	Taman Bale Kota	1,63562
23	Taman Rancabango	0,084054
24	Taman Lapang Sukamulya	0,386429
25	Taman Lapang Indihiang	0,71163
26	Taman Lapang Karikil	0,511412
27	Taman Lapang Singkup	0,356596
28	Taman Lapang Cibeureum	0,391096
29	Taman Lapang Kersamenak	0,621324
30	Taman Lapang Karanganyar	0,555187
31	Taman Lapang Urug	0,76202
32	Taman Lapang Sukamanah	0,444031
33	Taman Lapang Parakannyasag	0,201526
34	Taman Lapang Linggajaya	0,525796
35	Taman Lapang Mangkubumi Babakan Kadu	0,303121
36	Taman Lapang Cipari	0,434877
37	Taman Makam Pahlawan	0,842326
38	Pulau Jalan Cibogor	0,013631
39	Pulau Jalan Sutisna Senjaya	0,009486
40	Pulau Jalan Tanuwijaya	0,007839
41	Pulau Jalan Tentara Pelajar	0,004891
42	Tugu Asmaul Husna	0,003997
43	Tugu Kelom Geulis	0,006178
44	Tugu Canting Batik	0,007992
45	Pulau Jalan RE. Martadinata	0,009398
46	Tugu Simpang Lima	0,004373

No	Nama	Luas (Ha)
47	Pulau Jalan Tarumanagara	0,001726
48	Pulau Jalan Cilolohan	0,00262
49	Pulau Jalan Gn. Sabeulah	0,001673
50	Taman Lapang Cintelangu Cihurip	0,354877
	Total	19,717823

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

2. Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan, pemantauan kualitas air dan udara, penanganan pengaduan, pemantauan ijin lingkungan, dan pelaksanaan kampung iklim. Berikut beberapa data dan penjelasan mengenai pengendalian dan pengawasan lingkungan;

Pemantauan kualitas air dan udara

Tabel 2.58.
Perhitungan Indeks Kualitas Air Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021

No	Lokasi Sampel	IP	IKA Existing	NSF
1	Sungai Ciloseh Hulu	Ringan	Memenuhi	78,35247209
2	Sungai Ciloseh Tengah	Sedang	Ringan	66,50133187
3	Sungai Ciloseh Hilir	Ringan	Memenuhi	70,79967655
4	Sungai Cikalang Hulu	Ringan	Memenuhi	71,32647393
5	Sungai Cikalang Tengah	Sedang	Ringan	67,55471757
6	Sungai Cikalang Hilir	Ringan	Ringan	63,8308001
7	Sungai Cilamajang Hulu	Ringan	Memenuhi	73,84768157
8	Sungai Cilamajang Tengah	Ringan	Memenuhi	73,56240048
9	Sungai Cilamajang Hilir	Ringan	Memenuhi	76,93233216
10	Sungai Cibangbay Hulu	Ringan	Memenuhi	76,8981448
11	Sungai Cibangbay Tengah	Ringan	Memenuhi	76,45836893
12	Sungai Cibangbay Hilir	Ringan	Memenuhi	72,37863853
Avg NSF				72,37025321
Status				Memenuhi Baku Mutu

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Tabel 2.59.
Indeks Kualitas Udara Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021

Peruntukan	Tahap I Kadar SO ₂	Tahap I Kadar NO ₂	Tahap II Kadar SO ₂	Tahap II Kadar NO ₂	Ieu SO ₂	Ieu NO ₂	Ieu NO ₂ & SO ₂	IKU	Ieu Gabungan	IKU Gabungan	Ket
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³							
Pemukiman	17,50	5,20	10,13	6,32	0,69	0,14	0,42	82,37	0,49	78,20	Baik
Transportasi	9,85	20,45	14,12	20,98	0,60	0,52	0,56	74,53			
Industri	23,27	8,71	12,68	7,93	0,90	0,21	0,55	74,81			
Perkantoran	18,42	11,26	5,29	11,80	0,59	0,29	0,44	81,09			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Indeks kualitas udara berdasarkan lokasi sampel Permukiman, Transportasi, Industri dan Perkantoran. Nilai IKU paling tinggi diperoleh dari lokasi kawasan permukiman dan paling rendah di kawasan transportasi. Hal tersebut menggambarkan di area permukiman memiliki kualitas udara lebih baik dibandingkan di area transportasi.

Tabel 2.60.
Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)

No.	Indikator Kinerja	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	45-64 (cukup /baik)	45,83	45-64 (cukup /baik)	51,38	45-64 (cukup /baik)	72,37	45-64 (cukup /baik)	64,52
2	Indeks Kualitas Udara	45-64 (cukup /baik)	71,85	45-64 (cukup /baik)	81,32	45-64 (cukup /baik)	78,20	45-64 (cukup /baik)	83,82

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Nilai IKA Kota Tasikmalaya yaitu 72,37 dengan klasifikasi predikat memenuhi baku mutu. Nilai IKU 78,20 dengan klasifikasi baik.

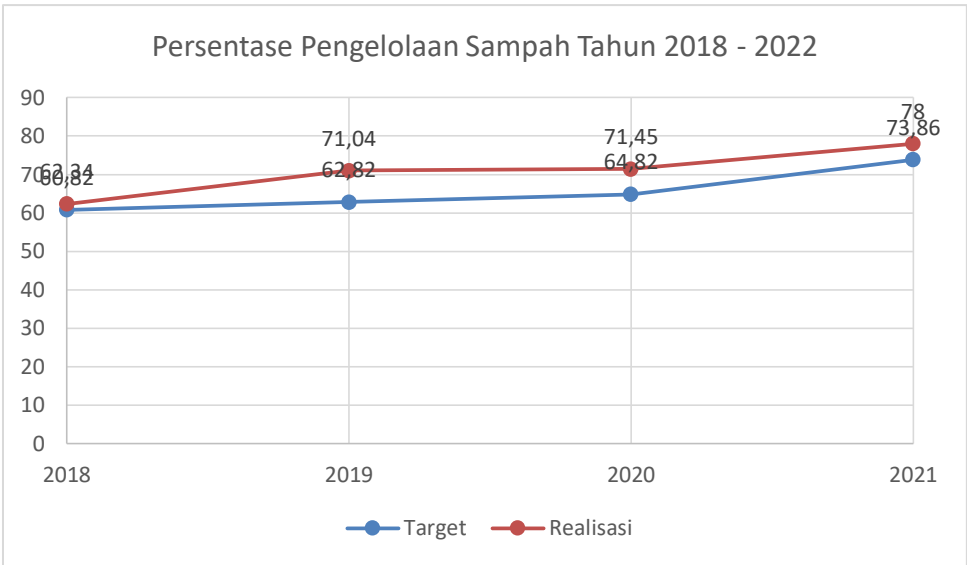
Penanganan Pengaduan

Tabel 2.61.
Penanganan Pengaduan Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun				Jumlah
	2018	2019	2020	2021	
1	2	11	4	6	23

3. Pengelolaan Persampahan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka setiap tahunnya jumlah sampah akan semakin meningkat pula. Timbulan sampah penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yaitu sebesar 315,11 Ton/Hari atau 114.650,15 Ton. Sampah masuk ke TPA tahun 2021 sebanyak 70.413,33 Ton, atau 61,23 % dan sampah yang dikuragi tahun 14.519,60 Ton atau 12,61%. Rata-rata timbulan sampah masyarakat Kota Tasikmalaya 3,63 L/Jiwa/Hari (Dokumen Kajian Timbulan Sampah, 2017).

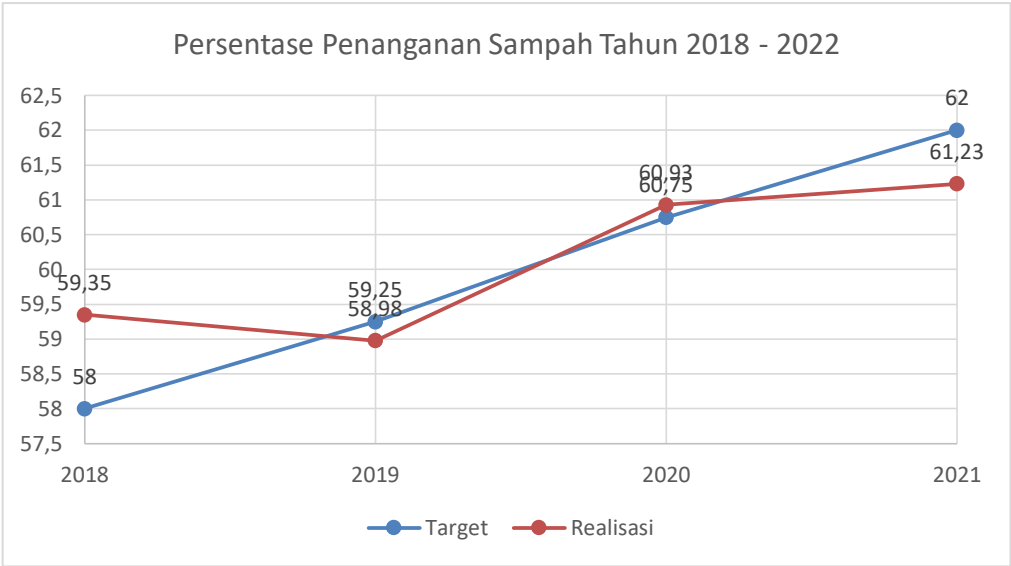


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 2.37.
Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2021

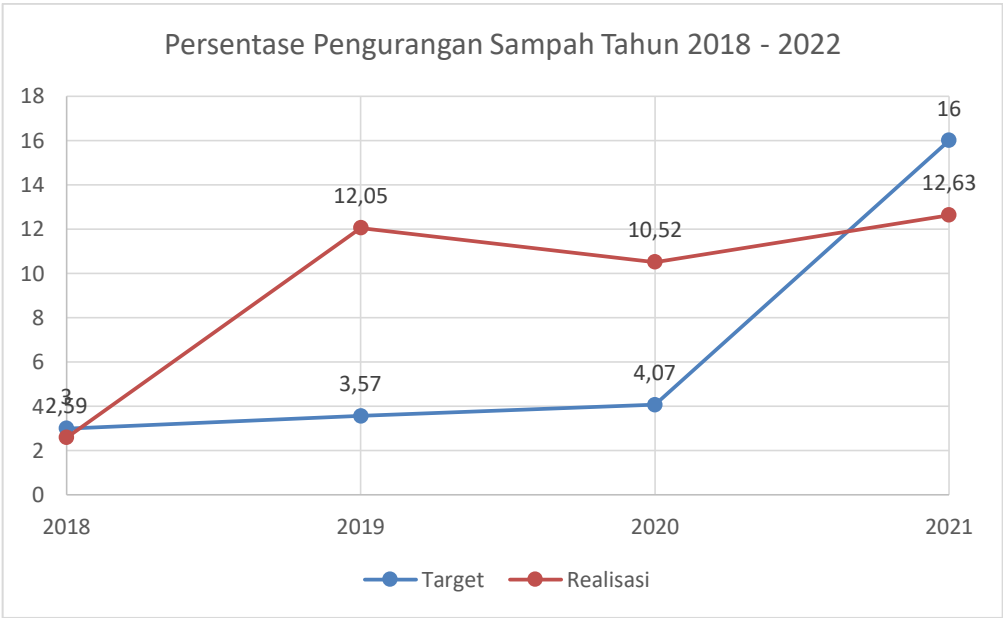
Apabila melihat Gambar 2.26. Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2021, trend kinerja pengelolaan sampah Tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 capaian pengelolaan sampah sebesar 58,82% dengan capaian pengurangan 2,57% dan penanganan 56,25%, dan di Tahun 2021 pengelolaan sampah mengalami peningkatan 15,04% atau menjadi 73,86%, dan pengurangan sampah mengalami kenaikan sebesar 10,06% menjadi 12,63%. Sedangkan untuk penanganan sampah naik sebesar 4,98% atau menjadi 61,23%.

Apabila membandingkan kenaikan capaian antara penanganan dan pengurangan sampah, maka pengurangan sampah memberikan kontribusi kenaikan sampah secara signifikan dari tahun 2018-2021. Namun jika membandingkan capaian terhadap target kedua komponen tersebut di tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai target, namun setelah dilakukan revisi Renstra dan melakukan perubahan target di tahun 2021 capaian kinerja pengelolaan sampah tidak memenuhi target. Hal tersebut dapat disebabkan di tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19, sehingga mempengaruhi kegiatan pengurangan sampah (terjadi penurunan capaian dari tahun 2019 ke 2020 sebesar -1,53%).



Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 2.38.
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2018-2021



Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 2.39.
Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2018-2021

Tabel 2.62.
Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2021

No.	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Dump Truck	6	7	7	20
2	Arm roll		8	4	12
3	Truck Engkel			1	1
4	Pick Up			1	1
5	Motor Roda 3	7	11		18
Jumlah		13	18	13	52

Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Selain sarana pengangkutan sampah, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan sarana alat berat. Berikut sarana alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.63.
Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2021

No.	Jenis	Kondisi				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Buldozer D31		1			1
2	Buldozer D39			1		1
3	Buldozer Jondear				1	1
4	Eksavator Liu Gong			1		1
5	Eksavator Pindad		1			1
Jumlah			2	2	1	5

Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Kondisi TPA saat ini masih menggunakan open dumping, keterbatasan SDM dan pelaksanaan SOP yang belum maksimal menjadi kendala dalam pelaksanaan operasional TPA. Sesuai dengan sertifikat lahan, luas lahan di TPA, yaitu 6,5 Ha. Namun jika hasil pengukuran mengikuti patok yang ada di TPA yaitu seluas 8 Ha. Permasalahan luas lahan TPA perlu dilegalkan agar kepemilikan lahan TPA jelas luasnya. Selain itu, berdasarkan kajian perluasan TPA, tahun 2017, TPA Ciangir dibutuhkan perluasan 9,9 Ha. Karena seringkali di TPA terdapat pencemaran akibat kegiatan di TPA dan kapasitas TPA sudah melebihi kapasitas. Sampah masuk ke TPA tahun 2021 sebanyak 70.413,33 Ton atau di tahun 2021 sampah masuk 192,91 Ton/hari atau hamper 200 Ton/hari.

Dalam rangka optimalisasi persampahan telah dikembangkan gerakan 3R dengan melalui kegiatan bank sampah di mulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW sampai dengan tingkat kecamatan. Pada Tahun 2018 Kota Tasikmalaya memiliki 10 Bank Sampah Unit, di tahun 2018 di bentuk Bank sampah induk di Komlek Bali Wiwitan. Dan pada Tahun 2020 17 bank sampah yang tersebar di setiap kecamatan, dengan rincian 2 Bank Sampah Induk dan 15 Bank Sampah Unit dan di Tahun 2021 Bank Sampah Unit bertambah 1 (satu) menjadi 16 Unit. Berikut rinciannya.

Tabel 2.64.
Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Jenis Bank Sampah	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Bank Sampah Induk		1	2	2
Bank Sampah Unit	10	10	15	16
Jumlah	10	11	17	18

Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2018-2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.65.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	%	96	98,43	96,50	99,47	97	98,77	97,5	101,1
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	60	78,43	65,00	99,6	70	96,89	75	101,6
3	Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim (buah)	Lembar	178	261	190,00	331	200	400	210	471
4	Kepemilikan KTP (orang)	Orang	477.099	510.564	486.641	636.570	501.338	654.423	506.351	538.841
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000)	Poin	373,2	317,3	385,70	226,108	410,7	398,59	373,2	410,3
6	Ketersediaan database kependudukan skala kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik
9	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	75	88,43	76,00	97,94	76	97,94	77	87,04
10	Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	%	65	78,43	66,00	99,80	67	98,45	68	100,8
11	Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	-	82,29	80	91,16	85	99,6	90	100,8
12	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	20	27,32	40	100	60	100	80	100
13	Persentase Penerbitan Akte Pencatatan Sipil	%	20	21,34	40	100	60	100	80	100
14	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	20	20	40	100	60	100	80	100
15	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kependudukan	%	20	20	40	40,00	60	100	80	100
16	Persentase Kerjasama Administrasi Kependudukan	%	0	2	25	66,67	75	100	100	100
17	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	-	2	25	100	75	100	100	100
18	Persentase Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan	%	-	2	2597	100	75	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022.

Salahsatu pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan KTP-elektronik. Sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66.

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-Elektronik Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Wajib KTP	Perekaman	Belum Perekaman
		L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cihideung	36.871	36.497	73.368	54.771	52.558	2.213
2	Cipedes	41.928	40.591	82.619	61.112	59.077	2.035
3	Tawang	31.858	32.029	63.887	48.533	46.378	2.155
4	Indihiang	29.108	28.500	57.608	42.509	41.063	1.446
5	Kawalu	50.234	47.618	97.852	71.112	69.082	2.030
6	Cibeureum	34.630	33.926	68.556	51.313	49.388	1.925
7	Tamansari	39.255	37.441	76.696	55.373	54.117	1.256
8	Mangkubumi	49.404	48.024	97.428	71.024	68.762	2.262
9	Bungursari	30.113	29.065	59.178	42.791	41.188	1.603
10	Purbaratu	23.290	22.272	45.562	33.658	32.949	709
JUMLAH		365.766	366.691	356.063	722.754	514.562	17.634

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kota Tasikmalaya Semester II Tahun 2021, 2021.

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2.67.

Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga	Buah	69	69	69	69
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan	Buah	308	308	308	276
3	Jumlah LSM (buah)	Buah	218	218	218	218
4	LPM Berprestasi	Persen	50	50	-	-
5	PKK aktif	Persen	100	100	100	100
6	Posyandu aktif	Unit	819	864	-	-
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program	Persen	30	-	-	-
8	Penerima Manfaat dari Program Gema Madani :					
	a. Bidang Infrastruktur	Kelompok/Paket	-	-	-	413
	b. Bidang Ekonomi	Orang	-	-	-	1.66
	c. Bidang Sosial	Orang	-	-	-	5.22

Sumber : Bappelitbangda, Diolah, 2022

Adapun untuk capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat tahun 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Setda Kota Tasikmalaya

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.68.
Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018 – 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Layanan Keluarga Berencana	%	65	72,34	66	72,37	66	72,36	67	63,60
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	%	65	72,34	66	72,37	72,50	72,36	67	72,37
3	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	1	1,26	1	1,17	1	1,22	1	0,60
4	Persentase Peran serta masyarakat dlm pembangunan kesejahteraan keluarga	%	100	100	100	75,60	100	100	100	100
5	Cakupan data mikro keluarga yang akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	96

Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.2.9. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perhubungan

Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		Target	2021
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota	%	65,49	62,59	66,75	69,84	47,25	65,06	_*	_*
2	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	%	52,76	51,73	63,45	70,98	74,23	88,21	_*	_*
3	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan sesuai yang ditargetkan	%	20	24	40	48,00	60	92	_*	_*
4	Cakupan terlayani angkutan umum	%	85,81	79,46	86,90	90,54	88,45	84,41	_*	_*
5	Cakupan Manajemen Angkutan	%	_*	79,71	84,06	85,51	86,96	85,51	_*	_*
6	Cakupan Bina Usaha Angkutan	%	_*	112,19	83,72	121,78	83,92	82,12	_*	_*
7	Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan	%	_*	107,69	92,91	105,06	94,49	85,62	_*	_*
8	Penurunan waktu antrian kendaraan pada jaringan jalan pusat kota	LoS	0	0,3	0,123	0,3	0,212	0,3	_*	_*
9	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota	%	_*	_*	75	91,67	83,33	91,67	_*	_*
10	Capaian kualitas layanan lalu lintas pada ruas jalan pusat kota	%	_*	_*	75	91,67	83,33	91,67	_*	_*
11	Persentase kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	82,34	88,03
12	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	50	53,57
13	Persentase pelayanan andalin	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	100	160
14	Persentase pemenuhan standar	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	95,25	76,7

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	keselamatan angkutan									
15	Persentase Pelayanan angkutan umum	%	__	__	__	__	__	__	84,12	61,84

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2022.

Dari data pada tabel 2.71. secara umum, capaian indikator pelayanan urusan perhubungan meningkat dalam kurun waktu 2018 – 2021. Walaupun terdapat beberapa yang mengalami penurunan, seperti persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota, Cakupan terlayani angkutan umum, Cakupan Bina Usaha Angkutan dan Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan.

Capaian persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota merupakan Realisasi ruas jalan memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan sesuai SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017 dengan tingkat layanan angkutan umum. Tampak pada tabel 2.48, data sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup berarti pada kinerja layanan angkutan umum, meliputi cakupan terlayani angkutan umum yang turun dari 104,11 menjadi 84,41%, kemudian cakupan bina usaha angkutan turun dari 121,78% menjadi 82,12% dan cakupan sarana dan prasarana angkutan turun dari 105,06% menjadi 85,62%. Dengan demikian, persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan turun dari 69,84% menjadi 65,06%.

Tidak tercapainya indikator di bidang angkutan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan pengendalian penyebaran pendemi covid-19 dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun yang mana dampak lanjutannya mempengaruhi terhadap capaian indikator di bidang angkutan. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh :

1. Menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berdampak terhadap disiplin pemilik/awak angkutan kota untuk memperpanjang ijin trayek;
2. Eksistensi kendaraan angkutan penumpang berbasis online/ojol;
3. Terdapat kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap capaian di bidang angkutan tidak dilaksanakan mengingat kegiatan tidak memungkinkan dilaksanakan pada situasi masa pandemi.

Adapun untuk tahun 2021, peningkatan capaian indikator pelayanan urusan perhubungan digambarkan oleh peningkatan hasil pembangunan urusan perhubungan selama kurun waktu tahun 2017-2021 sebagaimana disajikan pada tabel 2.72, sebagai berikut :

Tabel 2.70.
Pembangunan Urusan Perhubungan
Dari Tahun 2018-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rambu terpasang	Unit	1.867	1.877	2002	2006
2	Jumlah Marka Jalan terpasang	M^2	1.571,2	1.571,2	3.051,2	3.622,2
3	Jumlah Traffic light terpasang	Lokasi	19	20	21	21
4	Jumlah Warning Light terpasang	Lokasi	48	49	49	49
5	Jumlah PJU terpasang	Unit	8.900	9.749	10.099	11.030
6	Jumlah Halte/shelter terbangun	Unit	27*	33	33	33
7	Jumlah Guardrail terbangun	m²	261	261	261	261
8	Jumlah ATCS terpasang	Unit	19	23	24	24
9	Jumlah Terminal terbangun	Buah	4	5	5	5

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2022.
Keterangan : *Pembongkaran

Tabel 2.71.
Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan	2020			2021		
			Terpasang	Kondisi		Terpasang	Kondisi	
				Baik	Rusak		Baik	Rusak
1	Jalan Nasional	230	175	120	55	175	120	55
2	Jalan Provinsi	726	256	135	121	256	135	121
3	Jalan Kota	1.750	1.571	787	784	1.575	791	784
Jumlah		2.706	2.002	1.042	960	2.006	1.046	960

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022.

Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.706 unit. Saat ini telah terpasang sebanyak 2.006 unit di lokasi jalan Nasional, Provinsi dan Kota, dimana 1.046 unit kondisi baik, 960 unit kondisi rusak. Dengan demikian, rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang sebanyak 700 unit dan 960 diperlukan perbaikan/penggantian.

Tabel 2.72.
Marka Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (m²)	2020				2021			
			Terpasang (m²)	Kondisi			Terpasang (m²)	Kondisi		
				Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)		Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)
1	Jalan Nasional	947,2	807	50	20	30	807	50	20	30



2	Jalan Provinsi	3.654,1	1.543	30	40	30	1.543	30	40	30
3	Jalan Kota	4.022,29	701,2	60	20	20	1.272,2	85	20	20
Jumlah		8.623,59	3.051,2				3.622,2			

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Kota Tasikmalaya telah membuat marka jalan sepanjang 3.622,2 meter persegi. Marka jalan dalam kondisi baik sebagian besar terletak di Jalan Kota sebanyak 85% dalam kondisi baik, sedangkan kondisi marka yang pudar terletak disekitar jalan nasional dan provinsi sebesar 30%. Kebutuhan marka jalan yang harus dibuat sebesar 8.623,59 meter persegi yang tersebar di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, sehingga kekurangan pembangunan marka sepanjang 5.001,39 m².

Tabel 2.73.
Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (unit)	2020		2021	
			Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)	Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)
1	Jalan Nasional	552	240	232	240	232
2	Jalan Provinsi	1.844	641	417	676	452
3	Jalan Kota	11.604	9.218	8.870	10.114	10.087
Jumlah		14.000	10.099	10.519	11.030	10.771

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Jumlah PJU dibutuhkan di Kota Tasikmalaya sebanyak 14.000 unit untuk jalan Nasional, Provinsi dan Kota. Adapun PJU yang terpasang sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 11.030 unit, dengan 97,65% (10.771 unit) berfungsi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, masih dibutuhkan pemasangan PJU sebanyak 2.970 unit.

Tabel 2.74.
Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya

No	Fasilitas	Dibutuhkan (buah)	2020		2021	
			Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)
1	Jalan Nasional	30	19	Baik	20	Baik
2	Jalan Provinsi	70	43	Baik	46	Baik
3	Jalan Kota	120	81	Baik	86	Baik
Jumlah		220	143	Baik	152	Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya dibutuhkan 220 buah, dan telah terpasang sampai tahun 2021 yaitu 152 buah dengan kondisi baik, sehingga masih perlu dilakukan pemasangan Zebra Cross sebanyak 68 buah.

Tabel 2.75.
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Jenis lokasi	Dibutuhkan (buah)	2020			2021		
			Terpasang (buah)	Kondisi (buah)		Terpasang (buah)	Kondisi (buah)	Terpasang (buah)
				Berfungsi	Tidak		Berfungsi	
1	Jalan Nasional	8	6	6	-	6	6	
2	Jalan Provinsi	7	4	4	-	4	4	
3	Jalan Kota	12	8	7	1	8	7	1
Jumlah		27	18	17	1	18	17	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2021

Berdasarkan kebutuhan ruas jalan yang berada di Kota Tasikmalaya, diperlukan 27 buah alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang telah terpasang sebanyak 18 unit dengan kondisi 17 berfungsi dan 1 tidak berfungsi. Masih terdapat selesih kebutuhan alat pemberi isyarat yaitu sebanyak 9 buah

Tabel 2.76.
Guard Rail (Pagar Pengaman) Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (meter)	Tahun	
			2020	2021
1	Jalan Nasional	-	-	0
2	Jalan Provinsi	700	200	200
3	Jalan Kota	300	61	61
Jumlah		1.000	261	261

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Tabel 2.77.
Cermin Tikungan Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Tahun	
			2020	2021
1	Jalan Nasional	4	-	0
2	Jalan Provinsi	6	-	0
3	Jalan Kota	20	2	2
Jumlah		30	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022



Berdasarkan kebutuhan untuk keselamatan jalan, fasilitas cermin tikungan sebanyak 30 buah, yang terpasang baru 2 buah. Sehingga masih diperlukan pemasangan cermin tingkungan sebanyak 28 buah.

Tabel 2.78
Pita Penggadu Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)	
			2020	2021
1	Jalan Nasional	10	6	6
2	Jalan Provinsi	8	4	4
3	Jalan Kota	25	12	12
Jumlah		43	22	22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Fasilitas perparkiran menurut jenis dan kondisinya sampai dengan tahun 2021 Ruang Parkir pada badan jalan direncanakan 8,8 KM dan telah digunakan 7,825 Km. Sehingga hampir keseluruhan telah digunakan (92,06%).

Tabel 2.79.
Ruang Parkir Pada Badan Jalan
Tahun 2021

No	Lokasi	Jml Ruas	Panjang jalan yg terdapat rambu parkir (Km)		Panjang jalan yg digunakan parkir (Km)	
			2020	2021	2020	2021
1	Jalan Nasional	-	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	1	-	-	0,25	0,25
3	Jalan Kota	33	8,8	8,8	7,8	7,8
Jumlah		34	8,8	8,8	7,825	7,825

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022.

Prasarana terminal angkutan penumpang pada tahun 2021_disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.80.
Terminal Angkutan Penumpang
Tahun 2021

No.	Nama Terminal	Tipe	Luas (Ha)	Instansi Pengelola
1.	Terminal Indihiang	A	7,50	Kementerian PHB
2.	Terminal Pancasila	C	0,30	Dishub
3.	Terminal Padayungan	C	0,23	Dishub
4.	Terminal Cikurubuk	C	0,29	Dishub
5.	Terminal Awipari	C	1,49	Dishub

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Kota Tasikmalaya memiliki 5 terminal, 1 terminal tipe A, dan 4 terminal tipe C. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018 - 2022,

direncanakan akan dibangun terminal tipe C Batunungku. Namun sampai dengan tahun 2021 pembangunan terminal Batunungku baru terealisasi 20%.

Untuk pelayanan angkutan penumpang umum khususnya angkutan kota pada tahun 2021 terdapat 16 Tempat Pemberhentian Kendaraan (TPK) yang tersebar berdasarkan jalur/ trayek angkutan kota yaitu :

1. TPK Nyantong

2. TPK Muncang

3. TPK Cikadongdong

4. TPK Leuwidahu

5. TPK Karangresik

6. TPK Cigeureung

7. TPK Gegernoong

8. TPK Cipeusar

9. TPK Awiluar

10. TPK Gobang

11. TPK Cibunigeulis

12. TPK Asta

13. TPK Pamipiran

14. TPK Bumi Resik Panglayungan

15. TPK Sindang Galih

16. TPK Perum Kota Baru

Selain hal-hal yang telah diuraikan, Dinas Perhubungan bertugas pula untuk menguji kendaraan umum bermotor. Berikut realisasi jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada rentang tahun 2018-2020.

Sehubungan dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas kendaraan umum untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan kebijakan program Zero ODOL (*Over Dimension Over Load*) Kendaraan Angkutan Barang dari Kementerian Perhubungan R.I, maka realisasi wajib uji dan kendaraan uji lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun rincian data ditampilkan pada tabel 2.84.

Tabel 2.81.
Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2021

TAHUN	MOBIL BARANG						KERETA GANDEN GAN		KERETA TEMPELAN		MOBIL BUS		KHUSUS		MOBIL PENUMPANG		TOTAL
	KECIL		SEDANG		BESAR												
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	
2020	2240	6300	1564	2411	379	222	0	5	27	182	2196	234	72	39	218	18	16107
2021	2375	5990	1440	2277	380	194	2	4	33	191	1938	222	60	29	188	16	15339

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Tabel 2.82.
Realiasi Kegiatan Ijin Trayek Aktif dan Jumlah Kendaraan Lulus uji
Dinas Perhubungan 2018-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Ijin trayek aktif	Unit	1.123	1.219	794	616

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun			
			2018	2019	2020	2021
2	Jumlah kendaraan lulus uji	Unit	20.515	20.013	16.310	15.339

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Lebih lanjut, Tabel 2.86 menunjukkan data adanya penurunan jumlah angkutan yang melaksanakan perpanjangan ijin trayek dan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel 2.83
Data Trayek Angkutan Kota
Tahun 2021

No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	2020					2021				
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum					Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				
			Alokasi	Realisasi	Status		Sisa	Alokasi	Realisasi	Status		Sisa
					Aktif	Non Aktif				Aktif	Non Aktif	
1	01	27	91	91	89	2	0	91	91	49	42	0
2	02	16	52	49	31	18	3	52	49	10	39	3
3	03	19,5	125	123	91	32	2	125	122	50	72	3
4	04	23	100	92	90	2	8	100	92	53	39	8
5	05	23,5	150	141	122	19	9	150	141	59	82	9
6	06	23	33	22	18	4	11	33	21	14	7	12
7	07	23	70	63	46	17	7	70	63	32	31	7
8	08	23	70	59	32	27	11	70	60	11	49	10
9	09	25	56	27	22	5	29	56	27	11	16	29
10	09 A	30	35	31	30	1	4	35	32	21	11	3
11	010	34,5	71	67	37	30	4	71	67	31	36	4
12	011	16	19	19	17	2	0	19	19	10	9	0
13	012	15	28	23	17	6	5	28	23	15	8	5
14	012 A	20	4	2	1	1	2	4	2	0	2	2
15	013	26	50	47	41	6	3	50	47	20	27	3
16	014	33	20	16	11	5	4	20	16	9	7	4
17	015	44	35	31	19	12	4	35	31	11	20	4
18	016	28	35	21	12	9	14	35	21	7	14	14
19	017	13	35	35	32	3	0	35	35	23	12	0
20	018	19,5	40	25	22	3	15	40	25	12	13	15
21	019	28	19	18	14	4	1	19	18	8	10	1
Jumlah			1.138	1.002	794	208	136	1.138	1.002	456	546	136

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

2.1.3.2.10. Komunikasi & Informatika

Pelaksanaan pelayanan umum urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.84.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	209	107	300	300	_*	_*	_*	_*
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100	100	100	100	100	_*	_*
4	Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	_*	_*
5	Capaian Implementasi E-Government	%	25	25	35	N/A	_*	_*	_*	_*
6	Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	%	15	20	20	33	30	37,5	40	41,68
7	Persentase pelayanan informasi/ dokumentasi dan pengaduan	%	50	45	60	100	70	100	80	100
8	Capaian pembangunan infrastruktur TIK terhadap target	%	50	54	60	65	70	94,5	_*	_*
9	Capaian implementasi smart city	%	10	10	17	46	24	62,66	_*	_*
10	Rasio ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan	%	10	8	25	38	50	88	_*	_*
11	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	_*	_*
12	Persentase pengelolaan saluran informasi	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100
14	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100
15	Capaian Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat	_*	_*	_*	_*	_*	_*	2,7	(Baik) 2,68
16	Jumlah titik jaringan intranet Pemerintah Daerah	Node	_*	_*	_*	_*	_*	_*	400	400
17	Persentase penataan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100
18	Capaian Pengelolaan Pusat Data	Tier	_*	_*	_*	_*	_*	_*	1	1



No.	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
19	Jumlah sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	Sistem	__	__	__	__	__	__	2	2
20	Jumlah data dan informasi elektronik	Unit	__	__	__	__	__	__	1	1
21	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	__	__	__	__	__	__	2	2
22	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem	__	__	__	__	__	__	7	7
23	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola	Paket	__	__	__	__	__	__	3	3
24	Capaian Government Chief Information Officer (GCIO)	Level	__	__	__	__	__	__	1	1

Ket : __ = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022.

Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Memasuki perjalanan Tahun ke dua pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pada saat itu masih tergabung pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) mendapatkan penghargaan dalam acara Kominfo Award sebagai juara ke-3 dari 27 pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat dalam katagori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ini menunjukan bahwa Kota Tasikmalaya bersungguh – sungguh dalam melaksanakan UU KIP. Penetapan Kebijakan PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya di dukung dengan ditetapkannya peraturan Wali Kota Tasikmalaya yaitu peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 tahun 2013 tentang pedoman tata kerja pengelolaan informasi dan dokumentasi, perwal ini sebagai dasar operasional PPID Badan Publik di Kota Tasikmalaya, Selanjutnya Wali Kota Tasikmalaya membentuk kelembagaan PPID melalui Keputusan Keputusan Wali Kota Nomor 550/kep.119-Kominfo/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya, pada tahun 2018 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama untuk memperlancar kegiatan PPID di kota Tasikmalaya mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor

480/13/Sekretariat/2018 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilaksanakan melalui website <http://ppid.tasikmalayakota.go.id>, Help desk/layanan langsung/frontdesk, dan Melalui telepon dan email.

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/ SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural yang terdiri dari :

- 1. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama;
- 2. Perangkat Daerah sebagai PPID pembantu.

Pelayanan kebutuhan informasi publik dapat diakses melalui :

- 1. Layanan via website PPID Utama Pemerintah Daerah Kota Tasikmlaya melalui <http://tasikmalaya.go.id>;
- 2. Layanan langsung melalui help desk/ front desk yang beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kota Tasikmalaya;
- 3. Alyanan melalui telpon dan email, dengan menghubungi nomor telpon (0265) 7523616 dan email dengan alamat ppid@tasikmalayakota.go.id

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID mau dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang terdiri dari Pembina sampai pada Pejabat Fungsional.

Pada tahun 2019 Permohonan Informasi Publik sebanyak 4 permohonan dengan rincian 2 permohonan di kabulkan dan 2 permohonan ditolak. Sedangkan pada tahun 2020 permohonan informasi public sebanyak 2 permohonan dan keduanya ditidak dikabulkan.

Pada tahun 2021 terdapat permohona indormasi publik dari masyarakat yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.85
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak	Jumlah
2021	11	2	2	15

Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Kabupaten/ Kota se Jawa Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bahwa Kota Tasikmalaya meraih kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota yang informatif.



2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya baik dari jumlah koperasi dan pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Berikut adalah keragaan koperasi di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.86.
Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2021

No	Nama Koperasi		Jml	Koperasi		RAT	Jumlah (orang)				
				Akti f	Tdk Akti f		Anggota	Pengu-rus	Penga-was	Karya-wan	Mana- -jer
I	Koperasi Unit Desa (KUD)		9	9	-	4	4.485	26	19	19	-
II	Koperasi Serba Usaha		105	60	45	17	9.400	335	273	164	8
III	Kop. Pondok Pesantren		45	12	33	3	6.113	146	125	11	1
IV	Koperasi Simpan Pinjam										
	4.1	KSP	94	78	16	40	20.281	305	239	173	15
	4.2	KBMT	33	12	21	3	6.153	103	91	68	7
V	Koperasi Konsumsi										
	5.1	KPRI	50	35	15	11	8.817	172	133	49	4
	5.2	KOPKAR	39	18	21	8	5.143	118	99	28	9
	5.3	Koperasi Angkatan Darat	2	2	-	1	1.640	10	6	8	-
	5.4	Koperasi Angkatan Udara	1	1	-	1	171	4	2	3	-
	5.5	Koperasi Kepolisian	1	1	-	1	897	3	3	2	-
	5.6	Koperasi Wanita	10	6	4	2	1.320	32	24	7	1
	5.7	Koperasi Wredatama	6	1	5	-	486	17	17	3	1
	5.8	Koperasi Mahasiswa/Pemuda	2	1	1	-	759	8	6	-	1
	5.9	Koperasi Lainnya									
	5.9.1	Koperasi Warga	102	23	79	5	7.251	285	258	38	2
	5.9.2	POKMAS	41	4	37	1	3.183	127	114	18	-
	5.9.3	PEPABRI	1	1	-	1	436	4	3	3	-
	5.9.4	Kop. Veteran	1	1	-	1	1.228	4	2	1	-
VI	Koperasi Produksi										
	6.1	KOPINKRA / INKRA	26	6	20	2	1.347	81	69	20	-
	6.2	Koperasi Pertanian	9	1	8	-	637	27	27	3	-
VII	Koperasi Pemasaran										
	7.1	Koperasi Pasar	16	8	8	-	1.681	44	35	10	-
VII I	Koperasi Profesi		2	1	1	-	75	6	6	5	-
IX	Koperasi Sekunder		6	3	3	2	15.458	19	18	10	-
X	Koperasi Produsen		5	5	-	-	127	19	15	2	-

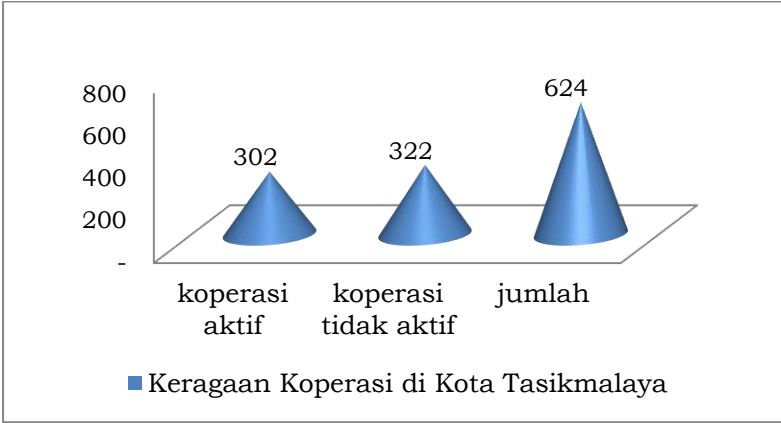
No	Nama Koperasi	Jm l	Koperasi		RAT	Jumlah (orang)				
			Akti f	Tdk Akti f		Anggota	Pengu- rus	Penga- was	Karya- wan	Mana- jer
XI	Koperasi Konsumen	18	13	5	7	1.826	60	45	7	2
	Jumlah Total	624	302	322	110	99.013	1.955	1.628	651	51

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2021.

Sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 624 buah koperasi dengan Jumlah anggota koperasi sebanyak 99.013 orang, angka ini bertambah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 98.903 orang. Modal yang telah terhimpun pada tahun 2021 yang merupakan modal sendiri sebanyak Rp.218,603 milyar, dan berhasil mendapat modal dari luar sebanyak Rp.160,538 milyar. Sementara volume usaha koperasi ini berjumlah Rp.274,493 milyar dengan total aset Rp.379,062 milyar. Secara umum, angka-angka di atas meningkat dari tahun sebelumnya, kecuali modal sendiri yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya Rp. 220,459 milyar pada tahun 2020.

Dari seluruh koperasi yang berjumlah 624 pada tahun 2021, hanya 302 unit koperasi yang merupakan koperasi aktif (48%), sisanya sebanyak 322 koperasi merupakan koperasi tidak aktif. Kondisi koperasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

1.



Gambar 2.40.
Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya

Sejak bulan Mei 2015, Kementerian Koperasi UKM memberlakukan Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Koperasi Aktif seluruh Indonesia. Dari 302 koperasi aktif pada tahun 2021 baru 192 koperasi (63,58%) yang telah berserifikat NIK dengan sebaran sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87.
Data Koperasi Bersertifikat NIK Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Indihiang	18
2	Bungursari	15
3	Mangkubumi	14
4	Cihideung	28

No.	Kecamatan	Jumlah
5	Cipedes	18
6	Tawang	38
7	Kawalu	17
8	Tamansari	15
9	Cibeureum	20
10	Purbaratu	9
	Jumlah	192

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022

Usaha ekonomi produktif di Kota Tasikmalaya didominasi oleh jenis usaha mikro. Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang sudah mendapatkan perizinan mencapai 9.770 pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.88.
Jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah UKM (Unit Usaha)
1	Bungursari	701
2	Cibeureum	548
3	Cihideung	1.432
4	Cipedes	1.551
5	Indihiang	763
6	Kawalu	1.455
7	Mangkubumi	1.130
8	Purbaratu	289
9	Tamansari	15
10	Tawang	1.132
11	Lain-lain (Luar Kota)	754
	Total	9.770

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022

Adapun pencapaian kinerja pelayanan umum urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.89.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase koperasi sehat	%	4	3,14	2	8,45	2	8	24	23,00
2	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
3	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	2	4,13	2	4,39	2	0,97	2	17,00
4	Jumlah Koperasi yang dibina	Buah	190	270	550	622	550	90	550	182
5	Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha	Buah	836	846	150	947	650	250	150	1.695
6	Persentase wirausaha baru yang dibina	%	100	82	100	88,5	-	25	-	-

No	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina	%	100	100	100	200	100	25	100	100
8	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100
9	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	13,51	36,42
10	Persentase Bina Koperasi yang berkompeten	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	33	40,00
11	Persentase koperasi aktif yang dibina	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	60,26
12	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	65	74,50
13	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	Orang	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.2.12. Penanaman modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Berikut capaian pelayanan urusan penanaman modal.

Tabel 2.90.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2018 - 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	M/Rp	500	520	550	1.223	200	422,6	250	1.630
2	Capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP	%	24	80,87	39	100	100	100	67	100
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	_*	_*
4	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya		_*	_*	_*	_*	_*	_*	50	0
5	Persentase pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	5	26,4
7	Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100
8	Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : DPMPTSP Kota Tasikmalaya, 2022.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam meningkatkan investasi atau penanaman modal perlu dukungan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian yang memadai. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Tasikmalaya, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan laju perekonomian sekaligus pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Berdasarkan hal ini di Kota Tasikmalaya terdapat kawasan yang strategis dari sudut perekonomian seperti kawasan perdagangan, hotel dan restoran di pusat kota, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan, Kawasan Minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, dan Kawasan Pendidikan Terpadu di Kecamatan Tamansari.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan pelayanan umum urusan kepemudaan dan olahrgara di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

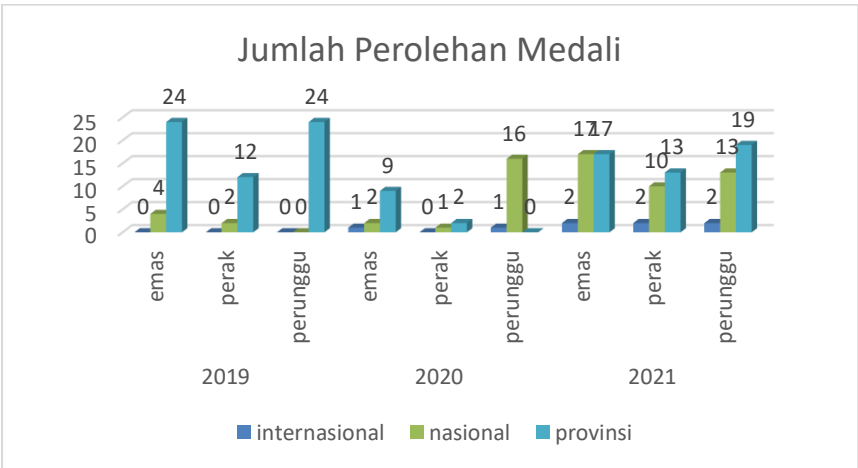
No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Organisasi pemuda terbina	%	40	42	42	57,14	-*	-*	-*	-*

2	Persentase peran serta organisasi kepemudaan yang dibina	%	22	23	24	46,15	_*	_*	_*	_*
3	Persentase Pembinaan Cabor yang berprestasi propinsi	%	71	81	79	83,33	_*	_*	_*	_*
4	Persentase peningkatan sarpras Olahraga	%	0	52	54	58,33	_*	_*	_*	_*
5	Persentase OKP yang dibina	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	28	28,57
6	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	75	60

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.
_* Indikator Lama
_** Indikator Baru

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Tasikmalaya berjumlah 91 (sembilan puluh satu) OKP dan yang telah dibina pada tahun 2021 sebanyak 26 (dua puluh enam) OKP, sedangkan OKP yang berprestasi sebanyak 3 (tiga) OKP.

Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi pada tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) cabang olahraga, tingkat nasional 7 (tujuh) cabang olahraga, dan internasional 3 (tiga) cabang olahraga, yakni taekwondo, silat serta wushu. Data perolehan medali pada cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Gambar 2.41
Perolehan Medali Cabang Olahraga Beprestasi
Kota Tasikmalaya Tahun 2021

2.1.3.2.14. Statistik

Pelaksanaan urusan stasistik di Kota Tasikmalaya dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.92.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	-*	-*	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu	%	-*	-*	100	100	100	100	100	100

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021.

Impelementasi optimalisasi dalam pengelolaan data statistik telah dibangun Open Data Kota Tasikmalaya yang dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui media sosial.

2.1.3.2.15. Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Urusan persandian ini berkaitan dengan keamanan informasi kedinasan.

Tabel 2.93.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	15	10	20	20	-*	-*	-*	-*
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	15	10	20	21	-*	-*	-*	-*
3	Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	50	33,33
4	Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Area	-**	-**	-**	-**	-**	-**	8	N/A
5	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan/Perwal	-**	-**	-**	-**	-**	-**	2	N/A
6	Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jenis	-**	-**	-**	-**	-**	-**	3	N/A
7	Persentase jumlah Insiden Kemanan Informasi yang tertangani	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022.

-* Target Lama
-**Target Baru

2.1.3.2.16. **Kebudayaan**

Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah	%	65	63	70	65,22	_*	_*	_*	_*
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30	41	40	64	_*	_*	_*	_*
3	Persentase pembinaan dan pengembangan terhadap grup kesenian	%	0	61	20	28,90	_*	_*	_*	_*
4	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	57	57,97
5	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	20	20,23
6	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	50	50
7	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	34	35,38

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

_* Indikator Lama

_** Indikator Baru

Sebagai upaya perlindungan cagar budaya dan seni di Kota Taikmalaya telah dilaksanakan pelestarian dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.95.
Data Cagar Budaya dan Kelompok Seni Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	2020	2021
1	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	buah	65	65
2	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	17	23
3	Jumlah Grup Kesenian Yang Dibina	buah	53	35

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Tabel 2.96.

Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Ketetapan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
1	Tugu Peta	Jl. Veteran	PO2018121300012
2	Tugu 0 Km	Jl.Dr. Sukarjo	PO2018121300009
3	Cilamajang Kota TasikmalayaJawa Barat	Cilamajang	PO2018121300018
4	Makam Gn. Subang	Lintasan Mangkubumi – Indihiang	PO2016061000161
5	Komplek Makam SyehTubagus Abdullah	Sukaasih	PO2016060900121
6	Makam (Mesjid) H. Bakri	Hz. Mustopa	PO2016061000356
7	Makam Gn Saena	Citamiang	PO2018121300019
8	Makam Eyang CakraNingrat	Ciseeng BabaknArsi	PO2018121300015
9	Punden Berundak,Gunung Pa Jahim	Leuwiliang, Kawalu	-
10	Makam H Hasan	Babakan Peundeuy	PO2018121300020
11	Makam Dalem Patuakan	Tanjung Kota Tasikmalaya Jawa Barat	PO2018121300014
12	Makam Eyang Patinggi	Leuwiliang	PO2018121300016
13	Makam DalemKutawaringin	Lewiliang	PO2018121300017
14	Lingga Yoni	Lintasan Mangkubumi Indihiang	PO2016061000161
15	Tugu Istiwa	Citamiang	PO2018121300002
16	Makam Nyimas Saena	Tanjung	PO2018121300021
17	Naskah Wasiat Sukapura (Manuskrip)	Tawang	-
18	Naskah Ndalem Patuakan	Jln. Komarasari Tawang	
19	Makam Sakarembong	Jl. Bantar,bantarsari Kota tasikmalaya	
20	Makam Eyang Jiwaraga	Kp Nagrog	
21	Makam Eyang Prabudilaya	Kota Tasikmalaya Jawa Barat	
22	Makam Syekh Abdul Gharib	Cibeas Kota Tasikmalaya	
23	Makam Eyang Cakraningrat		

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perpustakaan Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	3	3,14	4	66,67	32	32	35	35,19

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Persentase peningkatan koleksi buku	%	0	4,94	4	5,13	4	6,86	_*	_*
3	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	0	52,07	8	20,14	0	0	14	71,52
4	Persentase pembinaan perpustakaan	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	5,53	5,53
5	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	50	50

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022.

- _* Indikator Lama
- _** Indikator Baru

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator urusan perpustakaan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terdapat realisasi yang cukup besar dari target yang telah ditetapkan pada persentase peningkatan pengunjung perpustakaan karena pada tahun 2021 perpustakaan telah dibuka kembali untuk menerima pengunjung setelah sebelumnya ditutup karena PPKM yang diberlakukan di Kota Tasikmalaya.

Jumlah perpustakaan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.98
Data Perpustakaan Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Koleksi		Jumlah Pengunjung/ Hari	Jumlah Anggota Perpustakaan
				Judul	Eksemplar		
A	Perpustakaan Umum	80	251	65.075	124.128	145	1.310
1	Perpustakaan Kab/Kota	1	14	26.325	46.778	66	420
2	Perpustakaan Kelurahan	69	207	33.750	67.350	69	690
3	Perpustakaan Kecamatan	10	30	5.000	10.000	10	200
B	Perpustakaan Sekolah	440	1.089	324.500	1.161.000	13.610	159.200
1	Perpustakaan SD/ MI	231	462	115.500	231.000	4.620	46.200
2	Perpustakaan SMP/MPS	116	345	115.000	460.000	5.750	57.500
3	Perpustakaan SMA/ MA	93	282	94.000	470.000	3.240	55.500
C	Perpustakaan Khusus	52	57	30.500	68.500	152	2.600



No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Koleksi		Jumlah Pengunjung/Hari	Jumlah Anggota Perpustakaan
				Judul	Eksemplar		
1	Perpustakaan OPD Kab/Kota	46	48	23.000	59.000	92	2.300
2	Perpustakaan Bank	2	5	5.500	5.500	20	100
3	Perpustakaan Vertikal	4	4	2.000	4.000	40	200
D	Perpustakaan Perguruan Tinggi	20	49	49.133	94.004	483	15.626
1	Perpustakaan PT Negeri	3	19	13.000	26.000	160	5.000
2	Perpustakaan PT Swasta	17	30	36.133	68.004	323	10.626
E	Perpustakaan Masyarakat	39	78	14.450	14.950	195	1.950
1	Taman Baca Masyarakat	39	78	14.450	14.950	195	1.950
Jumlah		631	1.524	483.658	1.462.582	14.585	180.686

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022.

2.1.3.2.18. Kearsipan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.99.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kearsipan
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terjaganya keutuhan dan keautentikan informasi arsip masing- masing OPD	%	_*	_*	45	46,98	60	58,63	_*	_*
2	Pemahaman informasi kearsipan terhadap yang diberikan informasi	kali	_*	_*	2	5	2	3	_*	_*
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	_*	_*	25	26,32	27	27	_*	_*
4	Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal	poin	_**	_**	_**	_**	2	2	2	0
5	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	_**	_**	_**	_**	62,18	62,18	63,89	63,89

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022.

-* Indikator Lama

-** Indikator Baru

Capaian indikator pelayanan kearsipan di Kota Tasikmalaya secara umum telah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Namun pada dasarnya terdapat berbagai aspek yang harus ditingkatkan, misalnya dalam Penetapan Kebijakan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Inaktif, Penyusutan Arsip, dan Sumber Daya Manusia Kearsipan dalam kaitannya dengan audit kearsipan eksternal yang akan mendongkrak Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan perikanan

Potensi areal perikanan di Kota Tasikmalaya sebesar 692,27 Ha, terdiri dari kolam pembenihan 19,49 Ha, kolam pembesaran 621,23 Ha, sawah irigasi untuk pengembangan minapadi seluas 51,42 Ha dan kolam air deras 0,14 Ha.

Aktifitas ekonomi di sektor perikanan melibatkan 393 kelompok pembudidaya ikan yang terdiri dari 375 pokdaan, 15 poklahsar dan 3 pokmaswas dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 4.842 orang.

Aktivitas di sector perikanan secara juga didukung oleh 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 1 unit pelayanan yaitu UPTD Balai Benih Ikan (BBI), UPTD Pengembangan Produksi Ikan dan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP). Selain itu terdapat 61 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang mendukung ketersediaan benih ikan di Kota Tasikmalaya.

Menurut kategori teknologi yang digunakan, aktivitas budidaya ikan di Kota Tasikmalaya sebagian besar dilakukan dengan semi intensif (51%), dan menggunakan teknologi yang sederhana (48,7%). Hanya 0,3% yang berbudidaya ikan secara intensif. Teknologi budidaya intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan. Budidaya Semi Intensif merupakan sistem budidaya peralihan, antara budidaya alami (esktensif/sederhana) dan budidaya intensif (buatan/perlakuan khusus). Hal ini sangat mempengaruhi terhadap produksi ikan di Kota Tasikmalaya.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan
Tahun 2017-2021

No.	Komoditas	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)	2021 (Ton)
1	Mas	1.981,35	1.983,37	1979,75	2.074,63	2004,39

No.	Komoditas	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)	2021 (Ton)
2	Nila	2.098,14	2.123,08	2.127,56	2.113,38	2188,93
3	Nilem	1.227,39	1.227,61	1.252,75	1.232,47	1243,34
4	Mujair	701,00	698,82	655,93	462,34	465,49
5	Lele	1.456,39	1.500,76	1.415,17	1.479,49	1489,55
6	Gurame	834,76	723,66	809,34	739,74	744,77
7	Tawes	980,81	1.024,32	1.001,53	1109,61	1109,16
8	Tambakan	513,06	512,79	507,56	462,34	465,48
9	Ikan Lainnya	184,23	184,83	233,03	277,41	279,28
	Jumlah	9.977,13	9.979,24	9.982,62	9.951,41	9.990,39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022.

Pelaksanaan urusan perikanan di Kota Tasikmalaya menjadi wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Berikut disajikan data pelaksanaan pelayanan umum urusan Perikanan.

Tabel 2.101.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perikanan

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan	Orang	100	52	100	100	-	0	150	150
2	Capaian produksi perikanan budidaya	Ton	10.100	9.979,24	10.200	9.982,62	10.300	9.951,42	10.400	9.990,39
3	Angka produksi hasil perikanan	Ton	195,16	199,38	195,20	312,80	197,24	312,70	199,39	312,78
4	Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	%	25	24,74	30	32,65	40	32,65	40	53,88
5	Jumlah masyarakat miskin sektor perikanan yang dibina	Orang	75	100	75	50	75	80	75	75

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar. Secara lebih detail data objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.102.
Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1	Kawalu	1. Makam Syekh Abdul Ghorib	Wisata Budaya	Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Air Tanjung	Wisata Alam	Jl. Air Tanjung-Tasikmalaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Bordir Kawalu	Wisata Minat Khusus	Jl. Perintis Kemerdekaan, Karsamenak	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		4. Kampung Salapan (Hutan Urug) - Gua Sarongge - Curug Sawidak - Puncak Nangela - Cadas Ngampar	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Bukit Lestari	Wisata Alam	RT 03 RW 03 Kel. Leuwiliang	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Arung Jeram Sungai Ciwulan	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Dalem Patuakan	Wisata Budaya	Tanjung 02/04	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		8. Makam Guning Saena	Wisata Budaya	Citamiang 06/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		9. Tugu Istiwa	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		10. Makam H.M. Bakri	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		11. Makam Eyang Ciseeng/ Cakraningrat	Wisata Budaya	Babakan Arsi 03/06	Obyek wisata



					potensial yang belum dikembangkan
		12.Makam H. Hasan	Wisata Budaya	Babakan Peundeuy 007	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		13.Makam Gn. Subang	Wisata Budaya	Cilamajang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		14.Makam Eyang Patinggi	Wisata Budaya	Leuwiliang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
2	Tamansari	1. Situ Cibeureum	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Kelom Gelis	Wisata Minat Khusus	Kp. Gobras Kel. Sukahurip	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Curug Tonjong	Wisata Alam	Kel. Setiawargi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Situ Malingping	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Situ Cipajaran	Wisata Alam	Kel.Mugarsari	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Makam Situ Malingping	Wisata Budaya	Kel.Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Makam Situ Kasindang	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
3	Cibeureum	1. Petilasan Purbasari	Wisata Budaya	Jl. Letkol Basir Surya	Objek Wisata



					Sudah Dikembangkan
		2. Pasir Pataya	Wisata Rekreasi	Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Perkebunan Salak	Wisata Minat Khusus	Peundeuy, Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
4	Purbaratu	1. Arung Jeram sungai Citanduy	Wisata Alam	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		2. Wisata Edukasi Bambu	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukajaya	Produk Wisata potensial yang belum dikembangkan
		3. Makam Syekh Kusumayuda	Wisata Budaya	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Makam Tubagus Abdulah	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Makam Jiwa Raga	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Kampung Awi	Wisata Alam		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		7. Farm House	Wisata Buatan		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		8. Kerajinan Mendong	Wisata Kriya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan



5	Tawang	1. Kuliner Tawang	Wisata Minat Khusus	Jl. BKR, Jl. Kolektoran	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		2. Titik Nol	Wisata Budaya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		3. Mambo Kuliner	Wisata Kuliner	Jl. Mayor Utarya	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
6	Cihideung	1. Pasar Minggu Dadaha	Wisata Minat Khusus	Jl. Dadaha	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		2. Teejay Waterpark	Wisata Rekreasi	Komp. Plaza Asia Jl. KHZ mustofa	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Kolam Renang Asia	Wisata Buatan	Komplek Dadaha	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
7	Mangkubumi	1. Situ Gede	Wisata Alam	Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Makam Eyang Prabudilaya	Wisata Budaya	Kel. Batarsari Kecamatan Bungursari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mangkubumi Water Park	Wisata Rekreasi	Jl.A.H. Nasution KM. 7	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		4. Perkebunan Buah Naga	Wisata Minat Khusus	Jl. Cibeet	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
8	Indihiang	1. Situs Linggayoni	Wisata Budaya	Kel. Sukamaju Kidul	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Payung Geulis Tasik	Wisata Minat Khusus	Kel. Panyingkiran	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Wisata Ciloseh	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial



					dalam tahap pengembangan
		4. Lapang Minisoccer (Indosoccernesia)	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukamaju Kidul	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Batu Bangkong	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Kawasan Cipanyir (Cipedes Panyingkiran)	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		7. Babakan Sanca	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
9	Bungursari	1. Makam Eyang Dalem Sakarembong	Wisata Budaya	Kel. Bantarsari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Ma'arif Garden	Wisata Alam	Jl. Sukarindik No.71, Sukarindik	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mutiara Aboh	Wisata Tirta	Kel. Sukamulya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
10	Cipedes	1. Taman Rekreasi Karang Resik	Wisata Rekreasi	Jl. Mohamad Hatta, Sukamanah	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Sentra Batik	Wisata Minat Khusus	Jl. Ciroyom No.20, Nagarasari, Kec. Cipedes	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Tebing Putih	Wisata Alam	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Budak Capetang	Wisata Buatan	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022

Apabila dilihat dari capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Tasikmalaya, jumlah kunjungan wisata ke Kota Tasikmalaya, yang meliputi wisatawan domestik dan mancanegara, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 589.000 orang pada tahun 2017, 650.553 orang pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 menjadi 695.647. Angka ini menurun pada tahun 2020, yaitu menjadi 344.423 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisata mulai naik lagi yaitu sebesar 483.569 orang, seiring dengan mulai meredanya kasus Covid-19.

Tabel berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisata di Kota Tasikmalaya selama 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel. 2.103
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 - 2021

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Jumlah Total (Orang)
	Mancanegara	Domestik	
2018	221	650.332	650.553
2019	124	695.523	695.647
2020	39	344.384	344.423
2021	6	483.563	483.569

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022

Untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Tasikmalaya, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa penginapan seperti hotel, guest house, hostel, dan lain sebagainya. Tabel berikut merupakan data sarana penginapan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.104.
Data Hotel di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
1	PERMATA SAHID HOTEL SYARIAH	JL.BRIGJEN WASITA KUSUMAH, INDIHIANG, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT 46151	Indihiang
2	HOTEL RAMAYANA	JL.RE MARTADINATA NO.333, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA 46151	Indihiang
3	ADEN 2 SYARIAH	JL.RE MARTADINATA NO.268, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	Indihiang
4	FRESH HOTEL	JL.RE MARTADINATA NO.191, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	Indihiang
5	HOTEL SRIKANDI	JL.RE MARTADINATA NO.266, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	Indihiang
6	CROWN HOTEL	JL. RE MARTADINATA NO.45	Cipedes
7	PONDOK TASYIQ GUEST HOUSE	JL.CIGANTANG, KEL.CIGANTANG, KEC.MANGKUBUMI	Mangkubumi
8	FAVE HOTEL TASIKMALAYA	JL.RE MARTADINATA 214, RT.02/07 KEL.CIPEDES, KEC.CIPEDES KOTA TASIKMALAYA KODE POS 46133	Cipedes

No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
9	HARMONI HOTEL	Jl.Rd.IKIK WIRADIKARTA 51 TASIKMALAYA	Tawang
10	HOTEL MANDALAWANGI	JL.RE MARTADINATA 177, TASIKMALAYA	Cipedes
11	HOTEL HORISON	JL. YUDANAGARA NO.16	Cihideung
12	HOTEL PADJADJARAN	JL. IR.H.DJUANDA (BY PASS)	Mangkubumi
13	HOTEL SETUJU	JL.CIEUNTEUNG	Mangkubumi
14	HOTEL WIJAYA KUSUMAH	JL. IR.H.DJUANDA (BY PASS)	Bungursari
15	SURYA HOTEL	JL.SILIWANGI NO.39 TASIKMALAYA	Tawang
16	MINI GUEST HOUSE	JL. CIPEDES II NO.21A	Cipedes
17	HOTEL MERDEKA	JL.TARUMANEGARA NO.48	Tawang
18	HOTEL PRIANGAN	JL. KEBON MANGGU I, TASIKMALAYA	Cihideung
19	SHANRILLA HOTEL	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.93, TASIKMALAYA	Cihideung
20	HOTEL SANTIKA	JL.YUDANAGARA, NO.57	Cihideung
21	HOTEL SARTIKA	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.244	Kawalu
22	HOTEL SEHAT	JL.MITRABATIK NO.73	Cipedes
23	HOTEL SELAMAT	JL.EMPANG NO.26 TASIKMALAYA	Tawang
24	HOTEL TASIK	JL.KOMALASARI NO.27 RT.01 RW.02, EMPANGSARI	Tawang
25	HOTEL ABADI	JL.EMPANG NO.58 TASIKMALAYA	Tawang
26	HOTEL ASRI	JL.HZ.MUSTOFA NO.326 TASIKMALAYA	Cihideung
27	HOTEL BOROBUDUR	JL.MAYOR SL.TOBING NO.25	Cihideung
28	HOTEL CITY	JL.SUKALAYA BARAT NO.50 TASIKMALAYA	Cihideung
29	HOTEL AMARIS	JL.KHZ.MUSTOFA, TUGUJAYA, CIHIDEUNG	Cihideung
30	GRAND METRO HOTEL	JL.KHZ.MUSTOFA NO.263, NAGARAWANGI	Cihideung
31	HOTEL KENCANA	JL.YUDANAGARA NO.17 TSM	Cihideung
32	HOTEL MANGKUBUMI	JL.JENDRAL AH.NASUTION KM.7 TSM	Mangkubumi
33	HOTEL FLAMBOYAN	JL.GALUNGGUNG NO.50	Tawang

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Adapun untuk capaian indikator urusan pariwisata dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.105.
Capaian Indikator Urusan Pariwisata

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	591.000	651.000	614.000	615.988	287.049	344.423	638.000	483.569
2	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	51	55,1
3	Jumlah Wirausaha baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha pariwisata	Orang	100	58	100	100	-	-	150	150
4	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	41	46,15

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

2.1.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian meliputi sektor pertanian tanaman pangan, sektor tanaman hortikultura, sektor tanaman perkebunan dan sektor peternakan. Produktivitas sektor pertanian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan. Luas lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kota Tasikmalaya sejak tahun

2009 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi lahan sawah ke peruntukan lain. Pada tahun 2017 luas sawah sebesar 5.826 Ha, sementara pada tahun 2021 menjadi 5.778 Ha. Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan Perkembangan data luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.106.
Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Tahun	Jumlah	Berkurang (Ha)
2018	5.799	27
2019	5.796	3
2020	5.790	6
2021	5.778	12
Jumlah		406

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

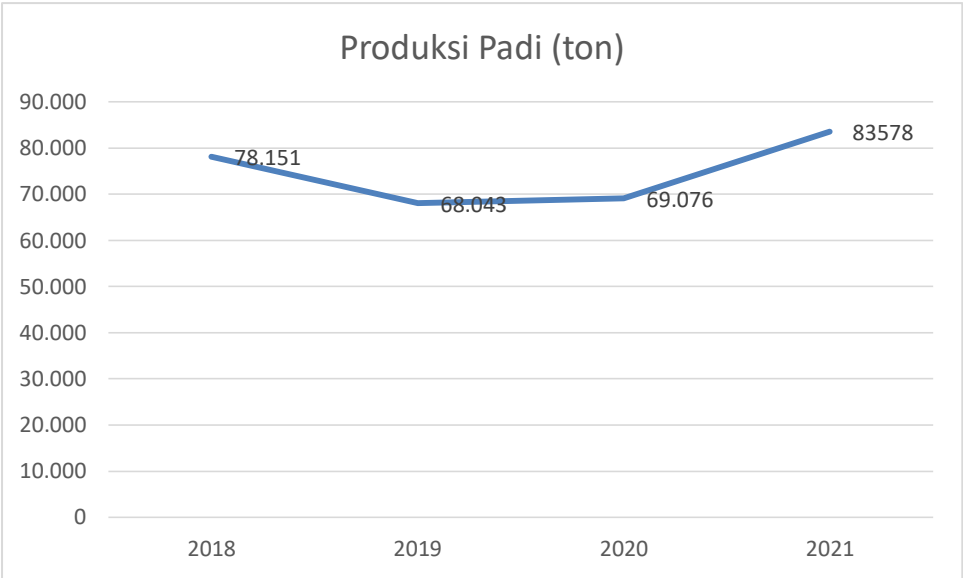
Potensi sumberdaya pertanian berbentuk kelompok tani sebanyak 644 kelompok dengan jumlah anggota kelompok tani berjumlah 27.424 orang yang terdiri dari kelompok tani dewasa 451 kelompok, kelompok wanita tani (KWT) 136 kelompok, dan taruna tani 57 kelompok. Kondisi ini meningkat dari tahun 2019. Berikut perkembangan kelompok tani di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.107.
Kelompok Tani di Kota Tasikmalaya Tahun 2019 - 2021

Tahun	Kelompok Tani			Jumlah Anggota
	Kelompok Dewasa	KWT	Taruna Tani	
2019	452	129	44	24.782
	625			
2020	451	136	57	27.424
	644			
2021	456	145	64	28.047
	665			

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

Komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, palawija serta tanaman serealial lainnya. Padi merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Produksi padi periode 2013-2021 seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.42.
Produksi Padi Tahun 2018-2021

Jika konversi dari gabah ke beras sebesar 62,74 persen maka produksi beras di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 52.437 ton naik. Dengan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 716.155 orang, dan diasumsikan kebutuhan beras per kapita/tahun sebanyak 100 kg sehingga jumlah kebutuhan beras seluruh penduduk Kota Tasikmalaya selama satu tahun sebanyak 71.615,5 ton. Dengan demikian produksi beras di Kota Tasikmalaya belum dapat memenuhi kebutuhan makan penduduknya. Berdasarkan data tersebut produksi beras di Kota Tasikmalaya baru memenuhi 72,22 persen dari total kebutuhan. Terdapat defisit beras sebanyak 19.178,66 ton atau 27,28 persen.

Namun demikian produksi padi ini mendominasi produksi tanaman pangan di Kota Tasikmalaya dibandingkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu seperti terlihat pada table di bawah ini.

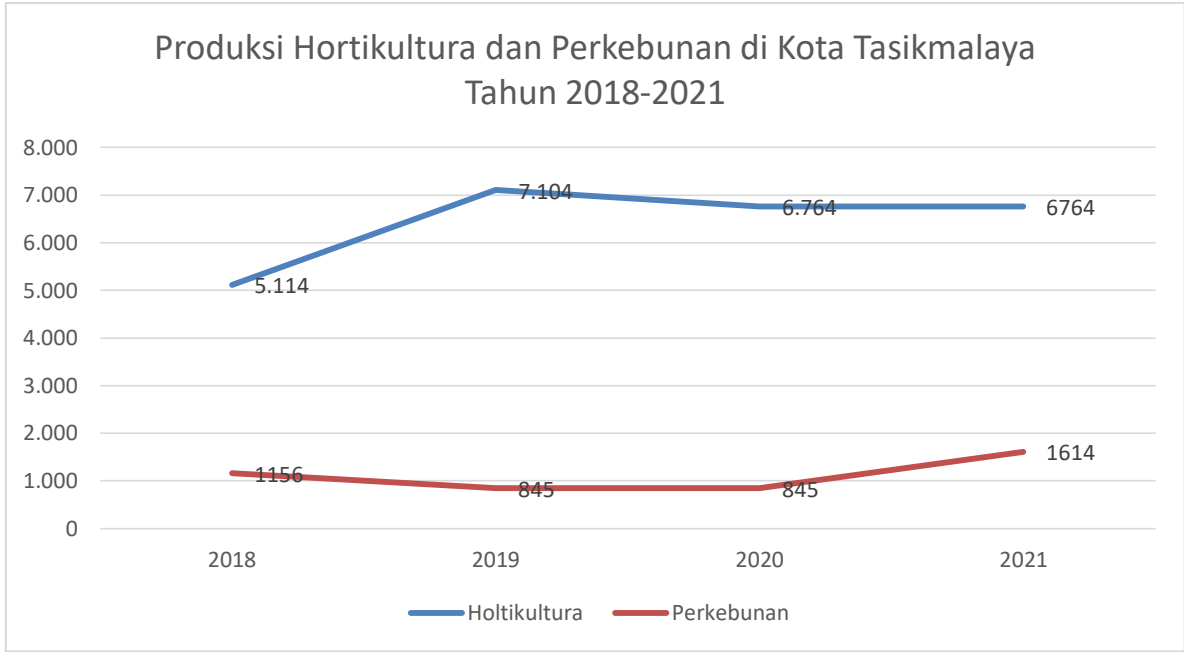
Tabel 2.108
Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021
Produksi Padi (ton)	78.151	68.043	69.076	83578
Produksi Jagung (Ton)	656	269	176	160
Produksi Kedelai (Ton)	57	-	-	-
Produksi Kacang Tanah (Ton)	132	231	406	128
Produksi Ubi Jalar (ton)	424	367	151	130
Produksi Ubi Kayu (ton)	2.300	3.060	1.119	1388
JUMLAH	81.720	71.970	70.928	85.384

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

Sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya terdiri dari tanaman hortikulturan sayuran dan tanaman hortikultura buah-buahan. Komoditas

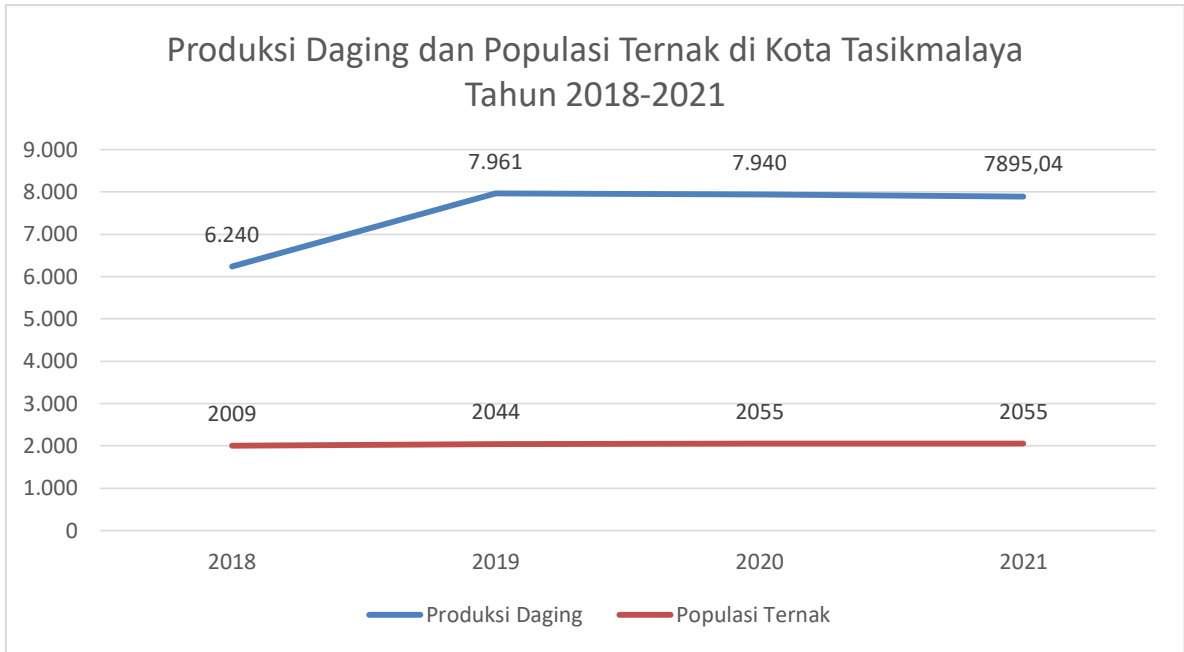
tanaman hortikultura sayuran terdiri dari komoditas cabe besar, cabe rawit, tomat, ketimun, petsai/sawi, dan kacang panjang. Sementara komoditas tanaman hortikultura buah-buahan terdiri dari komoditas salak, pisang, rambutan, mangga, pepaya, durian dan manggis. Selain itu terdapat juga komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari komoditas mendong, kelapa, lada, kakao, pala, kopi dan tembakau. Produksi tanaman hortikultura tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 dan sedikit menurun pada tahun 2021, sementara produksi tanaman perkebunan terus menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2021

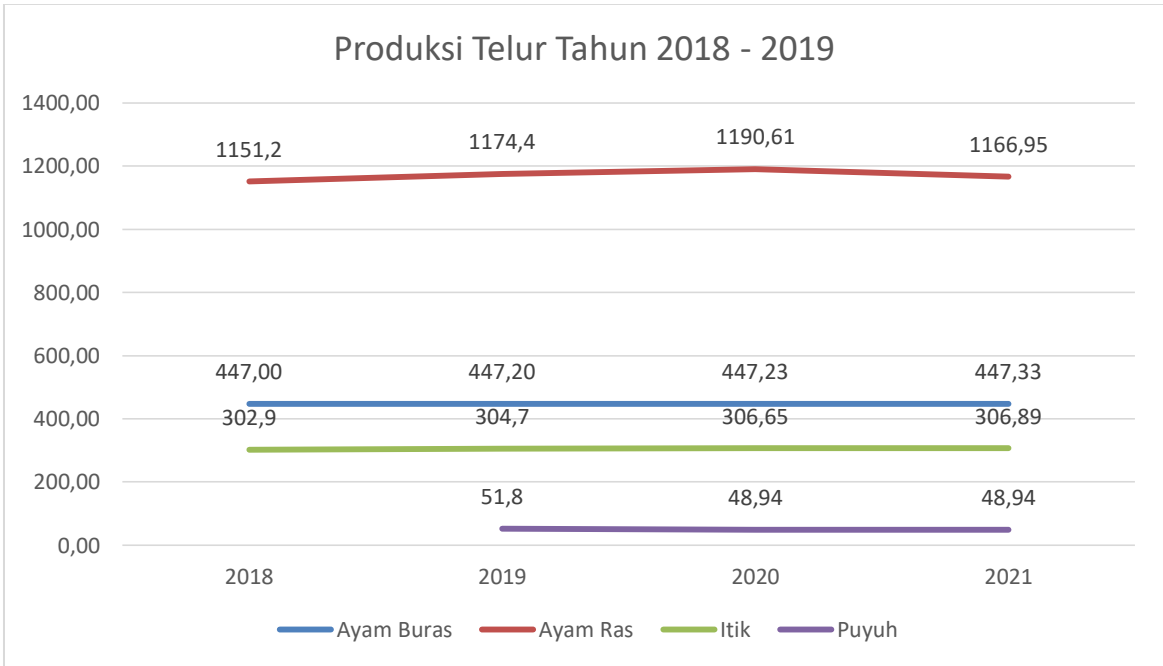
Gambar. 2.43.
Produksi Hortikultura dan Perkebunan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2021

Komoditas sektor peternakan terdiri dari ternak besar seperti sapi, kambing dan domba serta unggas seperti ayam, itik dan puyuh. Selain itu terdapat produksi hasil peternakan seperti daging, telur dan susu. Populasi ternak besar dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan walau dengan pertumbuhan yang lambat yaitu rata-rata 1,94 persen per tahun. Sementara produksi daging dalam 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Produksi daging berangsur baik pada tahun 2018 dan 2019 kemudian turun kembali pada tahun 2021. Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.44.
Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Produksi telur dalam 4 tahun terakhir didominasi telur ayam ras petelur yang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2018-2019 dengan rata-rata pertumbuhan 7,9 persen per tahun, namun menurun pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -0,6 persen. Produksi telur ayam ras pada tahun 2019 mencapai 1.174,2 ton, turun pada tahun 2020 menjadi 1.167,1 ton. Untuk produksi telur ayam bukan ras, itik serta puyuh relative stagnan. Perkembangan produksi telur di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.45.
Produksi Telur Tahun 2018-2021

Di sektor peternakan, sarana prasarana milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH dan Pasar Hewan. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

Selain berdampak terhadap capaian angka PDRB kategori pertanian, kehutanan perikanan, kondisi di atas sangat mempengaruhi terhadap capaian pelayanan umum pada urusan pertanian. Banyak capaian target indikator urusan pertanian pada tahun 2020 yang turun dari capaian tahun 2019.

Tabel 2.109.
Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian produksi tanaman hortikultura	Ton	_*	_*	_*	_*		5.755,3	_*	_*
2	Capaian produksi tanaman perkebunan	Ton	_*	_*	_*	_*		854,01	_*	_*
3	Jumlah petani miskin yang dibina	Orang	300	410	300	352	300	126	225	225
4	Angka produktivitas tanaman pangan utama	Ton	_*	_*	_*	_*		62,16	_*	_*
5	Capaian Produksi Tanaman Pangan	Ton	90.000	81.720	91.800	71.970	93.000	70.928	73.400	85.384
6	Jumlah Gapoktan yang dibina	Gapoktan	64	64	64	64	64	64	64	64
7	Capaian peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan	%	5	39,41	5	21,67	5	38,67	_*	_*
8	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	%	100	100	100	100	100	100	_*	_*
9	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1	1,61	2	0,25	2	0,52	1	-1,59
10	Persentase peningkatan hasil produksi peternakan	%		33,81		21,44	4	1,86	_*	_*
11	Jumlah Wirausaha baru sektor pertanian	Orang	200	135	200	200	0	0	300	295

12	Capaian produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	1	22,82	1	_*	_*	_*	_*	_*
13	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	_**	_**	_**	_**	_**	_**	198	199
14	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Kwintal/hektar	_**	_**	_**	_**	_**	_**	63	62,9
15	Capaian produksi Hasil peternakan	Ton	_**	_**	_**	_**	_**	_**	8000	10.347
16	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	100	100
17	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	30	4,35

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.3.4. Perdagangan

Perekonomian Kota Tasikmalaya banyak didorong dan didukung oleh kategori perdagangan. Berikut capaian layanan urusan perdagangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.110.
Capaian Pelayanan Umum Urusan Perdagangan
Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
2	Persentase alat UTP yang bertera sah	%	50	65,83	60	80,44	70	80.89	88	109
3	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang		328		354		100		-
4	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	450	450	200	400	_*	_*	_*	_*
5	Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	3	1
6	Persentase Pelaku usaha yang dibina	%	100	100	100	104	_*	_*	_*	_*
7	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	5	5	5	4,58	8	_*	5	-6,64
8	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	100	100	100	343	_*	_*	_*	_*

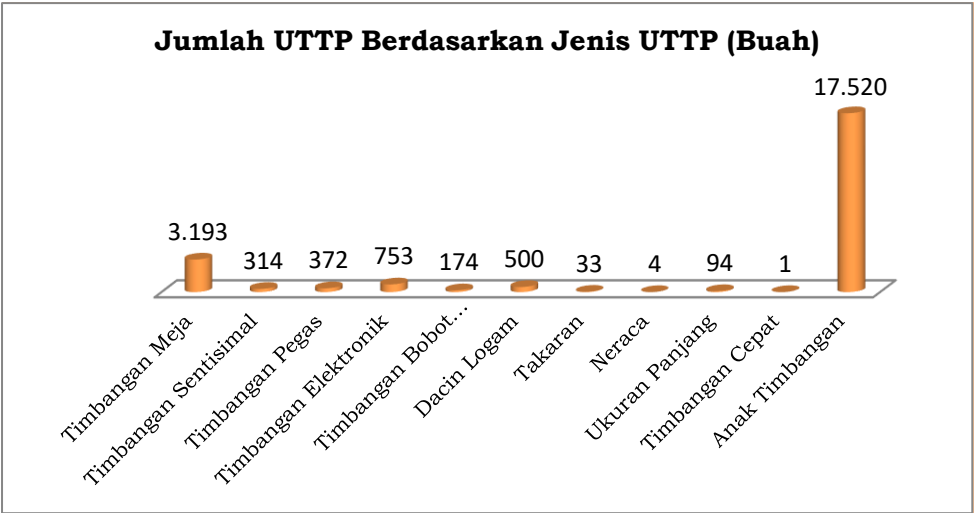
No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
9	Persentase Pasar yang dibina	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
10	Nilai ekspor bersih	US\$ (ribuan)	38.000	34.000	39.000	14.993,52	40.000	35.883.71	41.000	31.459.43
11	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	100	100
12	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	100	80
13	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	72	54,5
14	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	3	1
15	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	88	88,9

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

Sebagai implementasi dari amanat Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib untuk pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertujuan guna melindungi kepentingan umum sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam hal kebenaran pengukuran.

Pada 2018 Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU). Adapun Jenis dan pemilik UTTP di Kota Tasikmalaya cukup banyak. Di lain pihak UPTD Metrologi Legal Kota Tasikmalaya juga masih melayani pemilik UTTP dari wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar melalui mekanisme Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Daerah Tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, serta Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan Metrologi Legal karena UPTD Metrologi Legalnya belum operasional.

Jenis dan jumlah UTTP yang dimiliki pedagang di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta yang dimiliki masyarakat di 10 kecamatan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Total ada 22.958 UTTP dari berbagai jenis yang dimiliki pelaku usaha di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta masyarakat di 10 kecamatan.



Gambar 2.46.
Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP

Pemilik UTTP juga tersebar di SPBU, SPBE, Perum Bulog, Perusahaan Ekspedisi, Kantor Pos, Tempat Pelayanan Kesehatan dan perusahaan lainnya dengan jumlah jenis UTTP sebanyak 30 jenis sebanyak 1.059 buah. Ada juga UTTP yang terpasang di Pelanggan Air dan Listrik di 10 kecamatan sebanyak 27.467 meter air dan 220.513 kWh meter.

Pasar rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya semakin penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan hasil pertanian dan hasil industri kecil menengah dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Saat ini, Pasar Cikurubuk menjadi pasar induk hasil bumi bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur, yang mampu memasarkan berbagai produk hasil pertanian paling lengkap, seperti: beras, sayuran, daging, ikan, telur dan lainnya serta hasil industri kecil menengah seperti alas kaki dan bordir.

Tabel 2.111.
Jumlah Pasar Rakyat Tahun 2021

No.	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Luas			Jumlah		
				Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Lantai	Los	Kios	Dasaran
1	Pasar Cikurubuk	Jl. Residen Ardiwinangun, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1994	43.120	25.650	1	50	2.772	1.867
2	Pasar Pancasila	Jl. Pancasila, Kel. Lengkongsari Kec. Tawang	1995	6.540	4.656	1	60	249	300
3	Pasar Indihiang	Jl. Letnan Harun, Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang	1997	10.622	743	1	0	402	50
4	Pasar Padayungan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung	1995	9.000	1.968	1	0	261	20
5	Pasar Cibeuti	Jl. Raya Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu	1990	696	691	1	12	44	0
6	Pasar Gegernoong	Jl. Raya Tamansari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari	1999	1.000	538	1	0	91	10



No.	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Luas			Jumlah		
				Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Lantai	Los	Kios	Dasaran
7	Pasar Burung dan Besi	Jl. Kh. Ez. Mutaqien, Kel. Lingajaya Kec. Mangkubumi	1997	6.407	444	1	0	244	40
8	Pasar Nyemplong/ Sindang Hayu	Setiawargi Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	2016	5.650	1.364	1	26	0	37
9	Pasar Cibeureum	Jl. Kh. Khoer Affandi Kel. Margabakti Kec. Cibeureum	2018	4.630	2.989	1	128	78	0
10	Pasar Purbaratu	Belum beroperasi	2019				276	4141	2324

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

Meskipun kategori perdagangan sudah cukup baik tetapi masih perlu peningkatan pada sarana dan prasarananya. Pasar-pasar tersebut secara bertahap harus ditingkatkan kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya untuk meningkatkan daya saing dengan pasar-pasar modern atau pusat perbelanjaan dan minimart yang ada.

Tabel 2.112.
Pusat Perbelanjaan di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Pusat Perbelanjaan	Alamat
1	Yogya HZ	Jl. HZ Mustofa No. 124 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
2	Asia Toserba	Jl. HZ. Mustofa No. 72 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
3	Yogya Mitrabatik	Jl. Mitra Batik No. 81-83 Kel. Cipedes Kec. Cipedes
4	Plaza Asia (PT. Asia San Prima Jaya)	Jl. HZ. Mustofa Kel. Tuguraja Kec. Cihideung
5	Agung Toserba	Jl. HZ Mustofa Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
6	Giant	Jl. Pasar Wetan Komplek Mayasari Plaza Kel. Argasari Kec. Cihideung
7	Lotte Mart	Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kersamenak Kec. Kawalu
8	Mega M (PT. Matahari Putra Prima)	Jl. Veteran No. 10 Kel. Cilembang Kec. Cihideung
9	Transmart	Jl. Ir. H. Juanda Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
10	Mayasari Plaza	Jl. Pasar Wetan Kel. Argasari Kec. Cihideung

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020.

Data lebih lanjut mengenai pelaku usaha perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.113.
Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

No.	Jenis	Jumlah
1	Usaha Mikro yang Sudah Terdaftar	120
2	Usaha Mikro Anggota Koperasi LPM	2.332
3	PKL Kojenggang	780



No.	Jenis	Jumlah
4	PKL sepanjang jalan Kota Tasikmalaya (21 ruas jalan)	1.371
5	PKL Selter Lingkar Dadaha	140
6	Peserta Program Kemiskinan	600
	Jumlah	4.784

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2019.

Kota Tasikmalaya memiliki banyak potensi kerajinan dan industri kreatif yang tersebar di beberapa sentra-sentra industri Kota Tasikmalaya yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Seluruh potensi kerajinan ini perlu didukung dengan fasilitas sarana prasarana promosi dan pemasaran produk industri kreatif dengan membangun tempat pameran khususnya untuk produk industri kreatif sebagai salah satu dari pengembangan pasar melalui promosi.

2.1.3.3.5. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan.

Berikut ini data potensi komoditi unggulan Kota Tasikmalaya :



Tabel 2.114.
Perkembangan Potensi Komoditi Industri Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2021

No.	Komoditi	Unit Usaha				Tanaga Kerja (Orang)				Nilai Investasi (Rp.000)				Nilai Produksi (Rp. 000)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Bordir	1.407	1.424	1.430	1.423	14.097	14.097	14.097	14.097	244.404.416	244.404.416	244.404.416	244.404.416	1.067.757.116	1.067.757.116	1.067.757.116	1.067.757.116
2	Kerajinan Mendong	174	175	175	174	2.292	2.292	2.292	2.292	7.011.232	7.011.232	7.011.232	7.011.232	43.203.874	43.203.874	43.203.874	43.203.874
3	Kerajinan Bambu	75	75	75	75	660	660	660	660	1.200.038	1.200.038	1.200.038	1.200.038	5.466.606	5.466.606	5.466.606	5.466.606
4	Alas Kaki (Kelom Geulis & Sandal, sepatu)	536	551	556	570	6.213	6.213	6.213	6.213	50.586.562	50.586.562	51.246.744	710.768.562	395.566.430	395.566.430	395.566.430	395.566.430
5	Kayu Olahan	217	235	237	226	1.538	1.538	1.538	1.538	28.677.699	28.677.699	28.677.699	28.677.699	82.656.245	82.656.245	82.656.245	82.656.245
6	Batik	41	43	41	43	695	695	695	695	7.840.576	7.840.576	7.840.576	7.840.576	51.540.682	51.540.682	51.540.682	51.540.682
7	Payung Geulis	8	8	8	8	56	56	56	56	78.500	78.500	78.500	78.500	1.216.800	1.216.800	1.216.800	1.216.800
8	Makanan Olahan	656	880	939	1.66	5.143	5.143	5.143	5.143	52.860.460	52.860.460	61.809.660	5.202.060.460	950.004.830	950.004.830	950.004.830	950.004.830
9	Bahan Bangunan	323	324	326	326	4.152	4.152	4.152	4.152	216.770.677	216.770.677	217.047.677	593.770.677	561.840.403	561.840.403	561.840.403	561.840.403
10	Pakaian Jadi	172	288	318	337	1.711	1.711	1.711	1.711	24.188.800	24.188.800	25.938.800	3.374.188.800	167.930.350	167.930.350	167.930.350	167.930.350
11	Percetakan	55	56	57	58	387	387	387	387	9.566.000	9.566.000	9.876.000	319.566.000	31.521.862	31.521.862	31.521.862	31.521.862
12	Lain-Lain	130	231	297	144	3.099	3.099	3.099	3.099	69.590.084	69.590.084	83.366.166	4.292.936.366	419.972.576	419.972.576	419.972.576	419.972.576
JUMLAH		680	4.290	4.459	4.450	9.349	39.795	40.043	40.043	320.115.561	706.438.044	712.775.044	14.782.503.326	3.763.447.774	3.763.447.774	3.778.677.774	3.778.677.774

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022



Tabel 2.115.
Perkembangan Jumlah Unit Industri Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 - 2021

No	Komoditi dan Klasifikasi Industri	Unit Usaha (UU)			
		2018	2019	2020	2021
A. Komoditi Unggulan :					
1	Bordir :	1.416	1.424	1.431	1.423
	a. Mikro	651	659		
	b. Kecil	652	652	1.319	1.311
	c. Menengah	113	113	112	112
	d. Besar	0	0	0	0
2	Kerajinan Mendong :	175	175	175	174
	a. Mikro	137	137		
	b. Kecil	37	37	174	173
	c. Menengah	1	1	1	1
	d. Besar	0	0	0	0
3	Kerajinan Bambu :	75	75	75	75
	a. Mikro	66	66		
	b. Kecil	8	8	74	74
	c. Menengah	1	1	1	1
	d. Besar	0	0	0	0
4	Alas Kaki (Sandal, Sepatu, Kelom Geulis) :	544	551	557	570
	a. Mikro	199	206		
	b. Kecil	323	323	535	548
	c. Menengah	22	22	22	22
	d. Besar	0	0	0	0
5	Kayu Olahan (Meubel) :	228	235	237	226
	a. Mikro	158	165		
	b. Kecil	66	66	233	223
	c. Menengah	3	3	3	3
	d. Besar	1	1	1	1
6	Batik :	41	43	43	43
	a. Mikro	20	22		
	b. Kecil	19	19	41	41
	c. Menengah	2	2	2	2
	d. Besar	0	0	0	0
7	Payung Geulis :	8	8	8	8
	a. Mikro	0	0		
	b. Kecil	8	8	8	8
	c. Menengah	0	0	0	0
	d. Besar	0	0	0	0
8	Makanan Olahan :	772	880	949	1.066
	a. Mikro	533	641		
	b. Kecil	222	222	932	1.049
	c. Menengah	17	17	17	17
	d. Besar	0	0	0	0
JUMLAH A		3.259	3.391	3.475	3.585
	a. Mikro	1.764	1.896		
	b. Kecil	1.335	1.335	3.316	3427
	c. Menengah	159	159	158	158
	d. Besar	1	1	1	1
B. Komoditi Lainnya :					
1	Bahan Bangunan :	323	324	326	326
	a. Mikro	217	218		
	b. Kecil	90	90	310	313
	c. Menengah	13	13	13	13
	d. Besar	3	3	3	3
2	Pakaian Jadi :	226	288	339	337
	a. Mikro	149	211		
	b. Kecil	67	67	329	327
	c. Menengah	10	10	10	10
	d. Besar	0	0	0	0
3	Percetakan :	55	56	59	58
	a. Mikro	15	16		
	b. Kecil	36	36	55	54
	c. Menengah	4	4	4	4
	d. Besar	0	0	0	0
4	Lain-lain :	220	231	260	144
	a. Mikro	127	138		
	b. Kecil	73	73	240	124
	c. Menengah	20	20	20	20
	d. Besar	0	0	0	0
JUMLAH B		824	899	984	865



No	Komoditi dan Klasifikasi Industri	Unit Usaha (UU)			
		2018	2019	2020	2021
	a. Mikro	508	583		
	b. Kecil	266	266	934	818
	c. Menengah	47	47	47	47
	d. Besar	3	3	3	3
	TOTAL A+B	4.083	4.290	4.459	4450
	a. Mikro	2.272	2.479		
	b. Kecil	1.601	1.601	4.250	4245
	c. Menengah	206	206	205	205
	d. Besar	4	4	4	4

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

Adapun capaian pelaksanaan urusan industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.116.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Industri
Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase industri kecil menengah berkualitas	%	2	-	2	-	2	23,54	_*	_*
2	Jumlah IKM yang dibina	IKM	_*	_*	_*	_*	775	1.110	_*	_*
3	Persentase pertumbuhan industry	%	2	11,68	2	5,07	2	3,94	2	9,4
4	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan	Buah	4	4	3	3	3	0	3	3
5	Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	5	50
6	Jumlah wirausaha baru sektor industri	Orang	_*	_*	_*	_*	_*	_*	325	325
7	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri	Orang	_*	_*	_*	_*	_*	_*	550	500
8	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	0
9	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	30	1,6

Ket : * = Perubahan indikator

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.4.1. Sekretariat Daerah

1) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kota Tasikmalaya yang umumnya disebut SAKIP mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 nilai SAKIP Kota

Tasikmalaya adalah 70,21 poin berada pada kriteria BB dan pada tahun 2021 nilai SAKIP Kota Tasikmalaya 71,63 poin berada kriteria BB.

Tabel. 2.117.
Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 – 2021

No	Uraian	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	61	70,21 (BB)	71-80 (BB)	71,09 (BB)	71-80 (BB)	70,84 (BB)	71-80 (BB)	71,63 (BB)

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2022.

2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nmor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 seusai amanat Peraturan Pemerintah Nmor 6 Tahun 2008. Penetapan Peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Capaian LPPD Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.118.
Capaian LPPD Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian LPPD	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	N/A	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,26	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,37	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	N/A

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2022.

Capaian LPPD Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan (realisasi sesuai dengan range target yang telah ditentukan).

3) Penggunaan E-Procurement

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan resmi berdiri tanggal 01 Januari 2019 dan berada pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

BPBJ mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah. BPBJ mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dalam hal Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan pengadaan barang/jasa;
2. Pengelolaan LPSE, dalam hal melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan dan Advokasi PBJ, melalui melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pembinaan advokasi pengadaan barang/jasa.

Sumber daya manusia pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119.
Sumber Daya Manusia pada BPBJ

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	Bersertifikat
2	Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	2	2 Orang Bersertifikat
3	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	9 Orang Bersertifikat
4	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	5	
5	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	3	1 Orang bersertifikat
6	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa	12	10 Orang JFU dan 2 JF
TOTAL		34	14 Orang Bersertifikat

Kinerja BPBJ dinilai melalui Capaian MCP Pemerintah Daerah di Jawa Barat, dan Kota Tasikmalaya berada pada angka 72,74 persen, terdiri dari indikator SDM UKPBJ, pelaksanaan Tupoksi, Perangkat Pendukung, Penayangan SIRUP, serta Pengendalian dan Pengawasan. Berikut kami sajikan Indikator Kinerja BPBJ pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.120
Capaian MCP Pemerintah Kota Tasikmalaya

No.	Indikator MCP		Capaian Tahun 2021
1.	SDM UKPBJ	Ketersediaan SDM (%)	100
		Pokja UKPBJ Permanen (%)	100

No.	Indikator MCP		Capaian Tahun 2021
		Ketersediaan Fungsional PBJ	10
2.	Pelaksanaan Tupoksi	Advokasi PBJ	100
		Evaluasi Kegiatan PBJ	88
		Review Perencanaan PBJ	65
		Vendor Management system	38
3.	Perangkat Pendukung	Kode Etik	100
		Standar Opearsional Prosedur	100
		TPP Khusus UKPBJ	0
4.	Penayangan SiRUP	Persentase Penayanan SiRUP	82
5.	Pengendalian dan Pegawasan	Review HPS	60
		Review Kinerja UKPBJ & Tindak	85

Pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dilakukan kepada penyedia, UKPBJ, Auditor dan Intansi. Paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dari Tahun 2019-2021 sebanyak 7.130 paket. Adapun Jumlah paket lelang pada tahun 2021 sebanayak 2524 paket.

2.1.3.4.2. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

- 1) Tersedianya dokumen RPD tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota)



RPD Kota Tasikmalaya disusun seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 pada Tahun 2022, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Tasikmalaya. Selain itu, Kebijakan nasional tentang pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sehingga pada masa transisi ini, dipandang dari sisi perencanaan, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah terjadi “kekosongan”.

Dokumen RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. RPD ini disusun untuk mengisi kekosongan perencanaan daerah jangka menengah. RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 pada tanggal 28 April 2022.

- 2) Tersedianya dokumen RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota)

Dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Tasikmalaya telah ditetapkan dengan peraturan Walikota Tasikmalaya. RKPD tahun 2022 mengacu kepada RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 dan merupakan RKPD tahun terakhir dari periode RPJMD 2017-2022. RKPD Tahun 2022 difokuskan untuk menyelesaikan target kinerja Wali Kota periode Tahun 2017-2022.

- 3) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen. Adapun untuk tahun 2020 dan 2021 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 100 persen.

- 4) Penerapan SIPD

Sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menggunakan sistem informasi berbasis online dalam proses perencanaan di Provinsi Jawa Barat. Sistem ini memuat perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.



Pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan:

1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik; serta 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan: 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik; serta 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya telah menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan. Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya juga telah menggunakan SIPD yang sebelumnya menggunakan sistem perencanaan mandiri (E-planning).

Adapun indikator kinerja penunjang bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.121.
Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang
Perencanaan Tahun 2018 - 2021

INDIKATOR	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	10	100
Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	%	15	36,99	25	31,52	85	73,53	30	66,06
Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	%	75	77,27	85	73,53	100	100	90	67,85
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	80	83,33	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.4.3. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan Walikota. Namun bila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kota Tasikmalaya tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota bersama

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tabel 2.123.
Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 - 2021

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100*	100	100	_*	_*	_*	_*
Persentase implementasi teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	%	100	100	100	100	_*	_*	_*	_*
Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat	%	36	31,66	38	40	_*	_*	_*	_*
Opini BKP atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	_*	_*	_*	_*	WTP	WTP	WTP	WTP

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase laporan keuangan sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase waktu penetapan KUA dan PPAS	%	**-	*-	*-	*-	**-	*-	100	100
Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang ditetapkan	%	95	96,66	95	95,75	100	100	95	96,97
Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase inventarisasi asset milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	12	11,88	11	3,91	6,49	-0,39	7,01	41,68
Persentase peningkatan pajak daerah	%	11	11,80	10	19,61	-27,77	-14,60	4,49	14,06
Persentase peningkatan retribusi daerah dan pendapatan lainnya	%	7	12,30	14	-7,87	-5,72	13,44	1,95	59,35
Persentase objek pajak baru terhadap yang ditargetkan	%	*-	*-	20	20	20	97,58	20	209,70
Persentase implementasi sistem informasi pajak daerah	%	*-	*-	20	23,30	20	100	15	88,89
Persentase penanganan wajib pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh	%	*-	*-	20	43,28	20	123,88	20	146,27
Capaian pajak daerah terhadap target	%	100	101,42	100	106,18	100	112,47	100	103,71
Capaian retribusi daerah dan pendapatan lainnya terhadap target	%	100	117,13	100	90,72	100	88,31	100	96,68

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, 2022.

- * Target Lama
- ** Target Baru

Transparansi Informasi APBD dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Guna mendorong keterbukaan informasi publik yang terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan yang dapat diakses secara *online* oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas melalui *website* di alamat <https://data.tasikmalayakota.go.id/> pada menu badan Pengelola Keuangan Daerah.



Gambar 2.47.
Website Data Tasikmalaya

2.1.3.4.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018 - 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.124
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang
Bidang Kepegawaian Tahun 2018 - 2021

INDIKATOR	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	76	49,29	77	49,62	78	52,92	78	63,26
Kesesuaian Kompetensi Aparatur dengan Jabatannya	%	73,5	74,30	75	76,99	76	76,59	78	78,01



INDIKATOR	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat disiplin aparaturn perangkat daerah	%	99	99,68	99	99,96	99	99,79	99	99,84
Capaian implementasi SIMPEG	%	50	52,50	50	60,70	60	68,33	70	80,37
Capaian pembinaan disiplin aparaturn	%	100	100,00	100	100,00	100	95,00	100	100,00
Capaian layanan kepegawaian	%	100	93,01	100	151,92	100	94,43	100	114,37
Capaian pendidikan dan pelatihan aparaturn	%	100	107,63	100	120,14	100	100,38	100	100,54

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada tahun sampai dengan tahun 2021 umumnya menunjukkan peningkatan. Namun, capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.125.
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2018 - 2021

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kategori	_*	_*	_*	Tidak Inovatif	_*	Kurang Inovatif	_*	Inovatif

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.
_* Belum ada penetapan target

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dapat terelaborasi sebesar 100 persen. Sedangkan untuk indikator Indeks Inovasi Daerah ada perbaikan capaian dari kurang inovatif pada tahun 2020 menjadi Inovatif pada tahun 2021.

2.1.3.4.6. Unsur Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Berikut capaian indikator unsur pengawasan:

Tabel 2.126.
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2018 - 2021

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
IKM Perangkat Daerah	Kategori	80	88	85	81,58	90	81,5	_*	_*
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	65	54	70	66,87	72	70,47	_*	_*
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	75	86	77	86,35	80	87	_*	_*
Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	_*	_*
Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	_*	_*
Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	2 (plus)	_*	_*
Persentase nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	_*	_*	_*	_*	60	70,52	_*	_*
Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	%	_*	_*	_*	_*	80 (BB)	83,31 (A)	_*	_*
Rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	75	77,85
Nilai SAKIP Kota	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	73	71
Level Maturitas SPIP Kota Tasikmalaya	Level	_*	_*	_*	_*	_*	_*	3	2,83
Skor PMPRB Kota Tasikmalaya	Poin	_*	_*	_*	_*	_*	_*	70	0
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Predikat WBK/WBBM	Unit	_*	_*	_*	_*	_*	_*	3	0
Persentase Kepatuhan Pelaporan harta kekayaan aparatur	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100
Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	N/A
Indeks Persepsi korupsi hasil survey eksternal	Poin	_*	_*	_*	_*	_*	_*	3	2,96
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	64,01
Persentase tingkat maturitas SPIP perangkat daerah	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	N/A
Tingkat capaian kapabilitas APIP	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	N/A
Persentase penyelenggaraan pengawasan fungsional APIP	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	100	95,50

Sumber : Inspektorat Kota Tasikmalaya, 2022.
-* Indikator Lama
-** Indikator Baru

Secara umum tabel di atas menggambarkan bahwa capaian urusan pengawasan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa indikator baru yang nilai capaiannya belum tersedia dan terdapat pula indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, misalnya Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat dan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti.

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Angka konsumsi perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2017-2020 terus meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.127.
Angka Konsumsi Perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Total Pengeluaran per kapita	13.348,35	14.459,94	15.710,37	15.068,46	15.729,30
2.	Jumlah Penduduk	661.404	662.723	663.517	716.515	723.920
3.	Rata-rata Pengeluaran perkapita (juta)	20,18	21,82	23,68	21,03	21,72

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

2. Persentase Konsumsi Non Pangan Perkapita

Persentase konsumsi non pangan perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.128.
Persentase Konsumsi Non Pangan perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

No.	Kelompok Konsumsi	Satuan	2018	2019	2020	2021
1.	Makanan dan Minuman Selain Restoran (Pangan)	Milyar Rp	7.054,52	8.082,98	7.755,02	7.875,23
	Persentase	%	48,79	51,45	49,84	50,07
	Pengeluaran Pangan Perkapita	Juta Rp	10,64	11,29	10,83	10,21
2.	Non Pangan		7.405,43	7.627,38	7.804,82	7.875,23
	Persentase	%	51,21	48,55	50,16	49,93

No.	Kelompok Konsumsi	Satuan	2018	2019	2020	2021
	Pengeluaran Non Pangan Perkapita	Juta Rp	11,17	10,65	10,89	

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.4.2. Infrastruktur Kota Tasikmalaya

1. Jalan Kota

Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, dinyatakan bahwa panjang jalan kota di Kota Tasikmalaya adalah 450,742 km. Adapun kinerja infrastruktur jalan kota selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.129.
Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Km	-*	403,910	-*	411,302	-*	379,525	-*	397.157
Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	93	89,61	91,58	91,25	97	84,2	98	88,11
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target	Km	-*	29,100	-*	37,470	-*	16,083	-*	19,601
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km)	%	6	14,55	25	18,74	30	8,04	0,4	9,80
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	Km	-*	65,73	-*	80,42	-*	45,90	-*	42,275
Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun)	%	20	21,91	20	26,81	20	15,3	20	14,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Dari tabel diatas, tampak bahwa panjang jalan kondisi baik mengalami penurunan di tahun 2020. Hal tersebut diantaranya dikarenakan adanya refocusing anggaran bidang jalan. Sesuai dengan umur jalan, harus dilakukan pemeliharaan rutin atau berkala dan peningkatan jalan untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi jalan.

Lebih lanjut, panjang jalan kota belum seluruhnya dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan dan apabila sudah ada belum berfungsi secara optimal terutama drainase jalan. Sehingga, pada beberapa ruas jalan mengalami genangan ketika hujan. Tabel berikut ini merupakan kinerja bangunan pelengkap jalan terdiri dari pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tabel 2.130.
Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Km	20	21,51	20	26,81	20	37,03	20	26,69
Capaian pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	%	79,25	71,7	89,62	80,93	94,34	123,43	88,16	88,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Bangunan pelengkap jalan diatas meliputi pekerjaan-pekerjaan antara lain pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan drainase jalan, pembangunan/ rehabilitasi tembok penahan tanah jalan dan pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar.

Berikut ini merupakan capaian pembangunan jalan mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.131.
Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun	Km	-*	0,7	-*	0,9	-*	2,45	-*	3,425
Capaian jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit)	%	3,3	10,93	14,83	14,05	33,55	38,25	88,16	53,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Di sisi lain, masih terdapat masalah keterbatasan kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Hal ini disiasati dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2. Sumber Daya Air

Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.132.
Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	53,47	58	60,2	68,49	66,6	79,94	72,68	84,23
Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik	KM	108,01	117,15	121,61	138,36	134,53	161,47	146,8	180,22
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya (target 40 Km selama 5 thn)	%	20	13,9	20	27,2	20	5,95	20	25,47
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya	Km	-*	5,56	-*	10,88	-*	2,38	-*	10,19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021.

2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Investasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum suatu daerah yang salah satu indikatornya adalah jumlah kriminalitas yang terjadi. Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.133.
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 - 2021

No.	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus Narkoba	0	0	5	87
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	0	1	3	1

No.	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
3	Jumlah Kejahatan Seksual	35	26	35	32
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	57	43	39	4
5	Jumlah Kasus Pencurian	108	77	69	70
6	Jumlah Kasus Penipuan	132	96	105	67
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	0	1
8	Jumlah Pidana Lainnya	98	122	120	109
9	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	430	366	376	327

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2021.

2. Jumlah Demonstrasi

Selain tingkat kriminalitas, kondisi keamanan dan ketertiban yang dapat mempengaruhi investasi daerah adalah banyaknya demonstrasi yang terjadi disuatu daerah.

Jumlah demonstrasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.134.
Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2021

No.	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Bidang Politik	1	9	10	6
2.	Ekonomi	3	7	19	6
3.	Lainnya	9	19	20	8
	Jumlah	13	35	49	20

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2022.

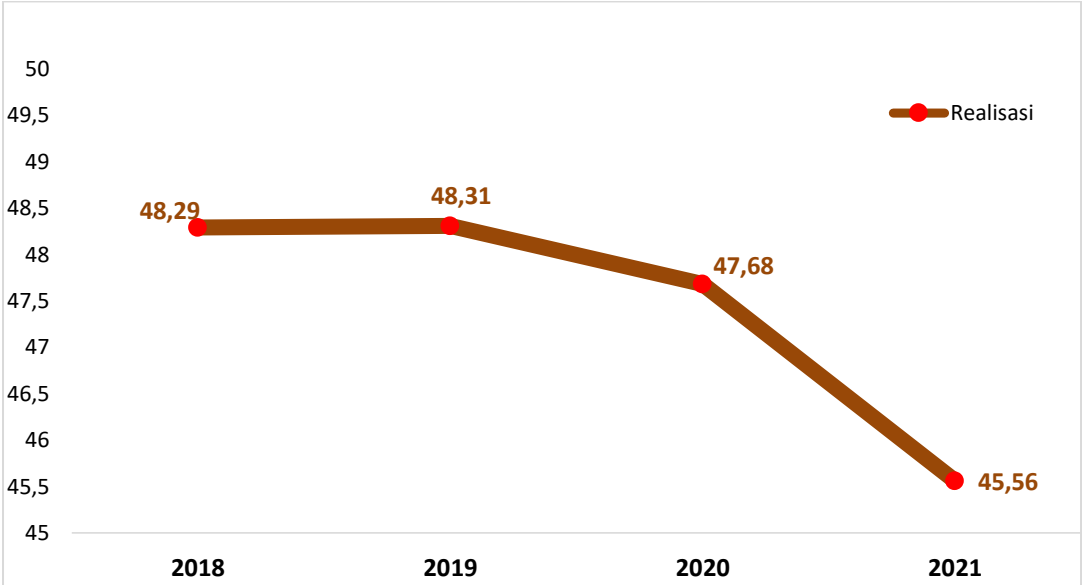
2.1.4.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*). Angka ini menggambarkan berapa besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Selain itu, angka ini dijadikan pula sebagai indicator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, apakah tergolong daerah maju atau sedang berkembang.

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 45,56. Hal ini berarti, bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Angka ini menyatakan bahwa masih banyak penduduk usia tidak produktif yang ditanggung penduduk usia

produktif. Semakin besar angka beban ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Gambar 2.48.
Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)
Kota Tasikmalaya 2018-2021



2.2. Evaluasi RKPD TAHUN 2021

Tabel 3.135.
Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
sampai dengan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)		Tingkat capaian Kinerja trhdp target	Tingkat capaian Keuangan trhdn	Predikat kinerja	Predikat anggaran
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Kinerja	Anggaran (Rp.)				
1	DINAS PENDIDIKAN	5	15	72	507.665.579.090	496.646.280.033	98,70	97,83	98,70	97,83	ST	ST
2	DINAS KESEHATAN	53	73	157	596.159.564.971	563.800.307.581	98,00	94,57	98,00	94,57	ST	ST
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	12	26	83	329.429.018.476	323.391.478.303	100,00	98,17	100,00	98,17	ST	ST
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	11	38	10.728.087.226	10.694.899.958	100,00	99,69	100,00	99,69	ST	ST
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	12	40	12.057.434.610	12.011.144.425	100,00	99,62	100,00	99,62	ST	ST
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	13	52	7.595.809.490	7.336.525.827	97,78	96,59	97,78	96,59	ST	ST
7	DINAS SOSIAL	6	16	57	10.065.946.090	9.939.546.367	99,00	98,74	99,00	98,74	ST	ST
8	DINAS TENAGA KERJA	4	13	41	5.382.579.140	5.286.160.310	100,00	98,21	100,00	98,21	ST	ST
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	10	27	65	29.953.292.825	29.453.297.928	99,00	98,33	99,00	98,33	ST	ST
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	14	40	33.582.350.450	33.210.225.973	100,00	98,89	100,00	98,89	ST	ST
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	13	42	10.132.781.111	9.945.627.496	100,00	98,15	100,00	98,15	ST	ST
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	23	58	13.252.970.837	12.327.116.862	98,39	93,01	98,39	93,01	ST	ST
13	DINAS PERHUBUNGAN	2	14	42	45.590.874.900	45.352.745.726	100,00	99,48	100,00	99,48	ST	ST
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	14	43	19.783.902.779	19.617.751.323	100,00	99,16	100,00	99,16	ST	ST
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16	32	77	50.680.365.324	44.069.930.739	96,33	86,96	96,33	86,96	ST	T
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15	48	10.643.739.946	6.620.703.176	90,00	62,20	90,00	62,20	T	R



NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)		Tingkat capaian Kinerja trhdp target	Tingkat capaian Keuangan trhdn	Predikat kinerja	Predikat anggaran
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Kinerja	Anggaran (Rp.)				
17	DINAS KEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	10	25	49	16.502.101.101	16.335.619.941	100,00	98,99	100,00	98,99	ST	ST
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	15	46	6.582.767.250	6.510.805.547	100,00	98,91	100,00	98,91	ST	ST
19	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	73	73.462.972.501	72.031.014.484	100,00	98,05	100,00	98,05	ST	ST
20	SEKRETARIAT DPRD	2	18	64	60.899.272.175	59.875.400.933	99,50	98,32	99,50	98,32	ST	ST
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	19	69	11.528.657.994	11.292.026.135	100,00	97,95	100,00	97,95	ST	ST
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	13	72	44.114.738.320	42.077.406.141	98,90	95,38	98,90	95,38	ST	ST
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	10	45	22.822.301.804	21.984.863.638	99,92	96,33	99,92	96,33	ST	ST
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	14	44	15.272.386.630	15.156.217.852	100,00	99,24	100,00	99,24	ST	ST
25	INSPEKTORAT	3	10	36	11.962.867.560	11.838.248.871	100,00	98,96	100,00	98,96	ST	ST
26	KECAMATAN CIHIDEUNG	5	15	43	10.023.319.360	9.994.732.720	100,00	99,71	100,00	99,71	ST	ST
27	KECAMATAN CIPEDES	5	17	46	8.926.453.750	8.856.834.825	100,00	99,22	100,00	99,22	ST	ST
28	KECAMATAN TAWANG	5	17	46	10.367.116.135	10.321.594.798	100,00	99,56	100,00	99,56	ST	ST
29	KECAMATAN INDIHIANG	5	17	47	10.347.294.357	10.322.223.840	100,00	99,76	100,00	99,76	ST	ST
30	KECAMATAN KAWALU	5	16	46	14.237.885.740	13.968.751.218	100,00	98,11	100,00	98,11	ST	ST
31	KECAMATAN CIBEUREUM	5	14	51	14.343.586.500	14.169.256.840	100,00	98,78	100,00	98,78	ST	ST
32	KECAMATAN TAMANSARI	5	17	46	11.988.477.828	11.856.410.241	100,00	98,90	100,00	98,90	ST	ST
33	KECAMATAN MANGKUBUMI	5	17	47	12.359.318.600	12.288.600.736	100,00	99,43	100,00	99,43	ST	ST
34	KECAMATAN BUNGURSARI	5	17	44	12.295.042.112	12.232.368.762	100,00	99,49	100,00	99,49	ST	ST
35	KECAMATAN PURBARATU	5	16	45	10.002.019.621	9.929.519.834	100,00	99,28	100,00	99,28	ST	ST
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	14	42	10.269.862.100	9.520.891.975	100,00	92,71	100,00	92,71	ST	ST
JUMLAH		237	651	1956	2.081.012.738.703	2.010.266.531.358	99,32	96,60	99,32	96,60	ST	ST

Keterangan : ST = Sangat Tinggi, T =Tinggi, S=Sedang, R = Rendah SR = Sangat R



Untuk rincian realisasi kinerja dan anggaran masing-masing program dalam RKPD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.136.
Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Program

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR				-						
DINAS PENDIDIKAN				532.105.149.712						
Dinas Pendidikan		0		532.105.149.712	3.447	11.286.954.417	3.486	183.382.559.945	6.933	194.669.514.362
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				532.105.149.712	3.447	11.286.954.417	3.486	183.382.559.945	6.933	194.669.514.362
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP Perangkat daerah	68 (B)		401.016.143.922	1.110	10.523.400.387	1.198	172.307.924.809	2.308	182.831.325.196
	Capaian IKM Perangkat Daerah	81 (Baik)								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		103		130.699.292.085	2.337	713.154.030	2.238	10.990.394.936	4.575	11.703.548.966
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase capaian pengembangan kurikulum	231		66.993.226	-	-	-	-	-	-
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	350		272.720.479	-	50.400.000	50	84.240.200	50	134.640.200



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	80		50.000.000	-	-	-	-	0	-
DINAS KESEHATAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				399.428.073.895		54.593.348.348		103.213.977.601		157.807.325.949
DINAS KESEHATAN				289.952.616.195		37.929.774.613		103.213.977.601		141.143.752.214
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	81	Kategori (A)	173.823.980.325		36.857.768.384		80.029.781.514	0	116.887.549.898
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100%	109.943.585.407		1.069.586.229		18.882.039.591	0	19.951.625.820
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi		55%	4.330.569.463		-		4.201.368.146	0	4.201.368.146
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentasi ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		100%	336.300.000		-		49.398.000	0	49.398.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS		42%	1.518.181.000		2.420.000		51.390.350	0	53.810.350
UPT KHUSUS DR. SOEKARDJO				109.475.457.700		16.663.573.735				16.663.573.735



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				104.475.089.340		16.663.573.735			0	16.663.573.735
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				5.000.368.360		-			0	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG										
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				117.755.582.285		4.589.214.255			-	4.591.387.605
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				117.641.282.285		4.589.214.255			-	4.589.214.255
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	81	Kategori A	13.356.876.285		3.083.794.539		3.960.951.418	-	7.044.745.957
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	35,53	%	9.614.600.000	0	561.690.800	-	2.740.446.123	-	3.302.136.923
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase KK/RT berakses layanan air minum	56,07	%	7.181.651.000	0	17.181.000	-	612.062.514	-	629.243.514
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	61,59	%	7.970.683.000	0	123.532.800	-	117.517.222	-	241.050.022



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	15,53		11.985.000.000	0	-	-	404.984.550	-	404.984.550
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Prosentase Insfrastruktur Lingkungan dalam Kondisi Baik	64,07	%	31.283.066.000	0	20.700.000	-	10.010.086.744	-	10.030.786.744
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan gedung yang ditangani (jumlah bangunan gedung yang ditangani / jumlah total bangunan gedung yang menjadi kewajiban pemda * 100)	26,32	%	7.113.160.000	0	8.030.250	-	884.303.850	-	892.334.100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase ruas jalan yang dibangun	100	%	27.594.666.000	0	706.861.750	-	2.450.806.250	-	3.157.668.000
	persentase ruas jalan yang ditingkatkan	100	%							
	persentase ruas jalan yang direhabilitasi	100	%							
	persentase jembatan yang ditangani	16,44	%							
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	100	%	105.000.000	0	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase tersedianya dokumen kajian rencana tata ruang wilayah daerah	100		1.436.580.000	120	67.423.116	-	143.378.714	120	210.801.830



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
	Persentase ijin pengawasan pemanfaatan ruang	98								
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		3		114.300.000	0	-	-	2.173.350	-	2.173.350
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		741		10.693.649.958,00	58	1.155.989.065	57	1.889.323.123	115	3.045.312.188
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		741		10.693.649.958,00	58	1.155.989.065	57	1.889.323.123	115	3.045.312.188
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		182		4.842.642.207,00	34	1.088.698.465	33	1.551.295.623	68	2.639.994.088
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		554		3.558.696.199,00	22	15.365.100	21	128.314.500	43	143.679.600
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		5		2.292.311.552,00	2	51.925.500	2	209.713.000	4	261.638.500
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
Satuan Polisi Pamong Praja		1299		13.557.660.030	432	2.779.510.799	304	3.934.170.122	736	6.713.680.921
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.299		13.557.660.030	432	2.779.510.799	304	3.934.170.122	736	6.713.680.921
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		509		12.920.380.030	332	2.706.244.187	161	3.527.365.922	493	6.233.610.109



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		790		637.280.000	100	73.266.612	143	406.804.200	243	480.070.812
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				8.987.426.110						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		47506		8.987.426.110	40	1.406.059.383	272	2.316.578.914	312	3.722.638.297
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		46715		6.252.896.010	35	1.164.179.583	65	1.840.882.081	100	3.005.061.664
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		778		1.962.505.100	2	129.240.000	204	364.929.853	206	494.169.853
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		13		772.025.000	3	112.639.800	3	110.766.980	6	223.406.780
DINAS SOSIAL				12.100.250.483		714.280.415	398	3.460.443.584	461	4.174.723.999
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.100.250.483		714.280.415	398	3.460.443.584	461	4.174.723.999
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		535		6.031.936.483	200	579.530.755	3	2.562.982.735	196	3.142.513.490
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.010		2.011.000.000	-	66.947.500	-	187.682.200	128	254.629.700



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.706		2.997.314.000	-	53.259.000	295	580.443.599	126	633.702.599
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		150		160.000.000	-	2.690.000	100	93.700.350	-	96.390.350
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		430		150.000.000	-	5.130.000	-	7.365.700	10	12.495.700
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		2		750.000.000	-	6.723.160	-	28.269.000	1	34.992.160
DINAS TENAGA KERJA										
Dinas Tenaga Kerja				6.365.058.290	2	1.482.470.807	-	1.533.670.430	2	3.016.141.237
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.365.058.290	2	1.482.470.807	-	1.533.670.430	2	3.016.141.237
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian IKM perangkat daerah;	79	Baik	4.805.058.290		1.076.929.137		1.326.083.930	-	2.403.013.067
	Capaian SAKIP perangkat daerah;	73	BB						-	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;	100	%	920.000.000	-	310.434.320		207.586.500	-	518.020.820
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;	100	%				-		-	
	Jumlah wirausaha baru sektor ketenagakerjaan;	100	%				-		-	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	44,3	%	340.000.000	2,2	47.170.000		-	2	47.170.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB);	78	%	300.000.000	-	47.937.350	-	-	-	47.937.350
	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);	100	%		67				67	
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN										
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		5.417		38.659.572.033	84	9.140.008.197	2.712	17.006.236.709	729	26.146.244.906
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		1.338		15.154.735.933	41	3.779.568.952	688	5.330.169.045	729	9.109.737.997
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Capaian SAKIP A (81,00) ; 2) Capaian IKM Perangkat Daerah Baik (85).	254		14.434.735.933	31	3.760.778.952	37	5.039.088.045	68	8.799.866.997
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun melalui poenyusunan Dokumen FSN (1 Dokumen)	1		50.000.000	-	-	-	2.719.500	-	2.719.500



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1) % Angka Kecukupan Energi (AKE); 2) % Angka Kecukupan Protein (AKP) - (100%)	559		620.000.000	9	18.790.000	150	243.669.300	159	262.459.300
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani (50%) - (51%)	520		40.000.000	-	-	500	37.407.500	500	37.407.500
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (79%) - (80%)	4		10.000.000	1	-	1	7.284.700	2	7.284.700
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2.262		23.504.836.100	23	2.744.484.778	1.022	6.250.339.157	1.051	1.110.938.090
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		445		6.371.500.000	3	128.530.311	20	824.610.650	29	1.110.938.090
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1) Jumlah RTS Miskin Perikanan yang dibina (Orang); 2) Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan (Orang); 3) Capaian produksi Perikanan Budidaya (Ton); 4) Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar (%)	428		4.986.500.000	3	127.882.311	17	714.179.454	20	842.061.765
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Capaian Produksi Produk Hasil Perikanan 197 - 199 (Ton)	17		1.385.000.000	-	648.000	3	110.431.196	9	268.876.325
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		1.817		17.133.336.100	20	2.615.954.467	1.002	5.425.728.507	1.022	8.041.682.974



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1) Cakupan bina kelompok tani (Orang); 2) Jumlah RTS Miskin Pertanian yang dibina (Orang); 6) Jumlah Wirausaha Baru Sektor Pertanian (Orang)	476		14.302.436.100	8	2.533.159.054	186	4.729.350.440	194	7.262.509.494
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kw/Ha); 2) Capaian produksi hasil peternakan (Ton); 3) Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1.014		1.640.000.000	3	63.360.413	504	296.987.997	507	360.348.410
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1) Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%); 2) Jumlah Laporan hasil pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (Dokumen);	199		917.500.000	6	8.750.000	181	357.310.970	187	366.060.970
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Laporan pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim	4		80.000.000	1	-	1	-		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah gapoktan yang dibina (Gapoktan)	128		273.400.000	3	10.685.000	131	42.079.100	134	52.764.100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP										



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				35.232.141.149		7.965.883.456		10.031.243.737		17.997.127.193
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				35.232.141.149		7.965.883.456		10.031.243.737		17.997.127.193
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	81	Kategori (poin)	16.955.324.399	71,51	4.789.465.020	71,66	5.256.619.645	143	10.046.084.665
	Capaian IKM Perangkat Daerah	89	Kategori (poin)	8.000.000	-	0				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	231.000.000	8,70	18.453.900	0,1304	17.671.100	9	36.125.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapainya Indeks Kualitas Air	53,6	Kategori (poin)	308.630.000		32.832.800		106.923.260	0	1.413.072.150
	Tercapainya Indeks Kualitas Udara	79,6	Kategori (poin)						0	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Luas RTH yang dikelola	100	%	3.195.400.000	25	277.735.350	25	1.135.336.800	50	1.413.072.150
	Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	100	%	109.700.000	0	727.900	0	180.000	-	907.900



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah	100	%	27.500.000	15,00	4.090.300	23,33	14.122.450	38	18.212.750
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Pelatihan, Penyuluhan, dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100	%	10.000.000	100	9.915.000	0	-	100	9.915.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat yang memperoleh Penghargaan	50	%	10.000.000	0	0	0	-	-	-
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	%	19.000.000	50	0	25	3.413.000	75	3.413.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	83,45	%	9.943.155.175	17,24	2.126.542.630	24,83	2.814.038.120	42	4.940.580.750
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah di TPA	100	%	4.414.431.575	25,00	706.120.556	25,00	682.939.362	50	1.389.059.918
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				9.995.733.390		681.067.053		3.175.646.198		3.856.713.251
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.995.733.390						



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			9.277.962.190		576.505.793		3.029.292.767	-	3.605.798.560
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk			311.385.600		5.679.500		98.205.531	-	103.885.031
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta pencatatan sipil			185.000.000		44.680.300		30.823.500	-	75.503.800
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan			221.385.600		54.201.460		17.324.400	-	71.525.860
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				16.925.070.788	-	1.480.703.228	53.740	2.775.931.037	53.740	4.256.634.265
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				15.594.630.788	-	1.389.447.228	53.740	2.284.190.706	53.740	3.673.637.934
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.698.312.788	5	1.162.206.903	148	1.300.055.178	153	2.462.262.081
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				185.305.000	43.000	6.227.300	53.590	20.714.550	96.590	26.941.850
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.261.232.000	12	216.013.025	2	680.224.392	14	896.237.417



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				5.449.781.000	-	5.000.000	-	283.196.586	-	288.196.586
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.330.440.000	33	91.256.000	-	491.740.331	33	582.996.331
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				78.640.000	-	4.500.000	-	6.125.500	-	10.625.500
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				70.000.000	9	13.665.000	-	3.545.997	9	17.210.997
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				852.280.000	-	5.140.000	-	414.301.695	-	419.441.695
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				178.760.000	13	37.129.500	-	56.158.850	13	93.288.350
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		45		150.760.000	11	30.821.500	-	11.608.289	11	42.429.789
DINAS PERHUBUNGAN										
DINAS PERHUBUNGAN				42.117.499.670		9.644.181.457				21.998.809.950
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				42.117.499.670		9.644.181.457				21.998.809.950
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	79	22.500.000		-		-	-	-



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	82,75/A	35.676.422.170		9.538.269.016		9.774.733.637	-	19.313.002.653
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	51,96	5.264.031.000	51,96	68.549.508	0	2.509.418.734	52	2.577.968.242
	Persentase pelayanan andalalin	%	100	13.500.000		-		-	-	-
	Persentase pelayanan angkutan umum	%	100	811.467.500	21,18	37.362.933	40,84	70.476.122	62	107.839.055
	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Angkutan	%	85,91	329.579.000	14,99	-	24,58	-	40	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100		17.698.515.803	15,83	2.685.511.143	158,04	4.984.716.730	173,87	7.670.227.873
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	%	17.198.515.903	23,40	2.660.281.143	66,04	4.698.177.646	89,44	7.358.458.789
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	6.378.779.903	20,22	1.098.641.104	2,61	1972898192	22,83	3.071.539.296
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan Saluran Informasi	100	%	986.560.000	25,00	81.129.500	37,5	275317000	62,50	356.446.500



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola Capaian Predikat Indeks SPBE	100	%	9.833.176.000	24,98	1.480.510.539	25,9323 11	2449962454	51	3.930.472.993
		(3.00) Baik	Nilai Indeks / Predikat							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				499.999.900						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		100		200.000.000	16,56	18.340.000	50	52.189.050	67	70.529.050
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pengelolaan Basis Data	100	%	200.000.000	16,56	18.340.000	50	52189050	67	70.529.050
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		60		299.999.900	1	6.890.000	42	234.350.034	43	241.240.034
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	60	%	299.999.900	1,20	6.890.000	42	234350034	43	241.240.034
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				21.937.379.915		-				7.664.282.096
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.156.546.965						5.949.134.387
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	76	(BB) Kategori	10.995.196.965	-	2.426.130.639		3.221.845.998	-	5.647.976.637



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan/atau diperiksa	13,5	%	100.000.000	6	14.765.000	2	27.513.750	8	42.278.750
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi sehat	24	%	100.000.000	-	10.500.000		25.451.300	-	35.951.300
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kompeten	10	%	202.100.000	-	-	3	52.487.500	3	52.487.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang dibina	100	%	155.000.000	-	-			-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha mikro	65	%	132.000.000	-	14.000.000	-	23.260.000	-	37.260.000
	Jumlah Masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	100	Orang						-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase wirausaha baru sektor perdagangan	65	%	472.250.000	-	45.766.150	25	87.414.050	25	133.180.200
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.780.832.950						1.715.147.709
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4.611.097.950						1.359.089.934
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100	%	25.000.000	-	-	35	3.584.000	35	3.584.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	80	%	3.700.097.950	80	189.893.028		922.683.244	80	1.112.576.272



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	72	%	40.000.000	-	-		9.545.000	-	9.545.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3	%	380.000.000	-	-		159.212.242	-	159.212.242
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertera sah	88	%	266.000.000	62	13.206.300		60.966.120	62	74.172.420
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	76	%	200.000.000	-	-			-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.169.735.000						356.057.775
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri	5	%	5.164.735.000	-	48.696.550		307.361.225	-	356.057.775
	Jumlah wirausaha baru sektor industri	325	Orang						-	-
	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri	100	Orang						-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	30	%	5.000.000	-	-			-	-
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					377	1.223.808.408	1.952	2.209.454.321		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			6.372.670.920		1.083.528.042	-	1.905.866.542	-	2.989.394.584
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	1	Unit	100.000.000		-			-	-
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	1	Kali	146.436.000		-			-	-
Program Pelayanan Penanaman Modal	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	4.672	Dokumen	1.058.366.386	377	140.280.366	1.950	202.070.279	2.327	342.350.645
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	8	Dokumen	369.695.000		-	2	88.358.000	2	88.358.000
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Perijinan sesuai SOP	1,1	Basis Data,Buah	51.076.264		-		13.159.500	-	13.159.500
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata				23.468.197.054	2	1.517.800.520	-	4.064.130.137		6.773.841.683
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				18.806.101.054	2	1.492.291.170	-	4.064.130.137		5.556.421.307
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	75 (BB)	Kategori	6.273.011.054		1.235.276.849		1.591.068.781	-	2.826.345.630
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	30	%	1.925.970.000	2	78.606.500		652.638.900	2	731.245.400



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	75	%	10.607.120.000		178.407.821		1.820.422.456	-	1.998.830.277
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.162.095.000		12.500.000				137.469.700
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	20	%	887.095.000	1	12.500.000	11	12.500.000	12	25.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	57	%	75.000.000	-	-	37	42.456.700	37	42.456.700
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	0	%	-		-		-	-	-
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	34	%	200.000.000		-		70.013.000	-	70.013.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.500.001.000		13.009.350				1.079.950.676
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				3.500.001.000		13.009.350				1.079.950.676
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	55	%	404.521.142		10.359.850		145.232.991	-	155.592.841
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	430.560	Orang	616.427.000		2.649.500		130.187.086	-	132.836.586
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	41	%	2.479.052.858		-		791.521.249	-	791.521.249



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH				6.497.871.220		1.143.174.633		1.783.127.936		1.419.206.379
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6.134.497.220		1.123.778.683		1.676.388.736		1.293.071.229
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian IKM perangkat daerah	83	Poin (Baik)	5.333.412.220	0	1.093.850.683		1.379.662.636	0	966.417.129
	Capaian SAKIP Perangkat daerah	78	Poin (BB) (Kategori)		0				0	
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	17	%	776.729.000	0	29.928.000		293.733.350	0	323.661.350
	Persentase pembinaan perpustakaan	5,53	%		0				0	
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	50	%	24.356.000	0	-	-	2.992.750	0	2.992.750
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				363.374.000		19.395.950		106.739.200		126.135.150
Program Pengelolaan Arsip	Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal	2	Poin	363.374.000	0	19.395.950		106.739.200	0	126.135.150
	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	70,27	%		0				0	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
SEKRETARIAT DAERAH		-	0	79.536.642.318	-	9.366.922.663	-	26.420.839.935	-	35.787.762.598
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	-	0	79.536.642.318	-	9.366.922.663	-	26.420.839.935	-	35.787.762.598
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (75)	Kategori	24.967.710.820	-	5.684.879.557	-	7.386.368.565	-	13.071.248.122
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian IKM Perangkat Daerah	77-88 (Baik)	Kategori	18.299.196.176	-	2.959.377.280	-	4.460.989.904	-	7.420.367.184
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	100	%	3.822.170.584	-	7.420.000	-	3.667.378.178	-	3.674.798.178
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Pemerintahan	100	%	665.279.480	-	27.787.500	-	320.937.000	-	348.724.500
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%	27.287.334.000	-	232.784.760	-	9.741.000.000	-	9.973.784.760
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	100	%	1.476.802.968	-	95.695.200	-	422.537.724	-	518.232.924
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Perekonomian	100	%	663.337.690	-	60.327.200	-	93.462.500	-	153.789.700
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Pembangunan	100	%	295.420.000	-	15.450.000	-	61.898.710	-	77.348.710
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	100	%	823.940.000	-	20.595.000	-	67.095.742	-	87.690.742
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	%	1.235.450.600	-	262.606.166	-	199.171.612	-	461.777.778



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
SEKRETARIAT DPRD		1.313.914		66.249.000.450	109.077	2.475.367.085	109.470	4.347.221.288	328.186	6.822.588.373
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.313.793		47.852.727.310	109.076	2.380.972.785	109.448	3.239.873.411	218.524	5.620.846.196
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		121		18.396.273.140	1	94.394.300	22	1.107.347.877	23	1.201.742.177
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				14.140.657.188		2.528.061.851			-	2.528.061.851
PERENCANAAN				13.240.657.188		2.519.408.051			-	2.519.408.051
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			10.993.857.188		1.993.789.415		3.735.177.707	-	5.728.967.122
	Capaian IKM Perangkat Daerah				85	1.836.252.565	85,25	3.362.194.850	170	5.198.447.415
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD			1.320.000.000		426.995.916		153.365.600	-	580.361.516
	Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD									
	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan									
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup			926.800.000		98.622.720		170.463.850	-	269.086.570

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
	Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia									
	Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia									
	Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilyahan									
	Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilyahan									
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				900.000.000		8.653.800		32.633.300	-	41.287.100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan			900.000.000		8.653.800		32.633.300	-	41.287.100
	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi									
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				25.581.590.990,00		3.270.316.707,00		7.712.907.833,00		10.983.224.540,00
KEUANGAN				25.581.590.990,00		3.270.316.707,00		7.712.907.833,00		10.983.224.540,00



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian IKM Perangkat Daerah	88	Baik	14.232.158.571,00		2.527.317.657,00		3.312.637.558,00	0	5.839.955.215,00
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	84	A						0	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu	100	%	8.051.374.169,00		545.571.140,00		2.551.331.188,00	0	3.096.902.328,00
	Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan	95	%		5,22		27,37		32,59	
	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	100	%		100				100	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase inventarisasi aset milik daerah	100	%	3.298.058.250,00	25	197.427.910,00	25	1.848.939.087,00	50	2.046.366.997,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH										
Badan Pendapatan Daerah				24.232.624.002		1.632.760.225		4.670.431.571		6.303.191.796
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		117,11		19.191.773.497	1,78	1.446.266.653		3.502.376.590	2	4.948.643.243
	1.Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	Kategori			-		-		
	2.Capaian IKM Perangkat Daerah	Sangat Baik (88,31)	Ktgr (point)			-		-	-	0



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	53,40	%	5.040.850.505		186.493.572		1.168.054.981	-	1.354.548.553
	Persentase peningkatan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan	56,73	%							
	Persentase peningkatan pajak parkir, pajak air tanah , pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak penerangan jalan	44,56	%							
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				15.495.733.837		2.717.471.280		3.545.993.259		6.185.534.916
KEPEGAWAIAN				14.287.233.837		2.534.074.090		3.468.063.636		6.002.137.726
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah Capaian IKM perangkat daerah	81 91	A Sangat Baik	10.595.923.837		2.267.782.850		2.932.641.795	-	5.200.424.645



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase implementasi SIMPEG Pesentase pengadaan ASN sesuai formasi Persentase capaian pembinaan disiplin aparatur Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan Persentase capaian pelayanan kepegawaian	80 100 100 5830 100	% % % Orang %	3.691.310.000		266.291.240		535.421.841	-	801.713.081
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.208.500.000		183.397.190		77.929.623		183.397.190
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	100	%	1.208.500.000		183.397.190		77.929.623		183.397.190
INSPEKTORAT DAERAH				15.198.622.471,00		2.548.958.673		3.802.977.808		6.351.936.481
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Itda	A (85)	Kategori	12.562.929.473	100,00	2.463.548.673,00	61,00	3.167.641.948,00	161	5.631.190.621
	Skor IKM Itda	77 - 88 (Baik)	Kategori						-	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	77	%	1.948.719.100		85.410.000		449.382.860	-	534.792.860
	Nilai SAKIP Kota	71	Point							
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	%							



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100	%	686.973.898		-		185.953.000	-	185.953.000
	Skor PMPRB Kota	75	Point							
	Indeks Persepsi Korupsi Hasil Survey Eksteernal	3,5	Point							
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Predikat WBK/WBBM	5	Unit							
	Persentase Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur	100	%							
	Level Maturitas SPIP Kota	3	Level							
Kecamatan Cihideung				9.394.259.343	5.730	1.695.388.955	1.636	1.666.606.313	1.473,20	3.361.995.268
KECAMATAN				9.394.259.343	5.730	1.695.388.955	1.636	1.666.606.313	1.473,20	3.361.995.268
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat	83	Katagori A	6.454.694.343	5.357	1.404.014.709	1.005	1.274.567.322	6.362	2.678.582.031
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Sangat Baik	65.625.000	6	15.833.000	2	6.759.800	8	22.592.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	90	%	2.759.940.000	364	267.984.646	625	373.675.316	989	641.659.962



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cihideung	100	%	80.000.000	1	3.006.800	2	11.472.875	3	14.479.675
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian pengawasan wawasan kebangsaan Kec Cihideung			34.000.000	2	4.549.800	2	131.000	4	4.680.800
KECAMATAN CIPEDES										
KECAMATAN CIPEDES				9.455.720.719	21	1.455.292.737	1.035	2.243.376.278	1.035	3.084.784.568
KECAMATAN				9.455.720.719	21	1.455.292.737	1.035	2.243.376.278	1.035	3.084.784.568
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase IKM perangkat daerah dengan predikat baik			6.162.230.719	11	1.257.920.872	663	1.624.616.831	674	2.882.537.703
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			551.030.000	0	-	2	4.875.000	0	4.875.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Cipedes			4.000.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Cipedes			81.000.000	0	-	20	14.741.000	0	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Cipedes			236.000.000	-	-	1	8.291.200	-	-
KELURAHAN PANGLAYUNGAN				580.940.000	3	47.231.166	112	177.662.634	3	47.231.166



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Cipedes	90%		580.940.000	3	47.231.166	112	177.662.634	3	47.231.166
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	0	-	0	-	-	-
KELURAHAN CIPEDES				501.940.000	3	39.941.088	47	73.732.120	94	39.941.088
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Cipedes			501.940.000	3	39.941.088	47	73.732.120	94	39.941.088
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-					-	-
KELURAHAN NAGARASARI				627.140.000	2	48.499.835	37	229.401.011	115	48.499.835
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Cipedes			627.140.000	2	48.499.835	37	229.401.011	115	48.499.835
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-					-	-
KELURAHAN SUKAMANAH				711.440.000	2	61.699.776	153	110.056.482	149	61.699.776
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Cipedes			711.440.000	2	61.699.776	153	110.056.482	149	61.699.776



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-					-	-
KECAMATAN TAWANG				9.224.084.177		1.611.400.798		2.234.636.171	-	3.846.036.969
KECAMATAN				9.224.084.177		1.611.400.798		2.234.636.171		3.846.036.969
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Capaian IKM Perangkat Daerah	A (83,00) Sangat Baik (93,25)	Point	6.478.644.177		1.371.031.241		1.846.478.338	-	3.217.509.579
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (93,25)	Point	145.340.000		5.600.000		8.661.500	-	14.261.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		5.000.000		-		-	-	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Tawang	100%		75.000.000		-		-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Tawang	100%		19.000.000		-		-	-	-
KELURAHAN TAWANGSARI				348.740.000		53.532.420		64.225.470	-	117.757.890
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		348.740.000		53.532.420		64.225.470	-	117.757.890
KELURAHAN EMPANGSARI										



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		363.240.000		33.200.928		76.164.610	-	109.365.538
KELURAHAN LENGKONGSARI										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		534.440.000		36.916.970		27.026.680	-	63.943.650
KELURAHAN CIKALANG										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		521.840.000		32.763.420		109.036.130	-	141.799.550
KELURAHAN KAHURIPAN										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		732.840.000		78.355.819		103.043.443	-	181.399.262
KECAMATAN INDIHIANG										
KECAMATAN				10.557.227.171		4.515.397.569		215.416.431		4.730.814.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Capaian IKM Perangkat Daerah	A (83,00) Sangat Baik (89,50)	Point	7.355.936.834		4.086.102.922	-	41.634.500	-	4.127.737.422
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89,50)	Point	355.401.897		20.000.000		4.925.000	-	24.925.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		10.000.000		9.999.800		-	-	9.999.800



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Indihiang	100%		80.000.000		22.444.000		3.000.000	-	25.444.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Indihiang	100%		61.425.440		300.000		6.125.000	-	6.425.000
KELURAHAN INDIHIANG										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		412.940.000		46.151.760		36.287.094	-	82.438.854
KELURAHAN SIRNAGALIH										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		366.840.000		55.406.800		39.258.000	-	94.664.800
KELURAHAN PARAKANNYASAG										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		494.040.000		59.073.460		13.889.000	-	72.962.460
KELURAHAN PANYINGKIRAN				399.863.000		66.296.297		34.135.957	-	100.432.254
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		399.863.000		66.296.297		34.135.957	-	100.432.254
KELURAHAN SUKAMAJUKALER										



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		536.940.000		93.058.610		36.161.880	-	129.220.490
KELURAHAN SUKAMAJUKIDUL										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		483.840.000		56.563.920		4.088.220	-	60.652.140
KECAMATAN KAWALU										
KECAMATAN		21.682		13.726.918.433	667	1.834.038.268	10.718		11.385	1.834.038.268
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SAKIP PERANGKAT DAERAH	13.589		8.988.541.233	16	1.675.578.454	9.067	3709028538	9.083	5.384.606.992
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Kategori Masyarakat (IKM)	181		749.100.000			100	14025500	100	14.025.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		90		19.250.000					-	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Kawalu	12		78.000.000		0		8186000	-	8.186.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan	69		90.327.200					-	-
KELURAHAN CILAMAJANG										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	683		343.740.000	57	22.965.264	260	108.669.153	317	131.634.417



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
KELURAHAN GUNUNG TANDALA				416.840.000		16.795.540				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	1042		416.840.000	87	16.795.540	171	120.667.882	258	137.463.422
KELURAHAN URUG										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	802		453.440.000	66	14.852.280	189	48.010.960	255	62.863.240
KELURAHAN TANJUNG										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	574		333.540.000	45	9.105.000	141	141.656.500	186	150.761.500
KELURAHAN CIBEUTI										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	768		377.640.000	64	18.992.000	183	46.513.100	247	65.505.100
KELURAHAN KARANGANYAR										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	780		385.840.000	65	14.811.500	186	43.760.025	251	58.571.525
KELURAHAN TALAGASARI										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	455		312.240.000	37	18.828.000	106	138.944.520	143	157.772.520
KELURAHAN LEUWILIANG										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	338		330.340.000	43	9.318.080	120	17.032.450	163	26.350.530



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
KELURAHAN GUNUNG GEDE										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Kegiatan Administrasi Kelurahan	814		377.240.000	68	17.317.150	195	59.089.600	263	76.406.750
KELURAHAN KARSAMENAK										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Kegiatan Administrasi Kelurahan	1485		470.840.000	119	15.475.000	0	174.729.936	119	190.204.936
Kecamatan Cibeureum										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	82,00	%	9.439.114.325,00	28,68	2.721.995.519,00	19,52	2.866.918.959,00	48,20	5.588.914.478,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.50	Kategori	757.654.000,00	26,00	-	24,00	-	50,00	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			3.380.580.000		272.370.470		477.853.961	-	750.224.431
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			86.543.000		-		7.250.000	-	7.250.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	100	%	62.158.300		-		-	-	-
KECAMATAN TAMANSARI										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.785.119.427		1.637.632.984		-	-	1.637.632.984



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				908.850.000		7.751.350		24.262.450	-	32.013.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				28.000.000	1	4.200.000		2.270.200	1	6.470.200
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				82.660.000		-		13.944.500	-	13.944.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				55.000.000	1	4.652.650		-	1	4.652.650
KELURAHAN TAMANSARI										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				456.740.000		8.626.000		54.376.733	-	63.002.733
KELURAHAN MUGARSARI										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				323.540.000		11.542.220		80.263.800	-	91.806.020
KELURAHAN TAMANJAYA										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				416.040.000		16.389.732		77.241.448	-	93.631.180
KELURAHAN SUMELAP										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				320.440.000		11.565.000		94.264.600	-	105.829.600
KELURAHAN SETIAWARGI										



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				538.240.000		40.611.750		111.706.762	-	152.318.512
KELURAHAN MULYASARI										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				456.640.000		38.200.000		67.339.240	-	105.539.240
KELURAHAN SUKAHURIP										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				354.740.000		13.738.320		81.520.000	-	95.258.320
KELURAHAN SETIAMULYA										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				360.540.000		8.351.488		86.292.180	-	94.643.668
KECAMATAN MANGKUBUMI										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		17.832		8.077.209.661	4.446	2.059.477.671		2.355.330.731	4.446	4.414.808.402
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		33		221.150.000	6	-	11	10.234.650	17	10.234.650
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		38		30.000.000	2	-	6	-	8	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		51		115.000.000	4	-	4	7.960.500	8	7.960.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		12		87.500.000	2	2.340.000	3	2.340.000	5	4.680.000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
Kelurahan Mangkubumi										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		155		471.040.000	31	42.725.000	30	64.431.325	61	107.156.325
Kelurahan Cigantang										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		132		404.140.000	22	28.847.408	21	28.828.956	43	57.676.364
Kelurahan Linggajaya										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		184		540.440.000	33	36.791.500	32	45.666.100	65	82.457.600
Kelurahan Karikil										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		154		387.040.000	21	26.330.000	20	50.411.920	41	76.741.920
Kelurahan Cipawitra										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		141		365.540.000	18	23.511.330	17	23.511.330	35	47.022.660
Kelurahan Sambongpari		123		346.140.000	17	23.335.354	-	-	17	23.335.354
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		123		346.140.000	18	23.335.354	17	23.625.680	35	46.961.034
Kelurahan Sambongjaya		167		442.740.000	28	39.479.242	-	-	28	39.479.242



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		167		442.740.000	29	39.479.242	28	49.800.949	57	89.280.191
Kelurahan Cipari		143		398.040.000	22	4.000.000	-	-	22	4.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		143		398.040.000	23	31.470.630	26	148.449.054	49	179.919.684
KECAMATAN BUNGURSARI			0	14.072.558.733		1.523.076.239			-	1.523.076.239
KECAMATAN				14.072.558.733		1.523.076.239			-	1.523.076.239
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase IKM perangkat daerah dengan predikat baik	A (80) 95%	Point	7.961.021.733		1.347.927.917		2.782.045.271	-	4.129.973.188
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		%	935.510.000	0	-		87.324.400	-	87.324.400
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	25.000.000	0	-		10.000.000	-	10.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Bungursari	100	%	85.000.000	0	-			-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Bungursari	100	%	73.000.000	0	-			-	-



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
KELURAHAN SUKAMULYA										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari			358.540.000	1	25.499.520	3	98.845.490	4	124.345.010
KELURAHAN SUKARINDIK										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari	95	%	2.523.287.000					-	-
KELURAHAN BUNGURSARI										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	390.740.000	1	26.989.820	2	65.749.570	3	92.739.390
KELURAHAN SUKAJAYA										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	389.140.000	1	27.486.827	2	25.696.631	3	53.183.458
KELURAHAN CIBUNIGEULIS				444.240.000	1	29.789.300				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	444.240.000	1	29.789.300	1	27.897.310	2	57.686.610
KELURAHAN BANTARSARI				464.740.000	1	39.883.040				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	464.740.000	1	39.883.040	1	39.947.200	2	79.830.240
KELURAHAN SUKALAKSANA				422.340.000	0	25.499.815				



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	422.340.000	0	25.499.815	0	113.009.796	-	138.509.611
Kecamatan Purbaratu				10.156.352.361	-	1.610.980.083	-	1.697.355.567	-	3.308.335.650
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (81)	Kategori	7.169.399.050		1.494.827.689		1.530.577.775	-	3.025.405.464
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (93.25)	Kategori	224.773.311		4.800.000		10.439.000	-	15.239.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec.Purbaratu	90	%	2.610.165.000		107.152.394		127.629.792	-	234.782.186
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Purbaratu	100	%	77.000.000		-		28.709.000	-	28.709.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase capaian tasik bersedekah Kec. Purbaratu	100	%	75.015.000		4.200.000		-	-	4.200.000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12.416.775.266		1.024.315.600		4.368.003.665		5.392.319.265
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				12.416.775.266		1.024.315.600		4.368.003.665		5.392.319.265
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12.416.775.266		1.024.315.600		4.368.003.665		5.392.319.265



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	
					I		II			
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5		6= 4+5	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP perangkat daerah	71	%	3.877.503.234		801.742.410		874.131.422	-	1.675.873.832
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan	100	%	176.789.600		-		-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian pendidikan politik	100	%	2.195.371.600	0	-	0	1.145.453.148	-	1.145.453.148
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif	71	%	5.585.678.166		207.170.500		2.313.109.290	-	2.520.279.790
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	%	141.164.233		1.425.000		2.035.000	-	3.460.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan konflik sosial	100	%	440.268.433		13.977.690		33.274.805	-	47.252.495

Sumber : Evaluasi RKPD Semester I Tahun 2022, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.



2.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan uraian capaian program tersebut di atas, dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorong pencapaian kinerja dan anggaran antara lain :

- 1) Kapasitas aparatur pelaksana kegiatan;
- 2) pengadaan program sarana dan prasarana penunjang;
- 3) proses pengadaan barang/jasa yang sudah baik;
- 4) serta proses pengadaministrasian keuangan yang baik.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan pada tahun 2021 ini adalah :

- 1) akibat terjadinya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemic covid-19, sehingga harus merubah Perencanaan Kegiatan yang telah ada. Hal ini berdampak pada mundurnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- 2) Peralihan penggunaan sistem informasi yang digunakan dalam penatausahaan keuangan sehingga perlu adanya adaptasi kembali dalam penatausahaan keuangan;

2.3. Kendala yang dihadapi

Tingkat capaian kinerja dan keuangan yang dicapai pada Tahun 2021, tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat/kendala yang dihadapi. Adapun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Adanya refocusing dan realokasi anggaran sebagai akibat pandemic covid-19 sehingga kegiatan menumpuk di Tahun 2021;
2. Adanya perubahan kebijakan Bantuan Keuangan Provinsi mengalami perubahan sehingga harus direncanakan kembali kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi tersebut;
3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Ketersediaan barang pada e-katalog yang tidak ada sesuai dengan kebutuhan sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan

2.4. Capaian Indikator Kunci Utama (IKU)

Indikator kunci utama (IKU) merupakan indikator yang dijadikan ukuran pencapaian pelaksanaan pembangunan. Berikut capaian IKU Kota Tasikmalaya pada tahun 2021.

Tabel 2.137.

Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2017-2022

Tahun 2021

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
Misi 1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal				
T1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%)	87	87	Sekretariat Daerah
S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani	0	0	Badan Kesbangpol
P1 : Program Magrib Mengaji	<u>Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti Program Magrib Mengaji (%)</u>	90	90	Sekretariat Daerah
P2 : Program Tasik Berkarakter	Persentase siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan karakter (%)	100	100	Sekretariat Daerah,
				Dinas Pendidikan
	<u>Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan berwawasan kebangsaan (%)</u>	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan hari besar keagamaan (%)	75	75	Sekretariat Daerah
T2 : Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah	<u>Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%)</u>	57	57,97	Dinas Porabudpar
S2 : Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	Persentase kelompok seni budaya aktif (%)	75	75,14	Dinas Porabudpar
P3 : Program Tasik Berbudaya	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah (%)	57	57,97	Dinas Porabudpar
	Persentase pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah tingkat kota (%)	100	100	Dinas Porabudpar
Misi 2: Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat				
T3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	12,5	13,13	BPS
S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS (%)	85,75	87,64	Dinsos
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100	100	Dinsos

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
P4 : Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%)	95	99	Dinas Sosial
P5 : Program Tasik Bersedekah	Jumlah sedekah yang terkumpul (milyar rupiah)	2,80	2,89	Sekretariat Daerah
P6 : Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif)	Jumlah sasaran penerima Program Gema Madani (kelompok/orang)	5000	4388	Sekretariat Daerah
P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK	600	600	Dinas KUMKM dan Perindag (200),
				Dinas Sosial (100),
				DKP3 (300)
T4 : Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5	3,57	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB a.d.h Berlaku (triliun rupiah)	22,98	22,85	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB Perkapita a.d.h Berlaku (juta rupiah)	30,77	31,56	BPS Kota Tasikmalaya
	Pengeluaran Perkapita (juta rupiah)	8,57	10,21	BPS Kota Tasikmalaya
	Inflasi daerah (%)	2,25	1,17	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Gini (point)	0,40	0,414	BPS Kota Tasikmalaya
S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Indeks Daya Beli (point)	57,58	70,78	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%)	4,38	1,91	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%)	4,68	2,97	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	4,61	2,39	BPS Kota Tasikmalaya
	Nilai investasi daerah (milyar rupiah)	250	1.630	DPMPSTP
	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	430.560	483.569	Dinas Porabudpar
P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Persentase Koperasi sehat (%)	24,00	27,48	Dinas KUMKM dan Perindag

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil (%)	1	0	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang meningkat omsetnya (%)	3	10	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase Industri Kecil Menengah berkualitas (%)	3	10,7	Dinas KUMKM dan Perindag
	Capaian penerbitan PerizinanTerpadu tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	DPMPTSP
S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,72	7,66	Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kota Tasikmalaya
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,50	65,75	
P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru (orang)	1.523	1.608	Dinas KUKM Perindag
				DKP3
				Dinas Tenaga Kerja
				Dinas Pendidikan
				Dinas Porabudpar
P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten (%)	60	23	Dinas Tenaga Kerja / data sementara
S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,07	0,28	BPS Kota Tasikmalaya
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	91	91,3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (%)	0,07	10,98	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	84	91,5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Misi 3: Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan				
T5 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%)	76,83	71,05	DPUTR, Disperwaskim, Dishub dan DLH

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
S7 : Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	80,00	88,10	DPUTR dan Dishub
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	58,71	DPUTR
P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	80	88,10	DPUTR, dan Dishub
	Rasio Jaringan Irigasi (point)	0,0704	0,087	DPUTR
S8 : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	61,04	61,20	DPUTR, Disperwaskim dan Dinas Kesehatan
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	100	100	Disperwaskim
P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	99,23	99,23	Disperwaskim
S9 : Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	74,20	63,85	DLH
P14 : Program Tasik Resik	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	12,14	10,30	DLH
	Indeks Kualitas Air	53,54	65,75	DLH
	Indeks Kualitas Udara	79,00	83,45	DLH
	Persentase Penanganan Sampah (%)	77,86	73,86	DLH
Misi 4: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
T6 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indek Pembangunan Manusia (point)	73,25	73,31	BPS Kota Tasikmalaya
S10 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (point)	68,25	69,12	BPS Kota Tasikmalaya
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	100	58,61	Dinas Pendidikan
P15 : Program Tasik Cerdas	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,55	9,52	BPS Kota Tasikmalaya
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,51	13,46	BPS Kota Tasikmalaya
S11 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indek Kesehatan (point)	81,06	80,52	BPS Kota Tasikmalaya
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100,00	48,09	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
P16 : Program Tasik Sehat	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,75	72,34	BPS Kota Tasikmalaya
	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	145,18	303,87	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	5,72	8,5	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (%)	19,10	14,48	Dinas Kesehatan
S12 : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%)	13	14	Dinas Porabudpar
P17 : Program Tasik Muda Berprestasi	Jumlah prestasi bidang kepemudaan (buah)	3	3	Dinas Porabudpar
	Persentase peningkatan nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat (%)	3	4	Dinas Porabudpar
S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (point)	3	4,46	Satpol PP
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100	98,47	Satpol PP dan BPBD
	Persentase Penanganan Bencana Daerah (%)	100	100	BPBD
P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga)	Persentase penegakan Peraturan Daerah (%)	86	86,13	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana daerah (%)	100	100	BPBD
T7 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	86	63,77	DPPKBP3A
	Indeks Pembangunan Gender/IPG (point)	91,52	91,74	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (point)	62,95	59,51)*	BPS Kota Tasikmalaya
S14 : Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,21	0,81	BPS Kota Tasikmalaya
	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (point)	2,06	2,03	DPPKBP3A
P19 : Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang tertangani (%)	100	100	DPPKBP3A
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	72,60	72,37	DPPKBP3A
Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
T8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	61-70 (B)	57,58 (CC)*	Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	77-88 (Baik)	83,32 (baik)	Sekretariat Daerah
	Capaian Predikat Indeks SPBE	Baik (2,75)	Baik (2,68)	Diskominfo
P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)	Cakupan IKM Perangkat Daerah (%)	95	97,22	Semua Perangkat Daerah
S16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP*	BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Sekretariat Daerah,
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	21,79	41,68	BPKAD, BAPENDA
	Nilai Evaluasi SAKIP (kategori)	70-80 (BB)	70,81 (BB)*	Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,37 (sangat Tinggi)*	Sekretariat Daerah
	Tingkat Maturitas SPIP (level)	2,75	2,83	Inspektorat
P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur	Cakupan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (%)	73	91,67	Semua Perangkat Daerah
	Cakupan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah (%)	65	100	Semua Perangkat Daerah

Sumber : LKPJ Wali Kota Tasikmalaya tahun 2021.

2.3. Capaian Janji Politik

A. Pencetakan 5.000 wirausaha baru

Program Wirausaha Baru (WUB) adalah program pembangunan ekonomi strategis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan target di RKPD tahun 2020 sebanyak 1.000 wirausaha baru. Program WUB bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui penyiapan pelaku usaha, kegiatan fasilitas pembiayaan modal usaha dan kegiatan fasilitasi subsidi kredit/margin modal usaha.

Program WUB dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah dengan target 1000 orang, Namun pada tahun 2020 dikarenakan ada refocusing anggaran target WUB diubah menjadi 105 orang pada RPJMD Perubahan dan 205 orang pada RKPD Perubahan Tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 Program WUB dilaksanakan dengan target 1.523 Orang.

Berikut ini perkembangan Program Pencetakan WUB yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut:



1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program WUB yang secara operasional dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp.975.000.000,00 dengan 2 kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Jasa Perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 dengan target pencetakan WUB sebanyak 375 orang. Sektor usaha yang dikembangkan adalah Tata Rias, Digital Marketing, Menjahit, dan Jas Service HP. Realisasi anggaran sebesar Rp.478.091.250,0 atau 98,07%. Realisasi fisik yaitu peserta yang mendapat sertifikat 375 orang.
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Home Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 dengan target pencetakan WUB sebanyak 375 orang. Sektor usaha yang dikembangkan adalah Makanan Olahan, Alas Kaki, dan Konveksi. Realisasi anggaran sebesar Rp.476.775.000,00 atau 97,80% dan realisasi fisik yaitu peserta yang mendapat sertifikat 375 orang

2) Dinas Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program WUB yang secara operasional dilaksanakan melalui Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian dan Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan dengan total anggaran sebesar Rp.675.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 300 orang yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu :
 - Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp. 337.500.000,- dengan target 225 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.321.390.350,- atau 96,23% dan realisasi fisik 100%. Capaian target pencetakan wirausaha baru pada sektor tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari target sebanyak 225 orang dapat terealisasi sebanyak 225 orang atau tercapai 100%;



- Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Peternakan dengan pagu anggaran Rp.112.500.000,- dengan target 75 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.105.507.000,- atau 93,78% dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk capaian target pencetakan Wirausaha baru pada sektor peternakan dari target sebanyak 75 orang dapat terealisasi sebanyak 70 orang atau sebesar 93,33%, hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaannya terdapat 5 orang peserta yang mengundurkan diri ketika program sedang berjalan sehingga peserta tersebut tidak dapat mengikuti seluruh tahapan program sesuai dengan yang disyaratkan dan tidak berhak mendapatkan sertifikat peserta program wirausaha baru. Atas kekurangan pencapaian target tersebut akan ditambahkan pada target program wirausaha baru pada tahun 2022;
- 2. Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan pagu anggaran sebesar Rp 225.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 150 orang yang dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 207.285.850,- atau 92,13 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk capaian target pencetakan Wirausaha baru pada sektor perikanan dari target sebanyak 150 orang dapat terealisasi sebanyak 150 orang atau sebesar 100%

3) Dinas Pendidikan.

Program WUB di Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru dengan target 100 orang dan alokasi dana sebesar Rp.139.320.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi Pelatihan , Tata Busana, Tata Kecantikan rambut. Realisasi anggaran sebesar Rp. 139.320.000,00 realisasi fisik yaitu yang mendapat sertifikat 100 orang.

4) Dinas Tenaga Kerja

Program WUB di Dinas Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru, dengan target 163 WUB dan pagu anggara sebesar Rp. 203.677.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi tata boga, tata busana, tata kecantikan dan tata rias. Realisasi anggaran sebesar Rp. 186.137.760 atau 91,38 % realisasi fisik yaitu yang mendapat sertifikat 163 orang

5) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program WUB di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan di Bidang Pariwisata melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sub kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan target 150 orang dan alokasi dana sebesar Rp. 190.370.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan yaitu media digital 52 orang dan Barista 60 orang serta fashion 38 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp. 188.289.382,00 atau 98,91% realisasi kinerja 100%.

Realisasi program WUB sampai dengan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah mencapai 3.484 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.138
Realisasi Program Wirausaha Baru berdasarkan Perangkat Daerah
Tahun 2018 – 2021

No	Perangkat Daerah	2018	2019	2020	2021	Total
1	Dinas Pendidikan	95	100	105	100	400
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87	100	0	163	350
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan	58	100	0	150	308
4	Dinas Pertanian dan Perikanan	189	300	0	445	934
5	Dinas KUMKM	328	354	60	750	1.492
Jumlah		757	954	165	1.608	3.484

Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 2022.

B. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selama periode RPJMD Tahun 2017 – 2022 ditargetkan sebanyak 1.000 unit per tahun. Sampai dengan tahun 2021, RTLH di wilayah Kota Tasikmalaya yang direhabilitasi sudah sebanyak 6.771 unit. Sebanyak 1.320 unit RTLH direhabilitasi pada Tahun 2021, capaian tersebut melebihi yang ditargetkan yaitu 1.000 unit. Sebaran lokasi rehabilitasi RTLH sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.139
Daftar Lokasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan	Rutilahu Prov	BRS DAK	RTLH Kota	BSPS	Jumlah Per Kec
1	Cihideung	Argasari			2		43
		Cilembang		15	1		
		Nagarawangi			2		
		Tugujaya	20		1		
		Tuguraja			2		

No	Kecamatan	Kelurahan	Rutilahu Prov	BRS DAK	RTLH Kota	BSPS	Jumlah Per Kec
2	Cipedes	Cipedes	30		1		114
		Nagarasari	30		1		
		Panglayungan	20		1		
		Sukamanah	30		1		
3	Tawang	Cikalang	30		1		83
		Empangsari			2		
		Kahuripan	30		1		
		Lengkongsari		15	2		
		Tawangsari			2		
4	Indihiang	Sukamaju Kidul			2		12
		Parakannyasag			2		
		Indihiang			2		
		Panyingkiran			2		
		Sirnagalih			2		
		Sukamaju Kaler			2		
5	Kawalu	Cibeuti			2		314
		Cilamajang			2		
		Gunung Gede	30		1		
		Gunung Tandala	30	40	1		
		Karanganyar	30		1		
		Karsamenak			2		
		Leuwiliang	30		1	50	
		Talagasari			2	10	
		Tanjung	30		1	10	
Urug	30		1	10			
6	Cibeureum	Awipari	30		1		269
		Ciakar	30		1		
		Ciherang	30		1		
		Kersanagara	30		1		
		Kotabaru	30		1		
		Margabakti	30		1		
		Setiajaya	30		1		
		Setianegara	30		1		
Setiaratu	20		1				
7	Tamansari	Mugarsari			2		74
		Mulyasari	30		1		
		Setiamulya			2		
		Setiawargi			2		
		Sukahurip			2		
		Sumelap			2		
		Tamanjaya			2		
		Tamansari	30		1		
8	Mangkubumi	Cigantang	30		1	10	202
		Cipari	30		1	10	
		Cipawitra	30		1	10	
		Karikil			2		
		Linggajaya			2	10	
		Mangkubumi			2	10	
		Sambongjaya	30		1	10	
		Sambongpari			2	10	
9	Bungursari	Bantarsari	30		1		149
		Bungursari	20		1		
		Cibunigeulis			2		
		Sukajaya	30		1		
		Sukalaksana	30		1		
		Sukamulya			2		
		Sukarindik	30		1		
10	Purbaratu	Purbaratu	20		1		60
		Singkup			2		
		Sukaasih			2		
		Sukajaya			2		
		Sukamenak			2		
		Sukanagara	30		1		
JUMLAH		1000	70	100	150	1.320	



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022

C. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dan Perintisan Jalan Lingkar Selatan.

Pembangunan Jalan Lingkar Utara sepanjang kurang lebih 3,85 km yang menghubungkan persimpangan Lanud Wiriadinata - Jalan Mohamad Hatta, estimasi biaya saat ini memerlukan anggaran sebesar Rp. 401 Miliar.

Sampai dengan tahun 2021, pembangunan Jalan Lingkar Utara secara keseluruhan baru terealisasi sebesar 33,43%, meliputi pembangunan Jembatan Fly Over, Jembatan Cikalang, Jembatan Dalem Suba, pembangunan jalan dan bangunan pelengkap jalan. Sedangkan untuk Jembatan Ciloseh saat ini sedang tahap pelaksanaan konstruksi yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR yang bersumber dari APBN, dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022.

Selanjutnya untuk perintisan lingkar selatan baru pada tahap Feasibility Study (FS) dan Penyusunan DED pembangunan jalan lingkar selatan pada tahun 2017. Belum ada tindak lanjut, karena saat ini pembangunan masih diprioritaskan untuk penyelesaian Jalan Lingkar Utara.

D. Pembangunan Pusdai / Tasikmalaya Islamic Center

Sampai dengan akhir tahun 2021, masih belum ada tindak lanjut terkait kendala status kepemilikan lahan. Oleh karena itu, pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center masih belum terlaksana. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center telah disusun pada tahun 2017 kemudian dilanjutkan pembangunan pagar batas tanah dan pematangan lahan di tahun 2018. Pada saat pelaksanaan penyusunan DED dan pekerjaan tersebut, terkendala terkait surat izin dari Bupati Tasikmalaya

E. Pembangunan Pusat Promosi Dan Pemasaran Produk Unggulan/ Industri Kreatif

Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif sudah terbangun di tahun 2021 yang berlokasi di Pusat Promosi dan pemasaran produk unggulan/ Industri Kreatif (PPIK). Untuk promosi produk unggulan, gedung ini memiliki fungsi sebagai pusat sarana informasi dan promosi produk unggulan Kota Tasikmalaya. Showroom ini menampilkan informasi mengenai proses pembuatan, display produk hasil pengembangan desain dan diversifikasi produk serta



produk yang akan dipromosikan dari produk-produk unggulan Kota Tasikmalaya. PPIK Kota Tasikmalaya secara umum berfungsi sebagai tempat pelatihan-pelatihan seperti pelatihan teknik produksi, pelatihan desain produk, serta fasilitasi pemasaran dengan adanya showroom.

F. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen

Persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 tercatat 13,13 persen, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 12,97. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi covid-19 yang terjadi di Kota Tasikmalaya sejak Maret 2020 sampai dengan tahun 2021 yang mengakibatkan kinerja perekonomian terkontraksi. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya namun terjadi hampir pada seluruh kabupaten/kota. Capaian Angka Kemiskinan Tahun 2021 masih diatas target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu sebesar 12,5 persen. Apabila dilihat dari kenaikan persentase angka kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen, dibandingkan dengan rata-rata kenaikan angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,52 persen. Dengan demikian kenaikan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih dibawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

G. Beasiswa Sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter Spesialis

Beasiswa dokter spesialis dilaksanakan di RSUD dr. Soekardjo sebanyak 1 orang, sedangkan program beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi baru dilaksanakan pada tahap penyusunan regulasi, dan realisasinya akan dilaksanakan pada tahun ini.

Adapun untuk beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 untuk 90 orang masyarakat miskin.

H. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana Posyandu

Bantuan operasional posyandu yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp.818.400.000,00 untuk 5.456 kader posyandu se-Kota Tasikmalaya atau Rp.150.000,00 per Orang

I. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW

Pada tahun 2021 bantuan operasional/insentif RT dan RW yaitu untuk RT sebesar Rp.125.000,00/bulan dan untuk RW sebesar Rp.150.000,00/bulan.



J. Peningkatan bantuan bidang keagamaan

Bantuan bidang keagamaan Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari:

1. Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah

Pada tahun 2021 jumlah penerima insentif sebanyak 5.448 orang masing-masing sebesar Rp.600.000,00/orang dengan jumlah total anggaran Rp.3.268.000.000,00.

2. Realisasi bantuan hibah sarana keagamaan tahun 2021 sebesar Rp.17.085.000.000,00 untuk 124 lembaga

K. Revitalisasi Pasar Rakyat

Pada tahun 2021 pemerintah Kota Tasikmalaya telah membangun pasar rakyat pancasila dengan anggaran Rp.15.932.281.000,00 dan realisasi sebesar Rp.15.041.669.616,00. Pembangunan yang telah dilaksanakan terdiri dari 2 lantai dengan 270 kios, 64 los, ruang laktasi dan ruang pelengkap lainnya. Sehingga sejak tahun 2018 pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5 pasar yaitu Pasar Indihiang, Pasar Cibeuti, Pasar Cibeureum, Pasar Purbaratu dan Pasar Pancasila

L. Implementasi e-government

Implementasi e-government di Kota Tasikmalaya tahun 2021 dibuktikan dengan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Capaian indeks SPBE Kota Tasikmalaya untuk tahun 2021 adalah 2,68 dengan predikat baik, yang meliputi:

1. Kebijakan internal SPBE, yaitu diterbitkannya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Tata kelola SPBE, dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE dalam dokumen masterplan dan enterprise arsitektur smart city; tersedianya pusat data dan jaringan intra pemerintah yang terhubung ke seluruh OPD dan kelurahan, Puskesmas dan Pustu, SD dan SMP, serta area publik dengan jumlah total 414 titik; dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk integrasi aplikasi.



3. Penerapan manajemen SPBE, yang meliputi penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, data, asset TIK, kompetensi SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE.
4. Audit TIK yang meliputi audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE.
5. Layanan SPBE, yang terdiri dari:
 - a. Layanan administrasi, yang meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja organisasi.

Layanan publik yang meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan bidang pendidikan, layanan bidang komunikasi dan layanan administrasi kelurahan.

2.4. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Keamanan dan Ketertiban Umum, dan Sosial. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya pada tahun 2021

Tabel. 2.140.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya
Tahun 2021

No.	Bidang Layanan	Satuan	Pencapaian SPM	
			Target	Capaian
1.	SPM Bidang Pendidikan	%	100	49,78
2.	SPM Bidang Kesehatan	%	100	66,34
3.	SPM Bidang Pekerjaan Umum	%	100	58,71
4.	SPM Bidang Perumahan	%	100	100
5.	SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	%	100	96,14
6.	SPM Bidang Sosial	%	100	24,71

Sumber : Laporan SPM Kota Tasikmalaya Tahun 2021, Setda Kota Tasikmalaya, 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) SPM yang harus dipenuhi dengan target 100 persen, hanya SPM Bidang Perumahan yang dapat mencapainya. Berbagai kendala dalam penerapan SPM di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan SPM Pendidikan masih terkendala oleh adanya sekolah yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga pada masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi terutama sekolah yang dikelola oleh Masyarakat/Yayasan pada jenjang PAUD, hal tersebut berdampak pada capaian mutu pendidikan yang belum memenuhi standar. Kemudian kekurangan Guru Kelas SD/MI, SMP/MTs serta kualitas tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi SI/DIV. Pada Pendidikan Kesetaraan permasalahan terdapat pada penyelenggara Paket A, B dan C melalui lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dalam pengelolaannya belum memenuhi standar yang ditetapkan sehingga masih terdapat lembaga PKBM belum terakreditasi;
2. Penerapan SPM Kesehatan terkendala oleh belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, misalnya pada layanan ibu melahirkan belum seluruh puskesmas dapat melayani persalinan dan perlunya peningkatan kualitas *home care*. Kemudian pelayanan kesehatan bayi baru lahir pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar belum maksimal, pelayanan ksehatan pada usia produktif



misalnya kader Posbindu PTM belum semua mendapatkan pelatihan terutama di tingkat RW, dan lain sebagainya;

3. Penerapan SPM Pekerjaan Umum terkendala oleh belum adanya Data Base SPAM terintegrasi Kota Tasikmalaya;
4. Penerapan SPM Bidang Perumahan meskipun pencapaiannya sudah 100 persen tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi yakni kegiatan yang mendukung SPM belum menjadi prioritas pada Perangkat Daerah bersangkutan;
5. Penerapan SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum dengan realiasi target mencapai 96,14 persen bukan tanpa hambatan semakin berkembangnya tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan, gepeng, dan penyakit masyarakat lainnya di lapangan menjadikan penertiban akan semakin sulit dilakukan;
6. Penerapan SPM Bidang Sosial masih terkendala oleh alat bantu layanan bidang sosial yang belum terpenuhi, sehingga capaian SPM masih jauh dari yang ditargetkan.

2.5. Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Capaian implelementasi SDGs/TPB di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.141.
Capaian SDGs/TPB Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Tujuan Pembangunan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persentase	12,79	12,5	13,13
1.3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINKES	Persentase	79,40	75	80,31
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Persentase	N/A	N/A	10,95
	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	DINSOS	Jiwa	37.034	N/A	35.820
1.4	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Dinkes, DPUTR Disperkimtan, Dishub	Persentase	PM	PM	
	1.4.1* - 2	Persentase Penduduk dengan Layanan Air Minum	DPUTR	Persentase	90,21	92,81	83,8
	1.4.1* - 3	Persentase Penduduk dengan Layanan Sanitasi	DPUTR	Persentase	79,53	79,43	89,99
	1.4.1* - 7	Indeks akses pada fasilitas penyehatan dasar	DINKES	Persentase	95,45	100	100,00
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINKES	Persentase	95,3	95,5	18,43



	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKBP3A	Persentase	72,36	72,60	72,37
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	DISPERAWASKIM	Persentase	47,61	47,59	54,15
1.5	1.51.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD				
	1.5.1* - 1	Korban Meninggal	BPBD	Orang		PM	2
	1.5.1* - 2	Korban Hilang	BPBD	Orang		PM	0
	1.5.1* - 3	Korban Terluka	BPBD	Orang		PM	5
	1.5.1* - 4	Korban Mengungsi	BPBD	Orang		PM	57
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen		1	1
Tujuan Pembangunan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES	Persentase	1,02	8,3	5.87
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES	Persentase	17,57	19,1	14.81
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DKP3	Persentase	91,60	91,00	91,30
2.4	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DKP3	Persentase	4,64	4,64	4,64
Tujuan Pembangunan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Seluruh Usia							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021



3.1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).*	DINKES	Kematian Per 100000 Kelahiran Hidup	202,55	145,18	303,87
3.2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	N/A	19,5	1,74
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	N/A	4,44	7,2
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	2,02	19,5	8,5
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES	Kasus Baru per 1000 penduduk tidak terinfeksi	N/A	0,21	0,09
3.3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	Kasus Baru per 10000 penduduk	N/A	252	149
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	DINKES	API/1000 Penduduk	N/A	0,31	0,01
3.4	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES	Persentase	N/A	34,1	51,38
3.7	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKBP3A	Persentase	72,36	72,60	72,37
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DPPKBP3A	Persentase	2,08	2,06	2,03
3.b	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES	Persentase	77,99	81,3	79,40
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES	Persentase		95	66,6



Tujuan Pembangunan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
4.1	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DISDIK	Persentase	N/A	95	97,91
	4.1.1.(b)*	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DISDIK	Persentase	N/A	95	93,38
4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	BPS/DISDIK	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator
	4.5.1* - 1b	Rasio APM SD pedesaan/ perkotaan	BPS/DISDIK	Persentase	90,69	89,66	90,31
	4.5.1* - 2b	Rasio APK SMP pedesaan/ perkotaan	BPS/DISDIK	Persentase	86,59	89,83	86,85
Tujuan Pembangunan 5 Mencapai Ksetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
5.1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPPKBP3A	Dokumen	1	1	1
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPKBP3A	Persentase	100	100,00	100



	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPKBP3A	Persentase	100	100	100
5.5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	SETWAN	Persentase	6,67	19.32	6,67
Tujuan Pembangunan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
6.1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPUTR	Persentase	55,58	55,82	56,23
6.2	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DPUTR	Persentase	60,54	79,43	61,20
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPUTR	Persentase	N/A	61,04	61,20
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPUTR	Persentase	7,07	PM	15,44
Tujuan Pembangunan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	BPS	Persentase	-2,01	4,50	3,57
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	BPS	Juta Rupiah	21,59	22,98	22,85
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DISNAKER/BPS	Persentase	N/A	50	46,71
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DISNAKER/BPS	Persentase	4.78	N/A	5,50



	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis Jenis kelompok Umur	DISNAKER/BPS	Persentase	7,99	7,72	7,66
Tujuan Pembangunan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs 2021	Capaian SDGs 2021
9.2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan Perkapita	BPS	Persentase	14,13	19,8	13,83
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	Persentase	-1,94	15.91	1,91
Tujuan Pembangunan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs 2021	Capaian SDGs 2021
10.1	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS/DINSOS	Persentase	12,97	12,5	13,13
10.3	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	SETDA	Kasus/Aduan	n/a	30	34
10.4	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Persentase	40.84	41.64	10,95
Tujuan Pembangunan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD				
	11.5.1* - 1	Korban Meninggal	BPBD	Orang	N/A	N/A	2
	11.5.1* - 2	Korban Hilang	BPBD	Orang	N/A	N/A	0
	11.5.1* - 3	Korban Terluka	BPBD	Orang	N/A	N/A	5
	11.5.1* - 4	Korban Mengungsi	BPBD	Orang	N/A	N/A	57
11.6	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	DLH	Persentase	71,45	76	77,86



Tujuan Pembangunan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
12.4	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Persentase	71,45	77,86	73,86
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	Persentase	N/A	25	25
Tujuan Pembangunan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
15.1	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	INDEKS	N/A	23	23,35
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
16.3	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	SETDA	Perkara	N/A	34	34
16.6		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP
	16.6.1.(a)						
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP > B	INSPEKTORAT	Persentase	N/A	30	33,33
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB > B	INSPEKTORAT	Nilai (Kategori)	N/A	50	58,33



	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	Persentase	6,67	30	6,67
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Persentase	3,7	35	6,45
16.9	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	DISDUKCAPIL	Persentase	N/A	93,00	58,33
Tujuan Pembangunan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2021	2021
17.1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD	Persentase	N/A	9,50	10,61
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	Persentase	N/A		2,91



2.6. Evaluasi Capaian Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024, Kota Tasikmalaya menjadi lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022.

2.7. Revitalisasi Pasar

Pada tahun 2021 pasar yang direvitalisasi di Kota Tasikmalaya yaitu Pasar Pancasila. Dampak yang dirasakan secara umum akibat dari revitalisasi tersebut diantaranya adalah :

1. Bangunan menjadi lebih baik, bersih dan nyaman
2. Jumlah kios/los bertambah, yang awalnya berjumlah 249 kios dan 60 los menjadi 270 kios dan 64 los
3. Bertambahnya beberapa sarana pendukung yang sudah dibangun seperti : ruang satpam, wc yang lebih representatif, ruang laktasi, dll.
4. Para pedagangn mendapatkan kios yang permanen, bersih dan nyaman, namun luasannya kecil (semuanya diseragamkan).
5. Para pedagang relatif lebih meningkat pendapatannya
6. Lebih nyaman dan lebih lengkap berbelanja barang yang dibutuhkan

2.8. Permasalahan Pembangunan

2.8.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar;
2. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
3. Melambatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat;
4. Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan, permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Belum optimalnya pelayanan publik dan kinerja aparatur.

2.8.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang



ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan data yang ada dan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Belum optimalnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- b. Masih terdapat anak usia pendidikan dasar yang belum bersekolah pada jenjang SMP
- c. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai
- d. Masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan

2) Kesehatan

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
- b. Masih terdapat puskesmas yang belum terakreditasi
- c. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional
- d. Belum optimalnya ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar
- e. Masih terdapatnya balita dengan kondisi gizi buruk
- f. Belum optimalnya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar
- h. Belum optimalnya kesehatan keluarga, penanganan penyakit menular dan tidak menular
- i. Masih kurangnya Tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain Sub spesialis dan spesialis tertentu;

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian.
- b. Ketersediaan data sektoral urusan Pekerjaan Umum belum lengkap.
- c. Masih diperlukan pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase;
- d. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan;
- e. Masih ada gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif dan sesuai dengan standar;
- f. Masih belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat mengakses air minum, dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



- a. Terdapat kawasan kumuh seluas 168,49 Hektar berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021.
- b. Masih terdapat rumah tidak layak huni;
- c. Masih terdapat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

- a. Masih terdapat masyarakat yang kurang patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

6) Sosial

- a. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- b. Belum optimalnya pemberdayaan fakir miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

- a. Masih tingginya angka pengangguran
- b. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja
- c. Belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK)
- b. Kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan
- c. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan;
- d. Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha
- e. Belum optimalnya penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

3) Pangan

- a. Belum optimalnya implementasi konsumsi keragaman pangan dan gizi
- b. Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi
- c. Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan
- d. Belum optimalnya infrastruktur ketahanan pangan
- e. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.

4) Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan



- b. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif
- c. Belum tercapainya proporsi Ruang Terbuka Hijau

5) Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya layanan keluarga berencana
- b. Belum optimalnya capaian Total Fertility Rate (TFR)
- c. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB
- d. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.

7) Perhubungan

- a. Belum optimalnya kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum
- b. Belum optimalnya ketersediaan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Belum optimalnya pengelolaan parkir
- d. Perlunya optimalisasi tata kelola terminal type C;

8) Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi public
- b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai;

9) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

- a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
- b. Belum optimalnya pembinaan koperasi
- c. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;

10) Penanaman Modal

- a. Belum tersedianya rencana umum penanaman modal
- b. Belum optimalnya pengendalian penanaman modal

11) Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sehingga pencapaian bidang keolahragaan belum optimal;



- c. Belum optimalnya pengembangan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemuda.

12) Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional;
- b. Belum optimalnya pelestarian terhadap nilai sejarah, seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya

13) Perpustakaan

- a. Belum optimalnya layanan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan;

14) Kearsipan

- a. Belum tersedianya Depo Arsip yang memenuhi standar baku
- b. Belum optimalnya penerapan standar baku kearsipan pada perangkat daerah;

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan.

- a. Belum optimalnya pemanfaatan minapolitan

2) Pariwisata.

- a. Belum tersedianya dokumen perencanaan kepariwisataan yang terintegrasi

3) Pertanian.

- a. Menurunnya populasi ternak
- b. Belum optimalnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
- c. Belum optimalnya kenaikan kelas petani

4) Perdagangan.

- a. Menurunnya omset pelaku usaha
- b. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat dan terbatasnya jumlah pasar rakyat
- c. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- d. Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur
- e. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- f. Belum tersedianya pusat pemasaran produk unggulan.



5) Perdagangan.

- a. Masih minimnya IKM yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional
- b. Belum optimalnya pengendalian izin usaha industri

b. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- a. Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) masih berada pada kategori kurang inovatif.

2) Keuangan

- a. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah

3) Kepegawaian

- a. Belum optimalnya pemetaan SDM ASN Kota Tasikmalaya
- b. Belum optimalnya kompetensi ASN



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Tasikmalaya baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan keuangan daerah menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2022.

Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Tasikmalaya.

3.1. Kinerja Perekonomian Daerah

3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Tasikmalaya tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global, nasional, regional Jawa Barat maupun kondisi lokal Kota Tasikmalaya.

1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global dan Nasional

Perbaikan ekonomi di berbagai daerah diperkirakan tetap berlangsung pada tahun 2022. Peningkatan mobilitas masyarakat seiring penurunan penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron serta kinerja ekspor nonmigas yang tetap kuat, khususnya yang berbasis sumber daya alam ditopang kenaikan harga komoditas menjaga keberlangsungan perbaikan perekonomian di berbagai daerah. Perkembangan tersebut diperkirakan menopang kinerja lapangan usaha (LU), seperti LU Industri Pengolahan di Jawa dan Sumatera, serta LU Pertambangan di Balinusra. Kinerja investasi juga masih cukup baik, khususnya terkait relokasi korporasi di Jawa, proyek hilirisasi di Sulampua, dan proyek pendukung penyelenggaraan acara internasional di Balinusra. Ke depan, perbaikan permintaan domestik terus berlanjut didukung penurunan kasus COVID-19, pelonggaran restriksi mobilitas, dan belanja Pemerintah Daerah yang secara bertahap diperkirakan meningkat. Namun prospek perbaikan permintaan domestik diperkirakan tidak sekuat prakiraan sebelumnya karena tertahannya volume ekspor maupun kenaikan harga energi dan pangan global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Sejalan dengan moderasi perekonomian global tersebut, permintaan eksternal juga diperkirakan lebih rendah dan sumber pemulihan perekonomian daerah diperkirakan lebih berimbang ditopang permintaan domestik, khususnya kinerja LU non-tradable. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan sedikit lebih rendah dalam kisaran 4,5-5,3% dari prakiraan sebelumnya di kisaran 4,7-5,5%. Prospek perekonomian tersebut masih didukung



perbaikan konsumsi swasta dan investasi serta tetap terjaganya belanja fiskal, berlanjutnya peningkatan mobilitas, serta akselerasi vaksinasi dan booster.

Di sisi inflasi, realisasi inflasi di seluruh wilayah pada triwulan I 2022 meningkat kendati masih terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara nasional pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,64% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terjadi di semua wilayah dipengaruhi khususnya inflasi inti dan administered prices (AP). Inflasi inti meningkat seiring perbaikan permintaan domestik di semua wilayah, serta tekanan kenaikan harga komoditas global. Inflasi kelompok AP dipengaruhi oleh inflasi bahan bakar rumah tangga dan bensin karena penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan BBM nonsubsidi, serta inflasi angkutan udara seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Pada 2022, inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0%±1% sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” akan melanjutkan 7 prioritas pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Sinergitas rencana pembangunan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan RKP 2022 sangat penting. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020-2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya

Tidak hanya itu, dalam RKP 2022 juga diharapkan tidak hanya menampilkan pendanaan yang tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi dari sumber lainnya seperti BUMN dan swasta. Investasi akan menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi pada 2022. Hal ini karena investasi menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Tidak hanya itu, beberapa faktor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2022.



Untuk mencapai target pemulihan ekonomi pada 2022, perlu juga dilakukan pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan. Untuk itu, setiap daerah perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya yang dapat digali atau dioptimalkan. Memastikan apa yang menjadi target nasional bisa tampil di daerah. Misalnya pertumbuhan ekonomi, potensi apa yang bisa dikembangkan, sumber daya berkualitas, karena semua hal berkaitan. Hal ini dilakukan untuk memastikan transformasi ekonomi yang inklusif. Terlebih salah satu target pembangunan adalah memastikan pertumbuhan di wilayah barat dan timur Indonesia seimbang.

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari COVID-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM, dan pariwisata yang tidak dapat berjalan menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat.

Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2020. Tantangan yang dihadapi Jawa Barat secara sektoral pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tantangan pada sektor investasi adalah membangkitkan kembali realisasi penanaman modal yang tadinya menurun akibat pandemi COVID-19 sehingga kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi Jawa Barat dapat tercapai kembali;
2. Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi industri Jawa Barat yang merupakan industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi kondisi industri pengolahan di Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun dalam aspek penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan. Oleh sebab itu tantangan sektor industri adalah substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0;
3. Tantangan pada sektor pariwisata yaitu kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan/atau PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berdampak pada penutupan sejumlah destinasi pariwisata, perhotelan, restoran, dan biro perjalanan. Hal ini berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan dengan besarnya jumlah karyawan sektor pariwisata yang di-PHK dan dirumahkan;
4. Tantangan pada sektor perdagangan tercermin dari kondisi ekspor Jawa Barat yang menjadi penyumbang ekspor terbesar nasional. Ekspor dan impor Jawa Barat cukup terganggu dengan adanya COVID-19. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekspor Jawa Barat, serta menurunnya impor bahan baku dan barang yang merupakan 90% komoditas impor Provinsi Jawa Barat. Kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai imbas dan penyebab menurunnya aktivitas industri di Jawa Barat. Pada perdagangan di tingkat Usaha Menengah Besar, Usaha Mikro Kecil dan Usaha Pertanian menurut survey BPS (2020), hanya sekitar 50,56 perusahaan yang beroperasi normal di tengah pandemi COVID-19;
5. Tantangan pada sektor pangan terkait ketersediaan bahan pangan. Pada sisi produksi ketersediaan pangan Jawa Barat cukup memadai tetapi sistem transportasi dan logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas,



sehingga produk petani tidak bisa dipasarkan yang memicu rendahnya harga jual di tingkat petani; dan

6. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang mengalami dampak terbesar dalam pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PHK dan karyawan yang dirumahkan sebagai akibat dari aktivitas usaha yang terhenti.

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2022 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,61% (yoy). Meskipun permintaan domestik tidak setinggi triwulan IV 2021 lantaran normalisasi pasca HBKN Natal dan Tahun Baru, pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut bahkan lebih baik dari prakiraan sebelumnya dan juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01% (yoy). Di antara 6 provinsi di Jawa, Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang gemilang di saat DKI Jakarta hanya mampu tumbuh 4,63% (yoy) dan Jawa Timur tumbuh sebesar 5,2% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor. Kondisi ekonomi yang membaik secara agregat berdampak pada kemampuan bayar dan juga daya beli masyarakat yang perlahan meningkat, meskipun masih terbatas sehubungan dengan pemberlakuan PPKM untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 varian Omicron yang memuncak di Februari 2022. Di sisi lain, pada triwulan I 2022 Jawa Barat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga komoditas global sehubungan dengan *share* ekspor yang cukup besar pada perekonomian Jawa Barat.

Sementara dari sisi lapangan usaha, selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif namun tidak setinggi triwulan IV 2021, kinerja lapangan usaha utama di Jawa Barat juga terpantau sedikit melandai, antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar & eceran, sektor konstruksi, serta sektor pertanian.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 kembali mengalami koreksi ke bawah menjadi 3,6% (yoy) seiring dengan eskalasi tensi geopolitik yang memberikan dampak signifikan pada kontraksi ekonomi negara yang terdampak langsung, perlambatan signifikan pertumbuhan ekonomi eropa, penurunan volume perdagangan dunia, dan terus berlanjutnya disrupsi rantai pasokan global.

Perekonomian Indonesia 2022 diproyeksikan tumbuh pada rentang yang lebih rendah yaitu 4,3%-5,0% (yoy), namun tetap berpotensi lebih tinggi dibandingkan 2021 sebesar 3,69% (yoy). Momentum perbaikan ekonomi nasional diperkirakan masih terus berlangsung berlanjut pada 2022 didukung oleh perbaikan permintaan domestik dan masih kuatnya kinerja ekspor utamanya ekspor komoditas. Kebijakan moneter dan makroprudensial ditujukan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan.

Ekonomi Jawa Barat Tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada rentang yang sedikit lebih rendah, yaitu 4,7%-5,5% (yoy). Sebagaimana ekonomi nasional, dampak eskalasi tensi geopolitik global juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, khususnya melalui jalur perdagangan dimana kinerja ekspor sedikit melambat sehubungan dengan prospek ekonomi global dan volume perdagangan dunia yang menurun. Namun demikian, peningkatan mobilitas yang signifikan mendorong optimisme perbaikan permintaan domestik, sehingga konsumsi rumah tangga akan menjadi motor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2022 yang diproyeksikan lebih baik dari tahun 2021. Sementara itu, tekanan inflasi Jawa Barat pada tahun 2022 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan 2021, namun tetap berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3,0%±1% (yoy).

3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Tasikmalaya



Berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2021 dan pelaksanaan dalam tahun berjalan 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini :

a. Kondisi perekonomian, dengan asumsi diantaranya :

Kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, dimana tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat belum meningkat serta dunia usaha dan industri masih belum pulih

Kondisi perekonomian nasional yang cukup membaik, namun saat ini dihadapkan pada tekanan perekonomian global diantaranya dipicu oleh perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada meningkatnya harga energi dan bahan pangan, tingginya tingkat inflasi diberbagai negara termasuk Amerika Serikat, China dan Eropa

Untuk inflasi, berdasarkan laporan BI dan BPS tingkat inflasi tahun kalender periode Januari – Juni 2022 di Kota Tasikmalaya tercatat mengalami inflasi sebesar 4,58%. Hal ini akan terus mengalami peningkatan dan diperkirakan bahwa sampai akhir tahun 2022 inflasi di Kota Tasikmalaya diprediksi akan berkisar antara 6% -7 %. Dengan angka inflasi yg relatif tinggi tersebut akan berdampak kurang baik terhadap berbagai indikator makro yang lainnya, antara lain : Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, PDRB, Gini Rasio dan Pengeluaran Perkapita

Dari berbagai hal tersebut akan berdampak pada Penerimaan Daerah terutama sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Kondisi Keuangan Daerah, dengan asumsi diantaranya :

Penerimaan daerah terutama dari beberapa sektor pajak dan retribusi daerah mengalami perlambatan realisasi penerimaan bahkan cenderung ada yang mengalami penurunan.

Penerimaan Dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi tidak ada perubahan penambahan yang signifikan

Defisit anggaran pada APBD 2022 (murni) dengan asumsi Silpa yang besar belum dapat dipenuhi dengan Silpa yang *audited* (pasti), yaitu asumsi Silpa sebesar Rp.106 M, terealisasi sebesar Rp.33 M

Kebutuhan akan belanja prioritas yang sifatnya wajib dan mendesak yang belum dianggarkan pada APBD 2022 masih cukup besar

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya :

- a) Optimalisasi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi serta penerimaan daerah lainnya
- b) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya optimalisasi penerimaan Dana Transfer
- c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran belanja
- d) Melakukan realokasi dan refocusing anggaran belanja

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021, maka tema pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pada sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan RKP 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri,

pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

1. Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Indikator Pembangunan	Target 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4–6,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,5 –6,2
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 –9,0
Rasio Gini (indeks)	0,376 –0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 -73,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	26,8- 27,1

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2022.

2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yaitu : Pemantapan Daya Saing Daerah menuju Kemandirian dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jawa Barat yang digulirkan adalah :

1. Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19
2. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
3. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
4. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
5. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
6. Reformasi birokrasi

Sedangkan sasaran dan target pembangunan ekonomi makro Provinsi Jawa Barat tahun 2022, antara lain :

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021 - 2022

Indikator Pembangunan	Realisasi 2020	Target 2021 Perubahan RPJMD	Target 2022 Perubahan RPJMD
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	72,09	71,71-72,10	72,38 – 72,79
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,44	3,33-4,49	5,20 -5,20
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,99	10,40-9,30	9,46-7,81
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,43	6,96-6,63	6,39-6,06
Rasio Gini (indeks)	0,403	0,39-0,40	0,39-0,40
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,11	1,47-1,48	1,45-1,46

Sumber: RPJMD Jawa Barat 2018-2023 dan Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2021

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel 3.2 di atas, strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi perlu disiapkan sedemikian rupa menuju pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan tentunya tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD Tahun 2018-2023.

Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2023 yaitu

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi
3. Penguatan system ketahanan pangan berkelanjutan
4. Reformasi system perlindungan social
5. Reformasi system pendidikan dan pemajuan kebudayaan
6. Reformasi system kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana
7. Inovasi pelayanan public dan penataan daerah
8. Gerakan membangun desa
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
11. Pengembangan Destinasi dan infrastruktur pariwisata

Dengan demikian Tema Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan tersebut menjadi based line dari arah kebijakan pembangunan untuk setiap daerah di provinsi Jawa Barat.

3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Tasikmalaya

Berdasarkan RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan dan kondisi ekonomi nasional dan regional (“pasca pandemi covid 19”), maka Proyeksi Target Indikator Makro Kota Tasikmalaya Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 antara lain :

Tabel 3.3
Target Indikator Pembangunan Ekonomi Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022 (RKPD)	Rencana Perubahan Target 2022 (RKPD)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,31	73,95	73,95
2	Angka kemiskinan	%	13,13	11,50	13,08
3	Angka Pengangguran	%	7,66	7,02	7,53
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,00	5,00
5	Pendapatan Perkapita	Juta	31,56	31,04	31,04
6	PDRB	Triliyun	22,85	23,61	23,61
7	Inflasi	%	1,17	2,00	6,50
8	Rasio Gini	Poin	0,414	0,360	0,390

Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022.

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi tahun 2022 sebagaimana tema pembangunan “Memacu Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan menuju Masyarakat Maju dan Madani” dengan target sesuai dengan diproyeksikan di atas, dengan Prioritas Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata nilai kehidupan dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar



2. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta Peningkatan daya saing daerah
3. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan kemantapan dan penyediaan infrastruktur perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pada bagian ini menyajikan mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun yang didukung oleh kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Kebijakan keuangan tersebut memberikan gambaran tentang anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah kedepan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, dukungan APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Berikut ini disajikan realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tabel 3.5. dibawah ini :



Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2017 – 2022

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Anggaran 2022		
				Murni 2022	Realisasi Semester I 2022	Proyeksi Perubahan 2022
A	PENDAPATAN	1.760.907.421.698,25	2.029.687.967.700,92	1.574.857.196.059,00	816.520.683.578,00	1.849.825.392.185,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	314.307.017.302,25	445.403.761.863,92	320.233.626.747,00	131.802.857.414,00	317.523.478.247,00
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	122.595.847.691,00	139.830.453.627,00	153.175.711.947,00	71.570.698.914,00	153.175.711.947,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.008.826.528,00	9.302.738.040,00	17.371.712.000,00	5.004.692.475,00	14.661.563.500,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.458.363.839,00	6.221.179.774,00	6.405.414.000,00	6.663.981.273,00	6.405.414.000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.243.979.244,25	290.049.390.422,92	143.280.788.800,00	48.563.484.752,00	143.280.788.800,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.376.288.904.396,00	1.514.206.250.837,00	1.165.869.669.312,00	625.874.329.675,00	1.443.548.013.938,00
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.091.272.112.424,00	1.123.833.404.816,00	1.051.960.060.000,00	553.169.955.471,00	1.051.960.060.000,00
2.2	Dana Perimbangan	1.083.301.230.424,00	1.104.792.686.816,00	1.046.835.700.000,00	550.607.775.471,00	1.046.835.700.000
	<i>Dana Transfer Umum</i>	843.976.429.187,00	847.402.128.072,00	808.652.011.000,00		808.652.011.000,00
	<i>1. Dana Bag Hasil</i>	90.659.677.187,00	105.304.188.072,00	66.554.071.000,00		66.554.071.000,00
	<i>2. Dana Alokasi Umum</i>	753.316.752.000,00	742.097.940.000,00	742.097.940.000,00		742.097.940.000,00
	<i>Dana Transfer Khusus</i>	239.324.801.237,00	257.390.558.744,00	238.183.689.000,00		238.183.689.000,00
	<i>Dana Insentif Daerah</i>		19.040.718.000,00	5.124.360.000,00	2.562.180.000,00	5.124.360.000,00
2.3	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	7.970.882.000,00				
	<i>Dana Penyesuaian</i>	7.970.882.000,00				
3.4	Transfer Antar Daerah	285.016.791.972,00	390.372.846.021,00	113.909.608.791,00	72.704.374.204,00	391.587.953.938,00
B	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	107.126.150.296,00	109.356.089.659,00	113.909.608.791,00	54.319.603.324,00	113.909.608.791,00
1	<i>Bantuan Keuangan</i>	177.890.641.676,00	281.016.756.362,00	0	18.384.770.880,00	277.678.345.147,00
1.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.311.500.000,00	70.077.955.000,00	88.753.900.000,00	58.843.496.489,00	88.753.900.000,00



No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Anggaran 2022		
				Murni 2022	Realisasi Semester I 2022	Proyeksi Perubahan 2022
1.2	Pendapatan Hibah	70.311.500.000,00	70.077.955.000,00			
1.3	Dana darurat					
1.4	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			88.753.900.000,00	58.843.496.489,00	88.753.900.000,00



Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2017 – 2022

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Anggaran 2022		
				Murni 2022	Realisasi Semester I 2022	Proyeksi Perubahan 2022
1.6	BELANJA DAERAH	1.743.157.214.090,00	1.942.803.908.023,00	1.653.678.535.510,00	595.536.712.390,00	1.931.147.967.675,00
2	BELANJA OPERASI	1.372.725.283.236,00	1.544.299.528.302,00	1.467.373.437.006,00	574.815.298.531,00	1.555.440.106.059,00
2.1	Belanja Pegawai	755.420.130.459,00	781.454.927.968,00	814.711.744.290,00	366.727.021.585,00	821.704.197.190,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	579.136.136.658,00	683.637.096.308,00	552.406.829.079,00	182.995.847.877,00	634.506.349.009,00
2.3	Belanja Bunga	435.748.720,00	443.405.362,00	1.000.000.000,00	153.664.711,00	1.000.000.000,00
	Belanja Subsidi	25.552.600,00	41.906.200,00	250.000.000,00	3.440.000,00	250.000.000,00
C	Belanja Hibah	35.005.833.200,00	75.572.192.464,00	97.715.863.637,00	24.482.024.358,00	97.120.559.860,00
1	Belanja Bantuan Sosial	2.701.881.599,00	3.150.000.000,00	1.289.000.000,00	453.300.000,00	859.000.000,00
1.1	BELANJA MODAL	321.922.174.799,00	373.887.020.203,00	158.942.075.844,00	19.345.899.719,00	371.938.216.536,00
1.2	Belanja Tanah	768.153.000,00	2.505.755.160,00	5.466.796.354,00	995.936.500,00	5.311.120.000,00
1.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.266.893.889,00	80.891.195.217,00	33.722.677.482,00	7.790.402.287,00	33.722.677.482,00
1.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.042.766.208,00	67.619.037.887,00	27.240.564.71,00	695.035.782,00	60.664.720.410,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	158.063.079.655,00	221.987.373.959,00	91.984.341.296,00	9.712.851.850,00	185.428.854.317,00
2.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.585.696.548,00	883.657.980,00	527.696.000,00	151.673.300,00	527.696.000,00
	Belanja Modal BLUD	7.195.585.499,00				
2.2	BELANJA TIDAK TERDUGA	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	27.363.022.660,00	1.375.514.140,00	3.769.645.080,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	27.363.022.660,00	1.375.514.140,00	3.769.645.080,00
2.4	BELANJA TRANSFER	1.242.312.530,00				



Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2017 – 2022

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Anggaran 2022		
				Murni 2022	Realisasi Semester I 2022	Proyeksi Perubahan 2022
E	SURPLUS/DEFISIT	17.750.207.608,25	86.884.059.677,92	(78.821.339.451,00)	220.983.971.188,00	(73.620.651.067,00)
	PEMBIAYAAN DAERAH	14.048.311.867,23	32.530.576.485,48	78.821.339.451,00	49.866.901.438,40	5.547.944.998,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	77.418.838.521,23	76.516.452.975,48	116.321.339.451,00	49.866.901.438,40	43.047.944.998,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.397.875.408,23	31.798.519.475,48	106.321.339.451,00	49.866.901.438,40	33.047.944.998,00
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	42.020.963.113,00	42.485.876.490,00	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		2.232.057.010,00			
	Penerimaan Piutang Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	63.370.526.654,00	43.985.876.490,00	37.500.000.000,00	17.499.999.620,00	37.500.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	61870526654	42.485.876.490,00	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.499.999.620,00	7.500.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan			20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	31.798.519.475,48	119.414.636.163,40	0	253.350.873.006,40	(68.072.706.069,00)



3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah ini dapat diukur dari besar kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal dan sumber-sumber pendapatan daerah, mengharuskan pemerintah daerah melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana-dana perimbangan dari pusat maupun provinsi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta aset daerah secara profesional guna menunjang pendapatan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencakup Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat, dan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah :

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;



- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain :

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
 - 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
 - 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
 - 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
- b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:
 - 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya
 - 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
 - 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).
- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui :
 - 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air



permukaan, dan pajak metrrologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

- 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efisien, efektif, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama belanja daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan dana kelurahan;
2. Alokasi belanja untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah yang sifatnya wajib diselenggarakan dalam 1 tahun penuh, diantaranya seperti biaya listrik, tenaga pengamanan dan kebersihan kantor, dll;
3. Alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri dari 6 bidang urusan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
4. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD melalui pendekatan *Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*;
5. Alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
6. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh RSUD dr. Soekardjo.

3.2.4 Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah Lainnya

1. Dana Belanja DIPA Kementerian/Lembaga (Tugas Pembantuan dan Satker) di Daerah.

Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang program Pembangunan di Daerah, yaitu dengan memanfaatkan dana DIPA Kementerian/Lembaga, berupa dana



Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dana Satker melalui Kementerian/Lembaga yang ada di daerah.

Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Prinsip Pengelolaan Dana TP antara lain (1) Pendanaan Dekon dan Tugas Pembantuan hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (PP 38/2007), (2) Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, (3) Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing), (4) Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional (5) Pendanaan Dekon/TP memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu (6) K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebelum pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah (7) Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian.

Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya, Kegiatan bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya yang diserahkan kepada pemerintah daerah serta Pengadaan aset Belanja Barang Fisik Lainnya.

Sedangkan Dana Satker (Satuan Kerja) di daerah terbagi kedalam 2 (dua) Jenis Satker, Yaitu Satker Pusat, adalah satker yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga yang lokasinya dapat berada di pusat dan atau di daerah serta Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor pusat.

Satker dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan. Untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah menyediakan alokasi dana melalui mekanisme penganggaran Satker yang ada di Daerah. Peran Koordinasi Pemerintah Daerah mutlak diperlukan dalam rangka koordinasi memberikan input menyusun rencana kerja dan anggaran satker secara jelas, terencana dan berkesinambungan (expenditure framework) dalam menghasilkan layanan bagi masyarakat (public services) di daerah.

2. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR)

Sumber alternatif lainnya yang dapat digunakan dalam membiayai pembangunan daerah adalah pelibatan pihak swasta melalui penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Kota Tasikmalaya



TJSL dan PKBL diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- c) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- d) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
- f) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
- g) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- h) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah

Dalam rangka terus mendorong minat pihak swasta untuk berkerjasama dalam pembangunan daerah melalui Program TJSL dan PKBL dilakukan melalui upaya-upaya :

- a) Sosialisasi program Program TJSL dan PKBL kepada pihak swasta dan perusahaan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi program pembangunan dengan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya
- c) Memberikan penghargaan bagi pihak swasta dan perusahaan yang telah berkerjasama dan melaksanakan program Program TJSL dan PKBL
- d) Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi Program TJSL dan PKBL dalam meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dan perusahaan

3. Pemanfaatan Dana Umat.

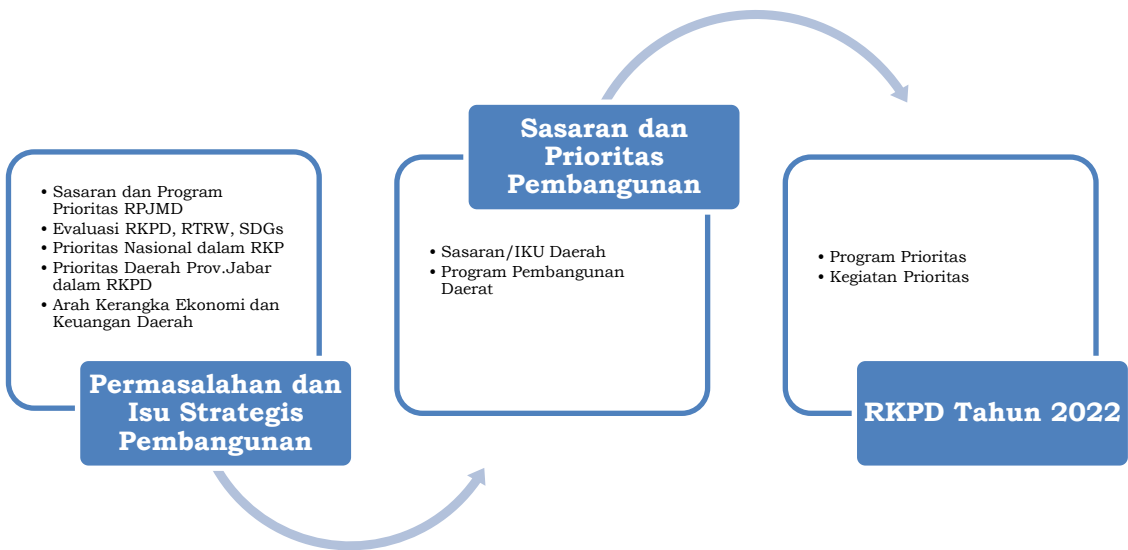
Pemanfaatan dana umat yang himpun oleh lembaga-lembaga keuangan non pemerintah seperti LAZNAS, yayasan untuk mendukung pembangunan melalui cara mengsinergikan sasaran program lembaga tersebut dengan sasaran pembangunan kota.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 mengacu pada (1) Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, (2) hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, RTRW, SDGs dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD (3) Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Awal RKP (4) Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat (5) identifikasi permasalahan pembangunan dan mempertimbangkan rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2022 disajikan dalam bentuk kerangka pikir perencanaan pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022, seperti terlihat pada Gambar 4.1 berikut :



Gambar 4.1

Kerangka Pikir Rumusan RKPD Kota Tasikmalaya

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan



keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi



Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan :
 - a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
 - b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
 - c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
 - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan :
 - a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
 - b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan;
 - c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;
 - d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
 - e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
 - a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
 - c) Pemenuhan Layanan Dasar;
 - d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan :
 - a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
 - b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
 - c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
 - d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
 - e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
 - f) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
 - g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar :



- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar;
 - b) Infrastruktur Ekonomi;
 - c) Infrastruktur Perkotaan;
 - d) Energi dan Ketenagalistrikan;
 - e) Transformasi Digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim :
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik :
- a) Konsolidasi Demokrasi;
 - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - c) Penegakan Hukum Nasional;
 - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
 - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

RKPD tahun 2022 Provinsi Jawa Barat merupakan RKPD tahun ke-4 dari RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Visi : ***“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”***

Misi :

1. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;



2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Adapun tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban, mempunyai tujuan : terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
2. Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif, mempunyai tujuan :
 - 1) meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
 - b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
 - c. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
 - d. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
 - e. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga, dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional.
 - 2) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan local
 - b. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
3. Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah, mempunyai tujuan :
 - 1) terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok



- b. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
 - c. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
 - d. Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan
- 2) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
 - b. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestic
 - c. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
4. Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan, mempunyai tujuan : terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran :
- a. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri
 - b. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
 - c. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
 - d. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, mempunyai tujuan : terwujudnya *good governance dan whole of government*, dengan sasaran :
- a. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel
 - b. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target per tahun.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Kota Tasikmalaya dalam RPJMD tahun 2017-2022 adalah *Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani*. Sedangkan misi dalam upaya pencapaian visi tersebut adalah :



1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Isu strategis yang tertuang dalam RPJMD yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup
4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat
5. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar
6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga
7. Tata kelola tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Adapun Tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 mempunyai 2 tujuan dan 2 sasaran, yaitu :

- T1. Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius, dengan sasaran :
- S1. Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- T2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, dengan sasaran :
- S2. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah

Misi ke-2 mempunyai 2 tujuan dan 4 sasaran, yaitu :

- T.3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran:
- S3. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat
- T.4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan sasaran :
- S4. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa
- S5. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha
- S6. Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah

Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran, yaitu :

- T5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran :



- S7. Meningkatnya layanan infratraktur dasar perkotaan yang mantap, aman, nyaman dan inklusif
- S8. Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat
- S9. Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan sesuai tata ruang wilayah.

Misi ke-4 mempunyai 2 tujuan dan 3 sasaran, yaitu :

- T6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran :
 - S10. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
 - S11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - S12. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga
 - S13. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
- T7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender, dengan sasaran :
 - S14. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 2 sasaran, yaitu :

- T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :
 - S15. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
 - S16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
Misi 1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal				
T1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%)	87,00	87	87
S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani	0,00	0	0
P1 : Program Magrib Mengaji	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti Program Magrib Mengaji (%)	90,00	90	90
P2 : Program Tasik Berkarakter	Persentase siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan karakter (%)	100,00	100	100
	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan berwawasan kebangsaan (%)	100,00	100	100
	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan hari besar keagamaan (%)	75,00	75	75
T2 : Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%)	61,00	61	61
S2 : Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	Persentase kelompok seni budaya aktif (%)	80,00	80,00	80,00
P3 : Program Tasik Berbudaya	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah (%)	61,00	61	61
	Persentase pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah tingkat kota (%)	100,00	100	100
Misi 2: Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat				
T3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	11,50	11,50	13,08
S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS (%)	89,51	89,51	89,51
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100,00	100	100



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
P4 : Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%)	100,00	100,00	100,00
P5 : Program Tasik Bersedekah	Jumlah sedekah yang terkumpul (milyar rupiah)	11,25	3,40	3,40
P6 : Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif)	Jumlah sasaran penerima Program Gema Madani (kelompok/orang)	25000	5000	5000
P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK	3150	600	600
T4 : Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,00	5,00
	PDRB a.d.h Berlaku (triliyun rupiah)	23,61	23,61	23,61
	PDRB Perkapita a.d.h Berlaku (juta rupiah)	31,04	31,04	31,04
	Pengeluaran Perkapita (juta rupiah)	9,86	9,86	9,86
	Inflasi daerah (%)	2,00	2,00	6,50
	Indeks Gini (point)	0,39	0,390	0,390
S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Indeks Daya Beli (point)	59,63	59,63	59,54
	Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%)	5,74	5,74	5,74
	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%)	6,97	6,97	6,97
	Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	5,83	5,83	5,83
	Nilai investasi daerah (milyar rupiah)	300,00	300,00	300,00
	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	3109000,00	642.000	642.000
P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Persentase Koperasi sehat (%)	20,00	20	20
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil (%)	5,00	1	1



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang meningkat omsetnya (%)	12,00	3	3
	Persentase Industri Kecil Menengah berkualitas (%)	12,00	3	3
	Capaian penerbitan Perijinan Terpadu tepat waktu sesuai SOP (%)	100,00	100	100
S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,02	7,02	7,53
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,75	66,75	66,75
P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru (orang)	5.000	1688	1688
P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten (%)	62,00	62,00	62,00
S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,10	0,10	0,10
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	92,00	92	92
P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (%)	0,10	0,10	0,10
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	85,00	85	85
Misi 3: Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan				
T5 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%)	77,75	77,75	77,75
S7 : Meningkatnya layanan infratraktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	97,00	97	97
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,00	100	100
P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	97,00	83	83
	Rasio Jaringan Irigasi (point)	0,07	0,0742	0,0742
	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	60,49	0,00	0,00



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
S8 : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	61,59	61,59	61,59
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	100,00	100	100
P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	100,00	100	100
S9 : Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan sesuai tata ruang wilayah.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	74,40	74,40	74,40
P14 : Program Tasik Resik	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	13,34	13,34	13,34
	Indeks Kualtas Air	53,60	53,60	53,60
	Indeks Kualitas Udara	79,60	79,60	79,60
	Persentase Penanganan Sampah (%)	83,45	83,45	83,45
Misi 4: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
T6 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indek Pembangunan Manusia (point)	73,95	73,95	73,86
S10 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (point)	68,50	68,5	68,5
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	100,00	100	100
P15 : Program Tasik Cerdas	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,70	9,7	9,7
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,54	13,54	13,54
S11 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indek Kesehatan (point)	81,65	81,65	81,65
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100,00	100,00	100,00
P16 : Program Tasik Sehat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,15	73,15	73,15
	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	116,75	125,09	125,09
	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	5,29	5,29	5,29



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
	Prevalensi Stunting (%)	18,10	18,10	18,10
S12 : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%)	14,00	14,00	14,00
P17 : Program Tasik Muda Berprestasi	Jumlah prestasi bidang kepemudaan (buah)	3,00	3,00	3,00
	Persentase peningkatan nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat (%)	5,00	5,00	5,00
S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (point)	2,50	2,5	2,50
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penanganan Bencana Daerah (%)	100,00	100,00	100,00
P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga)	Persentase penegakan Peraturan Daerah (%)	90,00	90,00	90,00
	Persentase penanganan bencana daerah (%)	100,00	100,00	100,00
T7 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	87,00	87,00	87,00
	Indeks Pembangunan Gender/IPG (point)	91,54	91,54	91,54
	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (point)	62,96	62,96	62,96
S14 : Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,20	0,20	0,02
	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (point)	2,04	2,04	2,04
P19 : Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang tertangani (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	72,70	72,70	72,70
Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
T8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	61-70 (B)	61-70 (Baik)	61-70 (Baik)



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	TARGET AKHIR RPJMD	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)
	Capaian Implementasi e-government ((poin)	-	-	-
	Capaian Predikat Indeks SPBE	Sangat Baik (3,00)	Sangat Baik (3,00)	Sangat Baik (3,00)
P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)	Cakupan IKM Perangkat Daerah (%)	100	100	100
S16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP	WTP
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	3,4	3,4	3,4
	Nilai Evaluasi SAKIP (kategori)	81 -90 (A)	81 -90 (A)	81 -90 (A)
	Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)
	Tingkat Maturitas SPIP (level)	3	3	3
P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur	Cakupan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (%)	75	75	75
	Cakupan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah (%)	70	70	70

Sumber : RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022

Berdasarkan 5 (lima) isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2022, maka perlu ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2022 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022, mengacu pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dan perubahannya. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.

Startegi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI			
Misi 1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal			
T1. Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	S1. Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan karakter masyarakat serta implementasi tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegar	a. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan implementasi tata nilai kehidupan yang religius dengan meningkatkan fasilitasi keagamaan
			b. Meningkatkan Penguatan pendidikan karakter dan akhlak mulia pada siswa dan masyarakat melalui peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan kegiatan extra kurikuler
			c. Meningkatkan keterlibatan aktif lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pencegahan konflik masyarakat dan SARA
T2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah	S2. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerahdengan strategi meningkatkan apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	a. Meningkatkan pembinaan pelaku dan sarana prasarana kesenian serta kebudayaan daerah
			b. Meningkatkan event/pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan
			c. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya yang berkembang
Misi 2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat			
T3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	S3. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat dengan strategi memperbaiki dan meningkatkan sistem program jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta mendorong pembangunan yang inklusif	a. Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosialserta peningkatan cakupan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan daerah yang menggunakan basis data terpadu/satu data sasaran
			b. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
			c. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan kapasitas



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			masyarakat miskin dan lembaga kesejahteraan sosial,
			d. Meningkatkan penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
T4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	S4. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Meningkatkan peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa, meningkatkan investasi dan membangun kemitraan/kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat, meningkatkan PDRB dan pengeluaran perkapita, mendorong sektor pariwisata daerah	a. Meningkatkan nilai tambah produksi dan pengeluaran perkapita dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan promosi daerah, b. Meningkatkan kelembagaan dunia usaha pada sektor koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata, baik sektor formal maupun informal c. Meningkatkan Pengembangan pasar rakyat dan memfasilitasi kemudahan akses terhadap pemasaran dan permodalan yang dilandasi oleh pelaksanaan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius
	S5.Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat	a. Meningkatkan potensi ekonomi lokal, dan pencetakan wirausaha baru b. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, optimalisasi Balai Latihan Kerja non pemerintah c. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan pembinaan hubungan industrial serta pengelolaan informasi ketenagakerjaan yang baik dan terbuka
	S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah	a. Meningkatkan produksi dan pemasaran pertanian serta ketersediaan pangan
			b. Meningkatkan sarana prasarana, penggunaan teknologi serta kapasitas SDM pertanian
			c. Meningkatkan Penataan kelembagaan dan pengelolaan distribusi hasil pertanian yang baik, mendorong pola dan keanekaragaman konsumsi serta menjamin keamanan pangan daerah
Misi 3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan			
T5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	S7. Meningkatnya layanan infrastruktur jalan yang mantap, aman, nyaman dan inklusif	meningkatkan layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman dan nyaman melalui implementasi program pemantapan infrastruktur dasar perkotaan yang ditunjang oleh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan	a. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar perkotaan melalui peningkatan kondisi jalan yang baik didukung oleh pelengkap jalan dan fasilitas lalu lintas untuk menunjang keselamatan pengguna jalan serta pengembangan infrastruktur transportasi yang diprioritaskan pada sentra – sentra industri kecil dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan	menengah, pusat perdagangan dan jasa <div> <div>b. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air dan irigasi untuk kawasan pertanian produktif</div> <div>c. Penataan infrastruktur dengan memperhatikan perencanaan tata ruang daerah</div> </div>
	S8. Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	meningkatkan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	<div> <div>a. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, perbaikan infrastruktur permukiman dan sanitasi lingkungan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM),</div> <div>b. Meningkatkan rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan mendorong peran serta masyarakat</div> </div>
	S9. Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan sesuai tata ruang wilayah	Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan melestarikan kawasan resapan air, pemantauan kualitas lingkungan hidup, dan penyelenggaraan layanan dan pengelolaan persampahan melalui Program Tasik Resik.	<div> <div>a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan layanan dan pengelolaan persampahan dari hulu sampai hilir</div> <div>b. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau, kawasan lindung dan ruang publik</div> <div>c. Meningkatkan Pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan Kota Tasikmalaya</div> </div>
Misi 4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
T6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	S10. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang inklusi	<div> <div>a. Meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah dengan meningkatkan mutu dan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal yang inklusi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM),</div> <div>b. Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan yang didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai, kurikulum dan metode pendidikan yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi,serta dilandasi oleh pendidikan karakter yang kuat</div> <div>c. Meningkatkan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat</div> </div>
	S11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam mencapai penurunan angka kelahiran, angka kematian, angka kesakitan, prevalensi stunting untuk pencapaian indeks kesehatan	<div> <div>a. Meningkatkan indeks kesehatan, angka harapan hidup, penurunan kematian ibu dan bayi serta gizi balita dan prevalensi stunting, penurunan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)melalui pendekatan keluarga dan masyarakat</div> </div>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<div>b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM kesehatan serta penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai</div> <div>c. Meningkatkan pencapaian kepesertaan menyeluruh (universal coverage) jaminan kesehatan nasional</div>
	S12. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga melalui peningkatan pelayanan kepemudaan dan olahraga untuk pencapaian prestasi kepemudaan dan olahraga baik tingkat provinsi maupun nasional	<div>a. Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi kepemudaan dan olahraga</div> <div>b. Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta peningkatan penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga</div>
	S13. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang komprehensif	<div>a. Meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat secara sinergis dan komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat</div> <div>b. Meningkatkan pencegahan tindak kriminal dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan melibatkan peran serta masyarakat</div>
T7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk	S14. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender serta memperkuat pemberdayaan ketahanan keluarga	<div>a. Meningkatkan layanan pemberdayaan dan perlindungan terhadap keluarga terutama perempuan, anak dan kelompok marjinal</div> <div>b. Penguatan kualitas dan kesejahteraan keluarga serta mendorong peran serta perempuan dalam pembangunan,</div> <div>c. Meningkatkan keluarga berencana dan pengendalian penduduk</div>
Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi	S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan	<div>a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana prasarana yang memadai</div> <div>b. Percepatan penerapan SPBE pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik</div>
	S16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan	a. Peningkatan Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional, efektif efisien, transparan dan akuntabel,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			b. Meningkatkan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan empat fokus pembangunan guna mengejar target RPJMN 2020-2024, untuk itu tema RKP 2022 adalah Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.

Adapun arah Pembangunan dalam RKP tahun 2022 yaitu :

- 1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;
- 2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- 3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial;
- 4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Tema pembangunan RKP Tahun 2022 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2022, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional Tahun 2022

- 1. PN 1,Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
- 3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- 7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Sasaran Nasional Tahun 2022

- 1. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
- 2. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
- 3. Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu



Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;

4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
6. Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan;
7. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
8. Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan;
9. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
10. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
11. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
14. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
15. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
17. Meningkatnya Konektivitas Wilayah;
18. Meningkatnya Layanan Angkutan Umum Massal di 6 (enam) Kota Metropolitan;
19. Meningkatnya Akses dan Pasokan Energi dan Tenaga Listrik yang Merata, Andal, dan Efisien;
20. Meningkatnya Infrastruktur Energi Listrik yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Listrik Terhadap Rumah Tangga Hingga ke Pelosok;
21. Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Tik, Serta Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi dalam Pertumbuhan Ekonomi;
22. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
23. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim;
24. Pembangunan Rendah Karbon; dan
25. Menguatnya Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2020 yaitu terjadinya pandemi COVID-19, maka

pada tahun 2022 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 ditekankan pada PN-1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Risiko dari adanya pandemi COVID-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan IPTEK.

4.2.2. Telahaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan misi pembangunan RPJMD. Tema pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yakni: “Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang merupakan janji Kepala Daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 terdiri dari 11 dengan memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana tabel di bawan ini :

Tabel 4.3.
Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	P1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
	P5 Reformasi Sistem Pendidikan Pemajuan Kebudayaan
	P9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	P2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi
	P3 Penguatan Sistem ketahanan Pangan Berkelanjutan
	P10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wialayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	P11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	P8 Gerakan Membangun Desa
Kemiskinan, pengangguran, dan masalah social	P4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
	P8 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
Reformasi birokrasi	P7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah



Penjelasan lebih rinci mengenai prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagai berikut:

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dilakukan melalui 28 (dua puluh delapan) strategi dan 54 arah kebijakan yang tersebar ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah

Sasaran dari Reformasi Sistem Kesehatan Daerah adalah Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan.

Kebijakan dan strategi yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi mulai dari fasilitas layanan primer (puskesmas atau klinik swasta) sampai ke fasilitas layanan tingkat lanjut yaitu rumah sakit rujukan termasuk laboratorium kesehatan berbasis data kependudukan;
- b. Penguatan jejaring rujukan laboratorium berdasarkan 5 (lima) kewilayahan di Provinsi Jawa Barat yang meliputi: wilayah Purwasuka, Bandung Raya, Priangan Timur, Bodebek, dan Ciayumajakuning;
- c. Penguatan kapasitas sumberdaya kesehatan, baik SDM maupun sarana prasarana pelayanan kesehatan;
- d. Menjamin pembiayaan layanan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- e. Penguatan penelitian dan pengembangan kesehatan (Litbangkes);
- f. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. Pengawasan pergerakan transportasi sesuai ketentuan pemerintah terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi

Sasaran dari prioritas ini adalah :

- a. Meningkatkan peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
- b. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi
- c. Meningkatkan Aksesibilitas Dari dan Ke Sentra Perdagangan, Perindustrian, dan UMKM
- d. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat

Untuk mengatasi dampak Pandemi Covid 19 dibutuhkan program pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan



Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 khusus untuk memulihkan kondisi yang terdampak pandemi, diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi serta melakukan reformasi pada sistem kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial, dan sistem ketahanan bencana.

Pemulihan dan pertumubuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dilakukan melalui 2 (dua) aspek, yakni :

- a. Pemulihan ekonomi
- b. Pemulihan investasi

3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Sasaran dari prioritas ini adalah :

- a. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- b. Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Pertanian

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pangan dan pertanian di tahun 2020 relatif kecil dibandingkan sektor lainnya, namun tetap ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan. Oleh karena itu tetap diperlukan upaya-upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui sistem pangan berkelanjutan yang terdiri dari aspek:

- a. Ketersediaan Pangan, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, penggunaan teknologi yang bersifat sustainable dan pemberdayaan masyarakat bersifat padat karya
- b. Akses pangan, terdiri dari :
 - 1) meningkatkan distribusi, logistik, dan perbaikan tata niaga pangan melalui pembenahan distribusi dan pemasaran, optimalisasi BUMD, pemanfaatan sistem informasi, pengaturan distribusi pangan;
 - 2) membenahi struktur pasar melalui penguatan pengaturan distribusi pangan, optimalisasi peran BULOG sebagai lembaga penyangga untuk mendukung stabilisasi harga pangan, serta penyediaan alternatif pasokan komoditas strategis;
 - 3) pemanfaatan pangan dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat.

Pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Strategi perlindungan sosial yang komprehensif yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), akses permodalan usaha melalui kredit MESRA, pelatihan kewirausahaan dll; dan



- b. Penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan SPP gratis, beasiswa siswa miskin, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN KIS), pelayanan gratis bagi masyarakat miskin di RS Provinsi, pelayanan panti, pembangunan rutilahu (rumah tidak layak huni), pemasangan listrik gratis, dan perlindungan sosial bagi korban bencana.

5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan. Strategi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi adalah itu pola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) melalui sistem daring (online). Selain itu, reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan merupakan prioritas dan langkah strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perbaikan sistem pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan merujuk kepada perbaikan tatakelola pendidikan, pemenuhan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas mutu lulusan yang berdaya saing. Untuk memberikan kemudahan akses pendidikan kepada masyarakat dan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dilakukan melalui pengembangan sekolah terintegrasi, dan revitalisasi SMK dilakukan sebagai peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana. Strategi dan kebijakan untuk penguatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat yaitu melalui peningkatan kesiapsiagaan, terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu: 1). Ketangguhan Masyarakat dan Komunitas (*Resilience Citizen*), 2). Ketangguhan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) dan Kearifan Lokal (*Resilience Knowledge and Local Wisdom*), 3). Ketangguhan Kelembagaan dan Kebijakan (*Resilience Institutional and Policy*), 4). Ketangguhan Pendanaan (*Resilience Financing*), 5). Ketangguhan Infrastruktur (*Resilience Infrastructure*), serta 6). Ketangguhan Ekologi (*Resilience Ecology*).

Strategi dan kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dalam kerangka kerja untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat, yang dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) aktivitas yaitu: 1) Penilaian resiko, 2) Rencana kontijensi, 3) Kelembagaan, 4) Sistem informasi, 5) Mobilisasi sumberdaya, 6) Peringatan dini, 7) Mekanisme respon, 8) Pendidikan dan pelatihan publik, serta 9) Gladi/simulasi.

7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Sasaran dari prioritas ini adalah Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah merupakan prioritas untuk menjawab isu reformasi birokrasi. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Misi 3 dan 5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

8. Gerakan Membangun Desa

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Gerbang Desa merupakan prioritas untuk menjawab isu kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, pertumbuhan dan pemerataan



pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 2, Misi 3 dan Misi 4 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara merupakan prioritas untuk menjawab isu strategis Jawa Barat yaitu peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 1 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran dari prioritas ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
- b. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat

Infrastruktur konektivitas wilayah merupakan prioritas untuk menjawab isu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 3 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Sasaran dari prioritas ini adalah Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 antara lain dengan mengaktifkan pembangunan pariwisata, dimana pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi. Arah kebijakan yang diambil adalah dengan melaksanakan program yang dapat menyerap tenaga kerja terutama yang kehilangan pekerjaan, membangkitkan kembali usaha terdampak COVID-19 dan membangun usaha baru untuk meningkatkan investasi dan serapan tenaga kerja. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan beberapa kegiatan antara lain peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan promosi wisata pada originasi yang sudah pulih; peningkatan eventevent seni, budaya dan olah raga; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas, peningkatan sarana prasarana pendukung dan standar layanan; serta pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.



4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.2.3.1. Prioritas dalam RPJMD

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bertujuan untuk mengutamakan dan memfokuskan rencana pembangunan dalam rangka percepatan mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 4.4.
Isu Strategis RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022
dan RKPD Tahun 2022

Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis RKPD Tahun 2022
1. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah	1. Belum optimalnya implementasi tata nilai kehidupan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar serta penanganan pandemi Covid-19
2. Penanggulangan kemiskinan	2. Melambatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya saing masyarakat.
3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup	3. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran dan permasalahan sosial
4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat	4. Kurang optimalnya penyediaan dan kemandirian infrastruktur perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar	5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga	
7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	

Sumber : Hasil Analisa Bappelitbangda,2021.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan memperhatikan isu strategis dan permasalahan serta hasil evaluasi pelaksanaan SKPD tahun 2020, maka tema pembangunan tahun 2022, yaitu : **Memacu Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Menuju Masyarakat Maju dan Madani.**

Dalam upaya mendukung tema pembangunan tersebut, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2022 diarahkan pada upaya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi sebagai dampak dari pandemik Covid-19 yang meliputi peningkatan pelayanan kesehatan, pelayanan dan jaring pengaman sosial, Peningkatan daya saing dan daya beli masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan agama dan karakter, tata nilai kehidupan dan budaya daerah, peningkatan kualitas pendidikan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan yang ditunjang oleh infrastruktur kota yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima guna tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, sejahtera, religius, maju dan madani.



Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2022, yaitu : **Memacu Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Menuju Masyarakat Maju dan Madani** telah disusun prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata nilai kehidupan dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar, melalui :
 - a. Peningkatan implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, diantaranya :
 - 1) Peningkatan sosialisasi, penegakan dan monitoring perda tata nilai;
 - 2) Peningkatan program Magrib Mengaji dan Tasik Bersedekah;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, diantaranya :
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pendidikan;
 - 2) Peningkatan sarana pendukung pendidikan;
 - 3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
 - 4) Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu berprestasi
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, diantaranya :
 - 1) Penanganan dan Vaksinasi Covid-19;
 - 2) Penurunan stunting;
 - 3) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (Preventif dan Promotif);
 - 4) Peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan;
 - 5) Operasional RSUD Pratama tipe D dan Rehabilitasi Puskesmas;
 - d. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), diantaranya:
 - 1) Penanganan rehabilitasi anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan gelandangan, pengemis di luar panti dan korban bencana;
 - 2) Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - e. Penguatan Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana, diantaranya :
 - 1) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 2) Peningkatan Penanggulangan Bencana.
 - f. Pengendalian Penduduk dan Kesenjangan Gender, diantaranya :
 - 1) Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.



2. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan daya saing daerah, melalui :
 - a. Percepatan investasi daerah, diantaranya :
 - 1) Pengembangan iklim investasi dan promosi daerah;
 - 2) Peningkatan pelayanan penanaman modal terpadu melalui Mall Pelayanan Publik.
 - b. Peningkatan kualitas dan produksi industri, usaha mikro dan kecil, serta koperasi, diantaranya :
 - 1) Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan koperasi;
 - 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
 - 3) Fasilitasi bantuan modal kerja.
 - c. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, diantaranya :
 - 1) Peningkatan kapasitas para petani;
 - 2) Peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan;
 - 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian;
 - 4) Penguatan ketahanan pangan daerah;
 - 5) Bantuan modal kerja pertanian dan perikanan.
 - d. Revitalisasi pasar dan fasilitasi perdagangan, diantaranya :
 - 1) Revitalisasi dan rehabilitasi pasar rakyat serta fasilitasi perdagangan;
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK);
 - 3) Peningkatan pengawasan perdagangan.
 - e. Pengembangan pariwisata kota, diantaranya :
 - 1) Pengembangan kawasan wisata Situ Gede;
 - 2) Pengembangan Kampung wisata;
 - 3) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi;
 - 4) Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata.
3. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, melalui :
 - a. Peningkatan jaminan dan perlindungan sosial, diantaranya :
 - 1) Peningkatan pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - 2) Jaminan kesehatan masyarakat miskin;
 - 3) Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
 - 4) Bantuan sambungan listrik rumah tangga miskin.
 - b. Pemberdayaan masyarakat miskin, diantaranya :
 - 1) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin;
 - 2) Pelatihan dan bantuan modal kerja.
 - c. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, diantaranya :
 - 1) Peningkatan kapasitas pencari kerja;



- 2) Pelatihan dan bantuan modal kerja;
 - 3) Peningkatan pencetakan wira usaha baru;
 - 4) Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas.
4. Peningkatan kemantapan dan penyediaan infrastruktur perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui :
- a. Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat, diantaranya :
 - 1) Peningkatan pelayanan persampahan;
 - 2) Peningkatan akses terhadap ketersediaan air bersih;
 - 3) Peningkatan akses terhadap pengelolaan air limbah domestik.
 - b. Peningkatan kualitas permukiman, diantaranya :
 - 1) Penataan kawasan kumuh;
 - 2) Peningkatan infrastruktur permukiman.
 - c. Peningkatan infrastruktur konektivitas daerah, diantaranya :
 - 1) Lanjutan pembangunan jalan lingkar utara;
 - 2) Peningkatan kemantapan jalan.
 - d. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya :
 - 1) Penataan ruang yang lebih proporsional;
 - 2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - e. Peningkatan pengendalian lingkungan hidup, diantaranya :
 - 1) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui :
- a. Percepatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu:
 - 1) Manajemen Perubahan;
 - 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
 - 4) Penataan tata Laksana;
 - 5) Penataan Sistem Manajemen SDM ;
 - 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - 8) Penguatan Pengawasan;
 - b. Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diantaranya :
 - 1) Peningkatan sarana prasarana pemerintahan;



- 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Pemerintahan;
- 3) Penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Daerah, diantaranya :
 - 1) Peningkatan Penegakan Perda;
 - 2) Peningkatan sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Daerah.

4.2.3.2. Standar Pelayanan Minimal

Prioritas pembangunan selanjutnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, ada 6 (enam) jenis SPM yang terdiri dari :

1. SPM Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan

2. SPM Kesehatan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif

3. SPM Pekerjaan umum

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4. SPM Perumahan rakyat



Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
5. SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

6. SPM Sosial

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian SPM :

1. Dalam rangka pencapaian pencapaian SPM Pendidikan dialokasikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan. pemenuhan capaian SPM melalui program kegiatan yang memuat indikator serta sasaran yang bertujuan untuk PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas data sasaran SPM bidang pendidikan.
2. Untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan pelayanan terhadap 12 kelompok penerima layanan kesehatan;
3. Untuk pemenuhan SPM bidang perumahan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam penyediaan infrastruktur perumahan korban bencana dan program pemerintah;
4. Untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik;

5. Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban umum. Adapun untuk pemenuhan dalam sub bidang kebencanaan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan informasi pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6. Peningkatan Pemenuhan SPM bidang Sosial, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran yang dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

4.2.3.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Keselarasan pelaksanaan SDGs ke dalam RKPD Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.5
Keterkaitan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs

SDGs	RKPD 2022		
	Program	Indikator	PD
Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial



SDGs	RKPD 2022		
	Program	Indikator	PD
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK berakses layanan air minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	Disdukcapil
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	Dinas Sosial
	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
		Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	
Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	
Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	
Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan



SDGs	RKPD 2022		
	Program	Indikator	PD
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	
Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender	Dinas PPKBP3A
Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK/RT berakses layanan air minum	Dinas PUTR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	Dinas PUTR
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya Indeks Kualitas Air	Dinas LH
Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	-	-	-
Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	Disporabudpar
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	Disporabudpar
		Jumlah Wira Usaha Baru subsektor ekonomi kreatif dan jasa usaha Pariwisata	Disporabudpar
Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas KUMKM Perindag



SDGs	RKPD 2022		
	Program	Indikator	PD
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas KUMKM Perindag
Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	-	-	-
Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik	Dinas PUTR
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Dinas PUTR
Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Capaian Produksi hasil peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Capaian produksi hasil perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	persentase peningkatan populasi ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Capaian Produksi Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Capaian produksi hortikultura dan perkebunan	
Tujuan 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	-	-	-
Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	-	-	-
Tujuan 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Capaian tersedianya dokumen pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Dinas LH



SDGs	RKPD 2022		
	Program	Indikator	PD
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Lokasi taman yang ditangani	Dinas LH
Tujuan 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbang
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial.	Badan Kesbang
Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase peningkatan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan	
		Persentase peningkatan pajak parkir, pajak air tanah , pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak penerangan jalan	
		Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	
	Program Informasi Dan Komunikasi/Publik	Persentase Pengelolaan Saluran Informasi	Dinas Kominfo
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola	Dinas Kominfo

4.2.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata



Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. RTRW ini harus menjadi acuan dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur - Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat. Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft).*



2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa
- 2) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan
- 3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum

Strategi pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) strategi pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa meliputi: penetapan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang dan mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional
- 2) strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan meliputi: peningkatan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan, penembangan jalan lingkaran dalam dan jalan lingkaran luar, peningkatan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan, pengembangan sistem transportasi massal, peningkatan fungsi terminal angkutan umum, dan peningkatan integrasi sistem antar moda transportasi.
- 3) strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum melalui pendistribusian sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi dan hierarki pelayanan, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi, pengembangan prasarana sumber daya air, peningkatan sistem pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana pengelolaan air limbah, dan pengembangan sistem prasarana drainase secara terpadu.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan pengembangan pola ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung; dan
- 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya

Adapun kebijakan pengelolaan kawasan lindung meliputi:

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :
 - a) Penetapan kawasan yang berfungsi lindung
 - b) Mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun
 - c) Meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung



- (2) Kebijakan pelestarian kawasan cagar budaya, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Penetapan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya
 - b) Memelihara kelestarian kawasan cagar budaya
- (3) Kebijakan penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
 - b) menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
 - c) mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
 - d) mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- (1) pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan pinggiran pusat kota; dan
 - b) mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota.
- (2) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien, dilaksanakan dengan strategi:
 - a) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - b) menerapkan insentif dan disinsentif.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis dalam dokumen RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031 adalah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan yang meliputi:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan keamanan negara

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kota Tasikmalaya meliputi:

- (1) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional
 - b) pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala regional
 - c) pengembangan sentra bisnis baru



- d) pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menengah. Antara lain yaitu pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansar
- (2) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a) mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan, yaitu di Kawasan Situ Gede; dan
 - b) mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama kawasan, yaitu di Kawasan Wisata Alam Urug.
- (3) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a) menetapkan kawasan strategis pendidikan; dan
 - b) mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsifungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.
- (4) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a) menata kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b) mengoptimalkan fungsi kawasan dengan mengintegrasikan fungsi pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi komersial tanpa mengganggu fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu di kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

4.2.3.5. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penyusunan RKPD harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 merupakan pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengejawantahkan kewajibannya, sebagai representasi masyarakat Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pula halnya ketentuan yang diatur pada Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat/konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kegiatan dalam rangka penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan hasil kegiatan reses 45 Anggota DPRD, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra kerja Perangkat Daerah Pemerintah



Kota Tasikmalaya dan hasil kunjungan kerja dalam daerah alat-alat kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya.

1. Kegiatan Reses

Kegiatan reses dilaksanakan dilaksanakan dalam 3 kali masa reses yang disesuaikan dengan 3 kali masa sidang. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sebagai bahan penyusunan laporan reses dan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Lokasi Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan terdiri dari 4 lokasi yaitu :

- a. Wilayah Dapil I meliputi :
 1. Kecamatan Cihideung;
 2. Kecamatan Tawang; dan
 3. Kecamatan Bungursari.
- b. Wilayah Dapil II meliputi :
 4. Kecamatan Cipedes;
 5. Kecamatan Indihiang.
- c. Wilayah Dapil III meliputi :
 6. Kecamatan Cibeureum;
 7. Kecamatan Tamansari;
 8. Kecamatan Purbaratu
- d. Wilayah Dapil IV meliputi :
 9. Kecamatan Mangkubumi;
 10. Kecamatan Kawalu.

Tujuan pelaksanaan kegiatan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Proses pelaksanaanya dilakukan dengan mengundang peserta reses yaitu para penerima dampak langsung dari kelompok masyarakat kemudian oleh anggota dewan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan dalam bentuk masalah dan usulan kegiatan menjadi rekomendasi sebagai laporan reses setiap anggota dewan, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, sebagaimana dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

2. Rapat Dengar Pendapat

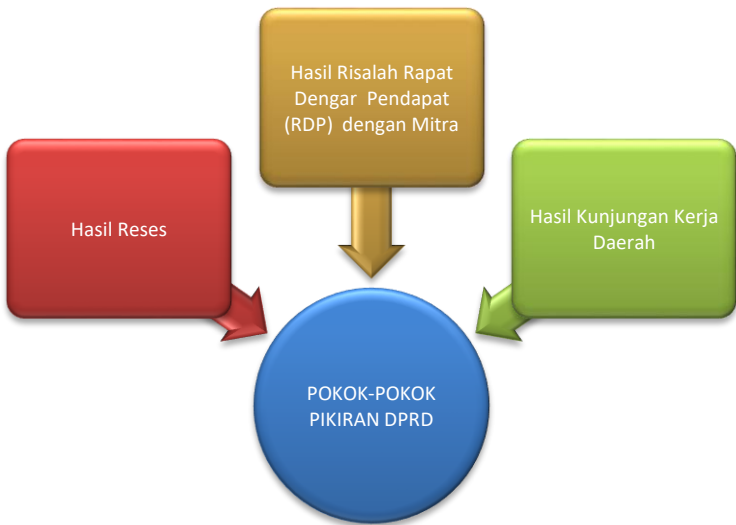
Rapat Dengan Pendapat (RDP) dilakukan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penyerapan aspirasi yang harus segera diselesaikan secara politis, pesertanya adalah kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, OPD yang terkait dan Komisi DPRD yang menjadi mitra kerjanya, serta pihak-pihak yang terkait yang dapat menyelaian masalah yang yang tersampaikan melalui selama proses rapat dengan pendapat. Lapornya

adalah hasil risalah rapat dengan kesimpulannya disajikan bahan rekomendasi dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

3. Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja DPRD adalah kegiatan selain kegiatan reses anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjangring, menampung aspirasi konstituen yang lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Prosesnya kunjungan kerja dilakukan dengan komunikasi dua arah dengan konstituen secara berkala, dengan melibatkan OPD mitra kerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, membuat laporan sebagai bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran dalam hubungan dengan pengawasan pembangunan.



Gambar 4.2.
Skema sumber data Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, hasil dengar pendapat, hasil audiensi, hasil reses atau penjangingan aspirasi masyarakat langsung yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang diperoleh dari DPRD melalui sekretariat DPRD. DPRD telah menyampaikan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 170/ Kep.01/DPRD 2021 tentang Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis



pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2021.

Beberapa pokok pikiran DPRD antarlain adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan Ruang Kelas Baru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;
2. Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan khususnya untuk Rumah Sakit Purbaratu dan Rumah Sakit Dewi Sartika dan seluruh fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya, dan peningkatan jumlah SDM kesehatan.
3. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan;
4. Mengoptimalkan bidang perumahan dan permukiman diantaranya mempermudah penyerahan fasum dan fasos, serta melaksanakan penataan kawasan kumuh;
5. Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan penciptaan keamanan dan ketertiban umum melalui menguatkan kelembagaan SatpolPP, sosialisasi, dan operasi penegakan keamanan dan ketertiban umum;
6. Meningkatkan penanganan PMKS mulai dari pendataan, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah;
7. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja melalui kerjasama pelatihan dan penempatan kerja, penyediaan balai latihan kerja, serta mengadakan bursa kerja.
8. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak terutama dalam penanganan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
9. Perlu dibangunnya kawasan pangan lestari serta menyediakan pemasaran produk pangan secara online;
10. Perlu peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu juga adanya penambahan ruang terbuka hijau;
11. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi;
12. Melakukan peningkatan pengelolaan perparkiran dan pengaturan lalu lintas serta pendataan penerangan jalan umum;
13. Peningkatan kapasitas koperasi dan peningkatan wirausaha baru yang profesional dan didukung dengan keilmuan yang mumpuni;
14. Optimalisasi dalam penggalan potensi dalam menjaring investasi serta meningkatkan pelayanan perijinan salahsatunya dengan pembentukan Mall Pelayanan Publik;
15. Perlunya peningkatan pembinaan atlet terutama atlet usia dini pada semua cabang olahraga;

16. Pelunya menyediakan sarana budaya sebagai tempat pementasan seni dari berbagai sanggar seni serta perlunya peningkatan pelesetarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Tasikmalaya;
- 17.Penyediaan perpustakaan digital untuk mendorong minat baca masyarakat serta peningkatan koleksi buku yang ada diperpustakaan;
- 18.Peningkatan budidaya perikanan dan pertanian diantaranya guna meningkatkan produktivitas perikanan dan pertanian melalui peningkatan SDM perikanan dan pertanian, alat teknologi pertanian, ketersediaan pakan, pupuk dan obat-obatan;
- 19.Optimalisasi kepariwisataan melalui penggalan potensi pariwisata serta peningkatan pemanfaatan sarana dan prasraana kepariwisataan yang telah ada;
- 20.Pemerintah Kota Tasikmalaya harus inten dalam pembinaan wira usaha, sosialisasi program, pelatihan, bantuan modal, bantuan bahan baku dan yang terpenting adalah bantuan pemasaran yang berdaya saing;
- 21.Pemerintah kota tasikmalaya harus melakukan verifikasi dan validasi data industri kecil menengah yang ada di Kota Tasikmalaya
- 22.Pemerintah Kota Tasikmalaya harus membuat sistem informasi data yang terintegrasi kepada semua OPD yang - 19 - berbasis teknologi agar penyajian data dan perencanaan pembangunan tepat sasaran;
- 23.Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat perencanaan karir asn secara periodik serta penempatan jabatan struktural maupun fungsional berdasarkan bidang keahlian/keilmuan sehingga tercipta tata kerja yang baik dilingkungan pemerintah kota tasikmalaya.

4.2.4. Program dan Kegiatan Prioritas

Prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2022 disusun berdasarkan isu strategis, serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2021 dan janji Walikota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan Arah kebijakan RPJMD Tahun 2017-2022, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan arah kebijakan RPJMD untuk tahun 2022 sangat erat.

Program Prioritas RKPD Tahun 2022 dilaksanakan melalui Program Pembangunan Daerah yang merupakan program prioritas daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh program-program perangkat daerah.

Tabel 4.6
Keterkaitan Program Prioritas dengan Isu Strategis

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
1. Belum optimalnya implementasi tata nilai kehidupan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar dan penanganan pandemic Covid-19	1. Peningkatan implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religious 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 4. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5. Penguatan Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana 6. Pengendalian Penduduk dan Kesetaraan Gender	P1 : Program Maghrib Mengaji P2 : Program Tasik Berkarakter P3 : Program Tasik Berbudaya P4: Program Jaminan danPerlindungan Sosial Masyarakat P15 : Program Tasik Cerdas P16: Program Tasik Sehat P17 : Program Tasik Muda Berprestasi P18 : Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga)



		P19 : Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
2. Melambatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya saing masyarakat.	1. Percepatan investasi daerah 2. Peningkatan kualitas dan produksi industri, usaha mikro dan kecil, serta koperasi 3. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Revitalisasi pasar dan fasilitasi perdagangan 5. Pengembangan pariwisata kota	P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
3. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran dan permasalahan sosial	1. Peningkatan jaminan dan perlindungan social 2. Pemberdayaan masyarakat miskin 3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	P.4 Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat P5 : Program Tasik Bersedekah P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK) P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
4. Kurang optimalnya penyediaan dan kemantapan infrastruktur perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat 2. Peningkatan kualitas permukiman 3. Peningkatan infrastruktur konektivitas daerah 4. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang 5. Peningkatan pengendalian lingkungan hidup	P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya) P14 : Program Tasik Resik
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	1. Percepatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2. Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Daerah	P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel) P.21 :Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur

Sumber : hasil analisa Bappelitbangda, 2021

Tabel 4.7
Keterkaitan Program Prioritas dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Program Prioritas
1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan Ruang Kelas Baru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;	P1 : Program Maghrib Mengaji P2 : Program Tasik Berkarakter P3 : Program Tasik Berbudaya P4: Program Jaminan danPerlindungan SosialMasyaraka
2. Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan khususnya untuk Rumah Sakit Purbaratu dan Rumah Sakit Dewi Sartika dan seluruh fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya, dan peningkatan jumlah SDM kesehatan.	P15 : Program Tasik Cerdas P16: Program Tasik Sehat P17 : Program Tasik Muda Berprestasi P18 : Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga) P19 : Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
3. Meningkatkan penegekan peraturan daerah dan penciptaan keamanan dan ketertiban umum melalui menguatkan	



Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Program Prioritas
<p>kelembagaan SatpolPP, sosialisasi, dan operasi penegakan keamanan dan ketertiban umum;</p> <p>4. Perlunya peningkatan pembinaan atlet terutama atlet usia dini pada semua cabang olahraga;</p> <p>5. Pelunya menyediakan sarana budaya sebagai tempat pementasan seni dari berbagai sanggar seni serta perlunya peningkatan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Tasikmalaya;</p> <p>6. Penyediaan perpustakaan digital untuk mendorong minat baca masyarakat serta peningkatan koleksi buku yang ada diperpustakaan;</p> <p>7. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak terutama dalam penanganan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);</p>	
<p>1. Perlu dibangunnya kawasan pangan lestari serta menyediakan pemasaran produk pangan secara online;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas koperasi dan peningkatan wirausaha baru yang profesional dan didukung dengan keilmuan yang mumpuni;</p> <p>3. Optimalisasi dalam penggalan potensi dalam menjaring investasi serta meningkatkan pelayanan perijinan salahsatunya dengan pembentukan Mall Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peningkatan budidaya perikanan dan pertanian diantaranya guna meningkatkan produktivitas perikanan dan pertanian melalui peningkatan SDM perikanan dan pertanian, alat teknologi pertanian, ketersediaan pakan, pupuk dan obat-obatan;</p> <p>5. Optimalisasi kepariwisataan melalui penggalan potensi pariwisata serta peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana kepariwisataan yang telah ada;</p> <p>6. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus intens dalam pembinaan wira usaha, sosialisasi program, pelatihan, bantuan modal, bantuan bahan baku dan yang terpenting adalah bantuan pemasaran yang berdaya saing;</p> <p>7. Pemerintah kota tasikmalaya harus melakukan verifikasi dan validasi data industri kecil menengah yang ada di Kota Tasikmalaya</p>	<p>P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah</p> <p>P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah</p>



Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Program Prioritas
<div>1. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja melalui kerjasama pelatihan dan penempatan kerja, penyediaan balai latihan kerja, serta mengadakan bursa kerja.</div> <div>2. Meningkatkan penanganan PMKS mulai dari pendataan, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah;</div>	<div>P.4 Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat</div> <div>P5 : Program Tasik Bersedekah</div> <div>P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)</div> <div>P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru</div> <div>P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja</div>
<div>1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan;</div> <div>2. Mengoptimalkan bidang perumahan dan permukiman diantaranya mempermudah penyerahan fasum dan fasos, serta melaksanakan penataan kawasan kumuh;</div> <div>3. Perlu peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu juga adanya penambahan ruang terbuka hijau;</div> <div>4. Melakukan peningkatan pengelolaan perparkiran dan pengaturan lalu lintas serta pendataan penerangan jalan umum;</div>	<div>P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan</div> <div>P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)</div> <div>P14 : Program Tasik Resik</div>
<div>1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatn teknologi informasi;</div> <div>2. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus membuat sistem informasi data yang terintegrasi kepada semua OPD yang - 19 - berbasis teknologi agar penyajian data dan perencanaan pembangunan tepat sasaran;</div> <div>3. Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat perencanaan karir asn secara periodik serta penempatan jabatan struktural maupun fungsional berdasarkan bidang keahlian/keilmuan sehingga tercipta tata kerja yang baik dilingkungan pemerintah kota tasikmalaya.</div>	<div>P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)</div> <div>P.21 :Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur</div>

Sumber : hasil analisa Bappelitbangda, 2021



Untuk mengimplementasikan program-program pembangunan daerah tersebut, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program-program perangkat daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah.



Tabel 4.8.
Program Prioritas Daerah, Sasasaran dan Program Prioritas

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2022	Perangkat Daerah	
1	Peningkatan tata nilai kehidupan dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar											
	A	Peningkatan implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius	S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus)	Kasus	0	P1 : Program Maghrib Mengaji	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	100	Setda
							P2 : Program Tasik Berkarakter	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	Badan Kesbang
								Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase capaian pendidikan politik	%	100	Badan Kesbang
								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Aktif	%	71	Badan Kesbang
								Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100	Badan Kesbang



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2022	Perangkat Daerah
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial.	%	100	Badan Kesbang
	B	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	S10: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (point)	Poin	68,5	P15 : Program Tasik Cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	point	25,77	Disdik
				Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	%	100			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	point	89,79	Disdik
				Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	tahun	9,7			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	point	78,64	Disdik
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun	13,54			Tingkat Partispasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	6,52	Disdik
									Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD	%	100	Disdik



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD	%	100	Disdik
								Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP	%	100	Disdik
								Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	%	100	Disdik
								Jumlah Wirausaha Baru yang dibina	Orang	100	Disdik
								persentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter/keagamaan	%	100	Disdik
							Program Pengembangan Kurikulum	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	100	Disdik
							Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	%	89,05	Disdik



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								dan Pendidikan Dasar			
							Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	40	Disdik
							Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	17	Dispusipda
								Persentase pembinaan perpustakaan	%	5,53	Dispusipda
							Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	%	50	Dispusipda
						P3 : Program Tasik Berbudaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	0,61	Disporabudpar
							Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	%	20 %	Disporabudpar
							Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	1	Disporabudpar
							Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	0,4	Disporabudpar



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2022	Perangkat Daerah
							P17 : Program Tasik Muda Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	%	30 %	Disporabudpar
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	85 %	Disporabudpar
	C	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	S11: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indek Kesehatan (point)	%	81,65	P16: Program Tasik Sehat	Program Pemenuhan UpayaKesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
				Cakupan StandarPelayanan MinimalBidang Kesehatan					Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	Dinas Kesehatan
				Usia Harapan Hidup	Tahun	73,15			Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	%	100	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Ibu (per 100.000)		125,09			Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	0,17	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi (per 1.000)		5,29			Persentase Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi	%	75	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (%)		18,1			Prosentase Faskes dengan sistem informasi kesehatan terintegrasi	%	100	Dinas Kesehatan



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin praktik	%	100	Dinas Kesehatan
									Prosentase Faskes dengan SDM terstandarisasi	%	100	Dinas Kesehatan
									Prosentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	100	Dinas Kesehatan
								Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase sarana kefarmasian sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
									Prosentase IRTP sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
									Prosentase TPM sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase Masyarakat dan lintas sektor yang bermitra	%	10	Dinas Kesehatan
									Prosentase Rumah tangga Ber PHBS	%	70	Dinas Kesehatan
									Prosentase UKBM yang dikembangkan	%	10	Dinas Kesehatan
	D	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	S 3 : Meningkatkan peranlingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS(%)	%	89,51	P4: Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS aktif	Lembaga	160	Dinas Sosial



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
				Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	%	100		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	Dinas Sosial
	E	Penguatan Ketertiban Umum dan Penanggulangan an Bencana	S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (point)	Point	2,5	P18 : Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga)	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran K3	Person	100	Satuan Polisi Pamong Praja
				Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	Persen	100			Persentase penanganan perlindungan masyarakat	Person	100	Satuan Polisi Pamong Praja
									Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Person	90	Satuan Polisi Pamong Praja
								Program Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan wilayah manajemen kebakaran	Person	86	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
								Program PenanggulanganBencana	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi layanan bencana	Person	100	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
									persentase masyarakat yang	Person	100	Badan Penanggulang



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
									memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			an Bencana Daerah
									Prosentase Penanganan Tanggapan Darurat Bencana	Person	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Person	78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Person	100	Kecamatan
	F	Pengendalian Penduduk dan Kesenjangan Gender	S14: Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persen	0,2	P19 : Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Data Mikro Keluarga Yang Akurat	Person	100	Dinas PPKBP3A
				Angka Kelahiran Total/ Fertility Rate (point)	Poin	2,04		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	Person	70	Dinas PPKBP3A
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase jumlah peran serta masyarakat dalam pembangunan	Person	100	Dinas PPKBP3A



NO			Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
										kesejahteraan keluarga			
									Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender	Persentase	63,15	Dinas PPKBP3A
									Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan Kekerasan terhadap perempuan	Persentase	100	Dinas PPKBP3A
									Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga binaan	Persentase	100	Dinas PPKBP3A
									Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	persentase anak yang difasilitasi pemenuhan haknya	Persentase	100	Dinas PPKBP3A
									Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus anak yang ditangani	Persentase	100	Dinas PPKBP3A
2		Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan daya saing daerah											
	A	Percepatan investasi daerah	Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Nilai investasi daerah (milyar rupiah)	Milyar Rupiah	300	P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	0,5	DPMPTSP	
								Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investasi daerah yang masuk	Rp. (Milyar)	700	DPMPTSP	



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								Peogram Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan	%	1	DPMPTSP
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	0,05	DPMPTSP
								Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP	%	100	DPMPTSP
									Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP	%	100	DPMPTSP
	B	Peningkatan kualitas dan produksi industri, usaha mikro dan kecil, serta koperasi	S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%)	%	5,74	P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	100	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
								Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan/atau diperiksa	%	13,51	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
								Program Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	48	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
											dan Perdagangan
							Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	38	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
							Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang dibina	%	100	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
							Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	65	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
								Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	Orang	100	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
							Program Pengembangan UMKM	Jumlah wirausaha baru sektor perdagangan	Orang	330	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
							Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri	%	10	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
												dan Perdagangan
									Jumlah wirausaha baru sektor industri	Orang	338	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
									Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri	Orang	550	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
								Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian IUI	%	100	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
								Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	%	40	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
	C	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan	S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	0,1	P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	%	6	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
				Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	Poin	92		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	0,9	Dinas Ketahanan Pangan



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
											Pertanian dan Perikanan
								persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	%	0,72	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	0,51	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	0,8	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	persentase peningkatan populasi ternak	%	1	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
								Capaian Produksi Tanaman Pangan	Ton	74.100	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
								Capaian produksi tanaman hortikultura dan perkebunan	Ton	5.000	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
								Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	252	Dinas Ketahanan Pangan



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
											Pertanian dan Perikanan
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	64	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
								Persentase peningkatan hasil produksi peternakan	%	0	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100 %	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
								Persentase peningkatan hasil produksi peternakan	%	0	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
							Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	0	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10.100	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
								Tingkat pengembangan	%	0,5	Dinas Ketahanan



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2022	Perangkat Daerah
									kawasan budidaya air tawar			Pangan Pertanian dan Perikanan
								Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Capaian produksi hasil perikanan	Ton	199	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
	D	Revitalisasi pasar dan fasilitasi perdagangan	S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%)	%	6,97	P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	100	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil	%	89	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
								Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	4	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
								Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	94	Dinas Koperasi KUMKM



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
												Perindustrian dan Perdagangan
								Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya	%	80	Dinas Koperasi KUMKM Perindustrian dan Perdagangan
	E	Pengembangan pariwisata kota	S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	Orang	642	P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	55	Disporabudpar
								Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	642.000	Disporabudpar
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	%	52	Disporabudpar
3		Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran										
	A	Peningkatan jaminan dan perlindungan sosial	S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS (%)	%		P.4 Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	80	Dinas Sosial
				Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	%	100			Jumlah RTS miskin yang dibina	RTS	200	
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase Penanganan	%	100	Dinas Sosial



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								Perlindungan dan Jaminan Sosial			
							Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial		100	Dinas Sosial
							Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan
							Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	100	Dinas Perwaskim
						P5 : Program Tasik Bersedekah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	3,4	Setda
	B	Pemberdayaan masyarakat miskin	S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS (%)	%	P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PSKS aktif	Lembaga	160	Dinas Sosial
				Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	%	100	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah RTS Miskin Perikanan yang dibina	Orang	75	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
							Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Person	30	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2022	Perangkat Daerah
								Program Pemberdayaan UsahaMenengah, Usaha Kecil, danUsaha Mikro (UMKM)	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	Oran g	100	Dinas KUMKM Perindag
	C	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	7,02	P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Wirausaha Baru Sektor Pertanian	orang	270	DKP3
				Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	%	66,75		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Wirausaha Baru Sektor Pertanian	orang	95	DKP3
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan	orang	150	DKP3
								Program Pengembangan UMKM	Jumlah wirausaha baru sektor perdagangan	orang	330	Dinas KUKM Perindag
								Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah wirausaha baru sektor industri	orang	338	Dinas KUKM Perindag
								Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Wirausaha Baru sektor ketengakerjaan	orang	163	Dinas Tenaga Kerja
								Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina	orang	100	Dinas Pendidikan
							P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ketenagakerjaan	%	100%	Dinas Tenaga Kerja



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2022	Perangkat Daerah
								Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100%	Dinas Tenaga Kerja
									Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100%	Dinas Tenaga Kerja
								Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	44,32 %	Dinas Tenaga Kerja
								Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/perjanjian kerja bersama (PKB)	%	83%	Dinas Tenaga Kerja
									Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100,00 %	Dinas Tenaga Kerja
4		Peningkatan kemantapan dan penyediaan infrastruktur perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup										
	A	Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat	Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	%	61,59	P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	%	61,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2022	Perangkat Daerah
				Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK/RT berakses layanan air minum	%	56,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	%	61,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	B	Peningkatan kualitas permukiman	Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	100	P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
									Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	51,59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	%	32,42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang diverifikasi	%	37,55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
									Persentase PSU yang diserahterimakan	%	21,56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2022	Perangkat Daerah
				Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan	%	100	P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
									Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	C	Peningkatan infrastruktur konektivitas daerah	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	83	P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase panjang jalan yang dibangun	%	100	Dinas Pekerjaan Umum and Tata Ruang
									persentase panjang jalan yang ditingkatkan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum and Tata Ruang
									persentase panjang jalan yang direhabilitasi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum and Tata Ruang
									persentase jembatan yang ditangani	%	16,44	Dinas Pekerjaan Umum and Tata Ruang
								Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	100	Dinas Perhubungan



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2022	Perangkat Daerah
	D	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	83	P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase tersedianya dokumen kajian rencana tata ruang wilayah daerah	%	100	Dinas Pekerjaan Umum and Tata Ruang
									Persentase ijin pengawasan pemanfaatan ruang	%	98	Dinas Pekerjaan Umum and Tata Ruang
	E	Peningkatan pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	74,44	P14 : Program Tasik Resik	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya Indeks Kualitas Air	Kateg ori	53,6 (Sedan g)	Dinas Lingkungan Hidup
									Tercapainya Indeks Kualitas Udara	Kateg ori	79,60 (Baik)	Dinas Lingkungan Hidup
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Capaian tersedianya dokumen pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
									Capaian Luas RTH yang dikelola	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
								Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah		83,45	Dinas Lingkungan Hidup
								Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase ketersediaan sarana prasarana	Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah	%	35,1	Dinas Pekerjaan Umum and Tata Ruang



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								pendukung pengelolaan sampah				
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Reformasi Birokrasi											
	A	Percepatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi	S15 : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	Kategori	77-88(Baik)	P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Terekam	%	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Capaian Predikat Indeks SPBE	Poin	Sangat Baik (3,00)	P.21 :Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur		Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kartu Keluarga			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
									Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
									Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kartu Identitas Anak			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
								Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
								Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
							Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
							Program Informasi Dan Komunikasi/Publik	Persentase Pengelolaan Saluran Informasi	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase pengelolaan basis data statistik sektoral terpadu	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	60	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	Bappelitbangda
								Prosentase keselarasan	%	100	Bappelitbangda



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								Rencana Kerja terhadap RKPD			
								Prosentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	%	35	Bappelitbangda
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	%	100	Bappelitbangda
								Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia		95%	
								Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilyahan	%	100	Bappelitbangda
								Persentase rata-rata capaian kinerja		95%	Bappelitbangda



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilyahan			
							Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan	%	100	Bappelitbangda
								Persentase Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	%	100	Bappelitbangda
							Program Pengelolaan Arsip	Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal	Poin	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
								Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	Person	70,27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	%	77	Inspektorat
								Nilai SAKIP Kota	%	7500%	Inspektorat
								Level Maturitas SPIP Kota	level	3	Inspektorat



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								Skor PMPRB Kota	Point	75	Inspektorat
								Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM	Unit	5	Inspektorat
								Persentase Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur	%	100	Inspektorat
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	%	100	Inspektorat
								Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	Inspektorat
								Indeks Persepsi Korupsi hasil survey eksternal	Point	3,5	Inspektorat
							Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	100	Sekretariat Daerah
								Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pemerintahan	%	100	Sekretariat Daerah



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	100	Sekretariat Daerah
								Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	Sekretariat Daerah
								Persentase produk hukum daerah yang diundangkan	%	100	Sekretariat Daerah
							Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Perekonomian	%	100	Sekretariat Daerah
								Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pembangunan	%	100	Sekretariat Daerah
								Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	100	Sekretariat Daerah
								Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	Sekretariat Daerah



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	%	100	Sekretariat Dewan
								Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan	%	100	Sekretariat DPRD
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
								Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan	%	95	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
								Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase inventarisasi aset milik daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan	%	3,39	Badan Pendapatan Daerah



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
								Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
								Persentase peningkatan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan	%	5,02	Badan Pendapatan Daerah
								Persentase peningkatan pajak parkir, pajak air tanah, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak penerangan jalan	%	4,63	Badan Pendapatan Daerah
								Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	%	20,81	Badan Pendapatan Daerah
							Program Kepegawaian Daerah	Capaian implementasi SIMPEG	%	100	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
								persentase pangadaan ASN sesuai formasi	%	100	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
								Capaian pembinaan disiplin aparatur	%	100	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
								Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan	orang	5.830	Badan Kepegawaian



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
												dan Sumber Daya Manusia
									Capaian pelayanan kepegawaian	%	100	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
								Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	%	100	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
								Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Kecamatan
								Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	95	Kecamatan
								Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	kategori	A (85)	Semua Perangkat Daerah
									Capaian IKM Perangkat Daerah	kategori	77-88 (Baik)	
	B	Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis	S15 : Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	Kategori	77-88(Baik)	P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	kategori	A (85)	Semua Perangkat Daerah



NO		Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
		Elektronik (SPBE)										
				Capaian Predikat Indeks SPBE	Poin	Sangat Baik (3,00)	P.21 :Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur		Capaian IKM Perangkat Daerah	kategori	77-88 (Baik)	Semua Perangkat Daerah
								Program Penataan Bangunan Gedung	persentase bangunan gedung yang ditangani (jumlah bangunan gedung yang ditangani / jumlah total bangunan gedung yang menjadi kewajiban pemda * 100)	%	55,56	
								Program Aplikasi Informatika	Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola	%	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Capaian Predikat Indeks SPBE	poin	3,0 (sangat Baik)	Dinas Komunikasi dan Informatika
	C	Peningkatan Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Daerah	S13 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (point)	poin	2,5	P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran K3	%	100	SatpolPP
				Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang	%	100			persentase penegakan perda	%	90	SatpolPP



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
							Program Penanggulangan Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan wilayah manajemen kebakaran	%	100	BPBD
							Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	%	78	BPBD
								Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	BPBD
								Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	%	78	BPBD



Kegiatan Prioritas Tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- A. Peningkatan tata nilai kehidupan dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar, melalui :
 - a. Peningkatan implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, diantaranya :
 - 1) Peningkatan sosialisasi, penegakan dan monitoring perda tata nilai;
 - 2) Peningkatan program magrib mengaji dan Tasik Bersedekah.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, diantaranya :
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pendidikan;
 - 2) Peningkatan sarana pendukung pendidikan;
 - 3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, diantaranya :
 - 1) Penuntasan pembangunan RSUD Purbaratu dan RS Dewi Sartika serta Rehabilitasi Puskesmas;
 - 2) Operasionalisasi RSUD Purbaratu dan RS Dewi Sartika;
 - 3) Penurunan prevalensi stunting;
 - 4) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (Preventif dan Promotif);
 - 5) Percepatan pencapaian Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) /ODF;
 - 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - 7) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dalam Penanganan Covid-19
 - d. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), diantaranya : Penanganan rehabilitasi anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan gepeng di luar panti;
 - e. Penguatan Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana, diantaranya :
 - 1) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2) Peningkatan Penanggulangan Bencana
 - f. Pengendalian Penduduk dan Kesenjangan Gender, diantaranya :
 - 1) Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- B. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan daya saing daerah, melalui :
 - a. Percepatan investasi daerah, diantaranya :
 - 1) Peningkatan promosi daerah;
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi;
 - 3) Optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP)
 - b. Peningkatan kualitas dan produksi industri, usaha mikro dan kecil, serta koperasi, diantaranya :



- 1) Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan koperasi;
 - 2) Pelatihan dan bantuan modal kerja;
 - 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi ;
 - 4) Fasilitasi bantuan legalitas usaha dan sertifikasi halal.
- c. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, diantaranya :
- 1) Peningkatan kapasitas para petani
 - 2) Peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan
 - 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian
 - 4) Bantuan modal kerja pertanian dan perikanan
- d. Revitalisasi pasar dan fasilitasi perdagangan, diantaranya :
- 1) Revitalisasi dan rehabilitasi pasar rakyat
 - 2) Pembangunan pusat pemasaran produk unggulan
 - 3) Pengembangan pariwisata kota, diantaranya :
 - 4) Pengembangan kawasan wisata Situ Gede
 - 5) Pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi
- e. Pengembangan Pariwisata Kota, diantaranya :
- 1) Pengembangan kawasan wisata Situ Gede;
 - 2) Pengembangan Kampung wisata;
 - 3) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi;
 - 4) Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata.
- C. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, melalui :
- a. Peningkatan jaminan dan perlindungan sosial, diantaranya :
- 1) Peningkatan pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
 - 2) Jaminan kesehatan masyarakat miskin;
 - 3) Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 - 4) Bantuan sambungan listrik rumah tangga miskin
- b. Pemberdayaan masyarakat miskin, diantaranya :
- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui program P3KK;
 - 2) Pelatihan dan bantuan modal kerja;
- c. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, diantaranya :
- 1) Peningkatan kapasitas pencari kerja;
 - 2) Pelatihan dan bantuan modal kerja;
 - 3) Peningkatan pencetakan wira usaha baru;
 - 4) Fasilitasi permodalan usaha.
- D. Peningkatan kemandirian dan penyediaan infrastruktur perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
- a. Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat, diantaranya :



- 1) Peningkatan pelayanan persampahan
 - 2) Peningkatan akses terhadap ketersediaan air bersih
 - 3) Peningkatan akses terhadap pengelolaan air limbah domestik
 - b. Peningkatan kualitas permukiman, diantaranya :
 - 1) Penataan kawasan kumuh
 - 2) Peningkatan infrastruktur permukiman
 - c. Peningkatan infrastruktur konektivitas daerah, diantaranya :
 - 1) Lanjutan pembangunan jalan lingkaran utara
 - 2) Peningkatan kemandirian jalan
 - d. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya :
 - 1) Penataan ruang yang lebih proporsional
 - 2) Peningkatan RTH dan ruang publik
 - 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup
- E. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Reformasi Birokrasi melalui :
- a. Percepatan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja , Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Pengawasan;
 - b. Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diantaranya :
 - 1) Pembangunan dan Rehabilitasi kantor Pemerintahan;
 - 2) Peningkatan Implementasi SPBE;
 - 3) Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - c. Peningkatan Stabilitas Ketertarikan dan Ketertiban Daerah , diantaranya :
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana PolPP;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana;
 - 3) Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah

4.2.5. Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19

4.2.5.1. Bidang Kesehatan dan Sosial

Dengan terjadinya pandemi covid-19 menuntut pemerintah untuk secara cepat dan tepat mengatur strategi untuk melakukan penanganan dan mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negerinya masing-masing. Dampak dari pandemi covid-19 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 dalam penanganan Covid-19 diantaranya yaitu :



1. Pengendalian dan Penanganan Penyebaran Covid-19 : a) Optimalisasi peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai tingkat Kota sampai ke Kelurahan b) Optimalisasi peran RT dan RW dalam pengawasan warga c) Memperketat kebijakan Social/Physical Distancing termasuk di tempat umum dan kompleks perumahan d) Pembatasan pergerakan orang dan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro e) Peningkatan kapasitas pelayanan fasilitas kesehatan;
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat : a) Menjaga ketahanan dan stabilitas pangan daerah b) Penyiapan Jaring Pengaman Sosial c) Operasi pasar murah online; d) Mendorong partisipasi sektor non pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19;
3. Dukungan reformasi kesehatan diantaranya penanganan Covid -19 dan memperkuat sistem kesehatan melalui dukungan vaksinasi Covid dan surveilans, peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, penurunan stunting dan pengentasan ODF, peningkatan jejaring, peningkatan dan pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan laboratorium;
4. Penguatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan pemberian bantuan stimulan bagi masyarakat miskin terdampak.

4.2.5.2. Bidang Ekonomi

Sedangkan kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi covid-19 khususnya tahun 2022 diantaranya yaitu :

1. Akselerasi Investasi, membuka lapangan kerja, dan pemulihan daya beli masyarakat, diversifikasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah, pemerataan infrastruktur dan pelayanan digital;
2. Menjaga ketahanan dan stabilitas pangan melalui pengendalian rantai pasok, pengendalian harga, monitoring stok komoditi pangan, dan pemberian stimulus bantuan bagi pelaku usaha sektor pertanian serta pemasaran secara digital;
3. Peningkatan kapasitas dan pemberian stimulus bantuan bagi pelaku usaha terutama kelompok usaha mikro dan sektor informal;
4. Mendorong peningkatan produksi dan fasilitasi pemasaran produk unggulan Kota Tasikmalaya melalui pelayanan digital;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui investasi infrastruktur padat karya dan/atau melibatkan tenaga kerja lokal;
6. Peningkatan promosi pariwisata lokal dan penyelenggaraan usaha pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
7. Dukungan terhadap reformasi struktural melalui penyesuaian peraturan-peraturan di daerah.

4.2.6. Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.



Dari uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 di atas, terdapat keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan antara nasional, provinsi dan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 4.8. berikut :



Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Tasikmalaya	
Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas (Program Pembangunan Daerah)
	7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas	3. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Parawisata	produktivitas pertanian 1. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif		
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia 2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia	1. Pengembangan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. Gerakan Membangun Desa	1. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengenalan dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	4. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran	1. Peningkatan jaminan dan perlindungan sosial 2. Pemberdayaan masyarakat miskin 3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha



Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Tasikmalaya	
Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas (Program Pembangunan Daerah)
3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan 2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas 5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas 6. Pengentasan kemiskinan 7. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 2. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehata 	1. Peningkatan tata nilai kehidupan dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 2. Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu berprestasi 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 4. Penanganan PMKS 5. Pengendalian Penduduk dan Kesetaraan Gender 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 2. Pendidikan Agama dan tempat Ibadah Juara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 2. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi 	1. Peningkatan tata nilai kehidupan dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 3. Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu berprestasi 4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 5. Penanganan PMKS



Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Tasikmalaya	
Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas (Program Pembangunan Daerah)
	<p>Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas</p> <p>3. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial</p> <p>4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter</p>				<p>6. Pengendalian Penduduk dan Kesetaraan Gender</p> <p>7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</p>
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<p>1. Infrastruktur Pelayanan Dasar</p> <p>2. Infrastruktur Ekonomi</p> <p>3. Infrastruktur Perkotaan</p> <p>4. Energi Dan Ketenagalistrikan</p>	1. Pengembangan Infrastruktur konektivitas wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian</p> <p>2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk</p>	4. Peningkatan kemantapan dan penyediaan Infrastruktur Perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>1. Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat</p> <p>2. Peningkatan kualitas permukiman</p> <p>3. Peningkatan infrastruktur konektivitas daerah</p> <p>4. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang</p>



Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Tasikmalaya	
Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas (Program Pembangunan Daerah)
			kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik		
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon	1. Pengembangan Infrastruktur konektivitas wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana	1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	4. Peningkatan kemantapan dan penyediaan Infrastruktur Perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan tata nilai kehidupan dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar	1. Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat 2. Peningkatan kualitas permukiman 3. Peningkatan infrastruktur konektivitas daerah 4. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Penguatan Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana



Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Tasikmalaya	
Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas (Program Pembangunan Daerah)
			1. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana		
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Konsolidasi Demokrasi 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3. Penegakan Hukum Nasional 4. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Reformasi sistem Perlindungan Sosial 2. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	1. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan 2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat 4. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel 5. Terwujudnya kolaborasi antara	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Ercepatan Reformasi Birokrasi	1. Percepatan pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Sarana Prasarana dan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Daerah

Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Tasikmalaya	
Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas	Prioritas Pembangunan	Sasaran/Program Prioritas (Program Pembangunan Daerah)
			pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integrat		



4.3. Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi Pembangunan Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan dan berikut ini beberapa inovasi yang akan dilaksanakan pada tahun depan :

1. Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Salah satu inovasi dalam Perencanaan pembangunan yaitu Aplikasi Mata Tasik (Masyarakat Menata Kota Tasikmalaya) merupakan aplikasi sebagai sarana bagi masyarakat kota Tasikmalaya untuk berperan dalam proses perumusan kebijakan yaitu dalam penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya. Masyarakat dapat menyampaikan usulan kegiatan sebagai bahan penyusunan RKPD melalui aplikasi **Mata Tasik** yang menjadi masukan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Mata Tasik ini telah digunakan dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk menampung masukan dari masyarakat yang belum tersalurkan melalui musrenbang.

2. Sistem Integrasi Data Infrastruktur (SIDATI)

Data seringkali menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan ketersediaan data yang terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibangun sebuah aplikasi Sistem Integrasi Data Infrastruktur (SIDATI). Dalam aplikasi ini, tersedia data infrastruktur Kota Tasikmalaya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang bersumber dari perangkat daerah. Untuk memenuhi kebutuhan akan data pembangunan, SIDATI ini akan dikembangkan menjadi Sistem Profil Pembangunan Kota Tasikmalaya yang berisi tidak hanya data infrastruktur namun juga data seluruh hasil pembangunan Kota Tasikmalaya.

3. SIM BPHTB ONLINE (Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya, maka diperlukan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah. Aplikasi SIM BPHTB ONLINE merupakan satu inovasi di bidang pelayanan yang digunakan untuk melakukan registrasi SSPD secara online. Aplikasi ini berbasis web sehingga untuk menjalankannya harus ada akses internet. Aplikasi ini dapat diakses dengan menggunakan berbagai browser standar seperti Internet Explorer, Firefox, Opera dan lain-lain.

Tujuan aplikasi SIM BPHTB ONLINE

1. Memaksimalkan Penelitian dan Validasi kewajaran Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang dilaporkan oleh wajib pajak;



2. Mengurangi celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dan pemalsuan dokumen SSPD BPHTB;
3. Memaksimalkan pelaporan dan rekonsiliasi data antara BAPENDA, BANK BJB dan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya;
4. Menciptakan tatakelola BPHTB yang transparan dan akuntabel

Manfa'at yang diperoleh dari aplikasi ini adalah Mempermudah pengendalian dan pengawasan kepada PPAT/PPATS dalam pengelolaan data BPHTB serta Mengurangi konsumsi kertas (Paperless Office) dengan cara mengunggah persyaratan BPHTB ke system sehingga mempermudah PPAT/PPATS dalam membuat dan melengkapi persyaratan dokumen SSPD BPHTB, manfaat lainnya dari aplikasi adalah terbentuknya kolaborasi dan integrasi, antara BANK BJB, BAPENDA, Kantor Pertanahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sehingga tatakelola data BPHTB lebih tertib dan histori pencipta data dapat terlacak sehingga mengurangi penyimpangan dan penyelewengan.

4. Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan (RASAMINDUK)

Inovasi RASAMINDUK merupakan implementasi dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), yang dilaunching pada bulan Februari 2018. Pada bulan Maret 2019, Disdukcapil membuat inovasi ini dengan harapan terbangunnya ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

Disdukcapil membuat inovasi Rasaminduk (KESA) untuk mempermudah masyarakat dalam pemenuhan haknya terkait kepemilikan data kependudukan yang merupakan akta otentik dari Negara. Inisiatif yang merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Pusat, dengan mencanangkan program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ini merupakan upaya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Hasil dari Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan (KESA) adalah :

1. Masyarakat, Pemerintah dan Lembaga pengguna bersama-sama mewujudkan kesadaran menuju tertib administrasi kependudukan;
2. Dengan terbentuknya KESA, seluruh pegawai Disdukcapil Kota Tasikmalaya khususnya di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan secara professional kepada masyarakat;
3. Program KESA membantu dalam optimalisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dalam memiliki data kependudukan yang akurat dan akuntabel sehingga masyarakat akan mudah dalam mengakses layanan publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

5. Go Dok (GO Dokumen Kependudukan)

Guna meningkatkan Pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi kependudukan, maka diluncurkan sebuah inovasi yaitu Go Dok (Go Dokumen Kependudukan). Inovasi Go Dok ini untuk mempermudah masyarakat



hususnya masyarakat lanjut usia dan disabilitas, dalam pemenuhan haknya terkait kepemilikan data kependudukan yang merupakan akta otentik dari Negara.

Melalui Go Dok masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, dengan tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. Masyarakat yang akan membuat dokumen kependudukan dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi online, kemudian setelah dokumen yang diminta selesai akan disampaikan langsung ke rumah pemohon.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program Prioritas Daerah

Berdasarkan isu strategis dan fokus pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, serta tema dan arah kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2022 yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan yang dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan pembangunan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2022, yang memuat rincian tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Pagu Indikatif yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya dan rencana kebutuhan perkiraan maju, serta Perangkat Daerah Pelaksana.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi rencana aksi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada Perubahan RKPD Tahun 2022, dengan mengacu pada arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Bab IV.

5.2. Rencana Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan Daerah

Penyusunan rencana kebutuhan pembangunan untuk perubahan RKPD Tahun 2022 didasarkan pada pemenuhan dan penyesuaian usulan kegiatan pada RKPD 2022 yang belum dapat dilaksanakan, usulan kegiatan dari pokok-pokok pikiran DPRD serta usulan perubahan rencana kerja dari perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya baik yang diusulkan melalui pendanaan pada APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN Tahun Anggaran 2022 diuraikan dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 pada Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022.



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan perubahan dokumen perencanaan RKPD tahun 2022 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran dan prioritas pembangunan daerah, penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya, melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2022 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022 yang diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, yang disepakati bersama antara Wali Kota dengan DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota/APBD Provinsi/APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2022, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2022;
4. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Dalam hal ada kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi yang belum tertampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022, maka dimasukkan dalam tahap penyusunan dan pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah;
7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2022, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Bappelitbangda;



8. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2022. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2022, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perubahan RKPD Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022.

WALI KOTA TASIKMALAYA

TTD

H.MUHAMMAD YUSUF